PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	11 Desember 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	17 Desember 2024
Masa Penawaran Umum	:	12 Desember 2024	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	17 Desember 2024
Tanggal Penjatahan	:	13 Desember 2024	Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia		18 Desember 2024

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

kreditplus

PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Kegiatan Usaha Utama :
Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Office 8 Lantai 15
SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 2933 3646
Faksimile: (021) 2933 3648
Situs web: www.kreditplus.com
E-mail: corsec@finansia.com

Jaringan kantor
1 kantor pusat, 129 kantor cabang dan 62 kantor selain kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp394.035.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp326.025.000.000 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp68.010.000.000 (enam puluh delapan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 17 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, BERUPA PIUTANG (*PERFORMING*) YANG DIMILIKI OLEH DAN MERUPAKAN KEKAYAAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN YANG DIMAKSUD DENGAN PIUTANG (*PERFORMING*) ADALAH PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN ATAU PIUTANG YANG TIDAK TERDAPAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER. TOTAL NILAI PIUTANG (*PERFORMING*) YANG DIIKAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI PENJAMINAN ADALAH (I) SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 20% DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI, DAN (II) SELAMBAT-LAMBATNYA 5 (LIMA) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 40% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ATAS OBJEK JAMINAN YANG DIJAMINKAN (PIUTANG (*PERFORMING*)) MEMILIKI PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI ATAU DIDAHULUKAN DENGAN JAMINAN KEBENDAAN (PREFEREN) DIBANDING HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN (BAIK JAMINAN KEBENDAAN MAUPUN PERORANGAN) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT ATAU RISIKO PEMBIAYAAN. DIMANA DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA, RISIKO KREDIT DIDEFINISIKAN SEBAGAI KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN / DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KEWAJIBANNYA PADA TANGGAL JATUH TEMPO, BAIK POKOK MAUPUN BUNGA YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA:

$AAA_{(idn)}$ (*Triple A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

KB Valbury Sekuritas

PT KB VALBURY SEKURITAS
(Terafiliasi)

trimegah SECURITIES

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2024.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui Surat No. 95/Srt-KBFMF/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("**UUP2SK**") dan peraturan pelaksananya serta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut "**UUPM**") dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024" pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-10899/BEI.PP2/10-2024 tanggal 17 Oktober 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("**Peraturan No. IX.A.2**").

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. 71/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I 2024. OJK selanjutnya telah mencatat rencana penerbitan efek melalui penawaran umum dalam administrasi OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-2210/PL.111/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak termasuk setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, kecuali PT KB Valbury Sekuritas sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu KB Financial Group. Selanjutnya, penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("POJK NO. 49/2020"), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		**i**
DEFINISI & SINGKATAN		**iii**
RINGKASAN		**xii**
I.	**PENAWARAN UMUM OBLIGASI**	**1**
II.	**RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM**	**16**
III.	**PERNYATAAN UTANG**	**17**
IV.	**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**	**26**
V.	**ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN**	**30**
VI.	**FAKTOR RISIKO**	**43**
VII.	**KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**	**46**
VIII.	**KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**	**47**
1.	RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	47
2.	PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 2 TAHUN TERAKHIR	48
3.	PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN	49
4.	PERJANJIAN PENTING	51
5.	KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN	79
6.	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	81
7.	KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	82
8.	PENGURUS DAN PENGAWAS	85
9.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* – GCG)	90
10.	SUMBER DAYA MANUSIA	115
11.	ASURANSI	119
12.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	121
13.	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	125
14.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	127
15.	KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	128
A.	Umum	128
B.	Kegiatan Usaha	129
C.	Proses Usaha	130
D.	Pemasaran	132
E.	Kolektabilitas Piutang	133
F.	Tingkat Kesehatan Perseroan	135
G.	Persaingan Usaha	136
H.	Prospek Usaha	137
I.	Strategi Usaha	138
J.	Teknologi Informasi	140
K.	Riset dan Pengembangan	140
L.	Kecenderungan Usaha	140
IX.	**PERPAJAKAN**	**141**
X.	**PENJAMINAN EMISI OBLIGASI**	**143**
XI.	**LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**	**144**
XII.	**KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT**	**147**
XIII.	**TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**	**154**
XIV.	**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**	**159**
XV.	**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**	**161**
XVI.	**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN**	**185**

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan; (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil, dan berkewajiban untuk membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) dan hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
Akta Pengakuan Utang	Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 21 tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
BEI atau Bursa Efek	Berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

BNRI	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: • Seri A: 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun; dan • Seri B: 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang meliputi antara lain Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaruannya dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
EBITDA	Berarti laba usaha sebelum bunga, pajak, depresiasi, amortisasi, dan penghasilan dan beban lain-lain.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Emisi	Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Force Majeure	Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang meliputi banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, perang atau huru hara di Indonesia (baik yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah maupun belum), yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
IAPI	Berati singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Masa Penawaran Umum	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu dua Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya), sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Obligasi	Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp394.035.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri, yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas (terafiliasi), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah ini PT KB Valbury Sekuritas (terafiliasi) dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 24 tanggal 6 September 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-091/OBL/KSEI/0824 tanggal 6 September 2024, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (PPEO)	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 23 tanggal 6 September 2024, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 1 Oktober 2024, (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 153 tanggal 30 Oktober 2024, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 4 Desember 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 6 September 2024, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 1 Oktober 2024, (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 152 tanggal 30 Oktober 2024, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 19 tanggal 4 Desember 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 6 September 2024, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 1 Oktober 2024, (ii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 151 tanggal 30 Oktober 2024, dan (iii) Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 18 tanggal 4 Desember 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Perpres 13/2018	Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT KB Finansia Multi Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 17/2020	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp394.035.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari: a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp326.025.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dan tingkat suku bunga sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo; dan b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp68.010.000.000,- (enam puluh delapan miliar sepuluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang disusun bersama-sama dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 9/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.

Prospektus Awal	Berarti prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/2017 yang merupakan dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga Oligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025,

	sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 17 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya antara lain utang kredit dan Efek bersifat utang, dengan pengecualian utang usaha, utang dividen, beban akrual, utang pajak dan utang kontraktor dan kewajiban kerjasama operasi.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
Wali Amanat	Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.
Digital Electronics & Appliances (DE&A)	Berarti barang-barang termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang elektronik, *furniture, gadget*, peralatan rumah tangga (*home appliances*), dan/atau barang-barang lainnya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang dikeluarkan OJK untuk Perseroan.

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.Th.94 tanggal 5 Juli 1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1457/1994 tanggal 25 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572 ("**Akta Pendirian**").

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 130 tanggal 27 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0120998 tanggal 27 Mei 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0101634.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Mei 2024 ("**Akta No. 130/2024**"). Berdasarkan Akta No. 130/2024,para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku adalah berdasarkan: (i) Akta Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 12 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah AHU-0251114.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023 ("**Akta No. 114/2023**") dan (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Desember 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**226.250.040**	**226.250.040.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- KB Kookmin Card Corp	181.000.032	181.000.032.000	80,00
- PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**226.250.040**	**226.250.040.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Pari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Fasilitas Modal Usaha, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau
c. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Fasilitas Dana, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau
d. Sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan, antara lain pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan berbasis imbal jasa, yang mana telah sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Service Product Perseroan

Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha pembiayaan konsumen. Melalui produk jasa pembiayaan konsumen ini, Penerbit menyediakan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua bekas untuk berbagai jenis dan merek. Di samping itu, Perseroan juga memberikan pelayanan pembiayaan konsumen untuk pengadaan produk *DE&A* yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen serta pembiayaan untuk modal kerja dengan pembelian piutang usaha dengan jaminan.

Pembiayaan Konsumen

Pelayanan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor bekas roda empat dan roda dua ditawarkan oleh Perseroan untuk berbagai jenis dan merek kendaraan, mulai dari sedan, *special utility vehicle* (SUV), *minibus*, *pick-up*, sepeda motor hingga truk; baik untuk keperluan pribadi maupun penunjang keperluan bisnis. Sedangkan jasa pelayanan pembiayaan konsumen untuk *DE&A* ditawarkan oleh Perseroan untuk berbagai jenis barang termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang elektronik, komputer, *notebook*, *audio video*, alat-alat pertanian, *household appliances*, *furniture*, *handphone*/PDA, *music instruments*, *office equipments*, *multi equipments*, *health equipments*, *game console*, sepeda, *sport equipments*, dan atau barang-barang sejenis lainnya kepada konsumen kelas menengah ke bawah.

Prospek Usaha

Berdasarkan Siaran Pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dalam World Economic Outlook (WEO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% (YoY) di tahun 2024, atau tetap stabil seperti tahun lalu. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stabil, IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2024 tetap tumbuh di level 5% seperti pada tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang baik di tengah berbagai tantangan yang melanda perekonomian global.

Dari segi suku bunga, berdasarkan data Bloomberg, di bulan September 2024 suku bunga Fed Fund Rate (FFR) telah menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 poin dari posisi 5,25%-5,50% menjadi 4,75%-5,00%. Sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan bahwa The FED akan memangkas suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebanyak tiga kali pada tahun ini dengan total 75basis poin sehingga suku bunga FFR pada akhir tahun akan menuju level 4,5%-5,75%.

Selain itu, berdasarkan data dari Bank Indonesia dimana Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Keputusan ini

konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Penurunan ini tentu saja menjadi angin segar bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pemberi pinjaman.

Akan tetapi beberapa kondisi ekonomi domestik di tahun 2024 juga masih memiliki tantangan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, peningkatan harga komoditas pangan berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum mayoritas naik tentunya hal ini juga mempengaruhi daya beli konsumen serta keputusan masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Hal inilah yang menyebabkan tahun 2024 ini menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan pembiayaan khususnya dalam menyalurkan pembiayaan pada produk kendaraan bermotor roda empat dimana penurunan permintaan dari pelanggan masih menjadi isu dalam menyalurkan pembiayaan baru di produk kendaraan bermotor roda empat. Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan permintaan di produk kendaraan bermotor roda empat, Perseroan saat ini juga telah mengembangkan penyaluran pembiayaan melalui produk kendaraan bermotor roda dua dan juga *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*). Melalui pengembangan penyaluran pembiayaan di kedua produk ini, Perseroan berharap kinerja keuangan Perseroan bisa semakin meningkat.

Dari sisi pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna, nilai piutang perusahaan pembiayaan per bulan Juni 2024 mengalami kenaikan 4,4% dari sebesar Rp445,95 triliun tahun 2023 menjadi sebesar Rp465,42 triliun di bulan Juni 2024. Industri pembiayaan nasional juga lebih banyak menyalurkan pembiayaan untuk multiguna, hal ini ditandai dengan pembiayaan multiguna yang memberikan kontribusi sebesar 54,5% dari total pembiayaan nasional. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja sebesar 35,2% dan 10,3% terhadap total pembiayaan nasional.

Sedangkan untuk nilai pendapatan, industri pembiayaan nasional membukukan pendapatan sebesar Rp67,1 triliun untuk periode enam bulan yang berakhir pada bulan Juni 2024, atau meningkat 13,2% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada bulan Juni 2023 sebesar Rp59,2 triliun. Dengan perolehan pendapatan tersebut, pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus membaik, dipengaruhi oleh makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian.

Melihat kondisi tersebut, Perseroan selaku perusahaan pembiayaan akan memonitor setiap aspek risiko yang dihadapi Perusahaan secara *up-to-date* dan memberikan respon yang cepat, tepat, dan akurat melalui kebijakan terkait operasional Perseroan. Perseroan juga senantiasa menguatkan strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang diharapkan mampu mendongkrak kinerja bisnis Perseroan.

Pembiayaan kendaraan bermotor roda empat

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) jumlah penjualan kendaraan bermotor roda empat untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar 408.012 unit, mengalami penurunan sebesar 98.415 unit atau 19,4% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar 506.427 unit. Data ini mengindikasikan bahwa saat ini kondisi sektor kendaraan bermotor roda empat di Indonesia masih dalam kondisi lesu.

Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) jumlah penjualan kendaraan bermotor roda dua untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar 3.170.994 unit, mengalami penurunan sebesar 30.936 unit atau 1,0% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar 3.201.930 unit. Walaupun sedikit mengalami penurunan, data ini mengindikasikan bahwa saat ini kondisi sektor otomotif terutama untuk kendaraan bermotor roda dua masih stabil dan masih akan terus bertumbuh serta diharapkan akan terus naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Prospek pembiayaan produk *Digital Electronics & Appliances (DE&A)*

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) jumlah penyaluran pembiayaan baru untuk produk Elektronik Digital Electronics & Appliances untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 6,1 Triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 118 Miliar atau 2,0% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp 6,2 Triliun. Walaupun sedikit mengalami penurunan, data ini mengindikasikan bahwa saat ini kondisi sektor produk *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*) masih stabil dan masih akan terus bertumbuh serta diharapkan akan terus naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia.

C. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITAWARKAN

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.
Target Obligasi Berkelanjutan	:	Sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp394.035.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut: • Seri A dengan jumlah sebesar Rp326.025.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah); dan • Seri B dengan jumlah sebesar Rp68.010.000.000,- (enam puluh delapan miliar sepuluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	• Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; dan • Seri B: 3 (tiga) tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 17 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* pada saat jatuh tempo.
Tingkat Bunga Obligasi	:	• Seri A: 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun; dan • Seri B: 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang (*performing*) yang dimiliki oleh dan merupakan kekayaan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Untuk menghindari keragu-raguan yang dimaksud dengan piutang (*performing*) adalah piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.

		Total nilai piutang (*performing*) yang diikat dalam akta jaminan fidusia adalah (i) sekurang-kurangnya sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi, dan (ii) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya sebesar 40% dari nilai Pokok Obligasi.
Hak Senioritas atas Utang	:	Hak Pemegang Obligasi atas objek Jaminan yang dijaminkan (piutang (*performing*) memiliki peringkat yang lebih tinggi atau didahulukan dengan jaminan kebendaan (preferen) dibanding hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak memiliki jaminan (baik jaminan kebendaan maupun perorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan mempunyai utang senioritas yang merupakan utang Perseroan yang mempunyai jaminan secara khusus dengan jumlah pokok sebesar Rp7.172.755.964.810,- (tujuh triliun seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh Rupiah), berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit (*audited*) per tanggal 30 Juni 2024 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.
Penyisihan Dana Cadangan *(Sinking Fund)*	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali *(Buyback)*	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali *(buyback)* untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeringkatan	:	$AAA_{(idn)}$ (*Triple A*) dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Wali Amanat	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penjelasan mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul "Penawaran Umum Obligasi."

D. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan sebesar Rp813.615 juta dengan rincian sebagai berikut:

Nama Efek	Tingkat Bunga	Peringkat	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (jutaan Rupiah)
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri B	7,40%	$AAA_{(idn)}$	22-Jul-25	313.615
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	7,30%	$AAA_{(idn)}$	7-Jul-26	500.000
Total				**813.615**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Efek Bersifat Utang Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh Perseroan.

E. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan berupa pembiayaan konsumen.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum."

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Aset	8.768.252	8.620.928	7.759.578
Liabilitas	7.461.675	7.249.341	6.666.742
Ekuitas	1.306.577	1.371.587	1.092.836

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Total Pendapatan	1.036.956	1.192.199	2.282.199	2.096.958
Total Beban	1.051.040	1.109.015	2.170.737	1.894.169
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(14.084)	83.184	111.462	202.789
Laba (Rugi) Bersih	(1.635)	69.657	91.546	158.128

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(76.382)	(412.777)	(629.329)	(1.838.098)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(59.478)	(132.760)	(210.860)	(153.206)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	196.410	1.518.327	816.134	1.900.243
(Penurunan)/Kenaikan kas dan setara kas	(159)	(1.987)	141	264
(Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	60.391	970.803	(23.914)	(90.797)
Kas dan setara kas pada awal tahun	150.519	174.433	174.433	265.230

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Kas dan setara kas pada akhir tahun	210.910	1.145.236	150.519	174.433

Rasio Keuangan

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Total Pendapatan	-13,02%[1)]	25,10%[1)]	8,83%	25,63%
Laba Tahun Berjalan	-102,35%[1)]	-5,06%[1)]	-42,11%	65,66%
Total Aset	1,71%[2)]	20,62%[2)]	11,10%	40,06%
Total Liabilitas	2,93%[2)]	22,46%[2)]	8,74%	45,83%
Total Ekuitas	-4,74%[2)]	9,43%[2)]	25,51%	12,82%
Rasio Usaha				
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/ Total Pendapatan	-1,36%	6,98%	4,88%	9,67%
Total Pendapatan/Total Aset	11,83%	12,74%	26,47%	27,02%
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	-0,16%	5,84%	4,01%	7,54%
Imbal Hasil atas Aset[3)]	-0,16%	0,89%	1,29%	2,61%
Imbal Hasil atas Ekuitas[4)]	-1,08%	6,96%	8,13%	18,56%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset	-0,02%	0,74%	1,06%	2,04%
Laba Tahun Berjalan /Total Ekuitas	-0,13%	5,82%	6,67%	14,47%
Rasio Keuangan				
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	5,71x	6,83x	5,29x	6,10x
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,85x	0,87x	0,84x	0,86x
Rasio Lancar[5)]	1,27x	1,14x	1,27x	1,18x
Gearing Ratio[6)]	5,59x	6,57x	5,19x	5,73x
Financing to Asset Ratio[7)]	89,25%	80,27%	91,11%	92,41%
Non Performing Financing (NPF) – Neto[8)]	2,79%	2,25%	2,01%	1,73%
Non Performing Financing (NPF) – Gross[9)]	4,75%	4,34%	3,71%	3,49%
Interest Coverage Ratio (ICR)[10)]	0,95x	1,35x	1,22x	1,57x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)[11)]	0,13x	0,13x	0,16x	0,14x

Keterangan:

1. *Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023 dan 2022*
2. *Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022*
3. *Imbal Hasil atas Aset= Laba rugi sebelum pajak/Total Aset.*
4. *Imbal Hasil atas Ekuitas= Laba rugi sebelum pajak/Total Ekuitas.*
5. *Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.*
6. *Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.*
7. *Financing to Asset ratio= Piutang Pembiayaan Neto/ Total Aset.*
8. *Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.*
9. *Non-Performing Financing (NPF) - Gross = piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet /Total Piutang Pembiayaan.*
10. *Interest Coverage Ratio (ICR) = Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) / Biaya Bunga*
11. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) / Debt Service*

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab IV dalam Prospektus ini dengan judul "Ikhtisar Data Keuangan Penting."

G. FAKTOR RISIKO

i. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit atau risiko pembiayaan yang merupakan risiko yang melekat *(inherent risk)* pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan *(multifinance).* Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidakmampuan konsumen / debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Saat ini Perseroan juga masih menghadapi risiko kredit sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang lalu. Meskipun pandemi Covid-19 sendiri sudah berakhir, namun Perseroan masih memiliki *outstanding* restrukturisasi Covid-19 yang dapat berisiko pada performa kualitas piutang Perseroan.

Meskipun pandemi Covid-19 sendiri sudah berakhir, Perseroan masih menghadapi dampak residual dalam bentuk *outstanding* restrukturisasi Covid-19 yang dilakukan selama pandemi. Risiko terkait piutang restrukturisasi Covid-19 ini dapat mempengaruhi kualitas piutang Perseroan dan berpotensi menurunkan kinerja keuangan.

Sehubungan dengan portfolio Perseroan, Perseroan memiliki portofolio terbesar pada produk kendaraan bermotor roda empat. Jika terjadi penurunan kondisi ekonomi di *sektor ini, atau jika rasio Non-Performing Loan* (NPL) meningkat, hal tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap arus kas dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih di bawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang di bawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva *(Loan to Value Ratio)* menjadi terlalu tinggi.

Di samping itu risiko kredit dapat diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, sektor ekonomi atau jenis pembiayaan tertentu, yang disebut sebagai risiko konsentrasi pembiayaan.

ii. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Operasional
2. Risiko Strategis
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Kepatuhan
5. Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi

iii. Risiko Umum

1. Risiko Persaingan
2. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro
3. Risiko Kebijakan Moneter

iv. Risiko Yang Dihadapi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi;
2. Risiko Gagal Bayar.

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko”.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

”Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024”

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp394.035.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh lima juta Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp326.025.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp68.010.000.000,- (enam puluh delapan miliar sepuluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 17 Maret 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2025 untuk Obligasi Seri A dan 17 Desember 2027 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	17 Maret 2025	17 Maret 2025
2	17 Juni 2025	17 Juni 2025

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
3	17 September 2025	17 September 2025
4	27 Desember 2025	17 Desember 2025
5		17 Maret 2026
6		17 Juni 2026
7		17 September 2026
8		17 Desember 2026
9		17 Maret 2027
10		17 Juni 2027
11		17 September 2027
12		17 Desember 2027

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang (*performing*) yang dimiliki oleh dan merupakan kekayaan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Piutang (*performing*) adalah piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.

Total nilai piutang (*performing*) yang diikat dalam akta jaminan fidusia adalah (i) sekurang kurangnya sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi, dan (ii) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya sebesar 40% dari nilai Pokok Obligasi.

HAK SENIORITAS

Hak Pemegang Obligasi atas objek Jaminan yang dijaminkan piutang (*performing*) memiliki peringkat yang lebih tinggi atau didahulukan dengan jaminan kebendaan (preferen) dibanding hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak memiliki jaminan (baik jaminan kebendaan maupun perorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan mempunyai utang senioritas yang merupakan utang Perseroan yang mempunyai jaminan secara khusus dengan jumlah pokok sebesar Rp7.172.755.964.810,- (tujuh triliun seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sepuluh Rupiah), berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang diaudit (*audited*) per tanggal 30 Juni 2024 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
b. Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening berhak memperoleh pembayaran Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, apabila terdapat keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.
c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

1.2. IKHTISAR MENGENAI PERSYARATAN POKOK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali untuk Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Negara Republik Indonesia.
g. rencana pembelian kembali wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
i. pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit pada media sebagai berikut:
   (i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
   (ii) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

j. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1. periode penawaran pembelian kembali;
   2. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   5. tata cara penyelesaian transaksi;
   6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Negara Republik Indonesia);
k. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
l. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
m. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar *(outstanding)* dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
   3. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
n. Perseroan wajib melaporkan informasi pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
   1. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
   2. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   3. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   4. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
o. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.
p. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
q. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
r. pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
   1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau biaya-biaya lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:
   Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   (i) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan terbukti lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak

melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang, kecuali:
a. pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Perseroan; atau
b. pembayaran pinjaman atau utang kepada pihak lain yang memiliki hak preferen atau hak untuk didahulukan pembayarannya.

(ii) memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali:
a. dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan; atau
b. memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 butir (iii) di bawah ini; atau
c. dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk memenuhi pendanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan.

(iii) menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva milik Perseroan kepada pihak lain dengan jaminan keutamaan atau preferen, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
a. aktiva yang dijaminkan sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani; atau
b. aktiva yang dijaminkan untuk utang atau pinjaman yang diperoleh untuk kegiatan usaha sehari-hari.

(iv) melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali:
a. sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi; atau
b. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.

(v) melakukan perubahan kegiatan usaha, kecuali karena kebijakan peraturan perundangan-undangan termasuk namun tidak terbatas pada peraturan OJK.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:
(i) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo, kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut.

Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi dan akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

(ii) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari Pemerintah Republik Indonesia maupun negara lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan menjaga rasio-rasio sebagai berikut:
- *Gearing Ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
- *Non Performing Financing* setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan *Non Performing Financing* dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) maksimal 5% (lima persen);
- Rasio permodalan paling sedikit 10% (sepuluh persen).

(iv) memenuhi dan mematuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

(v) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada perusahaan asuransi yang telah disetujui oleh OJK, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;

(vi) mengijinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk auditor atau Akuntan, perusahaan penilai, dan konsultan hukum yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dengan pemberitahuan dari Wali Amanat secara tertulis 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukaan dan operasi Perseroan;

(vii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, yaitu:
a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK pada selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan kepada OJK, dengan mempertimbangkan apabila terdapat kebijakan relaksasi dari OJK, maka jangka waktu penyampaiannya akan dapat menyesuaikan dengan ketentuan relaksasi tersebut;
b. laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
   - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
   - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
   - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;

(viii) menjalankan dan memelihara sistem akuntasi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi di Negara Republik Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu.

(ix) menjaga dan mengusahakan agar harta kekayaan Perseroan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;

(x) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku;

(xi) memberitahu Wali Amanat atas:
a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang dalam ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat menyerahkan kepada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau sekretaris perusahaan Perseroan untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting yang memiliki dampak negatif secara material atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
e. Setiap adanya penambahan pinjaman atau penerbitan surat utang yang telah melebihi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam butir (iii) ayat ini.

(xii) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan yaitu:
a. Pemeringkatan Tahunan
i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
1) peringkat baru; dan
2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
c. Pemeringkatan Ulang
i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xii) huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/2020.

(xiii) menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan melakukan tindakan dari

waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

(xiv) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pembayaran kembali Obligasi, yang fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.

(xv) melakukan atau memelihara seluruh tindakan-tindakannya dari waktu ke waktu atas permintaan dari Wali Amanat dan melaksanakan atau memelihara pelaksanaan dari seluruh dokumen-dokumen berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

(xvi) melakukan pengikatan atas Jaminan dengan tunduk pada ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan (i) dengan total nilai objek Jaminan keseluruhan sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi dan (ii) dengan total nilai objek Jaminan keseluruhan sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi.

(xvii) dalam hal nilai objek Jaminan kurang dari 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi setelah 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib melakukan penambahan *account receivables* (piutang) yang dimiliki Perseroan untuk menutupi sejumlah kekurangan nilai objek Jaminan tersebut (sebagaimana relevan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penambahan tersebut. Penambahan piutang sebagai Jaminan wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada dibuatnya dokumen jaminan. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk melaksanakan penambahan Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penambahan Jaminan tersebut.

(xviii) mempertahankan nilai objek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar (i) 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sejak Tanggal Emisi sampai paling lama 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi dan (ii) 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sejak selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi dan dengan memperhatikan ketentuan perjanjian penjaminan fidusia (tagihan) yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan berkewajiban mengganti dengan piutang baru apabila terdapat piutang yang dijaminkan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan sudah lunas dan/atau piutang (*non performing*).

(xix) menyerahkan kepada Wali Amanat laporan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

(xx) Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak lain manapun.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   i. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   ii. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain yang tertera pada nomor 1 butir i di atas) dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

iii. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, kecuali ketidakbenaran tersebut disebabkan oleh ketidaksengajaan dan tidak didasarkan atas itikad buruk dari Perseroan; atau
iv. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan/atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
v. Adanya pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) dari pengadilan atau pihak yang berwenang atas pembayaran pinjaman-pinjaman Perseroan; atau
vi. pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
vii. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
viii. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
   i. Nomor 1 butir i dan viii dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   ii. Nomor 1 butir ii, iii, iv, v,vi, dan vii dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana teguran tertulis Wali Amanat, paling lama lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

   Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan.

   Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
   a. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, pembubaran mana sebagaimana ketentuan Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
   b. Perseroan dinyatakan pailit dan pernyataan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

   maka dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya dan Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi berhak mengambil keputusan yang

dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dengan mengajukan tagihan sebesar Jumlah Terutang kepada Perseroan. Untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, Jaminan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat untuk mengambil tindakan lain;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam bab ini dengan judul "Kelalaian Perseroan" dan POJK No. 20/2020; dan
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
      Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.
3. Permintaan penyelenggaraan RUPO sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat. Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPO dari Pemegang Obligasi, Perseroan, atau OJK.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
   a. pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 14 Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO;
   b. pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lambat 14 Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
   c. pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat tujuh Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
   d. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 Hari Kalender dan paling lama 21 Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;

e. Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
   1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   2) agenda RUPO;
   3) pihak yang mengajukan susulan diselenggarakannya RUPO;
   4) pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

6. Tata Cara RUPO:
   a. RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO, dan Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO;
   b. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
   c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
   d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
   e. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
   f. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai satu Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
   g. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan satu suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
   h. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
   i. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   j. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   k. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
   l. Sebelum pelaksanaan RUPO:
      1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
      2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
      3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
      4) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan, berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan, menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6 huruf h, kuorum pengambilan keputusan:
   a. dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut:

1) apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2) apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
3) apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
   (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat

apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat;
7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat;
8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat tujuh Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya-biaya yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telp.: (021) 526 8216, 524 5161
Fax.: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President - Capital Market Services

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile.

Perseroan
PT KB Finansia Multi Finance
Gedung Office 8 Lantai 15
SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 2933 3646
Fax.: (021) 2933 3648
Up. Corporate Secretary

Wali Amanat
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telp.: (021) 526 8216, 524 5161
Fax.: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President - Capital Market Services

Apabila salah satu pihak mengalami perubahan alamat, maka pihak yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

1.3. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**PUB**") ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

a. PUB dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 9 September 2024 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik No. 287/KAP-PIC/KBFMF/SC/VIII-2024 tanggal 23 Agustus 2024
d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

Sesuai dengan pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah melaporkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I kepada OJK melalui Surat No. 71/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I 2024. OJK selanjutnya telah mencatat rencana penerbitan efek melalui penawaran umum dalam administrasi OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-2210/PL.111/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/POJK.05/2018, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KB Finansia Multi Finance tanggal 18 Oktober 2024, yang menyetujui rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Bersifat Utang yaitu Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance dengan nilai penerbitan sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

1.4. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia sesuai dengan Surat No. 184/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Peringkat Privat PT KB Finansia Multi Finance, dengan peringkat:

$AAA_{(idn)}$ (*Triple A*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap 1 (satu) tahun sekali sampai dengan Perseroan menyelesaikan seluruh kewajiban atas Obligasi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan berupa pembiayaan konsumen.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kalinya dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan telah dilaporkan Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat No. 78/Srt-KBFMF/CORSEC/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Penyampaian laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah sekitar 0,745% dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebesar 0,230%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan *(management fee)* sebesar 0,130%, biaya jasa penjaminan *(underwriting fee)* sebesar 0,050%, dan biaya jasa penjualan *(selling fee)* sebesar 0,050%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,193%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,098%; biaya jasa Notaris sebesar 0,025%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,070%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,085% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,025% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,060%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,236% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI dan KSEI, biaya audit penjatahan, biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp7.461.675 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Pinjaman yang diterima	5.846.678
Utang pajak	4.557
Beban yang masih harus dibayar	87.940
Utang lain-lain	70.996
Surat berharga yang diterbitkan	1.310.140
Liabilitas sewa	21.615
Liabilitas imbalan pasca-kerja	119.749
Total Liabilitas	**7.461.675**

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas

Pinjaman yang diterima

Saldo pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp5.846.678 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
PT Bank HSBC Indonesia	
Kredit Modal Kerja	670.000
MUFG Bank, Ltd.,Cabang Jakarta	
Kredit Modal Kerja	550.000
PT Bank BTPN Tbk	
Loan on Notes	550.000
PT Bank KB Bukopin Tbk	
Kredit Modal Kerja	500.000
PT Bank Jago Tbk	
Pinjaman Angsuran Berjangka	494.584
PT Bank Shinhan Indonesia	
Pinjaman Korporasi	440.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
Kredit Angsuran Berjangka	434.722
PT Bank KEB Hana Indonesia	
Kredit Modal Kerja	397.500
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
Pinjaman Berjangka	394.306
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	
Kredit Modal Kerja	365.000

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
PT Bank DBS Indonesia	
Term Loan	300.000
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	
Kredit Modal Kerja	256.363
PT Bank Central Asia Tbk	
Installment Loan	237.500
PT Bank Permata Tbk	
Term Loan	184.167
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Kredit Modal Kerja	77.917
PT Bank Mega Tbk	
Kredit Modal Kerja	7.083
	5.859.142
Dikurangi :	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(12.464)
Jumlah	**5.846.678**

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perseroan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perseroan seperti mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain kecuali pinjaman yang didapat sehubungan dengan kegiatan usaha yang sehari-hari atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman. Tidak ada pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan.

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio Keuangan	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan	
		30 Juni 2024	30 Juni 2023
Non Performing Financing (NPF) - Neto[1)]	maksimal 5,00%	2,79%	2,25%
Gearing Ratio[2)]	maksimal 9,00x	5,59X	6,57%
Rasio Kecukupan Modal[3)]	minimum 9,20%	22,82%	23,84%
Rasio Lancar[4)]	minimum 1x	1,27x	1,14x

Keterangan:

1. *Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.*
2. *Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.*
3. *Rasio Kecukupan Modal = Perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.*
4. *Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.*

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.557 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	3.175
Pasal 23/26	295
Pasal4 (2) – Final	366

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Pajak Pertambahan Nilai	721
Jumlah	**4.557**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Jumlah taksiran laba kena pajak di atas menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment)*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pajak terhutang.

Utang lain-lain

Saldo utang lan-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp70.966 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Dealer	19.662
Asuransi	22.274
Utang restorasi	6.614
Lain-lain	22.446
Jumlah	**70.966**

Surat berharga yang diterbitkan

Saldo surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.310.140 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2024
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri B	313.615
Obligasi II KB Finansia Multi FinanceTahun 2023 Seri A	500.000
Obligasi II KB Finansia Multi FinanceTahun 2023 Seri B	500.000
	1.313.615
Dikurangi:	
Biaya emisi Obligasi yang belum diamortisasi	(3.475)
Jumlah	**1.310.140**

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

Pada tanggal 22 Juli 2022, Perseroan telah menerbitkan “Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022” dimana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori performing, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurangkurangnya 60% dari nilai Pokok Obligasi.

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi dilakukan secara triwulan.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perseroan telah menerbitkan "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" dimana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai Pokok Obligasi.

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi dilakukan secara triwulan.

Liabilitas sewa

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas sewa pada 30 Juni 2024:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Sewa Minimum	Bunga	Nilai Kini
Masa jatuh tempo (dalam tahun):			
Tidak lebih dari satu tahun	18.331	899	17.432
Antara satu dan lima tahun	4.321	138	4.183
JUMLAH	**22.652**	**1.037**	**21.615**

Jumlah biaya bunga yang dibebankan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1.037juta.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Sesuai dengan Undang-undang No.11 tahun 2020 yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Perseroan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

Perseroan menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan.

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan keuangan dan beban imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	120.641
Nilai wajar aset program	(892)
KEWAJIBAN YANG DIAKUI DALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN	**119.749**

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	116.655
Beban biaya jasa kini	8.221
Biaya bunga	3.887

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Pembayaran imbalan yang diharapkan	(8.122)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diharapkan	120.641
Kerugian akrual	-
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	**120.641**

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Saldo awal 1 Januari	115.760
Beban yang diakui pada tahun berjalan	12.076
Beban yang diakui pada penghasilan kemprehensif lain	-
Penarikan dana dari aset program	3.535
Iuran yang dibayarkan oleh Perseroan	(3.500)
Pembayaran imbalan	(8.122)
LIABILITAS YANG DIAKUI DI LAPORAN POSISI KEUANGAN	**119.749**

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Biaya jasa kini	8.221
Biaya bunga	3.887
Imbal hasil ekspektasian aset program	(32)
JUMLAH BEBAN	**12.076**

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Program pensiun
Nilai wajar aset awal tahun	895
Iuran yang dibayarkan oleh Perseroan	3.500
Imbal hasil ekspektasian aset program	32
Penarikan dana dari aset program	(3.535)
Nilai ekspektasi aset program	892
Kerugian aktuaria atas aset program	-
NILAI ASET PROGRAM PADA AKHIR TAHUN	**892**

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal dan 30 Juni 2024:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Kewajiban imbalan pasca-kerja
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	111.138
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	134.613

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan penyisihan imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kewajiban imbalan pasca-kerja
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*
Tingkat diskonto	6,87%
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	5,00%
Tabel mortalita	TMI-IV 2019

Keterangan	Kewajiban imbalan pasca-kerja
Tingkat cacat	5,00%

Tingkat pengunduran diri

Umur	Persentase
0-39	5%
40-44	3%
45-49	2%
50-54	1%
>55	-

Metode: *Projected unit credit*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Total
Analisis jatuh tempo pembayaran kewajiban imbalan pasti:	
Tahun ke 1	6.873
Tahun ke 2	5.184
Tahun ke 3	2.840
Tahun ke 4	4.765
Tahun ke 5	5.374
Tahun ke 6 – 10	27.670
Tahun ke 11 – 15	31.757
Tahun ke 16 – 20	21.376
Lebih dari 20 tahun	13.910
JUMLAH	**119.749**

2. Perjanjian Penting dan Komitmen

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya disebut "**BTPN**") telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama yang bersifat *"revolving"* untuk pembiayaan *durable goods*, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari penandatanganan perjanjian tersebut.

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perseroan dan BTPN Tbk telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS-JFNo.024/BSBSC/X/2022 yang bersifat *"revolving"* untuk pembiayaan *durable goods*, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp300.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari penandatanganan perjanjian tersebut.

Pada tanggal 9 Maret 2023, Perseroan dan BTPN telah menandatangani Addendum I Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk menambah ketentuan Credit Limit Determination.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, Perseroan dan BTPN telah menandatangani Addendum II Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk menambah batas maksimum pembiayaan menjadi sebesar Rp600.000.000.000 dan perubahan kewajiban.

Pada tanggal 1 November 2023, Perseroan dan BTPN telah menandatangani Addendum III Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama terkait dengan perubahan kewajiban.

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 5 Maret 2009, Perseroan dan PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) mengadakan kerjasama melalui Perjanjian Kerjasama No. 015/BP/TB/III/09 dalam penerimaan pembayaran tagihan konsumen melalui jaringan pelayanan Bank Permata. Perjanjian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan diperpanjang setiap tahunnya secara otomatis.

PT Sarana Yukti Bandhana

Perseroan dan PT Sarana Yukti Bandhana (SYB) telah menjalin kerjasama sejak 2007 tentang Implementasi Sistem Host to Host Dalam Pengelolaan Data Tagihan Secara Online dimana telah mengalami beberapa perubahan dimana perubahan terakhir pada Perjanjian No. 02/PAYP/KBFMFSYB/VI/2021 pada tanggal 30 Juni 2021. Di dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa SYB akan berperan sebagai *Collecting Agent Aggregator* sehingga pembayaran tagihan nasabah Perseroan dapat dilakukan oleh Mitra SYB dan/atau dilokasi payment point yang dikelola oleh Mitra SYB. Pada perubahan perjanjian terakhir, Perseroan dan SYB sepakat bahwa salah satu mitra SYB untuk payment point adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI), PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI), PT Pos Indonesia (Pos Indonesia), PT Tokopedia (Tokopedia), PT Shopee Internasional Indonesia (Shopee), PT Espay Debit Indonesia (DANA) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTagihan).

PT Inovasi Daya Solusi

Perseroan dan PT Inovasi Daya Solusi (IDS) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama *Platform Service* sejak tahun 2022 dimana perubahan terakhir pada Perjanjian No. KBFMF/RPKS/ASR/2022/09 /005 pada tanggal 31 Januari 2024. Dimana dalam perjanjian tersebut IDS akan menyediakan bantuan kepada Perseroan untuk mengadakan integrasi sistem teknologi dengan Collecting Agent sehubungan dengan penyediaan layanan yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan pelanggan/konsumen Perseroan. Perseroan dan IDS sepakat bahwa layanan *payment point* dan setorku dapat dilakukan di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan PT Sumber Indah Lestari (DanDan).

PT Mitra Sentral Terpadu

Perseroan dan PT Mitra Sentral Terpadu (MST) telah menandatangani Perjanjian Tentang Penerimaan Transaksi Pembayaran Produk di *Collecting Agent* sebagaimana perubahan terakhir pada Perjanjian No. 252/PKS/MST-KP/XI/2021 dilakukan pada tanggal 12 Desember 2023. Dimana MTS menyediakan layanan transaksi pembayaran produk secara langsung untuk Nasabah dan/atau Konsumen serta pengguna jasa di *Channel Delivery* milik *Collecting Agent* yang telah bekerjasama dengan MTS. Salah satu mitra MTS untuk *payment point* adalah PT Indomarco Prismatama (Indomaret), PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir), dan PT Lion Super Indo (Superindo).

PT Ayopop Teknologi Indonesia

Perseroan dan PT Ayopop Teknologi Indonesia (ATI) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Layanan *Direct Debit* pada tahun 2023 dan perubahan terakhir pada Perjanjian No. KBFMF/PKS/ASN2023/11/052 dilakukan pada tanggal April 2024. ATI akan menyediakan layanan *Direct Debit* melalu API kepada pelanggan untuk diimplementasi oleh Pelanggan dan disediakan kepada pengguna akhir dan atas penyediaan layanan *Direct Debit.* Salah satu mitra API sebagai aggregator untuk *Direct Debit* melalui Kreditplus Mobile (KPM) milik Perseroan.

PT Sinar Digital Terdepan

Perseroan dan PT Sinar Digital Terdepan (Xendit) telah melakukan kerjasama sejak 12 Juli 2019 melalui Perjanjian No. 1153/XEN-SA/VII/2019 dan perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 1 Maret 2022. Perseroan merupakan perusahaan teknologi yang mengoperasikan suatu portal pembayaran yang mendukung penyediaan jasa dan Xendit bermaksud untuk menggunakan layanan yang mungkin bervariasi. Salah satu mitra Xendit sebagai

aggregator untuk pembayaran melalui Bank *Virtual Account,* Kartu Kredit, Gerai Ritel, *Electronic Wallet* (*E-Wallet*), QR *Code*, PayLater, *Direct Debit* dan *Disbursements*.

KB Kookmin Card Corp

Pada tanggal 28 Juli 2020, Perseroan dan KB Kookmin Card Corp telah menandatangani Perjanjian Jaminan *(Corporate Guaranty)* untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perseroan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 25 Februari 2021, Perseroan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Pertama Perjanjian Jaminan, di mana KB Kookmin Card Corp akan menjamin pemberi pinjaman bahwa Perseroan akan melakukan kewajiban saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 405.000.000.000 dan jangka waktu jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2026.

Pada tanggal 27 Juli 2021, Perseroan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani perubahan kedua atas perjanjian pinjaman *(Corporate Guaranty)* tersebut terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 370.461.000.000 untuk jangka waktu yang sama.

Pada tanggal 10 Maret 2022, Perseroan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Ketiga Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 367.400.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2027.

Pada tanggal 7 Juni 2023, Perseroan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Keempat Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 366.400.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2028.

Bank Kookmin, Cabang Hong Kong

Pada tanggal 6 September 2022, Perseroan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan *(Bank Guarantee)* senilai Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perseroan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 6 September 2024, Perseroan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan *(Bank Guarantee)* senilai Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perseroan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

3. Perubahan Liabilitas setelah 30 Juni sampai dengan tanggal Laporan Independen

- Pada tanggal 7 Juli 2024, Perseroan telah melakukan pelunasan pokok Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 - Seri A sebesar Rp500.000.000.000,-. Pembayaran pokok Obligasi ini dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

- Pada tanggal 28 Agustus 2024, Perseroan memperoleh fasilitas Pinjaman Promes Berulang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk pembiayaan modal kerja Perseroan dengan batas maksimum sebesar Rp200.000.000.000 dan bersifat "*revolving*". Jangka waktu pembiayaan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan dijamin dengan piutang pembiayaan Perseroan yang diikat secara fidusia.

- Pada tanggal 6 September 2024, Perseroan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan *(Bank Guarantee)* senilai Rp800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perseroan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

4. Utang yang akan jatuh tempo dalam tiga bulan

Utang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
Pinjaman yang diterima	876.576.686.035
Utang Lain-lain	43.618.339.217
Beban yang masih harus dibayar	3.017.500.000
Surat berharga yang diterbitkan	(364.593.165)
Liabilitas Sewa	2.909.866.743
Total	**925.757.798.830**

Sumber dana yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan tersebut di atas adalah dengan menggunakan dana yang berasal kas internal Perseroan.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS. PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan pada pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Aset			
Kas dan setara kas	210.910	150.519	174.433
Piutang pembiayaan	7.342.752	7.433.340	6.924.430
Tagihan anjak piutang	483.221	421.458	246.356
Piutang Lain-lain	233.652	142.313	55.106
Beban dibayar dimuka	36.949	12.494	8.365
Uang muka	6.080	13.151	8.717
Pajak dibayar dimuka	1.691	-	-
Aset pajak tangguhan	102.994	86.981	82.785
Aset tetap	127.847	120.033	91.792
Aset hak-guna	86.942	94.259	81.086
Aset tak berwujud	83.622	77.100	58.494
Investasi jangka panjang	27.000	43.200	-
Aset lain-lain	24.592	26.080	28.014
Jumlah Aset	**8.768.252**	**8.620.928**	**7.759.578**
Liabilitas			
Pinjaman yang diterima	5.846.678	5.588.833	5.272.819
Utang pajak	4.557	8.465	45.545
Beban yang masih harus dibayar	87.940	109.213	138.191
Utang lain-lain	70.996	90.745	77.946
Surat berharga yang diterbitkan	1.310.140	1.307.359	993.628
Liabilitas sewa	21.615	28.966	36.618
Liabilitas imbalan pasca - kerja	119.749	115.760	101.995
Jumlah Liabilitas	**7.461.675**	**7.249.341**	**6.666.742**
Ekuitas			
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000 per saham			
Modal dasar, modal ditempatkan			
dan disetor penuh - 226.250.040 saham	226.250	226.250	126.250
Tambahan modal disetor	288.887	288.887	288.887
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	600.000	600.000	435.000
Saldo laba			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Ditentukan penggunaannya	45.250	25.250	25.250
Tidak ditentukan penggunaannya	214.954	287.328	253.186
Komponen ekuitas lain	(68.764)	(56.128)	(35.737)
Jumlah Ekuitas	**1.306.577**	**1.371.587**	**1.092.836**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**8.768.252**	**8.620.928**	**7.759.578**

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pendapatan				
Piutang pembiayaan	967.582	1.145.497	2.169.746	2.055.185
Anjak piutang	31.908	19.227	44.847	25.215
Lain-lain	37.466	27.475	67.606	16.558
Jumlah Pendapatan	**1.036.956**	**1.192.199**	**2.282.199**	**2.096.958**
Beban				
Beban umum dan administrasi	130.302	151.025	310.167	259.081
Beban kepegawaian	297.944	295.076	633.906	576.208
Beban keuangan	261.722	238.464	503.950	355.060
Cadangan kerugian penurunan nilai atas				
Piutang pembiayaan	295.828	366.702	587.821	601.317
Tagihan anjak piutang	3.033	565	4.051	7.701
Beban penyusutan dan amortisasi	54.263	50.393	103.553	87.928
Beban lain-lain	7.948	6.790	27.289	6.874
Jumlah biaya	**1.051.040**	**1.109.015**	**2.170.737**	**1.894.169**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	**(14.084)**	**83.184**	**111.462**	**202.789**
Pajak Penghasilan				
Pajak kini	-	(2.677)	(18.664)	(68.679)
Pajak tangguhan	12.449	(10.849)	(1.252)	24.018
Penghasilan (Beban) Pajak Penghasilan	**12.449**	**(13.526)**	**(19.916)**	**(44.661)**
Laba (Rugi) Bersih	**(1.635)**	**69.657**	**91.546**	**158.128**
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	-	-	(15.040)	(4.674)
Kerugian perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI	(16.200)	-	(10.800)	-
Keuntungan perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI	-	1.080	-	-
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.564	(238)	5.449	908
Jumlah Penghasilan komprehensif lain	**(12.636)**	**842**	**(20.391)**	**(3.766)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**(14.271)**	**70.500**	**71.155**	**154.362**

Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi				
Penerimaan dari transaksi pembiayaan	4.371.545	4.671.012	8.680.703	7.427.319
Penerimaan dari pendapatan keuangan	1.421	3.578	9.873	5.242
Pembayaran atas transaksi pembiayaan	(3.489.927)	(3.792.794)	(7.583.522)	(7.807.790)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Pembayaran atas pajak penghasilan	(1.691)	(53.190)	(37.528)	(33.447)
Pembayaran beban keuangan	(291.749)	(264.384)	(541.833)	(305.093)
Pembayaran beban operasional	(665.981)	(976.999)	(1.157.022)	(1.124.329)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	**(76.382)**	**(412.777)**	**(629.329)**	**(1.838.098)**
Arus kas dari aktivitas investasi				
Perolehan aset tak berwujud	(17.225)	(22.620)	(41.132)	(31.147)
Perolehan aset tetap	(22.227)	(29.800)	(48.930)	(57.052)
Perolehan atas aset hak-guna	(20.192)	(26.466)	(71.458)	(66.341)
Hasil dari penjualan aset tetap	166	126	4.660	1.334
Penempatan investasi jangka panjang	-	(54.000)	(54.000)	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(59.478)**	**(132.760)**	**(210.860)**	**(153.206)**
Arus kas dari aktivitas pendanaan				
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	4.191.448	2.360.000	4.860.000	2.965.287
Pembayaran atas pinjaman yang diterima	(3.935.005)	(1.775.253)	(4.546.818)	(2.020.605)
Pembayaran bunga obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	(45.534)	(32.155)	(32.155)	(13.776)
Pembayaran atas liabilitas sewa	(9.295)	(9.015)	(18.258)	(14.251)
Pembayaran dividen tunai	(5.204)	(25.250)	(25.250)	(16.412)
Penerimaan dari penerbitan obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	-	-	165.000	-
Penerimaan dari penerbitan modal saham	-	-	100.000	-
Pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan	-	-	(686.385)	-
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**196.410**	**1.518.327**	**816.134**	**1.900.243**
(Penurunan)/Kenaikan kas dan setara kas	**(159)**	**(1.987)**	**141**	**264**
(Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	**60.391**	**970.803**	**(23.914)**	**(90.797)**
Kas dan setara kas pada awal tahun	**150.519**	**174.433**	**174.433**	**265.230**
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**210.910**	**1.145.236**	**150.519**	**174.433**

Rasio-Rasio Penting

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Total Pendapatan	-13,02%[1)]	25,10%[1)]	8,83%	25,63%
Laba Tahun Berjalan	-102,35%[1)]	-5,06%[1)]	-42,11%	65,66%
Total Aset	1,71%[2)]	20,62%[2)]	11,10%	40,06%
Total Liabilitas	2,93%[2)]	22,46%[2)]	8,74%	45,83%
Total Ekuitas	-4,74%[2)]	9,43%[2)]	25,51%	12,82%
Rasio Usaha				
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan/ Total Pendapatan	-1,36%	6,98%	4,88%	9,67%
Total Pendapatan/Total Aset	11,83%	12,74%	26,47%	27,02%
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	-0,16%	5,84%	4,01%	7,54%
Imbal Hasil atas Aset[3)]	-0,16%	0,89%	1,29%	2,61%

KETERANGAN	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Imbal Hasil atas Ekuitas[4)]	-1,08%	6,96%	8,13%	18,56%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset	-0,02%	0,74%	1,06%	2,04%
Laba Tahun Berjalan /Total Ekuitas	-0,13%	5,82%	6,67%	14,47%
Rasio Keuangan				
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	5,71x	6,83x	5,29x	6,10x
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,85x	0,87x	0,84x	0,86x
Rasio Lancar[5)]	1,27x	1,14x	1,27x	1,18x
Gearing Ratio[6)]	5,59x	6,57x	5,19x	5,73x
Financing to Asset Ratio[7)]	89,25%	80,27%	91,11%	92,41%
Non Performing Financing (NPF) – Neto[8)]	2,79%	2,25%	2,01%	1,73%
Non Performing Financing (NPF) – Gross[9)]	4,75%	4,34%	3,71%	3,49%
Interest Coverage Ratio (ICR)[10)]	0,95x	1,35x	1,22x	1,57x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)[11)]	0,13x	0,13x	0,16x	0,14x

Keterangan:

1. *Dihitung dengan membandingkan periode yang sama pada tahun 2023 dan 2022*
2. *Dihitung dengan membandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022*
3. *Imbal Hasil atas Aset= Laba rugi sebelum pajak/Total Aset.*
4. *Imbal Hasil atas Ekuitas= Laba rugi sebelum pajak/Total Ekuitas.*
5. *Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.*
6. *Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.*
7. *Financing to Asset ratio= Piutang Pembiayaan Neto/ Total Aset.*
8. *Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.*
9. *Non-Performing Financing (NPF) - Gross = piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet /Total Piutang Pembiayaan.*
10. *Interest Coverage Ratio (ICR) = Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) / Biaya Bunga*
11. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA) / Debt Service*

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Rasio Keuangan	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan	
		30 Juni 2024	30 Juni 2023
Non Performing Financing (NPF) - Neto[1)]	maksimal 5,00%	2,79%	2,25%
Gearing Ratio[2)]	maksimal 9,00x	5,59X	6,57%
Rasio Kecukupan Modal[3)]	minimum 9,20%	22,82%	23,84%
Rasio Lancar[4)]	minimum 1x	1,27x	1,14x

Keterangan:

1. *Non-Performing Financing (NPF) – Neto= piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet/Total Piutang Pembiayaan.*
2. *Gearing Ratio= Pinjaman Yang Diterima, surat berharga yang Diterbitkan/Total Ekuitas.*
3. *Rasio Kecukupan Modal = Perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan.*
4. *Rasio Lancar= Aset Lancar/Liabilitas Lancar.*

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam bab ini diambil dari laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.Th.94 tanggal 5 Juli 1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1457/1994 tanggal 25 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572.

Perseroan telah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Finansia Multi Finance, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Perseroan telah terdaftar menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan No. Anggota 1147/JKT/01 dan anggota pada lembaga pencatatan aset dengan No. Anggota 057/Rapindo-1/3/2024 dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Perseroan memiliki 129 kantor cabang yang tersebar di Indonesia dimana 1 diantaranya yaitu Kantor Cabang Bengkulu berencana ditutup dan dalam proses persiapan dokumen penutupan secara internal olehcabang Bengkulu tersebut.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini :

Dalam menjalankan usahanya sebagai perusahaan pembiayaan, kegiatan usaha Perseroan tidak bisa terlepas dari berbagai faktor-faktor yang dapat menghambat kegiatan usaha dan operasi Perseroan, baik dari faktor eksternal maupun faktor internal. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Perseroan:

- Kondisi perekonomian dan perbankan
  Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat inflasi. Faktor makro ekonomi yang kondusif yang ditunjang dengan pertumbuhan produk domestik bruto akan menyebabkan pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada meningkatnya daya beli

masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan kendaraan dan *Digital Electronics & Appliances (DE&A)*. Sementara itu, bila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan cenderung akan meningkat, begitupun sebaliknya.

- Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan
  Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan multifinance adalah bagaimana perusahaan tersebut mendekatkan diri ke target pasar yang dituju, baik secara fisik dengan keberadaan kantor cabang maupun secara virtual lewat hubungan baik dengan rekanan bisnis di daerah tersebut yang berpotensi untuk memberikan referensi bisnis kepada perusahaan *multifinance* dimaksud.

- Kualitas aktiva produktif / portofolio
  Setiap perusahaan yang menyalurkan kredit, baik perbankan maupun *multifinance* dihadapkan dengan risiko kredit yang tidak tertagih (macet). Oleh karena itu, manajemen kredit merupakan hal pokok untuk menunjang keberhasilan Perseroan secara berkesinambungan.

- Posisi keuangan
  Posisi keuangan yang kuat sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya modal sendiri dan rasio utang terhadap modal yang rendah, serta kecukupan penyisihan atas piutang yang diragukan. Semua ini bertujuan untuk menjaga performa Perseroan apabila kondisi ekonomi sedang buruk sehingga profitabilitas dan pertumbuhan Perseroan dapat berlangsung terus.

- Kemampuan penghimpunan dana
  Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, kemampuan Perseroan dalam penghimpunan dana merupakan faktor yang sangat penting. Selain memiliki jumlah ekuitas yang cukup besar pada saat ini, Perseroan tetap memerlukan sumber pendanaan lainnya, baik melalui penerbitan surat utang dan pinjaman dari perbankan (dalam dan luar negeri) maupun kerjasama pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan usahanya.

- Proses Internal
  Selain poin-poin di atas, yang tidak kalah penting adalah proses internal yang kuat, yang meliputi sumber daya manusia (SDM) baik dari level manajemen hingga staf untuk mengeksekusi kebijakan yang diambil; proses kerja yang efisien dan efektif serta sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh informasi dapat tersaji untuk pengambilan keputusan manajemen yang tepat waktu dan akurat.

3. Hasil Kegiatan Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Total Pendapatan	1.036.956	1.192.199	2.282.199	2.096.958
Total Beban	1.051.040	1.109.015	2.170.737	1.894.169
Laba (Rugi) Bersih	(1.635)	69.657	91.546	158.128

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Pendapatan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp1.036.956 juta atau menurun sebesar Rp155.243 juta atau -13,0% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.192.199 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berasal dari pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mencapai Rp967.582 juta, mengalami penurunan sebesar Rp177.915 juta atau sebesar 15,5% dibanding periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang berjumlah Rp1.145.497 juta.

Beban Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp1.051.040 juta atau menurun sebesar Rp57.975 juta atau -5,2% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.109.015 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp295.828 juta, mengalami penurunan Rp70.874 juta atau sebesar 19,3% dibandingkan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sejumlah Rp366.702 juta.

Laba (rugi) periode berjalan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp(1.635) juta atau menurun sebesar Rp71.293 juta atau 102,3% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp69.657 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berasal dari pembiayaan konsumen dan juga peningkatan beban keuangan Perseroan. Pendapatan pembiayaan konsumen untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mencapai Rp967.582 juta, mengalami penurunan sebesar Rp177.915 juta atau sebesar 15,53% dibanding periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang berjumlah Rp1.145.497 juta. Sementara itu, beban keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp261.722 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp23.258 juta atau 9,7% dibanding periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang berjumlah Rp238.464 juta. Kenaikan beban keuangan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga the Fed.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.282.199 atau meningkat sebesar Rp185.241 juta atau 8,83% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.096.958 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Pendapatan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp2.169.746 juta, meningkat sebesar Rp114.561 juta atau sebesar 5,6% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp2.055.185 juta. Pendapatan anjak piutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp44.847 juta, meningkat sebesar Rp19.632 juta atau sebesar 77,8% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp25.215 juta.

Beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.170.737 atau meningkat sebesar Rp276.568 juta atau 14,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.894.169 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan dan beban kepegawaian Perseroan. Beban keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp503.950 juta, meningkat sebesar Rp148.890 juta atau sebesar 41,9% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp355.060 juta. Beban kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp633.906 juta, meningkat sebesar Rp57.698 juta atau sebesar 10,0% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp576.208 juta.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp91.546 atau menurun sebesar Rp66.582 juta atau -42,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp158.128 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha dibandingkan pendapatan usaha yang diterima Perseroan.

4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Aset	8.768.252	8.620.928	7.759.578
Liabilitas	7.461.675	7.249.341	6.666.742
Ekuitas	1.306.577	1.371.587	1.092.836

Posisi tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp147.324 juta atau 1,7% yaitu dari Rp8.620.928 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp8.768.252 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang lain-lain dan tagihan anjak piutang Perseroan. Piutang lain-lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mencapai Rp233.652 juta, meningkat sebesar Rp91.339 juta atau sebesar 64,2% dibanding tahun 2023 yang berjumlah Rp142.313 juta. Tagihan anjak piutang untuk tahun periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mencapai Rp483.221 juta, meningkat sebesar Rp61.763 juta atau sebesar 14,7% dibanding tahun 2023 yang berjumlah Rp421.458 juta.

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp212.334 juta atau 2,9% yaitu dari Rp7.249.341 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp7.461.675 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman yang diterima Perseroan sebesar Rp257.845 juta atau 4,6% dari tahun 2023 sebesar Rp5.588.833 juta menjadi Rp5.846.678 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Ekuitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp65.010 juta atau -4,74% yaitu dari Rp1.371.587 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp1.306.577 juta untuk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp861.349 juta atau 11,10% yaitu dari Rp7.759.578 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp8.620.928 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang. Piutang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp7.433.340 juta, meningkat sebesar Rp508.910 juta atau sebesar 7,3% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp6.924.430 juta. Tagihan anjak piutang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp421.458 juta, meningkat sebesar Rp175.102 juta atau sebesar 71,1% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp246.356 juta.

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp582.599 juta atau 8,74% yaitu dari Rp6.666.742 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp7.249.341 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh oleh kenaikan pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan oleh Perseroan. Pinjaman yang diterima untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp5.588.833 juta, meningkat sebesar Rp316.014 juta atau sebesar 6,0% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp5.272.819 juta. Surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mencapai Rp1.307.359 juta, meningkat sebesar Rp313.731 juta atau sebesar 31,5% dibanding tahun 2022 yang berjumlah Rp993.628 juta.

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp278.751 juta atau 25,51% yaitu dari Rp1.092.836 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp1.371.587 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham Perseroan dan penerbitan tambahan obligasi perpetual yang dapat dikonversikan.

5. Likuditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran piutang pembiayaan dari konsumen dan selalu melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Disamping sumber likuiditas secara internal yang berasal dari penerimaan pembayaran angsuran, Perseroan juga memiliki sumber

likuiditas dari eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Perseroan memiliki sumber likuiditas berupa fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat Prospektus ini diterbitkan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasionalnya serta pinjaman perbankan, dan ekuitas.

Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(76.382)	(412.777)	(629.329)	(1.838.098)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(59.478)	(132.760)	(210.860)	(153.206)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	196.410	1.518.327	816.134	1.900.243
(Penurunan)/Kenaikan kas dan setara kas	(159)	(1.987)	141	264
(Penurunan)/Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	**60.391**	**970.803**	**(23.914)**	**(90.797)**
Kas dan setara kas pada awal tahun	**150.519**	**174.433**	**174.433**	**265.230**
Kas dan setara kas pada akhir tahun	**210.910**	**1.145.236**	**150.519**	**174.433**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp336.395 juta atau setara 81,4%, yaitu sebesar Rp76.382 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp412.777 juta. Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan penerimaan dari transaksi pembiayaan dan penurunan pembayaran operasional. Penerimaan dari transaksi pembiayaan konsumen mengalami penurunan sebesar Rp299.467 juta atau 6,4% menjadi Rp 4.671.012 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.712.478 juta. Selain itu, pembayaran operasional mengalami penurunan sebesar Rp311.018 juta atau 31,8% menjadi Rp665.981 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp976.999 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp73.282 juta atau setara 55,1% menjadi sebesar Rp59.478 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dari sebesar Rp132.760 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Penurunan ini terutama dikarenakan tidak adanya penempatan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Perseroan sampai dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp1.321.917 juta atau setara 87,1% menjadi sebesar Rp196.410 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dari dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp1.518.327 juta. Hal ini dikarenakan belum adanya penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan oleh Perseroan sampai dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp1.208.769 juta atau setara 65,7% menjadi sebesar Rp629.329 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari sebelumnya sebesar Rp1.838.098 juta untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pada penerimaan pembiayaan konsumen sebesar Rp1.253.384 juta atau 16,9% menjadi Rp8.680.703 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.427.319 juta.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp57.654 juta atau setara 37,6% menjadi sebesar Rp210.860 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari sebesar Rp153.206 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan adanya penempatan investasi jangka panjang sebesar Rp54.000 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp1.084.109 juta atau setara 57,1% menjadi sebesar Rp816.134 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari sebelumnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.900.243 juta. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan penerimaan dari pinjaman yang diterima Perseroan. Penerimaan dari pinjaman yang diterima Perseroan meningkat sebesar Rp1.894.713 juta atau 63,9% dari Rp2.965.287 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp4.860.000 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat karateristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi pola arus kas Perseroan.

6. Informasi segmen

Perseroan memiliki tiga segmen operasi: (i) pembiyaan investasi, (ii) pembiayaan multiguna; dan (iii) pembiayaan modal kerja. Tabel berikut ini menyajikan rincian informasi keuangan Perseroan per segmen operasi untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Piutang Pembiayaan Investasi - neto	668.530	745.366
Piutang Pembiayaan Multiguna - neto	3.787.921	3.745.897
Piutang Pembiayaan Modal Kerja - neto	3.369.521	3.363.534
Total Piutang Pembiayaan - neto	7.825.972	7.854.797

Total Piutang Pembiayaan – neto Perseroan pada posisi 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.825 juta atau 0,4% yaitu dari Rp7.854.797 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp7.825.972 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan ini terutama

dikarenakan adanya penurunan piutang pembiayaan investasi – neto Perseroan sebesar Rp76.836 juta atau 10,3% dari sebesar Rp 745.366 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 668.530 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Pendapatan Bunga dari Pembiayan Investasi	43.441	59.846
Pendapatan Bunga dari Piutang Pembiayaan Multiguna	574.542	672.756
Pendapatan Bunga dari Piutang Pembiayaan Modal Kerja	239.178	315.540
Total Pendapatan Bunga Piutang Pembiayaan	857.131	1.048.142

Total pendapatan bunga untuk piutang pembiayaan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 191.011 juta atau 18,2% dari sebesar Rp1.048.142 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 menjadi Rp857.131 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Penurunan ini terutama dikarenakan adanya penurunan pendapatan bunga dari piutang pembiayaan multiguna sebesar Rp98.214 juta atau 14,5% dari periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp672.756 menjadi Rp574.542 juta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

7. Belanja modal

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Biaya perolehan			
Pemilikan langsung			
Renovasi bangunan	2.114	2.362	2.148
Kendaraan	-	58	1.129
Perabot dan perlengkapan kantor	338	1.139	1.113
Peralatan kantor	1.396	19.294	10.643
Jumlah biaya perolehan	**3.848**	**22.853**	**15.033**

Untuk periode enam bulan dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, penambahan aset tetap Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp3.848 juta, Rp22.853 juta, dan Rp15.033 juta.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari ekuitas. Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan:
1. tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang material baik pada saat ini maupun untuk tahun-tahun mendatang; dan
2. tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dari isu lingkungan hidup.

8. Risiko fluktuasi kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Aset mata uang asing	1	2	4

Jumlah aset mata uang asing - bersih yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1 juta, Rp 2 juta dan Rp 4 juta.

Perseroan tidak mempunyai pinjaman dalam mata uang asing. Seluruh pinjaman yang dimilki Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah. Terkait dengan fluktuasi suku bunga, eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan dikarenakan mayoritas pinjaman yang dimiliki Perseroan adalah pinjaman dengan suku bunga tetap, dimana rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang *(floating)* masih dalam batas risk appetite Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas kondisi aset dan liabilitas terutama yang memiliki sensitivitas terhadap suku bunga dan indikator keuangan yang terekspose risiko pasar di antaranya yaitu pemantauan perubahan suku bunga, pergerakan harga komoditas dan indikator makro ekonomi.

9. Kebijakan akuntansi penting

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Penyusunan laporan keuangan Perseroan memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan akuntansi Perseroan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan telah diungkapkan di bawah ini.

Berikut ini adalah diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dalam menyusun laporan keuangan Perseroan. Kebijakan laporan akuntansi dan keuangan serta pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dijelaskan secara rinci pada Catatan 2 dalam laporan keuangan.

Piutang Pembiayaan

Piutang pembiayaan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya *(without recourse)*, pendapatan piutang pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan piutang pembiayaan yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan, akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian piutang pembiayaan dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Penyelesaian kontrak sebelum masa piutang pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan dan pendapatan yang timbul terkait penyelesaian kontrak diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari. Perseroan juga dapat melakukan *write off* sebelum 180 hari dan dapat melakukan penundaan *write off*. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan

Pembiayaan investasi diberikan untuk pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi.

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

Kegiatan pembiayaan investasi dan modal kerja ditunjukan untuk debitur yang:

a. Memiliki usaha produktif; dan/atau
b. Memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pembiayaan multiguna diberikan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif.

Pembiayaan Bersama

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pembiayaan bersama *without recourse* dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perseroan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan piutang pembiayaan disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, antara Perseroan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Piutang Pembiayaan".

Piutang pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang *with recourse* merupakan piutang yang dibeli dari Perseroan lain. Tagihan anjak piutang *with recourse* diklasifikasikan dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Piutang dalam Proses Penyelesaian

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait, yaitu piutang pembiayaan dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual objek yang dijaminkan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi jangka panjang

Investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diakui sebesar nilai wajarnya.

Investasi dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase pemilikan, dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Investasi pada instrumen ekuitas

Perseroan memiliki investasi strategis dalam entitas yang listed. Untuk investasi tersebut, Perseroan telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengklasifikasikan investasi pada FVTOCI daripada FVTPL karena Perseroan menganggap pengukuran ini paling representatif untuk model bisnis aset ini.

Investasi pada instrumen ekuitas pada FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Kemudian, aset diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam keuntungan belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI.

Akumulasi keuntungan atau kerugian tidak direklasifikasi ke laba rugi pada saat penarikan investasi pada instrumen ekuitas, sebaliknya, ditransfer ke saldo laba (*defisit*). Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas ini diakui dalam laba rugi, kecuali dividen jelas merupakan pemulihan sebagian dari biaya perolehan investasi.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama *(joint financing) with recourse*. Fasilitas pembiayaan bersama *(joint financing) with recourse* disajikan secara *gross*, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari piutang pembiayaan diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli *(call option)* dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh biaya transaksi yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perseroan tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan piutang pembiayaan Perseroan disajikan bersih setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

Untuk piutang pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum ditagih akan dicadangkan.

Pendapatan administrasi dari pembiayaan konsumen diakui pada saat perjanjian piutang pembiayaan ditandatangani.

Pajak Penghasilan

Pajak kini

Aset dan/atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari kantor pelayanan pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelum periode pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak kini dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset direalisasi atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui, diukur kembali pada tiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila terdapat kemungkinan pendapatan kena pajak di masa depan memulihkan aset pajak tangguhan.

Perpajakan lainnya

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima dan/atau, jika mengajukan keberatan dan/atau banding oleh Perseroan, ketika hasil dari keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi

Penyajian laporan keuangan Perseroan memerlukan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan liabilitas kontijensi pada tanggal pelaporan. Namun demikian, ketidakpastian tentang asumsi dan estimasi ini dapat mengakibatkan hasil penyesuaian material untuk nilai buku aset atau liabilitas yang berpengaruh pada periode di masa depan.

Penggunaan Pertimbangan

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan:

Pajak penghasilan

Perseroan memiliki eksposur atas pajak penghasilan, pertimbangan signifikan dilakukan di dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi dimana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti di dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitias atas isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah penambahan pajak akan jatuh tempo. Pada saat hasil final perpajakan berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode dimana penentuan tersebut dibuat.

Penentuan mata uang fungsional

Dalam menentukan mata uang fungsional Perseroan, penilaian diperlukan untuk menentukan mata uang yang terutama mempengaruhi seluruh transaksi jasa yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan Perseroan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, didiskusikan di bawah.

Masa manfaat aset tetap

Biaya aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap. Manajemen memperkirakan masa manfaat aset tetap adalah 5 – 20 tahun. Hal ini sesuai taksiran masa manfaat yang umum diaplikasikan pada industri. Perubahan tingkat yang diharapkan dalam penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat peralatan dan nilai sisa atas aset-aset tersebut. Oleh karena itu, biaya penyusutan di masa yang akan dating dapat saja berubah. Nilai tercatat aset tetap Perseroan pada akhir periode pelaporan

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan asset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Karena Perseroan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan rata-rata tingkat suku bunga pinjaman sebagai tingkat suku bunga inkremental Perseroan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perseroan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Perseroan.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua kerugian fiskal yang belum dipergunakan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak terhadap kerugian yang dapat dikurangkan akan dapat diutilisasi. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan perbedaan temporer dan tingkat laba fiskal di masa depan bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kolektif.

Penentuan nilai wajar

Perseroan menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat diskonto dan perkiraan arus kas masa depan. Maka dari itu, perkiraan nilai wajar yang diperoleh tidak selalu dapat dibuktikan dengan membandingkan pada pasar independen dan, dalam banyak kasus, mungkin tidak dapat segera direalisasi.

Asumsi pensiun

Biaya, aset dan liabilitas dari program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Perseroan ditentukan dengan menggunakan metode-metode yang mengandalkan estimasi dan asumsi aktuarial.

Rincian dari asumsi-asumsi utama ditetapkan dalam laporan keuangan, Perseroan menerima masukan dari aktuaris independen berkaitan dengan kelayakan asumsi, Perubahan dalam asumsi yang digunakan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan.

10. Perubahan kebijakan akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dianggap relevan terhadap Perseroan.

11. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

12. Komponen Penting Dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Pendapatan lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp37.466 juta naik sebesar Rp9.991 juta atau sebesar 36,4% dari periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp27.475 juta. Komponen terbesar pendapatan lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 yaitu pemulihan atas piutang yang telah dihapus buku sebesar Rp22.090 juta.

Beban lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp7.948 juta naik sebesar Rp1.158 juta atau sebesar 17,1% dari periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp6.790 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian sebesar Rp6.299 juta atau 138,9% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan lain tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dimulai dari risiko utama.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit atau risiko pembiayaan yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan *prudent*, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Saat ini Perseroan juga masih menghadapi risiko kredit sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang lalu. Meskipun pandemi Covid-19 sendiri sudah berakhir, namun Perseroan masih memiliki *outstanding* restrukturisasi Covid-19 yang dapat berisiko pada performa kualitas piutang Perseroan.

Meskipun pandemi Covid-19 sendiri sudah berakhir, Perseroan masih menghadapi dampak residual dalam bentuk *outstanding* restrukturisasi Covid-19 yang dilakukan selama pandemi. Risiko terkait piutang restrukturisasi Covid-19 ini dapat memengaruhi kualitas piutang Perseroan dan berpotensi menurunkan kinerja keuangan.

Sehubungan dengan portfolio Perseroan, Perseroan memiliki portofolio terbesar pada produk kendaraan bermotor roda empat. Jika terjadi penurunan kondisi ekonomi di sektor ini, atau jika rasio *Non-Performing Loan* (NPL) meningkat, hal tersebut dapat memberikan dampak besar terhadap arus kas dan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih di bawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang di bawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi.

Di samping itu risiko kredit dapat diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, sektor ekonomi atau jenis pembiayaan tertentu, yang disebut sebagai risiko konsentrasi pembiayaan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Apabila penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional Perseroan tidak dikelola dengan baik, maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Perseroan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan. Kelangsungan usaha Perseroan juga bergantung pada kemampuan Perseroan dalam menghadapi kemajuan teknologi dan perkembangan standar industri pembiayaan yang dilakukan dengan biaya rendah dan tepat waktu.

2. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Perseroan harus mampu merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan melihat perubahan pada faktor internal dan faktor eksternal Perseroan, seperti kebijakan Pemerintah atau sumber daya manusia.

Dampak yang dapat terjadi terhadap Perseroan dengan adanya risiko stratejik didorong oleh adanya perubahan regulasi, kondisi mikro dan makro ekonomi maupun faktor eksternal lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan pengaruh dalam implementasi setiap keputusan strategis bisnis, seperti terhambatnya kegiatan usaha, penurunan kondisi keuangan, tidak tercapainya hasil usaha maupun prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karenanya, ketidakcukupan dana atau modal, kurangnya akses tambahan dana atau modal, keterbatasan sumber-sumber pendanaan dapat berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan. Demikian pula dengan ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan di mata kreditur dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru di kemudian hari.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan harus selalu tunduk terhadap peraturan OJK yang senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan nasional.

Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi administratif berbentuk peringatan tertulis, denda material, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran bagi manajemen Perseroan.

5. Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga

Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan bunga dari aset pembiayaan dan beban bunga dari kewajiban. Penyesuaian terhadap tingkat suku bunga baik pada sisi aset maupun kewajiban tidak selalu dilakukan pada saat bersamaan. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan suku bunga yang cepat di masa mendatang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan kredit, keuntungan, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

6. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang belum sempurna. Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan potensi tuntutan hukum dan permasalahan hukum di kemudian hari, yang jika terjadi dalam jumlah yang signifikan akan menimbulkan biaya serta potensi kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko reputasi Perseroan dikelola melalu mekanisme monitoring, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan serta didukung oleh bagian terkait dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Perseroan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada nasabahnya. Kegagalan Perseroan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perseroan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah pembiayaan yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Persaingan

Industri sektor usaha pembiayaan di Indonesia tumbuh secara kompetitif dan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif, mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan serta meningkatnya pembiayaan oleh bank maupun Lembaga keuangan non-bank lainnya akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan terutama pada tingkat suku bunga. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini apabila tidak bisa ditanggulangi adalah akan menurunkan pendapatan dan pangsa pasar Perseroan.

2. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

Risiko yang dihadapi Perseroan terkait dengan perubahan kondisi ekonomi makro adalah Risiko kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Stratejik, dimana perubahan ekonomi makro dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Perseroan akan mengalami peningkatan Risiko kredit apabila terjadi penurunan kemampuan pengembalian piutang dari sejumlah debitur pada saat terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pergerakan pasar yang signifikan saat terjadi krisis ekonomi dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan karena posisi mismatch antara aset dan kewajiban-nya. Risiko likuiditas Perseroan juga akan mengalami peningkatan pada saat terjadi krisis ekonomi, mengingat pada saat terjadi perlambatan ekonomi terdapat kecenderungan menurunnya perputaran dana dan likuiditas di pasar uang. Di samping itu, perubahan kondisi ekonomi makro juga dapat berpengaruh terhadap pencapaian kemampuan Perseroan dalam mencapai target bisnisnya atau berpotensi untuk meningkatkan Risiko Stratejik.

3. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana yang mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Sedangkan deregulasi di bidang moneter dan keuangan umumnya akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut dapat menurunkan aktifitas Perseroan maupun pendapatan usaha Perseroan. Selain itu, terdapat risiko lainnya apabila Pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga yang tinggi, yang dapat mengakibatkan marjin pembiayaan bersih Perseroan menjadi turun, yang berdampak pada penurunan pendapatan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 1 Oktober 2024 atas laporan keuangan interim Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Santanu Chandra (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dengan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Finansia Multi Finance berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.Th.94 tanggal 5 Juli 1994 dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1457/1994 tanggal 25 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572 ("**Akta Pendirian**").

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

Pada tahun 2020 Perseroan telah berubah nama dari PT Finansia Multi Finance menjadi PT KB Finansia Multi Finance sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Finansia Multi Finance menjadi PT KB Finansia Multi Finance No. 23 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0045638.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106732.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 9 Maret 2021, Tambahan No. 009606.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**5.000.000**	**5.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Erdhi Tandjung	4.375.000	4.375.000.000	87,50
- Purwo Hari Prawira	625.000	625.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**5.000.000**	**5.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan No. 130 tanggal 27 Mei 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0120998 tanggal 27 Mei 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101634.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2024, Tambahan No. 024032 ("**Akta No. 130/2024**"). Berdasarkan Akta No. 130/2024, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan atas Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual

Piutang, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau

2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Pari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Fasilitas Modal Usaha, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau

3. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Fasilitas Dana, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau

4. Sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan, antara lain pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan berbasis imbal jasa, yang mana telah sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 2 TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham yang berlaku adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0274137 tanggal 3 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah AHU-0106033.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 3 Juli 2020 ("**Akta No. 16/2020**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan (i) Akta No. 16/2020 dan (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**126.250.040**	**126.250.040.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- KB Kookmin Card Corp	101.000.032	101.000.032.000,00	80,00
- PT Finansia Pacifica Raya	25.250.008	25.250.008.000,00	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**126.250.040**	**126.250.040.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Perubahan struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 114 tanggal 12 Desember 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154549 tanggal 12 Desember 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251114.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, Tambahan No. 024031 ("**Akta No. 114/2023**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) penambahan modal dasar Perseroan dari semula Rp126.250.040.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah), (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp126.250.040.000,00 (seratus dua puluh enam miliar

dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah), dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan. Sehingga struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Akta No. 114/2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**226.250.040**	**226.250.040.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- KB Kookmin Card Corp	181.000.032	181.000.032.000,00	80,00
- PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000,00	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**226.250.040**	**226.250.040.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Sehubungan dengan perubahan pemegang saham pengendali telah dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) berdasarkan Surat Laporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan PT KB Finansia Multi Finance No.S-43/PL.021/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh OJK dan Perseroan telah melakukan pemenuhan keterbukaan informasi terhadap POJK No. 31/POJK.04/2015 bahwa Perseroan telah menyampaikan pelaporan atas pengumuman informasi atau fakta material terkait dengan perubahan pemegang saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perseroan No. 112/Srt-KBFMF/CORSEC/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Perubahan Anggaran Dasar.

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perizinan Terkait	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA No. 81202119271486 diterbitkan tanggal 18 Desember 2018, perubahan ke-1 tanggal 19 April 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS – Perizinan RBA	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-177/NB.11/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Finansia Multi Finance Menjadi PT KB Finansia Multi Finance	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.686.102.3-062.000 tertanggal 7 Juli 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Jakarta Selatan Satu	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-64PKP/WPJ.04/KP.1103/2020 tanggal 7 Juli 2020	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
5.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-81KT/WPJ.04/KP.1103/2020 tanggal 7 Juli 2020 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
6.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Finansia Multi Finance	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-637/MK.10/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Pemindahan Alamat Kantor Pusat Finansia Multi Finance	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
8.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-892/MK.6/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Pemindahan Alamat Kantor Pusat Finansia Multi Finance	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

No.	Perizinan Terkait	Masa Berlaku
9.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("**TDPSE**") No. 000132.01/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk sistem elektronik Kredit Plus Mobile	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
10.	TDPSE No. 000132.02/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk sistem elektronik Kredit Plus Express	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
11.	TDPSE No. 000132.03/DJAI.PSE/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk sistem elektronik Kreditmu	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
12.	TDPSE No. 000132.09/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Collection Hub"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
13.	TDPSE No. 000132.12/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Deasy"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
14.	TDPSE No. 000132.06/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Eform Wg"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
15.	TDPSE No. 000132.08/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Eform Kmb"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
16.	TDPSE No. 000132.05/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Kpgateway"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
17.	TDPSE No. 000132.10/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Kphub"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
18.	TDPSE No. 000132.04/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Kreditplus.com"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
19.	TDPSE No. 000132.07/DJAI.PSE/09/2022 tanggal 9 September 2022 untuk sistem elektronik "Mobile Collection System (MCS)"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
20.	TDPSE No. 000132.11/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 18 Juli 2022 untuk sistem elektronik "Sally"	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
21.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 03650/IMB/1988 tanggal 16 Juni 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jl. Wijaya II Blok P1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan	
22.	Keputusan Kepala Dinas Pengawasan Dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 3869/IMB/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jl. Senopati Raya Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	
23.	Keputusan Walikota Samarinda No. 527/DPPK-KS/Pr.B/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jl. M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda	
24.	Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 02170/IMB/2004 tanggal 25 Maret 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 178A, RT/RW001-15, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan	
25.	Sertifikat Laik Fungsi ("**SLF**") No. 41/C.39B/31.74.01.1003.32.K-1/2/TM.15.37/E/2023 tanggal 26 Oktober 2023 untuk bangunan gedung yang terletak di Jl. Prof. Dr. Soepomo,S.H., No. 178A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan	5 tahun, sampai dengan 26 Oktober 2028

No.	Perizinan Terkait	Masa Berlaku
26.	SLF No. 42/C.39B/31.74.01.1007.25.K-2.b.I/2/TM.15.37/E/2023 tanggal 26 Oktober 2023 untuk bangunan gedung yang terletak di Jl. Wijaya II Blok F Persil 3, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	5 tahun, sampai dengan 26 Oktober 2028
27.	SLF No. 8120219271486 tanggal 8 Januari 2020 untuk bangunan gedung yang terletak di Gedung Office 8 Lantai 15, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	
28.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 19042210213174292 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	3 tahun sejak tanggal penerbitan
29.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 28082410113175169 tanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	3 tahun sejak tanggal penerbitan
30.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 18112410113174160 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	
31.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 18112410113174144 tanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	
32.	Sertifikat APPI No. 3765/APPI/Membership/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan No. Anggota 1147/JKT/01	1 Januari 2024 – 31 Desember 2024
33.	Sertifikat Rapindo No. 0020/Rapindo/MEMBERSHIP/III/2024 dengan No. Anggota 057/Rapindo-1/3/2024	31 Maret 2024 – 30 Maret 2025
34.	Certificate of Registration ISO/IEC 27001:2013 untuk sistem manajemen keamanan informasi No. ISMS1001173 tanggal 14 Maret 2022 diterbitkan oleh PT CBQA Global Indonesia	14 Maret 2022 – 13 Maret 2025

4. PERJANJIAN PENTING

Di bawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, adalah sebagai berikut:

A. Perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afliasi	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	Perjanjian Jaminan tanggal 28 Juli 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Keempat tanggal 7 Juni 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan KB Kookmin Card Corp	KB Kookmin Card Corp adalah pengendali Perseroan	Jangka waktu penjaminan oleh KB Kookmin Card Corp untuk setiap pinjaman tidak boleh lebih dari 5 tahun. Namun, bahwa jangka waktu penjaminan akan berakhir pada akhir tahun 2028 dan akan dimulai bersamaan dengan dimulainya perjanjian pinjaman.	KB Kookmin Card Corp sebagai Penjamin dengan ini tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali menjamin pemberi pinjaman dan penerusnya masing-masing, mengendorse, mentransfer dan mengalihkan, pembayaran dan pelaksanaan segera dan pada saat jatuh tempo kewajiban yang terutang oleh Perseroan kepada masing-masing pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman. Jumlah maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah KRW366.400.000.000 atau setara dalam Rupiah atau USD. Jumlah yang setara dengan IDR atau USD akan dikonversikan pada kurs tetap dan dikelola dengan baik oleh Para Pihak sebagai persiapan untuk fluktuasi nilai tukar, dimana KB Kookmin Card Corp menjamin

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afliasi	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
					dengan kurs berkisar antara 100% sampai 120% dari pinjaman dengan ketentuan bahwa total jumlah jaminan harus dalam batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan kepailitan debitur.
2.	Perjanjian Pembelian Obligasi Bunga Abadi Senilai Rp435.000.000.000 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan KB Kookmin Card Corp	KB Kookmin Card Corp adalah pengendali Perseroan	Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, perjanjian masih berlaku.	Perseroan dengan ini hendak menerbitkan obligasi bunga abadi berdasarkan perjanjian dalam sekali penerbitan ("Surat Berharga") dan KB Kookmin Card Corp telah sepakat untuk membeli Surat Berharga. Obligasi Bunga Abadi antara Perseroan dengan KB Kookmin Card adalah surat-surat hutang yang tidak terdapat jangka waktu atau jatuh tempo, melainkan hanya memberikan bunga secara terus menerus.
3.	Perjanjian Pembelian Obligasi Bunga Abadi Senilai Rp165.000.000.000 tanggal 30 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan KB Kookmin Card Corp	KB Kookmin Card Corp adalah pengendali Perseroan	Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, perjanjian masih berlaku	Perseroan dengan ini hendak menerbitkan obligasi bunga abadi berdasarkan perjanjian dalam sekali penerbitan ("Surat Berharga") dan KB Kookmin Card Corp telah sepakat untuk membeli Surat Berharga. Obligasi Bunga Abadi antara Perseroan dengan KB Kookmin Card adalah surat-surat hutang yang tidak terdapat jangka waktu atau jatuh tempo, melainkan hanya memberikan bunga secara terus menerus.
4.	Perjanjian Kerjasama Proyek Pemanfaatan Ruang No. 008/KBFMFLGL/X/2022 dan No. PKS.300/DSTC/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum II Perjanjian Kerjasama Proyek Pemanfaatan Ruang No. ADD.04/KBFMFLGL/X/2024 dan No. ADD.638/DSTC/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk	Perseroan dan Bank Bukopin secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2025	Para Pihak mengadakan sinergi bisnis dengan cara pemanfaatan ruang secara efektif di kantor cabang Bank Bukopin untuk dapat digunakan sebagai aktivitas penjualan atas produk Para Pihak dan aktivitas bisnis lainnya, antara lain untuk penerimaan angsuran dari konsumen.
5.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan PT KB Insurance Indonesia ("KII")	Perseroan dengan KII adalah perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama	Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan akan terus berlaku sampai dibatalkan oleh salah satu Pihak	Permintaan penutupan asuransi dilakukan oleh Perseroan dengan mengirimkan surat permintaan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh Perseroan, yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan polis oleh KII.
6.	Perjanjian Kerja Sama Pembelian Motor Bekas No. 01/PKS/PSA-FMF/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sebagaimana diubah	Perseroan dengan PT Prima Sentra Abadi ("PSA")	Perseroan dan PSA dikendalikan oleh pemegang saham yang sama	24 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan	Kerjasama terkait pembiayaan yang difasilitasi Perseroan kepada konsumen PSA untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh konsumen.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afliasi	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	dengan Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama No. 02/PKS/PSA- FMF/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup			kesepakatan tertulis dari Para Pihak	
7.	Perjanjian Lisensi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum Perjanjian Lisensi tanggal 18 April 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan Kookmin Bank	Perseroan dengan Kookmin Bank dikendalikan oleh pihak yang sama	Perjanjian akan terus diperpanjang dengan sendirinya selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai pengakhiran atau maksudnya untuk mengubah perjanjian dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran	Bank memberikan hak yang bersifat non-eksklusif kepada Perseroan untuk menggunakan merek jasa, berupa K-Kb Bank, KBFG, Kb Kookminbank, KB STAR BANK, dan Kookmin, kepada Perseroan untuk menjalankan bisnis yang sekarang sedang dijalankan olehnya terhitung dari tanggal perjanjian atau yang akan dijalankan olehnya dikemudian hari, di negara di mana Perseroan berada.
8.	Perjanjian Kerjasama No. 04/PKS/KBFMF-PW/BUSDEV/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Keempat Perjanjian Kerjasama No. 35/ADD/PKS-PW/KBFMF-MKT/VI/2024 tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan PT Siwarga Indo Media ("SIM")	Perseroan dengan SIM dikendalikan oleh pemegan saham yang sama	Perjanjian ini berlaku sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2025.	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama untuk memberikan pembiayaan atas pembeliaan kebutuhan para konsumen melalui platform SIM, secara kredit
9.	Perjanjian Pemegang Saham Patungan tanggal 28 November 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan KB Kookmin Card Corp dan PT Finansia Pacifica Raya ("FPR")	KB Kookmin Card Corp dan FPR merupakan pemegang saham	Perjanjian akan berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya perjanjian yaitu tanggal 28 November 2019 dan akan terus berlaku sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan mengenai pengakhiran pada perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini Perjanjian masih berlaku dan Para Pihak masih saling mengikat.	Berdasarkan perjanjian, sejak tanggal efektif dan penyempurnaan transaksi yang dituangkan berdasarkan ketentuan dari suatu perjanjian bersyarat pembelian saham yang ditandatangani pada tanggal 28 November 2019 ("**SPA**") antara KB Kookmin Card Corp dan mantan pemegang saham tertentu dari Perseroan, KB Kookmin Card Corp akan memegang 80% dari total modal saham ditempatkan Perseroan, dan FPR memegang 20% dari total modal saham ditempatkan Perseroan. Sejak tanggal 28 November 2019 dan pelaksanaan transaksi yang dituangkan dalam SPA, Perseroan akan menjalankan kegiatan usaha dan KB Kookmin Card Corp dan FPR akan menggunakan hak-hak mereka sebagai pemegang saham Perseroan.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/FPR-FMF-Sewa/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan I Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/Srt-FPR/XII/2023 tanggal 21	Perseroan dengan PT Finansia Pacifica Raya ("FPR")	FPR adalah pemegang saham Perseroan	1 Januari 2024 sampai dengan 2 Januari 2029	Perseroan bermaksud untuk menyewa ruang kantor yang terletak di Office 8 Lantai 15 (A-G), 17 F dan 19 H, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, 12190, dengan detail unit: unit di lantai 15 A dengan luas 254 m2, unit di lantai 15 B

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afliasi	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
	Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup				dengan luas 186 m2, unit di lantai 15 C dengan luas 94 m2, unit di lantai 15 D dengan luas 94 m2, unit di lantai 15 E dengan luas 94 m2, unit di lantai 15 F dengan luas 94 m2, unit di lantai 15 G dengan luas 173 m2, unit di lantai 17 F dengan luas 94 m2, dan unit di lantai 19 H dengan luas 173 m2 dengan total luas 1.256 m2 dari FPR untuk digunakan sebagai kantor pusat Perseroan
11.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan PT Finansia Pacifica Raya ("FPR")	FPR adalah pemegang saham Perseroan	2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2026	Perseroan bermaksud untuk menyewa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Senopati Tower Prosperity (OF2) Lantai 12 D dan 12 E, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seluas kurang lebih 133 m2 dan 270 m2 dari PT Finansia Pacifica Raya untuk digunakan sebagai kantor Perseroan.
12.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 17/Srt-FPR/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan IV Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/Srt-FPR/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan PT Finansia Pacifica Raya ("FPR")	FPR adalah pemegang saham Perseroan	2 Oktober 2024 sampai dengan 2 Oktober 2025	Perseroan bermaksud untuk menyewa ruang kantor yang terletak di Jl. Wijaya I No. 5E Blok Q Persil No. 379 B/4, Kelurahan Petogongan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan luas sebesar 465 m2 dari PT Finansia Pacifica Raya untuk digunakan sebagai kantor Perseroan.
13.	Perjanjian Fasilitas Bank Garansi Fasilitas Bank Garansi IDR 800.000.000.000 tanggal 6 September 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Perseroan dengan Kookmin Bank Hongkong Branch	Perseroan dengan Kookmin Bank dikendalikan oleh pihak yang sama, yakni KB Financial Group	6 September 2024 sampai dengan 5 September 2025	Bank setuju untuk memberikan fasilitas bank garansi sejumlah maksimal Rp800.000.000.000 kepada Perseroan sehubungan dengan perjanjian/perikatan yang dibuat oleh Perseroan dengan *beneficiary*.

B. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Dengan Pihak Ketiga

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2037 tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 47 tanggal 15 November 2019 yang dibuat di hadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta	Frederick Pandjaitan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duren Bangka RT 001/RW 02, Duren Tiga, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	12 Desember 2019 sampai dengan 13 Desember 2024	Rp2.500.000.000,00
2.	Perjanjian Sewa Unit Perkantoran Graha Inti Fauzi (Ketentuan Standar Sewa) No. 008/FPM/K-07/I/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Fauzi Panca Manunggal	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Buncit Raya No. 22 Jakarta.	1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2027	Rp501.614.100,00
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Office 8 @Senopati Lantai 17 Unit G tanggal 5 April 2018 sebagaimana	PT Prakarsa Ekatama Advisory	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Office 8, Jalan Senopati Dalam I, Kelurahan Senayan, Kecamatan	10 April 2023 sampai dengan 9 April 2026.	Rp2.024.100.000,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	terakhir kali diubah dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Office 8 @Senopati Lantai 17 Unit G No. 001/PEA-FMF/ADD.I/III/2023 tanggal 16 Maret 2023		Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, Ruang kantor pada Lantai 17 Unit G		

C. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang Dengan Pihak Ketiga

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 73, yang dibuat di hadapan Irfvan Mursito, S.H., Notaris di Tangerang	Lim Tai Tjoan	Ruko 4 Lantai yang terletak di Komplek Pergudangan Era Prima Blok P No. 19, Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batuceper, Tangerang.	3 Mei 2023 sampai dengan 2 Mei 2027	Rp920.000.000,00
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 85 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan, Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Semarang	PT Citra Nusa Insan Cemerlang	Satu unit bangunan rumah toko berlantai tiga yang terletak di Jalan Karangwulan Selatan No. B6- B7, Kelurahan Jagalan, Jawa Tengah, Semarang	01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2025	Rp 666.000.000,00
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 22 Maret 2022, yang dibuat di hadapan, Nofinus Ginting, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung	Herminawati	Satu unit bangunan rumah toko berlantai tiga yang terletak di Jalan BKR No. 37A, Kecamatan Regol, Kelurahan Pasirluyu, Kota Bandung, Jawa Barat	09 Mei 2022 sampai dengan 08 Mei 2025	Rp 1.416.666.667,00
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 003 tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan H. Hendra Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	Boby Sunardy Edward dan Lenny Sethiono	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rappocini Raya No. 153 C, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	16 Oktober 2024 sampai dengan 26 Oktober 2027	Rp1.083.333.333
5.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 201 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Ferty Pratiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros	Aris Wira dan Muchtar Wira	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rappocini Raya No. 153 A,Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	25 Januari 2020 sampai dengan 25 Januari 2025	Rp525.000.000,00
6.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 200 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Ferty Pratiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros	Fenni dan Aris Wira	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rappocini Raya No. 153 B, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	25 Januari 2020 sampai dengan 25 Januari 2025	Rp525.000.000,00
7.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 299 tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Wiwik Suwartutik Mulyadi, S.H., Notaris di Jombang	Lo Iwan Santoso	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 39, Blok B dan C, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	30 April 2022 sampai dengan 30 April 2025	Rp533.333.333,00
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Yoga Ananda,	Majib Marchiato	3 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Komplek Ruko Palm Spring Blok A III No. 6, Komplek Ruko Palm Spring Blok A III No. 7,	2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025	Rp1.100.000.000,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	S.H., Notaris di Kota Batam		Komplek Ruko Palm Spring Blok A III No. 8, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Batam		
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 190 tanggal 19 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Iqbal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi.	Djurijanto Chudri dan Johana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 25A-B RT. 04, Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.	3 April 2023 sampai dengan 3 April 2026	Rp800.000.001,00
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Junjung Handoko Limantoro, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Malang.	PT Anekacipta Muliaindah	Bangunan yang terletak di Jl. Raya Sawojajar, Ruko Blok Tokyo/TK 2 No. 1 dan 2, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	15 Agustus 2022 sampai dengan 15 Agustus 2025	Rp420.000.000,00
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 28 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Heri Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang	Rico Susilo	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Residen Abdul Rozak No. 888, RT.002/RW. 001, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2027	Rp1.000.000.000,00
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Aldila Vibriyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kubu Raya	Yani Liliani	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. WR Supratman No. B3, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	2 September 2024 sampai dengan 2 September 2026	Rp400.000.000,00
13.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Aldila Vibriyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kubu Raya	Hendry Wahyono dan Hendry Wahyudhi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. WR. Supratman No. B 12, Kelurahan, Benuamelayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat	6 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2026	Rp222.222.222,00
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruko No. 04 tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Antonius Hutagalung, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara	Komsani dan Tri Sulami	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pesut No. 24 RT. 18, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	2 Juli 2022 sampai dengan 1 Juli 2025	Rp191.666.667,00
15.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Emilia Kartolo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Banjarmasin	Siti Farida	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ahmad Yani yani Km 36, Kelurahan Sei Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Tingkat II Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan	1 Juli 2022 sampai dengan 1 Juli 2025	Rp330.000.000,00
16.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Koentarno, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas	Henny Suyati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Siswondo Parman No. 26, Kelurahan Purwokerrto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah	1 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2025	Rp200.000.000,00
17.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 537 tanggal 27 April 2022, yang dibuat di hadapan Dedy Sukma, S.H., M.Kn., Notaris di Barat	Jimmy Tjen Hay dan Linda	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ahmad Yani, RT012, RW004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025	Rp177.777.778,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 November 2022, yang dibuat di hadapan Maria Diana Linggawidjaja, S.H., Notaris di Kota Bogor.	Hendra Eng	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. K.H. Soleh Iskandar No. 1D-1E, RT 006, RW 002, Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Kota Provinsi Barat. Utara, Bogor, Jawa	16 November 2022 sampai dengan 16 November 2025.	Rp945.000.000,00
19.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 25 Januari 2023, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 13 November 2024 yang dibuat di hadapan In-In Inayat Amintapura, S.H., Notaris di Kota Bandung	Wen Waluya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok Sawah Lega (Jl. Sangkuriang No. 60 RT003 /RW020), Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Kota Provinsi Barat Utara, Cimahi, Jawa	16 November 2024 sampai dengan 16 November 2025	Rp208.333.333,00
20.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 25 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Denny Rachman Hakim, S.H., M.Kn., Notaris di Kediri	Agung Ismail	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Penanggungan, Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur	1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2025	Rp188.888.888,00
21.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Kresnowati Kahfianazli Oktapentari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.	Eny Hernawaty	2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kedoya Arteri No. 88 dan No. 88 A, RT 011 RW 003, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2025	Rp1.333.333.333,00
22.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 128 tanggal 25 September 2024, yang dibuat di hadapan Damayanti Rosita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Madiun	Ja'far Badar Al Katiri	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dokter Setia Budi, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur.	1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2026	Rp500.000.000,00
23.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 05 tanggal 6 April 2022, yang dibuat di hadapan Ni Putu Rediyanti Shinta, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram	Hendrik Suyata	2 buah bangunan rumah toko (ruko) bertingkat 1 dan 2, yang terletak di Jl. Sriwijaya, Ruko No. 34 dan No. 35, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2025	Rp276.000.000,00
24.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 01 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Roosye Evitina Soriton, S.H., Notaris di Kota Palu	Megic Tandayong	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai Ruko Petak ke 4 dan Petak ke 5, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Selatan	14 Februari 2023 sampai dengan 13 Februari 2025	Rp500.000.000,00
25.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 02 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Andi Hariany, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pare-pare	Ericson Giordano Yonardy	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bau Massepe, Ruko permanen lantai 3, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan	01 Januari 2023 sampai dengan 01 Januari 2026	Rp416.666.667,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
26.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 294 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi	Ir. B. Rudi Setiawan, Marfuah Binti Dalih dan Ucu Juriah	2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Jababeka I, Ruko Permata Junction Blok A No. 8 dan No. 9, Desa Pacar Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2027	Rp716.666.666,00
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 008 tanggal 05 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Hearnny Annissa, S.H., M.Kn., Notaris di Garut	H. Dani Muhammad Ramdan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cikuray No. 70 RT 004 RW 006, Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2025	Rp233.333.333,00
28.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 28 Desember 2022, yang dibuat di hadapan, Rizwansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Prabumulih	Listarti	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Padat Karya RT004, RW005, Kecamatan Prabumulih, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan	14 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2025	Rp200.000.000,00
29.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Sri Anggraini	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H. Agus Salim No. 32, Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Provinsi Riau	20 November 2024 sampai dengan 19 Mei 2025	Rp22.000.000,00
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 3 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Puspita Mustikasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota BauBau.	Zainal Ajud M	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bataraguru, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara	3 September 2022 sampai dengan 2 September 2025	Rp 316.666.666,00
31.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 24 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Andi Mulyana, S.H., Notaris di Kota Bontang	Jono Tjendikiawan Wongso	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Brigjend Katamso RT 18, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	2 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2025	Rp333.333.333,00
32.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 8 November 2024, yang dibuat di hadapan Diana Nurcahya Kusumah Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur	drg. Lisa Wongkar	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. KH. Abdulla Bin Nuh, Kelurahan Pamayonan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2027	Rp305.555.555,00
33.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 16 November 2024, yang dibuat di hadapan Diana Nurcahya Kusumah Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur	Weitarsa Hendarto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. KH. Abdulla Bin Nuh, Kelurahan Pamayonan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	19 November 2024 sampai dengan 18 November 2027	Rp305.555.555,00
34.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 227 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Viola Tariza Windianita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.	Lindawati	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ciledug Raya No. 40C dan 40D, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025	Rp 888.888.888,00
35.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4251	Muhamad Zamili	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda,	9 Maret 2022 sampai dengan 8 Maret 2025	Rp350.000.000,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta		Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat		
36.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rilis Herlina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung.	Susanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Terusan Kopo RT004/RW004, Desa Margahayu, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.	1 Januari 2023 sampai dengan 1 Januari 2026	Rp583.333.333,00
37.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 2 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Anne Agustine, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lahat	Lina	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mayor Ruslan III No. 3-5, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan	15 September 2024 sampai dengan 15 September 2026	Rp134.000.000,00
38.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Tina Astuti Widjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Metro.	Hartati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT/RW. 009/002, Kelurahan Metro, Kecamatan, Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung.	2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2025	Rp55.555.556,00
39.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Iskandar, S.H., Notaris di Kota Singkawang	Sri Astuti	Sebuah ruko yang terletak di Jl. Alianyang No. 6C, RT 041, RW 015, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.	2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2025	Rp88.888.888,00
40.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3323 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn	H. Asep Saepudin	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kutabumi Tanggerang Ruko Boulevard No. 4-5, Kampung Teriti RT004, RW004, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	15 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2025	Rp316.666.666,00
41.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9577 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan, Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Tetdy Tambuwun	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang Km. 21, Komplek Pergudangan Cibadak Indah Blok 8H No. 10	02 Desember 2022 sampai dengan 01 Desember 2025	Rp262.500.000,00
42.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat di hadapan, Anita Kriptiani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Ternate	Irwan IE	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda Djabir Shah, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	01 Maret 2023 sampai dengan 01 Maret 2025	Rp450.000.000,00
43.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 154 tanggal 8 November 2024, yang dibuat di hadapan Isnadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru	Roma Pasaribu	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hangtuah No. 321, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2026	Rp60.000.000,00
44.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 152 tanggal 19 November 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti,	Drs. Ali Basir	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Sultan Hasanudin Kampung Setia Jaya No. 76 A, RT 01 RW, Kelurahan Setia Darma, Kecamatan	17 November 2024 sampai dengan 16 November 2026	Rp200.000.000,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi		Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat		
45.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16 tanggal 20 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Ngestirini Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta	Angela Sumanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bandangan Selatan No. 43 Puri Deltamas Blok A Kav. 6, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025	Rp490.000.000,00
46.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 130 tanggal 4 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.	Stevenson Heri Hartolo	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang KM 65, Kampung Raab, Desa Lewi Limus, Cikande, Serang, Banten	1 Januari 2023 sampai dengan 1 Januari 2025	Rp 288.888.889,00
47.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5789 tanggal 17 Juli 2024, yang dibuat di hadapan, Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Lim Sun Lie/ Slamet Wongso	Dua bidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di Jalan Kampung Kebon Kelapa Kavling No. 2 dan 3, RT015, RW005, Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	12 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2027	Rp253.333.333,00
48.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3164 tanggal 11 November 2022, yang dibuat di hadapan, Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Mulyanta Oslan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Muncul, RT011, RW003 Kelurahan Setu, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	02 Januari 2023 sampai dengan 01 Januari 2025	Rp 77.777.778,00
49.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 67 tanggal 26 November 2024, yang dibuat di hadapan Sri Mulyono Hermawan, S.H., M.Kn., Notaris di Ngawi	Nor Afni	Bangunan yang terletak di Jl. Kartini, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur	1 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2026	Rp55.000.000,00
50.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 yang dibuat di hadapan, Doktor Roy, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kota Ambon	Maria Goreti Tan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rijali, Desa Huruf D, Kecamatan Kota Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku (Jl. Rijali No 4, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau)	11 Maret 2022 sampai dengan 11 Maret 2025	Rp1.110.000.000,00
51.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 yang dibuat di hadapan, Donda Siringo Ringo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu	Johan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Transmigrasi KM 1 RT.12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan	01 April 2022 sampai dengan 01 April 2025	Rp366.666.667,00
52.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 yang dibuat di hadapan Ni Putu Ayunita WaspurI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya	Vittorio Adiekoesoemo, S.E.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Dr. Ir. H. Soekarno S- 15/214-A, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	01 Februari 2022 sampai dengan 01 Maret 2025	Rp450.000.000,00
53.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 7 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Ferty Pratiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Maros	Leny Wijaya dan Stecen Yaowry dan Cindy Yaowry	2 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 16 No. 2-3, Daya Sudiang, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	8 Desember 2022 sampai dengan 8 Desember 2025	Rp533.333.333,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
54.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 7 November 2022, yang dibuat di hadapan, Ferty Pratiwi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros	Herlin Panjaya dan Megawati dan Suhuyanli	Satu unit tanah dan bangunan rumah toko berlantai tiga yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, No. 1, Kecamatan Biringkanaya, kelurahan Pai, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	07 November 2022 sampai dengan 07 November 2025	Rp200.000.000,00
55.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Fitria Ayu Nengsi, S.H., M.Kn., Notaris di Balikpapan	Deanny Indahwaty Lomewa	Sebidang tanah dan bangunan ruko 4 (empat) lantai yang terletak di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 124, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	4 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2025	Rp150.000.000,00
56.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 3 April 2024, yang dibuat di hadapan Emilia Kartolo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Banjarmasin	Dion Budiyanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. A. Yani KM 3,5 No. 210 A, Kelurahan Kebun Bunga Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Provinsi Kalimatan Selatan.	1 April 2024 sampai dengan 1 Maret 2027	Rp866.666.667,00
57.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 18 September 2023, yang dibuat di hadapan Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	Sukartini Tjandradjaja	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok C 22 B, Jl. A. Yani, RT.004/003, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1 Oktober 2023 sampai dengam 30 September 2026	Rp340.416.666,67
58.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 18 September 2023, yang dibuat di hadapan Gunawan Budilaksono, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	Siska Utami Suherlan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Bekasi Mas Blok C 23, Jl. A. Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1 Oktober 2023 sampai dengam 30 September 2026	Rp376.250.000,00
59.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 2 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Iwan Suhardi, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya	Rudi Santoso dan Indahwati Logioto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Grand Sungkono Blok B-2 dan Blok C-2, Jl. Mayjend Sungkono No. 176-178, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	1 Juli 2023 sampai dengan 20 Juni 2026	Rp999.999.999,00
60.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 22 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Iwan Suhardi, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya	Jessyca	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Grand Sungkono Blok B-03, Jl. Mayjend Sungkono No. 176-178, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Juli 2026	Rp283.333.333,00
61.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9293 tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang	Yenny	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No. 30-31A, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2027	Rp700.000.000,00
62.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Anita	Yati Sunaryo, Ivan Pramono Susanto, dan Atika Olivia Susanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Profesor Yohanes, RT 037, RT 008, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondo kusuman, Kota	7 April 2024 sampai dengan 6 April 2026	Rp666.666.666,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	Emiasara, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Magelang		Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		
63.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 13 April 2024, yang dibuat di hadapan I Gusti Ngurang Agung Andika Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Bali	Anak Agung Made Merti	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Barat No. 408, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali	1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2027	Rp1.066.666.667,00
64.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 30 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Wiwiek Widayati, S.H., M.Kn., Notaris di Gresik	Ir. Rahmat Ridlo, M.B.A.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kalimantan No. 72, Desa Sukamulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2026	Rp330.000.000,00
65.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Septino Dwi Putra, S.H., M.Kn., Notaris di Mojokerto	Nur Kholis	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan RA Basuni, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto	1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2027	Rp222.222.222,00
66.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Stevia Widyatmasari, S.H., M.Kn., Notaris di Palangka Raya	Evi Veronica	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 19A-B, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	2 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2027	Rp666.666.667,00
67.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Taufan Rochaditomi Dachlius, S.H., M.Kn., Notaris di Sukoharjo	Indriati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ronggowarsito No. 151 Blok F, Priyobadan RT/RW 002/002, Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	1 April 2024 sampai dengan 1 September 2025	Rp120.000.000,00
68.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 tanggal 18 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Lindriyani, S.H., M.Kn., Notaris di Lampung Selatan	Vonny Ismudiaty	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	31 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2027	Rp833.333.333,00
69.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Paramita Jeitty Betsy Paat, S.H., M.Kn., Notaris di Manado	Djung Khin Fui	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pierre Tendean, Gedung Marina Shopping Walk Manado, Kompleks Marina Plaza Blok RA No. 9	15 Januari 2023 sampai dengan 15 Januari 2026	Rp1.200.000.000,00
70.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 188 tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Isna, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru	Hj. Indriati. HS	Tiga bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 377 B, Keluarahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	15 April 2024 sampai dengan 14 April 2027	Rp680.000.000,00
71.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1351 tanggal 4 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto S.H., Notaris di Jakarta	Teddy Wahyudi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Letjen. Suprapto Blok E-1/3 Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	16 Juli 2023 sampai dengan 15 Juli 2025	Rp388.888.888,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
72.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 365 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Sylvia Irawati, S.H., Notaris di Jakarta	Shanty Gozali Gow	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Letjen. Suprapto Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No. 1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2025	Rp324.000.000,00
73.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3435 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta	Andy Kornel Manik	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tebet Raya No. 34 Blok A dan B, Blok A Persil No. 4, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	3 Januari 2024 samai dengan 3 Januari 2026	Rp666.666.667,00
74.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 011 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan H. Hendra Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar	ST. Yuslinah Massaerang	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan	1 Oktober 2024 sampai dengan 1 Oktober 2026	Rp100.000.000,00
75.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 6 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ridwan Rate, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bone	H. Abustam, Spd	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. K.H. Agus Salim No. 12, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	2 April 2024 sampai dengan 2 April 2027	Rp516.666.666,00
76.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 8 November 2023, yang dibuat di hadapan Sukma Nurani Amperia, S.H., Notaris di Bulukumba	Hajja Sahaya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No. 3, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2027	Rp200.000.000,00
77.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 4 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Deddy Suardi, S.H., Notaris di Kota Cirebon	Mulchand Lilaram Bahirwani	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kesambi Komplek Ruko Kesambi Regency No. 12, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	8 Agustus 2023 sampai dengan 8 Agustus 2025	Rp270.000.000,00
78.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 8 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Andi Eka Yunita Devi Tawil, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Gorontalo	Suriaty Dengo	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Arief Rahman Hakim No. 18, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Wimialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	6 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2029	Rp777.777.777,00
79.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 252 tanggal 21 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu Wahyuni, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	Ie Rina	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tarumanagara Kav. 8 Arteri Tol Karawang Barat Ruko Perum Grand Taruma Dharmawangsa 2 Blok B17, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat	1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027	Rp291.666.666,00
80.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 251 tanggal 21 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu Wahyuni, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	Andri Leo Sudjaya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tarumanagara Kav. 8 Arteri Tol Karawang Barat Ruko Perum Grand Taruma Dharmawangsa 2 Blok B18, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur,	1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027	Rp291.666.666,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
			Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat		
81.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Widartiningsih, S.H., Notaris di Makassar	Johnny Aliman	Dua bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Madjid Yunus By Pass Square Blok B No. 9 dan No. 9, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Maret 2023 sampai dengan 28 Februari 2026	Rp733.333.333,00
82.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 8 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Samsul, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palopo	Nelly Kong	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Andi Kambo, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan	8 Desember 2023 sampai dengan 7 Desember 2026	Rp500.000.000,00
83.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Oktober 2023, yang dibuat dan dicap oleh Sukmawati Suryadinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Buleleng	Nuningverany Gondowdjojo	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Seririt Singaraja, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025	Rp100.000.000,00
84.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 3 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Septian Adriansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi	Tjhie Hin Njan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Ahmad Sanusi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi	1 November 2023 sampai dengan 1 November 2026	Rp333.333.333,00
85.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 63 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Rendy Indira Pradikta, S.H., M.Kn., Notaris di Tasikmalaya	Luis Lily Farida	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raden Edi Martadinata No. 38, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	1 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2027	Rp833.333.333,00
86.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 9 November 2023, yang dibuat di hadapan Harijani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Blitar	Faisal Agus Irianto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepancenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur	18 Januari 2024 sampai dengan 18 Oktober 2025	Rp36.000.000,00
87.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 5 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ratih Setyowati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap	Basuki Rachmad	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dokter Sutomo, RT 07/RW 09, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	21 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2025	Rp21.111.111,00
88.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8702 tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Lukdy	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pertokan Komplek CTC Cileungsi Blok E No. 2, 3, 4, dan 16, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	26 September 2024 sampai dengan 26 September 2027	Rp522.000.000,00
89.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 6 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Yoga Pranata, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Klaten	Ting Abraham Kurniawan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pramuka No. 15, RT 001/RW007, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2025	Rp133.333.333,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
90.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 93 tanggal 22 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Tunjung Widhi Wasesa Suwadji, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang	Nanik Mindarsih	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Agus Salim, Ruko Ronggolawe No. 26A, Desa Getaspejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah	5 Februari 2024 sampai dengan 5 Februari 2026	Rp216.666.666,00
91.	Akta Perpanjangan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Menyewa No. 55 tanggal 23 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Mutiara Rachmalia Celica., Notaris di Bandung	Thomas Subekti	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Nasution Square, Jl. Abdul Haris No. 103 Kav. 08, Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	17 Juni 2023 sampai dengan 16 Juni 2026	Rp400.000.000,00
92.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 12 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Paramita Jeitty Betsy Paat, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado	Teddy Limuat	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Gunung, Elai, Kecamatan Bitung Bawah, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juni 2026	Rp293.333.333,00
93.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 102 tanggal 6 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Viola Tariza Windianita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang	Sri Hartini Peniati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. RE Martadinata No. 8C, RT003, RW009, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	3 Desember 2023 sampai dengan 3 Desember 2026	Rp260.000.000,00
94.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4086 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta	Tjhin Khay Sian	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kelapa Hybrida Blok GOS/B20, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	10 Februari 2024 sampai dengan 9 Februari 2027	Rp666.666.666,00
95.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Emilia Kartolo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Banjarmasin	Taufik Rahman, S.Pd.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tambun Bungai, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Selatan	3 Mei 2024 sampai dengan 3 Mei 2026	Rp102.222.222,00
96.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 1 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn., Notaris di Kotabaru	Hj. Hindriyati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. M. Alwi RT 05, RW 04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan	1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024	Rp44.444.444,00
97.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 13 April 2023, yang dibuat di hadapan Yustina Widhiwuryani, S.H., M.Kn., Notaris di Kupang	Dekrit Hermanus Jeferson Amabi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. W J Lalamentik RT. 034 RW. 011, Kelurahan Fatululi, No. 1 dan No. 5, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 April 2023 sampai dengan 1 April 2026	Rp833.333.333,00
98.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Arlan, S.H., M.Kn., Notaris di Mamuju	Hj. Evita Yulianti	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Emy Saelan No. 40, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	8 Mei 2024 sampai dengan 8 Mei 2027	Rp166.666.667,00
99.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26	Hartati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yos	2 Januari 2023 sampai dengan 2 Januari 2025	Rp55.555.556,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Tina Astuti Widjaja, S.H., Notaris di Metro		Sudarso RT009/RW002, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung		
100.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 647 tanggal 31 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Isnadi, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru	Efendi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Harapan Raya No. 362 H, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	20 September 2023 sampai dengan 20 September 2025	Rp63.333.333,00
101.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat di hadapan, Emilia Kartolo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin	Hadiyanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Boejjasin No. 27, RT 21, RW06, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan	2 Februari 2024 sampai dengan 2 Februari 2026	Rp75.555.556,00
102.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 7 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Cicierdis Ifanurdiani, S.H., M.Kn., Notaris di Purwakarta	Agus Iriana, S.E.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mister Dokter Kusuma Atmaja RT/RW 04/01 Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	2 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2026	Rp583.333.333,00
103.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5370 tanggal 22 April 2024, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang	Mulyadi Mulya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	18 Mei 2024 sampai dengan 18 Mei 2026	Rp233.333.333,00
104.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 21 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Evalusi Hastutik, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang	Rizky Agung Nugroho	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cilegon, RT003/RW004, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten	21 Juni 2024 sampai dengan 21 Juni 2027	Rp361.111.111,00
105.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 3 Mei 2024, yang dibuat di hadapan I Gusti Ayu Made Semilir Susila, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tabanan	Ni Nyoman Sri Utama	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali	1 Mei 2024 sampai dengan 1 Mei 2026	Rp33.333.333,00
106.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 3 April 2023, yang dibuat di hadapan Neri Erniaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tana Toraja	Esy Rita	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pongtiku No. 7, Kelurahan Karassik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	1 April 2023 sampai dengan 1 April 2026	Rp216.666.667,00
107.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Nanik Purwaningsih, S.H., Notaris di Tuban	Andy Putra Wirawan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Basuki Rahmad No. 12, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2024 sampai dengan 1 Februari 2026	Rp244.444.444,00
108.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 265 tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi	Ny. Lasrini	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Hankam No. 57, RT 001, RW 007, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	9 Juni 2024 sampai dengan 8 Juni 2025	Rp127.777.778,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
109.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11 tanggal 19 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Maria Diana Linggwidjaja, S.H., Notaris di Kota Bogor	Syafrizal dan Citra Novi Brillianty (dan Harizal Sukma	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 14, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	2 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2026	Rp66.666.666,00
110.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2578 tanggal 8 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S,H., Notaris di Jakarta	Kenes Yohana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pondok Kopi Raya Blok U 1 No. 6 RT007 RW006, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur	31 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2026	Rp355.555.556,00
111.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6775 tanggal 22 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta	Mandiawanati	2 Bidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D1 No. 20 dan 21, Jl. Raya Bogor KM 20, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2026	Rp355.555.555,00
112.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 24 tanggal 29 Oktober 2024, yang dibuat di hadapan Frisa Dwikirta Mayang Safitri, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang	Ahmad Redi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jaksa Agung R. Suprato No. 36 Blok 4, Kelurahan 26 Ilir I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	2 November 2024 sampai dengan 2 November 2026	Rp155.555.556,00
113.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, S.H., Notaris di Kota Tanjungpinang	Hj. Murniati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. D.I Panjaitan KM. 10 No. 9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Riau	6 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2025	Rp95.555.555,00
114.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8260 tanggal 28 November 2023, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Ngadino, MBA	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tarakanita III No. 06 RT002/RW008, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan	1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2025	Rp133.333.333,00
115.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2057 tanggal 6 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta.	H. Supriyanto, S.E.	Jl. Raya Cilangkap No. 101, Cipayung, Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	30 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2026	Rp177.777.777,00
116.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3519 tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta.	Gouw Tjhai Oei Al Supargo	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Budi Mulya Raya 8-P, RT 012 RW 015, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.	21 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2025	Rp322.222.222,00
117.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3018 tanggal 13 Desember 2023, yang dibuat di hadapan, Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Dede Kurniawan Iskandar, S.T	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Saga Bunar, RT009, RW002, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat	01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024	Rp26.666.666,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
118.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Juli 2023, yang dibuat di hadapan H. Khairuddin Rasyid, S.H., Notaris di Batam	Akhmad Zainul Ardi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Pertokoan Sentosa Perdana E No. 11, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2025	Rp144.444.444,00
119.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 15 April 2023, yang dibuat di hadapan Paramita Jeitty Betsy Paat, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Manado	Pingkan Natalia Tjie	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Suprapto, Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Provinsi Sulawesi Utara	1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2026	Rp310.000.000,00
120.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 185 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	Badar M. Bisyir	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Carigin, RT010, RW002, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	16 Juni 2024 sampai dengan 15 Juni 2026	Rp255.555.556,00
121.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 269 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi	Kasdi Bin Imung	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kampung Serang, RT003/RW001, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2025	Rp88.888.888,00
122.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7226 tanggal 23 September 2023, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Hj. Ratu Ayunovianti	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raden Patah No. 14-16, RT001/RW006, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten	1 Januari 2024 sampai dengan 1 Oktober 2025	Rp408.333.333,00
123.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6266 tanggal 23 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hesti Suliastiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta	Elduse Delfino Taran	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 25 (Jalan Hamengku Buwono), Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	2 Januari 2024 sampai dengan 23 Oktober 2025	Rp235.666.667,00
124.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5553 tanggal 17 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta	Rudy Siahaan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tenggiri Blok A, Kavling No. 6, Pulogadung, Jakarta Timur	31 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2026	Rp433.333.333,00
125.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2842 tanggal 8 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta	H. Ir. Irwan Achmad Wijaya	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bugis No. 73C, RT001, RW004, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	8 Januari 2024 sampai dengan 7 Januari 2025	Rp150.000.000,00
126.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Firdaus S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangka	Fahita Tohir	Dua unit tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Adiyaksa No. 2 Kacang Pedang, Taman Sari, Sumatera Selatan	20 Juni 2023 sampai dengan 19 Juni 2025	Rp244.444.444,00
127.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 57 tanggal 12 Januari 2024, yang dibuat di hadapan, Muchlis	Amiruddin	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT.011 RW.000, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara	22 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2026	Rp277.777.778,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	Tabrani, S.H., Notaris di Kota Tarakan				
128.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3539 tanggal 18 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang	Akhmad Misbahul Hasan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Curug Wetan, RT002/RW002, Kelurahan Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	1 Juli 2024 sampai dengan 1 Juli 2025	Rp25.555.555,00
129.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 2 April 2024, yang dibuat di hadapan Dhinny Ridha Suarsa, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur	Suciono	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mas Tirtodarmo Haryono No. 085, RT015/RW006, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupatem Kotawaringin Timur	1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027	Rp150.000.000,00
130.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 2 April 2024, yang dibuat di hadapan Dhinny Ridha Suarsa, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur	Suciono danDahlia	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Muhammad Arsyad No. 120 A/B, RT015/RW006, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupatem Kotawaringin Timur	1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2027	Rp333.333.333,00
131.	Akta Perjanjian Sewa No. 03 tanggal 19 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Fenty Nartaty, S.H., M.Kn., Notaris di Sumedang	Nanang Cahyana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangeran Kornel No. 256, RT002/RW022, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatang, Provinsi Jawa Barat	30 April 2024 sampai dengan 29 April 2026	Rp222.222.222,00
132.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 3 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Christina Agustini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tegal	Katidjan Andriana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kompol Suprapto No. 7 RT001/RW003, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	1 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025	Rp88.888.889,00

D. Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Selain Kantor Cabang Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	H. Anwar Rahmat	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Majid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2025	Rp100.000.000,00
2.	Perjanjian Sewa tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hasanah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kosambi, Kabupaten Karawang, Kecamatan Klari, Provinsi Jawa Barat	01 Februari 31 2023 sampai dengan 31 Januari 2025	Rp55.555.556,00
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	H. Asep Irwansyah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cipacing KM. 20 A3, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat	1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2025	Rp200.000.000,00
4.	Perjanjian Sewa tanggal 01 Februari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ida Farida Setiaji	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kp. Warung Tiwu RT/RW. 002/015, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2025	Rp64.444.444,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
5.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 September 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Jamaludin Malik	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kp. Radio No. 36, Desa Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	1 November 2024 sampai dengan 1 November 2026	Rp95.555.556,00
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Antonious Dwi Juniarto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Lembang No. 208, Kelurahan Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2026	Rp77.777.778,00
7.	Perjanjian Sewa tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Royadi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Kapuk No. 9 RT/RW. 003/011, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat	18 Januari 2023 sampai dengan 18 Januari 2025	Rp88.888.888,00
8.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Felixius Pranata	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Duri Selatan No. 26, RT. 002/RW. Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	14 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2024	Rp108.888.888,00
9.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Akin S	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. H Saaba No. 30 RT/RW. 004/001, Keluraha Joglo, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	10 Agustus 2024 sampai dengan 9 Agustus 2026	Rp77.777.779,00
10.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 07 September 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Agatha J. Limas	Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jl. Palem Raja Raya Selatan, Ruko Madrid Nomor 21, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten	24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2025	Rp333.333.333,00
11.	Perjanjian Sewa tanggal 1 November 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Murdi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Cisoka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	01 Desember 2024 sampai dengan 30 November 2025	Rp26.666.667,00
12.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Irman Soetandar	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Semeru No. 34 001/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	25 Januari 2023 sampai dengan 24 Januari 2025	Rp100.000.000,00
13.	Perjanjian Sewa tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ahmad Haekal	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Indra Giri 386, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	29 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2024	Rp62.222.222,00
14.	Perjanjian Sewa tanggal 02 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Yuliyah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Baru Gg. 2 No. 38 Seb RT/RW. 005/001, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	09 Januari 2023 sampai dengan 09 Januari 2025	Rp94.444.444,00
15.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 Januari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Manihar Situmorang, S.H.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pemuda No. 26, RT/RW. 004/003, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat	01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024	Rp66.666.666,00
16.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Pandji Hidayaturrahman H. Halmahera	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kasongan, Sampit KM. 1, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	17 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2024	Rp77.777.778,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
17.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 21 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ir. H. Zainal Abidin	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yos Sudarso II RT. 012, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur	6 Februari 2023 sampai dengan 5 Februari 2025	Rp100.000.000,00
18.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hj Ridawati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Andi Panggaru Sengkang RT/RW. 000/000, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan	01 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2027	Rp150.000.000 ,00
19.	Perjanjian Sewa tanggal 07 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Eidi Hartono	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cendrawasih No. 394, Kecamatan Mamajang, Desa Tamparang Kekem Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	25 Desember 2022 sampai dengan 25 Desember 2025	Rp200.000.000,00
20.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Muhammad Kasmad	Sebidang tanah dan bangunan di Jl. Moh Hatta, Kelurahan Baliase, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	1 September 2022 sampai dengan 30 Agustus 2025	Rp133.333.333,00
21.	Perjanjian Sewa tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Suryadi Anwar	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Poros Makassar Barru, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan	12 Agustus 2022 sampai dengan 12 Agustus 2025	Rp166.666.667,00
22.	Perjanjian Sewa tanggal 17 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ir. Lismaniar Siagian	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cemara No. 63 RT/RW 006/002, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat	1 Februari 2023 sampai dengan 31 Januari 2026	Rp100.000.000,00
23.	Perjanjian Sewa tanggal 24 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Listianto Koeshandoko	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Citayam, Ruko Citayam Centre No. 39, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat	24 Desember 2022 sampai dengan 24 Desember 2024	Rp77.777.778,00
24.	Perjanjian Sewa tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Drs. H. Hasyim Djalal	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mardani RT/RW. 010/005, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	15 Januari 2023 sampai dengan 14 Desember 2024	Rp106.481.467,00
25.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Acep Kundrat	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gg Gemini No. 2, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	25 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2026	Rp116.666.667,00
26.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 Juni 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hj. Nanan Maryani	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Banjaran, Kp Palasari RT/RW. 003/002, kelurahan Bojomanggu, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2026	Rp61.111.111,00
27.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Suryana Hidayat	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Soreang – Ciwidey, Kp Kabuyutan RT03/RW01, Kelurahan Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025	Rp77.777.777,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
28.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Acep Firmansyah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan KH Achmad Dahlan, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2025	Rp44.444.444,00
29.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Eulis Srimawati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Timur Borolong No. 42, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2025	Rp83.333.333,00
30.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tjeng Hung	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Toram RT009/RW010, Kelurahan Tegal Alur, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	15 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2025	Rp95.555.555,00
31.	Perjanjian Sewa tanggal 5 Juli 2024 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Khosim Kurniawan	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kelurahan Sumur Pacing, Kota Tangerang, Provinsi Banten	01 September 2024 sampai dengan 1 September 2026	Rp66.666.6665,00
32.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hj. Khoiriyah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp Batu Ceper, RT/RW. 01/05, Kecamatan Benda, Kota Tengerang, Provinsi Banten	17 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2025	Rp77.777.776,00
33.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 19 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Victor Anthony	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cilegon No. 8, Desa Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten	1 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2025	Rp88.888.888,00
34.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	H. Agus Triyana, S.pd	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Serang – Jakarta KM 10, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten	1 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2026	Rp53.333.333,00
35.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ir. Teguh Riyanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jombang Ruko Emerald Town House Blok A1 No. 16, RT001/RW007, Kelurahan	4 Mei 2023 sampai dengan 4 Mei 2026	Rp158.333.333,00
36.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ku Kian Tjiap	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Bogor No. 18 RT. 001, RW. 004 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2026	Rp155.555.555,00
37.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	H. Nurhasan Haschambar, S.H.	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cakung Barat RT. 003, RW. 008, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1 Januari 2024 sampai dengan 1 Januari 2026	Rp88.888.889,00
38.	Perjanjain Sewa Menyewa tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Kwee Tjioe Lin	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Cibening Indah Blok B/1A No. 25, RT. 004, RW. 016, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Kota Provinsi Barat Gede, Bekasi, Jawa	1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2025	Rp85.555.555,00
39.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat di	H Ujang Dedi	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Mayor	25 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2026	Rp62.222.222,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
	bawah tangan dan bermeterai cukup		Oking Jayaatmaja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat		
40.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Candra Susanto	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Jonggol Pasar Lama No. 10, RT002/RW002, Kelurahan Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Jonggol, Provinsi Jawa Barat	1 November 2023 sampai dengan 1 November 2025	Rp63.333.333,00
41.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 April 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Drs. Nur Qomari	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Pulo Gebang, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	21 Maret 2024 sampai dengan 21 Maret 2025	Rp88.888.889,00
42.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Supii	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Ruko Demangan Residen B-25, RT01/RW08, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur	1 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2026	Rp44.444.444,00
43.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Dra. Sulastri	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo No. 08, RT004/RW002, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	1 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2025	Rp44.444.444,00
44.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	H.M Nasir	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Modang No. 24, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogol, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur	1 April 2023 sampai dengan 31 Maret 2025	Rp133.333.333,00
45.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Choirotus Siami	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Haji Isa 3, RT. 023/RW. 000, Kelurahan Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	1 Mei 2024 sampai dengan 30 April 2025	Rp111.111.111,00
46.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 April 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Anriany Tansil	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pancasila No. 37C, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	9 Juni 2024 sampai dengan 9 Juni 2026	Rp100.000.000,00
47.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Rosida Anton	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pasar, Kelurahan Matani Kecamatan Tomohon Tengah, Kotamadya Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara	2 Desember 2023 sampai dengan 2 Desember 2025	Rp84.444.444,00
48.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 September 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Zainal Abidin	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. DI Panjaitan No. 65, Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	22 September 2023 sampai dengan 22 September 2025	Rp77.777.778,00
49.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Nelly Silviana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Ruko LaMargas No. R2, RT. 03, RW. 03, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat	13 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2025	Rp66.666.667,00

No.	Nama Perjanjian	Pihak Pemberi Sewa	Objek Sewa	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
50.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 12 Maret 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Vivi Valentina	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pahlawan No. 8 E, Kelurahan Duren Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	30 Maret 2024 sampai dengan 29 Maret 2025	Rp44.444.444,00
51.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 28 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Meliana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Parung, RT. 001, RW. 007, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	2 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2025	Rp127.777.778,00
52.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Sitti Aminah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Ir, RT000/RW000, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulauwesi Selatan	22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2027	Rp146.666.666,00
53.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Lindawati	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Muhtar Raya, RT005/RW003, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecmatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	24 Oktober 2023 sampai dengan 23 September 2025	Rp88.888.889,00
54.	Perjanjian Sewa tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Yeyet	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Imam Bonjol RT007/RW013, Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	17 Oktober 2024 sampai dengan 16 Oktober 2025	Rp50.000.000,00
55.	Perjanjian Sewa Menyewa 31 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	DR. Rita Erfita	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Jatiasih RT 008/ RW 005, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2025	Rp 77.777.778,00
56.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Maret 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hj. Arifah	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Kramat RT12/RW02, Jalan Raya Serang KM 30, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2026	Rp57.777.778,00
57.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Riski Trimaolana Mulyana	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Ciawi Gadog, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kota/Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	2 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2025	Rp66.666.667,00
58.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 September 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Sintara Maksum	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jagakarsa II RT/RW 0.13/001, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	1 Oktober 2023 sampai dengan 1 Oktober 2025	Rp55.555.555,00
59.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Diane Line	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Pondok Timur No. 368 Kp Rawa Sapi, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	13 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2025	Rp33.333.333,00
60.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Kho Siok Hoa	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pogidon Raya No. 2, Kelurahan Bitung Karangria, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2026	Rp111.111.111,00

E. Perjanjian Pinjaman Dengan Pihak Ketiga

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* Pinjaman per 30 Juni 2024
1.	Fasilitas Kredit *Executing Multifinance*	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Executing Multi Finance No. 84 tanggal 18 April 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	18 April 2023 sampai dengan 18 April 2025	7,00% per-*annum effective* (all tenor)	Rp81.615.978.121,00
2.	Fasilitas Kredit *Executing Multifinance*	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Executing Multi Finance No. 69 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Kemas Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat	PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	15 Desember 2023 sampai dengan 15 Desember 2027	7,00% per-*annum effective* (all tenor)	Rp174.746.833.046,00
3.	Fasilitas Kredit	Akta Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 28 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Lusiana Liana, S.H., M.Kn. selaku pengganti dari Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kesembilanbelas Perjanjian Kredit Nomor: 040/ADD-PK/LCCL/23 tanggal 3 Juli 2023	PT Bank Mega Tbk	31 Maret 2021 sampai dengan Tanggal Akhir atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.	untuk Fasilitas VI, 12,50% *fixed* per pencairan; untuk Fasilitas XI, untuk tenor 1 tahun sampai dengan 3 tahun sebesar, 10.00% *fixed* per pencairan	Rp 7.083.333.333
4.	Fasilitas Kredit Modal Kerja - *Fixed Loan*	Akta Perjanjian Kredit No. 111 tanggal 24 September 2020, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 204 tanggal 26 September 2023, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	29 September 2023 sampai dengan 29 September 2026	Fasilitas Kredit Modal Kerja Fiexed Loan 1 Uncomitted sebesar 7,4% fixed. Fasilitas Kredit Modal Kerja *Working Capital Installment Uncomitted* sebesar 7,75% per annum fixed.	Rp397.500.000.000,00
5.	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0060 tanggal 3 Juli 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kelima atas Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0060 tanggal 28 Maret 2024	PT Bank BTPN Tbk	3 Juli 2020 sampai dengan 31 Maret 2025.	6,77% per tahun dan telah dilakukan penarikan	Rp550.000.000.000,00
6.	Fasilitas Kredit Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)	Perjanjian Fasilitas No. PKS-JF.024/BSBSC/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022, sebagaimana	PT Bank BTPN Tbk	28 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2028	10,50% per tahun dan telah dilakukan penarikan	Rp229.610.897.309,00

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* Pinjaman per 30 Juni 2024
		terakhir kali diubah dengan Addendum III (Ketiga) atas Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama No. PKS.073/RLBJF/XI/2023 tanggal 1 November 2023				
7.	Fasilitas *Committed Term Loan Facility*	Perjanjian Fasilitas Perbankan/*Banking Facility Agreement* No. 045/PFP-DBSI/III/1-2/2024 tanggal 5 Maret 2024	PT Bank DBS Indonesia Tbk	5 Maret 2024 sampai dengan 14 Maret 2025	6,50% per tahun atau tingkat suku bunga lain yang disetujui oleh Para Pihak dengan jangka waktu bunga maksimum 3 bulan	Rp150.000.000.000,00
8.	Fasilitas *Committed Term Loan Facility*	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 320/PFP-DBSI/XI/1-2/2024 tanggal 28 November 2024	PT Bank DBS Indonesia Tbk	28 November 2024 sampai dengan 28 Desember 2027	Bunga 2 (dua) tahun sebesar 6,92% (enam koma sembilan dua persen) dan 3 (tiga) tahun sebesar 7,17% (tujuh koma tujuh belas persen) atau tingkat suku bunga lain yang disetujui oleh Para Pihak dengan jangka waktu bunga maksimum 3 bulan	Belum melakukan penarikan Fasilitas Kredit
9.	Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior Sebesar IDR365.000.000.000 tanggal 22 Agustus 2023	Standard Charter Bank, Jakarta Branch	22 Agustus 2023 sampai dengan 22 Agustus 2025	Pinjaman Tranche A untuk masing-masing Periode Bunga adalah 6,75% per tahun. Pinjaman Tranche B untuk masing-masing Periode Bunga adalah 6,70% per tahun.	Rp365.000.000.000,00
10.	Fasilitas Perbankan Kredit Modal Kerja	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/200762/U/00603981 tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan ke-2 terhadap *Corporate Facility Agreement* No. JAK/210853/U/00693804 tanggal 7 Desember 2021 dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Pemberian	PT Bank HSBC Indonesia	Jangka waktu maksimum 730 hari atau 2 tahun terhitung sejak Tanggal Pencairan.	7,2% per tahun, atau suku Bunga pinjaman. Lain yang disetujui bersama	Rp670.000.000.000,00

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* Pinjaman per 30 Juni 2024
		Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/212454/U/0084652 6 tanggal 25 April 2024				
11.	Fasilitas Kredit	Perjanjian Pinjaman No. Investasi 48819 tanggal 28 Maret 2024	International Finance Corporation	28 Maret 2024 sampai dengan 30 Juni 2028.	7,36% untuk pencairan pertama per 25 Juli 2024 dengan tenor 3 tahun	Rp323.800.000.000,00
12.	Fasilitas Kredit Pinjaman Komersial	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 047/PFK/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023	PT Bank Shinhan Indonesia	13 Desember 2023 sampai dengan 13 Desember 2025	JIBOR 3 bulan + 1,7%	Rp240.000.000.000,00
13.	Fasilitas Kredit Tanpa Komitmen	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 006/PFK/II/2023 tanggal 28 Februari 2023	PT Bank Shinhan Indonesia	28 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2025	JIBOR 3 bulan + 1,7%	Rp200.000.000.000,00
14.	Fasilitas Kredit dengan Komitmen	Perjanjian Kredit Nomor: 2021-0029081 tanggal 16 Agustus 2021, oleh dan antara MUFG Bank, Ltd. dan PT KB Finansia Multi Finance sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas No. 2023-0049994 tanggal 7 November 2023	MUFG Bank, Ltd.	Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025	*Cost of Funds* untuk jangka waktu bunga bersangkutan ditambah dengan marjin yang berlaku untuk suatu pinjaman dalam Rupiah. Marjin yang berlaku minimal 0.95% (nol koma sembilan puluh lima persen) per tahun.	Rp350.000.000.000,00 Tidak ada fasilitas MUFG Bank, Ltd. yang belum ditarik.
15.	Fasilitas Pinjaman Berjangka	Perjanjian Fasilitas No. 2022-0026723 tanggal 23 Agustus 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas No. 2023-0049994 tanggal 7 November 2023	MUFG Bank, Ltd.	Sampai dengan tanggal 7 November 2025	Suku bunga tetap sebesar 7,55% untuk 3 tahun	Rp200.000.000.000,00 Tidak ada fasilitas MUFG Bank, Ltd. Yang belum ditarik.
16.	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 94 tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 50 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta.	PT Bank Permata Tbk	30 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2026	7,54% per tahun dan telah dilakukan penarikan	Rp184.166.666.666,00
17.	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO-KP/KMK/202022 dan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2027	Suku bunga pinjaman	Rp77.916.666.651,00

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* Pinjaman per 30 Juni 2024
		No. 77 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta			fasilitas kredit dengan tenor: - sampai dengan 1 tahun sebesar 6,75% per annum. - lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun sebesar 6,75% per annum. - lebih dari 3 sampai dengan 4 tahun sebesar 7,00% per annum.	
18.	Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka	Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 10 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Robertus Bima Wahyu Mahardika, S.H., M.H., Notaris Pengganti dari Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 4 Juni 2024, yang dibuat dihadapan Ester Septarini, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	sampai dengan tanggal 29 Januari 2027	7,45% per tahun dan telah dilakukan penarikan	Rp434.722.222.222,00
19.	Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB *Line*)	Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 27 Februari 2024, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Jago Tbk	PAB-1 sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2029 PAB-2 sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Januari 2029 PAB-3 sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2027 PAB-4 sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2029	Tenor sampai dengan 36 bulan sebesar 7,00% efektif per tahun Tenor 37 bulan sampai dengan 48 bulan sebesar 7,25% efektif per tahun.	Rp494.583.709.215,00
20.	Fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka *Executing*	Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	13 Juli 2023 sampai dengan 13 Juli 2027	7,58% per tahun, untuk tenor maksimum 36 bulan, fixe rate per pencairan.	Rp394.305.555.556,00
21.	Fasilitas Kredit *Installment Loan*	Akta Perjanjian Kredit No. 40 tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan	PT Bank Central Asia Tbk	maksimal 3 tahun dari setiap realisasi/penarikan	7% per tahun fixed rate	Rp191.666.666.667,00

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* Pinjaman per 30 Juni 2024
		Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta				
22.	Fasilitas Kredit *Installment Loan*	Akta Perjanjian Kredit No. 181 tanggal 19 Maret 2024, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta	PT Bank Central Asia Tbk	maksimal 3 tahun dari setiap realisasi/penarikan	7% per tahun *fixed rate* per pencairan selama tenor penarikan di atas 1 tahun sampai dengan maksimal 3 tahun dengan penarikan maksimal Maret 2024 7,5% per tahun *fixed rate* selama masa tenor pernarikan di atas 1 tahun sampai dengan maksimal 3 tahun dengan penarikan maksimal Maret 2024	Rp45.833.333.333,00

F. Perjanjian Kredit Dengan Pihak Afiliasi

No.	Jenis Fasilitas	Nama Perjanjian	Kreditur	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jumlah *Outstanding* Pinjaman Per 30 Juni 2024
1.	Fasilitas Kredit *Reguler*	Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. LII/008/KB-BUKI/PK-REG/IX/2022 tanggal 7 September 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. LIV/008/BUKI/ADD-PK-REG/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Bank KB Bukopin Tbk	16 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2025	JIBOR 3 bulan + 1,4%, terhitung sejak tanggal pencairan pertama dari jumlah Pinjaman sampai dengan tanggal pelunasan Pinjaman.	Rp250.000.000.000,00

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki bidang-bidang tanah yang terdiri dari 1 (satu) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun ("**SHMSRS**") dan 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") sebagai berikut:

No.	Keterangan	Sertipikat Tanah	Luas	Lokasi
1.	Office 8, Lantai 12A (Head Office)	Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 1881 yang diterbitkan tanggal 28 Agustus 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2028.	194,54 m^2	Gedung Office 8, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

No.	Keterangan	Sertipikat Tanah	Luas	Lokasi
2.	Ruko Samarinda	SHGB No. 22 yang diterbitkan tanggal 29 Mei 2003 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Mei 2033.	324 m^2	Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Ruko Grand Wijaya (Jl. Wijaya Graha Puri Blok F/ 3)	SHGB No. 868 yang diterbitkan tanggal 11 Januari 1988 dan berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2027.	71 m^2	Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
4.	Ruko Tebet - Royal Palace	SHGB No. 01479 yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2052.	81 m^2	Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Total nilai aset tetap - bersih yang dimiliki Perseroan pada tanggal 30 Juni 2024 adalah Rp127.847 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

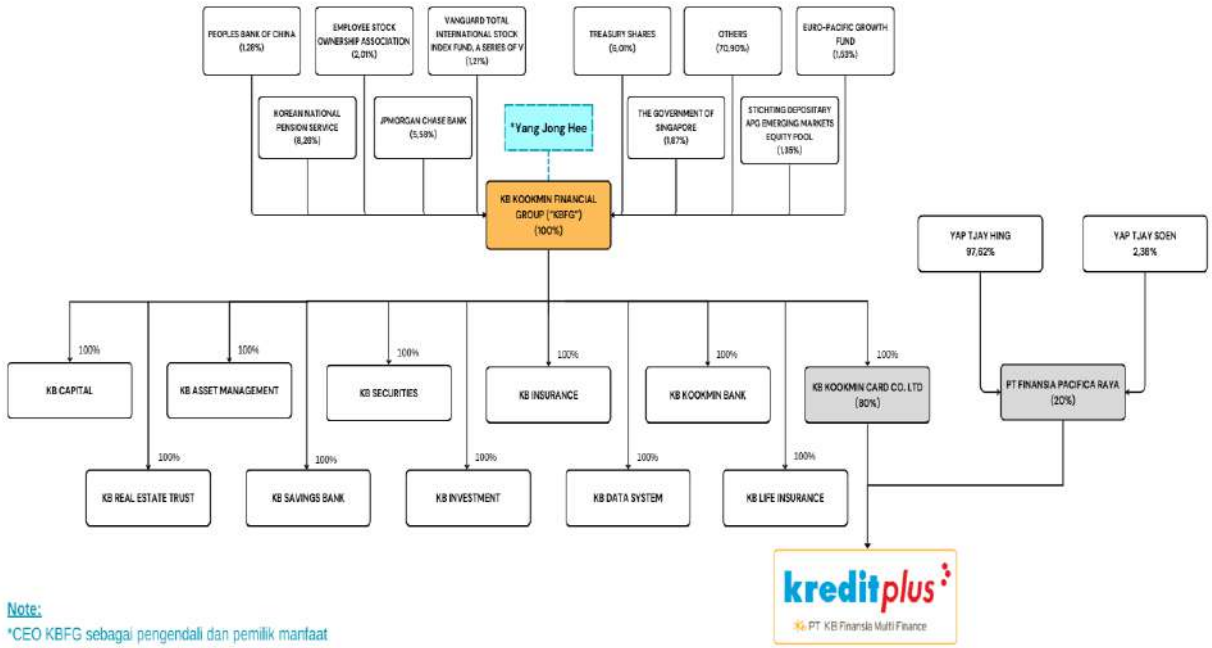
Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	5.762	-	5.762
Bangunan	10.495	6.441	4.054
Renovasi Bangunan	112.281	82.811	29.470
Kendaraan	5.312	4.589	723
Perabot dan Perlengkapan Kantor	15.512	13.189	2.323
Peralatan Kantor	196.852	113.457	83.395
Aset dalam Penyelesaian	2.120	-	2.120
Total Aset Tetap	**348.334**	**220.487**	**127.847**

Pada tanggal 30 Juni 2024, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset berupa deposito berjangka, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bank	Jumlah	Bunga	Periode
1.	PT Bank KB Bukopin Tbk	Rp10.000.000.000	4,50% p.a.	30 Juni 2024 - 30 Juli 2024 Automatic Roll Over (ARO)
	Total	**Rp10.000.000.000**		

6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini diagram yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:



Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Yang Jong Hee. Perseroan telah menyampaikan pengkinian informasi terkait Pemilik Manfaat dari Perseroan pada sistem AHU online pada 11 November 2024 sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres No. 13/2018.

Perseroan telah menetapkan pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah KB Kookmin Card Corp.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham utama berbentuk badan hukum, adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	PT KB Kookmin Card Corp	PT Finansia Pacifica Raya
Moon Cheol Kang	KU	-	-
Nursalam Andi Tabusalla	KI	-	-
Yap Tjay Hing	DU	-	K
Kisup Wi	Wakil DU	-	-
Peter Halim	D	-	-
Hery Susanto Dermawan	D	-	-
Hea Swan Lah	D	-	-
Martina Hariyanto	D	-	-
Choi, Ho Jung	D	-	-
Yap Tjay Soen	-	-	D
Lee Chang Kwon	-	CEO	-
Cho Seong Joon	-	D	-
Choi Ja Young	-	D	-
Yoon Jeung Hyeon	-	D	-

Nama	Perseroan	PT KB Kookmin Card Corp	PT Finansia Pacifica Raya
Lee Jongn Eun	-	D	-
Kim Kyeong Ho	-	D	-
Kim Jae Gwan	-	D	-

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

7. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah keterangan singkat tentang pemegang saham berbentuk badan hukum:

1. KB Kookmin Card Corp

Berdasarkan *Certificate of Seal Impression* yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Pusat Seoul (Pencatat Jungbu) tertanggal 5 November 2019, KB Kookmin Card Corp, selaku pemegang saham pengendali dari perseroan telah terdaftar di Korea Selatan dengan nomor pendaftaran usaha 110111-4546523.

Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Pengendali tanggal 29 November 2019 dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang Diaudit untuk periode 31 Desember 2021 dan 2020, yang telah disediakan oleh Perseroan, KB Kookmin Card Corp dimiliki oleh KB Financial Group Inc. dengan kepemilikan saham sebanyak 92.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per saham sebesar 5.000 won per lembar saham.

Keterangan	Nilai Nominal ₩5.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (₩)	
Modal Dasar	92.000.000	460.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- KB Financial Group Inc.	92.000.000	460.000.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**92.000.000**	**460.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**-**	**-**	

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan tanda terima laporan realisasi investasi secara langsung di luar negeri oleh KB Kookmin Card Corp yang diterbitkan oleh Financial Services Commission pada tanggal 10 December 2019, KB Kookmin Card Corp. memiliki spesialisasi usaha di bidang pemberian pinjaman (perusahaan pembiayaan). Lebih lanjut *registry* dari KB Kookmin Card, Co., Ltd. No. 454652 yang dikeluarkan oleh Seoul Central District Court Department of Registration menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari KBC antara lain sebagai berikut:

1. penerbitan, penjualan dan pengelolaan kartu kredit, kartu prabayar, kartu debit (selanjutnya disebut kartu kredit) dan uang elektronik;
2. pembayaran terkait penggunaan kartu kredit (termasuk persetujuan transaksi);
3. rekrutmen dan pengelolaan anggota dan afiliasi kartu kredit;
4. pinjaman dana untuk anggota kartu kredit;
5. bertindak atas nama dan mendelegasikan tugas 1 sampai 4 sesuai dengan undang-undang yang relevan;
6. jasa fasilitas sewa;
7. penjualan pembayaran yang ditangguhkan;
8. pinjaman kredit dan pinjaman yang dijamin termasuk pembiayaan angsuran;
9. layanan diskon tagihan;
10. perolehan, pengelolaan dan penagihan piutang usaha yang diperoleh melalui penyediaan barang dan jasa perusahaan;

11. membeli obligasi yang dipegang oleh perusahaan pembiayaan kredit khusus lainnya dan bersamaan dengan pinjaman bisnis operasi, atau jaminan yang diberikan, sehubungan dengan bisnis pada poin 1 sampai dengan 10;
12. investigasi kredit terkait dengan bisnis di bawah 1 sampai 10;
13. bisnis manajemen informasi kredit pribadi;
14. bisnis kredit rating individual;
15. bisnis jaminan pembayaran;
16. usaha lain untuk tujuan pemberian kredit;
17. bisnis agen asuransi;
18. bisnis travel umum;
19. bisnis *telemarketing*;
20. bisnis teknologi keuangan;
21. investasi ekuitas dan investasi terkait dengan bisnis ventura;
22. internet dan *e-business*;
23. bisnis dan investasi bisnis terkait *e-commerce;*
24. layanan komunikasi tambahan;
25. agensi untuk penjualan sertifikat pemberian, tiket lotere dan semacamnya;
26. agensi produksi kartu;
27. perolehan dan penggunaan sekuritas;
28. bisnis valuta asing;
29. bisnis sewa properti;
30. bisnis pemborongan dan *retail*;
31. publikasi dan publikasi buku sehubungan dengan pekerjaan;
32. bisnis lain yang diizinkan oleh *Specialized Credit Finance Business Act* dan ketentuan hukum sejenis;
33. bisnis lain yang diizinkan oleh *Ministry* dan ketentuan hukum sejenis Minisry of Strategy and Finance dan the Financial Supervisory Service;
34. bisnis penyewaan sistem *computer*; dan
35. bisnis lainnya terkait dengan investasi.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Certificate of Entire Registered Items dengan Registry No. 454652 yang dikeluarkan oleh Seoul District Court Registry Office tanggal 28 Agustus 2024 menjelaskan bahwa susunan direksi dari KBC adalah sebagai berikut:

Chief Executive Officer/Inside Director	:	Lee Chang Kwon
Inside Director/Auditor	:	Kim Kyeong Ho
Outside Director	:	Yoon Jeung Hyeon
Outside Director	:	Cho Seong Joon
Outside Director/Auditor	:	Choi Ja Young
Outside Director/Auditor	:	Lee Jong Eun
Non-Executive Director	:	Kim Jae Gwan

2. PT Finansia Pacifica Raya ("FPR")

FPR, didirikan dengan nama PT Finansia Pacifica Raya, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 8 April 1996, yang dibuat di hadapan Milly Karmila Sareal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 02-7902 HT.01.01.Th.96 tanggal 28 Juni 1996, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No. 32/BH09.05/VIII/1996 tanggal 9 Agustus 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 1996, Tambahan No. 8623 ("**Akta Pendirian FPR**").

Pendirian FPR telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi FPR.

Anggaran Dasar FPR yang dimuat dalam Akta Pendirian FPR telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Finansia Pacifica Raya No. 14 tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Adminstrasi Badan Hukum sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0129221 tanggal 16 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205608.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 16 Oktober 2023 ("**Akta No. 14/2023**").

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Finansia Pacifica Raya No. 36 tanggal 13 September 2023, yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan No. AHU-0055432.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0181854.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 September 2023, para pemegang saham FPR telah menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar FPR sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari FPR.

Terkait dengan permodalan FPR terakhir diubah dan dimuat dalam Akta No. 14/2023. Berdasarkan Akta No. 14/2023, para pemegang saham FPR telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp31.000.000.000,- (tiga puluh satu miliar Rupiah) terbagi atas 31.000.000 (tiga puluh satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah).

Anggaran Dasar FPR sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian FPR beserta perubahannya tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar FPR**".

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar FPR, maksud dan tujuan FPR adalah berusaha berusaha dalam bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, FPR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. Real estat yaitu real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
2. Real estat atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
3. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; dan
4. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham FPR terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 14/2023, para pemegang saham FPR telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar FPR, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp21.000.000.000 (dua puluh satu miliar Rupiah) menjadi Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah) dimana peningkatan modal tersebut diambil oleh Yap Tjay Hing sebesar 97,62% dan Yap Tjay Soen sebesar 2,38% dari nilai nominal setiap saham telah ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada FPR oleh masing-masing pemegang saham dengan cara:

a. Sebesar Rp9.761.905.000 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima ribu Rupiah) disetor dengan uang tunai oleh Yap Tjay Hing; dan

b. Sebesar Rp238.095.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu Rupiah) disetor uang tunai oleh Yap Tjay Soen.

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FPR berdasarkan Akta No. 14/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 40.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 31.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp 31.000.000.000

Modal Dasar FPR terbagi atas 40.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 1.000.

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
Modal Dasar		**40.000.000**	**40.000.000.000**	
1.	Yap Tjay Hing	30.261.905	30.261.905.000	97,62
2.	Yap Tjay Soen	738.095	738.095.000	2,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		**31.000.000**	**31.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**9.000.000**	**9.000.000.000**	**-**

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Finansia Pacifica Raya No. 36 tanggal 18 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Vivi Novita Ranadireksa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Adminstrasi Badan Hukum sebagaimana dibuktikan dalam Surat No. AHU-AH.01.09.0142530 tanggal 21 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137954.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris FPR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Yap Tjay Hing

Direksi
Direktur : Yap Tjay Soen

8. PENGURUS DAN PENGAWAS

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 93 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0287790 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0112408.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 131/Srt-KBFMF/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 ("**Akta No. 93/2020**"); (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 8 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0225393 tanggal 9 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065727.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 9 April 2021, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 51/Srt-KBFMF/I/2021 tanggal 12 April 2021 ("**Akta No. 52/2021**"); (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 06 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030147 tanggal 06 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0129000.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 06 Juli 2022, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 83/Srt-KBFMF/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 ("**Akta No. 23/2022**"); (iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 18 Nopember 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077571 tanggal 18 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0231982.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 November 2022, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 131/Srt-KBFMF/XI/2022 tanggal 21 November 2022 ("**Akta No. 80/2022**"), (v) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144272 tanggal 26 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141523.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juli 2023, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 72/Srt-KBFMF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 ("**Akta No. 122/2023**"); (vi) Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan

telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0181727 tanggal 6 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222084.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 99/Srt-KBFMF/XI/2023 tanggal 6 November 2023 ("**Akta No. 6/2023**"), (vii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 4 April 2024, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0138674 tanggal 4 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0070868.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 4 April 2024, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 26/Srt-KBFMF/IV/2024 tanggal 5 April 2024 ("**Akta No. 33/2024**"), dan (viii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 131 tanggal 25 Juli 2024, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0231390 tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0152674.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Juli 2024, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 73/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 ("**Akta No. 131/2024**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Moon Cheol Kang*)
Komisaris Independen	:	Nursalam Andi Tabusalla

**) Tidak berdomisili di Indonesia*

Direksi

Direktur Utama	:	Yap Tjay Hing
Wakil Direktur Utama	:	Kisup Wi
Direktur	:	Peter Halim
Direktur	:	Hery Susanto Dermawan
Direktur Pemasaran	:	Sea Hwan Lah
Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs	:	Martina Hariyanto
Direktur	:	Choi, Ho Jung

Seluruh anggota Direksi Perseroan menetap di Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai pembatasan rangkap jabatan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Moon Cheol Kang, Komisaris Utama

Warga negara Korea, 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Arkeologi dan Sejarah dari Seoul National University pada tahun 1997. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juli tahun 2024. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

Januari 2024 – saat ini		*Managing Director* Grup Bisnis Global, KB Kookmin Card
2020 – Desember 2023	:	Manajer Umum Departemen Manajemen Resiko, KB Kookmin Card
2017 – Januari 2020	:	Kepala Tim Departemen Manajemen Resiko, KB Kookmin Card

2016 – Januari 2017	:	Wakil Kepala Cabang pada cabang Dongrae, KB Kookmin Card
2011 – Januari 2016	:	*Associate* Departemen Manajemen Resiko, KB Kookmin Card
2010 – Maret 2011	:	*Associate* department CRM dan Analisis Kartu Kredit, KB Kookmin Card
2007 – Nopember 2010	:	*Associate* Departemen Risiko Pemasaran dan Operasional, KB Kookmin Card
2006 – Januari 2007	:	*Associate* Kantor Cabang Boramae, KB Kookmin Card
2005 – Februari 2006	:	*Associate* Managemen Risiko Kartu Kredit, KB Kookmin Card
2003 – Oktober 2005	:	*Associate* dan Asisten Manajer di Tim Pemasaran dan Perencanaan Kartu Kredit, KB Kookmin Card
1998 – September 2003	:	Asisten Manager di Departemen Perencanaan, KB Kookmin Card
Juli 1998 – Desember 1998	:	Staff Departemen Dukungan Pelanggan, KB Kookmin Card
1997 – Januari 1998	:	Staf di Kantor Cabang, KB Kookmin Card
1996 – Januari 1997	:	Staf pada Departemen *General Affairs,* KB Kookmin Card

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Nursalam Andi Tabusalla, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 66 tahun. Meraih gelar Sarjana Bachelor of Business Administration dari University of San Francisco pada tahun 1983. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015. Selain menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

2018 - saat ini	:	Direktur PT Multi Berkat Energi
2003 - saat ini	:	Direktur PT Massada Komunikasi
2003 - 2019	:	Direktur PT Indohartama Sentra
2003 - 2019	:	Direktur PT INNI Sarana Golf Indonesia
2000 - 2003	:	General Manager PT Ariewest Indonesia
1989 - 2000	:	Wakil Direktur Utama Chase Manhattan Bank
1985 - 1988	:	Ass. Manager Individual Banking Division, Chase Manhattan Bank
1984 - 1985	:	Ass. Manager Operation and System Division, Chase Manhattan Bank

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Direksi



Yap Tjay Hing, Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 70 tahun.
Meraih gelar Bachelor of Engineering dari University of McGill pada tahun 1977 dan gelar Master of Business Administration dari University of Toronto pada tahun 1980. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2000. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

2000 - saat ini	:	Direktur Utama, PT KB Finansia Multi Finance
2018 - saat ini	:	Komisaris PT Finansia Pacifica Raya
2013 - saat ini	:	Komisaris PT Siwarga Indo Media
1995 - 2002	:	Direktur Sumber Daya Manusia & Urusan Korporasi, PT. Ariawest International (a Telkom and AT &T Joint Venture dengan Keluarga Soeryadjaya)
1992 - 1995	:	Direktur Eksekutif Djuhar Group (grup Salim)
1989 - 1992	:	*Country Financial Manager* Chase Manhattan Bank
1987 – 1992	:	Komisaris Utama PT PT Chase Leasing Indonesia
1987 - 1988	:	Wakil President Manajer Keuangan Negara (*Vice President Country Financial Manager*), Chase Manhattan Bank
1987 - 1989	:	Direktur Utama PT Chase Leasing Indonesia
1982 - 1987	:	Manajer Chase Manhattan Bank
1980 - 1982	:	Spesialis Perencanaan Keuangan, General Foods Kanada

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Kisup Wi, Wakil Direktur Utama

Warga negara Korea, 48 tahun. Meraih gelar Bachelor of Public Administration dari Yonsei University, Korea Selatan pada tahun 2002 dan Master of Business Administration and Law dari Yonsei University, Korea Selatan pada tahun 2012. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak bulan Maret tahun 2024. Selain menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

2021 – Maret 2024	:	Direktur Keuangan, PT KB Finansia Multi Finance
2019 - 2020	:	Kepala Tim Bisnis Global, KB Kookmin Card
2013 - 2019	:	Kepala Tim Perencanaan Keuangan, KB Kookmin Card
2011 - 2012	:	Manajer Perencanaan Strategis, KB Kookmin Card
2003 - 2010	:	Asisten Manajer Departemen Pendukung Operasional dan Proses, KB Kookmin Bank

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Peter Halim, Direktur

Warga negara Indonesia, 52 tahun.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

2003 - 2008	:	Chief Financial Officer, PT Finansia Multi Finance
1995 - 2003	:	Audit Manager, Deloitte Touche Tohmatsu

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Hery Susanto Dermawan, Direktur

Warga negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1993. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

2006 - 2016	:	Senior General Manager, PT Finansia Multi Finance
2002 - 2006	:	*Operation Director*, PT Artha Persada Finance
1996 - 2002	:	Regional Operation Manager, PT Primaswadana Perkasa Finance
1993 -1996	:	Asisten Supervisor Audit, Deloitte & Touche Tohmatsu

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Sea Hwan Lah, Direktur Pemasaran

Warga negara Korea, 49 tahun. Meraih gelar Bachelor of Chinese Studies dari Catholic University, Korea Selatan pada tahun 2012. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak November tahun 2022. Selain menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

Nov 2020 – Nov 2022	:	Penasihat Pemasaran dan Operasional, PT KB Finansia Multi Finance
2019 - 2020	:	Deputy General Manager Departemen Bisnis Global, KB Kookmin Card
2011 - 2019	:	Senior Manager Departemen Perencanaan Penjualan, KB Kookmin Card
2003 - 2011	:	Manajer Pemasaran Kartu Kredit, KB Kookmin Bank
2002	:	Associate Branch Sales, KB Kookmin Card

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan**.**



Martina Hariyanto, Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs

Warga negara Indonesia, 60 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1987. Menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Perseroan sejak Juni tahun 2023. Selain menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

Juni 2023 – saat ini	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affair, PT. KB Finansia Multi Finance
Juli 1997 – Mei 2023	:	*Head of Human Resources & General Affairs*, PT. KB Finansia Multi Finance
Des 1994 – Juni 1997	:	*Customer Service Manager,* PT GE Astra Finance
Juni 1992 – Nov 1994	:	*Head of Administration* dan HRD & *General Affairs,* PT Adiputra Sumber Sedaya Finance
Jan 1990 – Mei 1992	:	*HRD & General Affairs Assistant Manager Corporate,* PT Astra Sedaya Finance
Jan 1988 – Des 1989	:	*Management Improvement Staff & Management Trainee,* PT Astra Sedaya Finance

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Choi, Ho Jung, Direktur

Warga negara Korea, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Managemen Bisnis dari Hongik University pada tahun 2007, Magister Ekonomi dari Ilinois University, Amerika Serikat pada tahun 2011 dan Magister Applied Statistic dari Cornell University, Amerika Serikat pada tahun 2011. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juni tahun 2023. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain antara lain:

Nov 2020 – Mei 2023	:	Penasihat bagian Managemen Risiko, PT KB Finansia Multi Finance
Juli 2017 – Nov 2020	:	Manager Bisnis Global, KB Kookmin Card Corp
Juli 2011 – Juli 2017	:	Asisten Manajer Management Risiko, KB Kookmin Card Corp

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* – GCG)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sebuah struktur dan proses yang digunakan dalam organ Perseroan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

Perseroan selalu berusaha untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan selalu berpedoman pada praktek bisnis terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 29 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah:

- **Prinsip Keterbukaan**
  Dalam mewujudkan keterbukaan, Perseroan menyediakan berbagai informasi yang relevan mengenai Perseroan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Seperti dengan penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan yang disampaikan ke pemegang saham, regulator ataupun publik melalui media cetak atau sarana publikasi yang dimiliki Perseroan.

- **Prinsip Akuntabilitas**
  Prinsip Akuntabilitas diterapkan melalui optimalisasi fungsi Audit Internal dan mekanisme penunjukan auditor eksternal yang independen untuk memastikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban masing-masing organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

- **Prinsip Pertanggungjawaban**
  Prinsip Pertanggungjawaban dalam mengelola dan menyelenggarakan usaha pembiayaan telah diterapkan oleh Perseroan dengan cara melaksanakan usaha pembiayaan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

- **Prinsip Kemandirian**
  Perseroan dikelola oleh masing-masing organ perusahaan secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, sesuai dengan ketentuan mengenai tugas dan wewenang dari Dewan Komisaris dan Direksi yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Standar Prosedur Operasi.

- **Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran**
  Perseroan selalu menjaga kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan atas hak dari seluruh Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Dewan Komisaris

Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen Perseroan dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan meninjau pengelolaan Perseroan dan memberikan saran kepada Direksi menurut keputusan-keputusan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan sesuai ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

1. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan meninjau pengelolaan Perseroan dan memberikan saran kepada Direksi menurut keputusan-keputusan Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, catatan dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris berhak untuk menangguhkan sementara anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak berlawanan dengan kepentingan-kepentingan terbaik Perseroan atau secara lain berlawanan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
5. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris, dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya.
6. Dewan komisaris harus, melalui suara mayoritas sederhana dari Dewan Komisaris, membentuk dan memelihara keberadaan pada setiap saat, suatu komite audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Tanggung jawab komite audit mencakup membantu Dewan Komisaris dalam:
   a. memantau dan memastikan efektifitas system kendali internal; dan
   b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas auditor internal dan eksternal, guna menilai kecukupan kendali-kendali internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih. Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi ("**Rapat Bersama**") secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama enam bulan pertama tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat Dewan Komisaris dan 2 (dua) kali Rapat Bersama, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran (%)	
		Rapat Dewan Komisaris	Rapat Gabungan
1. Song Yong Hun[*)]	Komisaris Utama	100	100
2. Moon Cheol Kang[**)]	Komisaris Utama	-	-
3. Nursalam Andi Tabusalla	Komisaris Independen	100	100

[*)] Beliau resmi mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama Perseroan tanggal 15 Februari 2024.
[**)] Beliau efektif menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test)* dari OJK, yakni 18 Juli 2024.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan RUPS. Dewan komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dalam hal ini mempertimbangkan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta kemampuan finansial Perseroan. Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan daya saingnya di industri. Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp507.071.402,-, Rp856.014.219,-, dan Rp808.366.900,-.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai objektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Tugas dan wewenang Direksi antara lain:

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan aset-aset Perseroan dengan tunduk pada pembatasan-pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Kewenangan Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk:
1. penandatanganan dan perubahan atas ketentuan dari, seluruh perjanjian, kontrak, kesepakatan atau transaksi di mana seorang Direktur, Komisaris atau pemegang saham atau suatu afiliasi dari mereka mempunyai suatu kepentingan keuangan atau manfaat langsung atau tidak langsung;
2. persetujuan atau pembuatan penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan pada ketentuan dari transaksi-transaksi yang melibatkan kepentingan-kepentingan dari tiap Direktur, Komisaris atau pemegang saham;
3. pembuatan kontrak di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
4. pemberian jaminan atau ganti rugi di luar dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan konsisten dengan praktik/kebiasaan masa lalu;
5. menjual, mentransfer, mengalihkan, melisensikan, membebankan, menciptakan suatu pembebanan pada atau secara lain melepas atau hal-hal yang berkaitan dengan merek dagang, paten, hak cipta nama domain atau kekayaan intelektual lain milik Perseroan;
6. melakukan peminjaman atau utang atau kewajiban lain yang bersifat peminjaman (termasuk, tanpa batasan, kewajiban kewajiban menurut tiap debenture, obligasi, surat utang, efek pinjaman atau sekuritas lain dari suatu Grup Perusahaan dan kewajiban kewajiban berdasarkan sewa menyewa pembiayaan) di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) per transaksi; dan
7. pemberian beban atau jaminan atau pembebanan pada atau atas aset Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak kekayaan intelektual Perseroan) atau jaminan-jaminan di luar dari kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan sesuai dengan praktik/kebiasaan masa lalu.

Dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi memiliki kewenangan untuk:
1. menambah atau mengurangi jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, memberikan tiap opsi atau kepentingan lain (dalam bentuk waran, sekuritas yang dapat dikonversi atau dalam bentuk lain) atas atau dalam modal sahamnya, menebus atau membeli sebagian dari saham-saham Perseroan sendiri atau melakukan reorganisasi lain atas modal sahamnya;
2. membuat tiap keputusan untuk pembubaran Perseroan atau menyampaikan tiap peromohonan administrasi terkait dengan pembubaran Perseroan selain berdasarkan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pemegang saham, kecuali jika Perseroan telah menjadi insolven;
3. mengubah dalam tiap aspek dalam Anggaran Dasar atau hak-hak yang melekat pada saham apa pun dalam Perseroan;
4. secara substansial berhenti menjalankan kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan dengan cara yang biasa dilakukan oleh Perseroan saat tanggal efektif Akta ini, atau mengubah sifat kegiatan usaha Perseroan;
5. melakukan tindakan akuisisi atau pelepasan oleh Perseroan atas aset dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total modal saham ditempatkan Perseroan dari waktu ke waktu; dan
6. menandatangani suatu perjanjian atau pengaturan tiap pemegang saham atau tiap anggota Grup dari suatu pemegang saham (yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang wajar).

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu. Selama enam bulan pertama tahun 2024, Direksi Perseroan telah mengadakan 6 (enam) kali rapat Direksi dan 2 (dua) kali Rapat Bersama, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran (%)	
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan
1. Yap Tjay Hing	Direktur Utama	100	100
2. Kisup Wi	Wakil Direktur Utama	100	100
3. Peter Halim	Direktur	100	100
4. Hery Susanto Dermawan	Direktur	100	100
5. Choi, Ho Jung	Direktur	100	100
6. Sea Hwan Lah	Direktur Pemasaran	100	100

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran (%)	
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan
7. Martina Hariyanto	Direktur Sumber Daya Manusia & General Affairs	100	100

Jumlah remunerasi yang diterima Direksi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.227.998.239,-, Rp45.383.651.808,-, dan Rp32.189.261.737,-.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan dari waktu ke waktu mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Selama enam bulan pertama tahun 2024, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti pelatihan dan seminar, antara lain:

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara
1. Yap Tjay Hing	1) Seminar Nasional bertumbuh dalam pengaturan UU P2SK	APPI
	2) Development and strengthening Multifinance Industry in Indonesia	APPI
	3) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance
2. Kisup Wi	1) Development and strengthening Multifinance Industry in Indonesia	APPI
	2) The Fed's Interest and enhancing Market Share Through Technologies Transformation	APPI
	3) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance
3. Peter Halim	1) Seminar Nasional bertumbuh dalam pengaturan UU P2SK	APPI
	2) The Fed's Interest and enhancing Market Share Through Technologies Transformation	APPI
	3) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance
4. Hery Susanto Dermawan	1) Tantangan Pembiayaan di tengah Perubahan Geopolitik dan Ekonomi	APPI
	2) The Fed's Interest and enhancing Market Share Through Technologies Transformation	APPI
	3) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance
5. Choi, Ho Jung	1) Tantangan Pembiayaan di tengah Perubahan Geopolitik dan Ekonomi	APPI
	2) The Fed's Interest and enhancing Market Share Through Technologies Transformation	APPI
	3) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance
6. Sea Hwan Lah	1) Tantangan Pembiayaan di tengah Perubahan Geopolitik dan Ekonomi	APPI
	2) The Fed's Interest and enhancing Market Share Through Technologies Transformation	APPI
	3) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance
7. Martina Hariyanto	1) Seminar Nasional bertumbuh dalam pengaturan UU P2SK	APPI

Nama	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara
	2) Development and strengthening Multifinance Industry in Indonesia	APPI
	3) The Fed's Interest and enhancing Market Share Through Technologies Transformation	APPI
	4) Personal Data Protection Training for Senior Leadership Team	PT KB Finansia Multi Finance

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Sdr. Antonius Padua Wisuda Adhitama sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/ KBFMF/CC-BOD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Adapun alamat sekretaris perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Antonius Padua Wisuda Adhitama
Gedung Office 8 Lantai 15, SCBD Lot. 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telp.: (021) 2933 3646
Faksimile: (021) 2933 3648
Situs web: www.kreditplus.com
Email: corsec@finansia.com

Antonius Padua Wisuda Adhitama. Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada bulan Maret 2022. Meraih gelar Sarjana Hukum Bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000 dan gelar Magister International Economic & Business Laws dari Universitas Rijksuniversiteit Groningen, Belanda pada tahun 2003. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Corporate Legal Manager Perseroan (2008-2013), Legal & Compliance Department Head PT Nissan Financial Service Indonesia (2013-2016), Legal & Risk Management Counsel PT Sampoerna Wirausaha (2017), dan Legal, Risk & Compliance Senior Manager Perseroan (2017-2022).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain adalah:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, asosiasi dan lembaga berwenang lainnya. Selama enam bulan pertama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, antara lain:

No.	Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Penyelenggaraan
1.	Webinar: *Connecting the Dots*	OJK Institute	11 Januari 2024
2.	*Online Workshop - Media Handling: Maintaining Company Reputation and Public Trust*	Indonesia Corporate Secretary Association	1 Februari 2024
3.	*Online Workshop: Understanding the Intersection of ESG and Cyber Security*	Indonesia Corporate Secretary Association	6 Februari 2024
4.	Webinar: Peran UU P2SK dalam Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Jasa Keuangan Ilegal	OJK Institute	15 Februari 2024
5.	Webinar: *Outlook* Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024	OJK Institute	22 Februari 2024
6.	Webinar: Strategi Mencegah Serangan Siber	OJK Institute	29 Februari 2024
7.	Webinar: *Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector*	OJK Institute	7 Maret 2024
8.	*Online Workshop*: Pendalaman POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik	Indonesia Corporate Secretary Association	7 Maret 2024
9.	Webinar: Peluang dan Tantangan Aset Digital di Indonesia	OJK Institute	14 Maret 2024
10.	Webinar: Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah	OJK Institute	21 Maret 2024
11.	Webinar: Peluang dan Tantangan *Open Finance* di Indonesia	OJK Institute	25 April 2024
12.	Webinar: *How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector*	OJK Institute	2 Mei 2024
13.	*Online Workshop: The Importance of Government Relations in Organizations*	Indonesia Corporate Secretary Association	2 Mei 2024
14.	Webinar: *How to Prevent Greenwashing in Sustainable Finance*	OJK Institute	16 Mei 2024
15.	Webinar: Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit	OJK Institute	22 Mei 2024
16.	*Online Workshop - The ESG Ratings Phenomenon: What, Why, and How*	Indonesia Corporate Secretary Association	29 Mei 2024
17.	Webinar: Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital	OJK Institute	30 Mei 2024
18.	Regulatory Roundtable Series Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 From Compliance to Confidence: Enhancing Integrity and Competitiveness with Regulatory Compliance Audits	Hukumonline	31 Mei 2024
19.	Webinar - Strategi Pemasaran Digital di Era Digital: Taktik dan Langkah Efektif Mencetak Profit Optimal	OJK Institute	5 Juni 2024

Komite Dibawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024, dengan susunan anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : Yap Tjay Hing
Anggota : Kisup Wi

Anggota	:	Peter Halim
Anggota	:	Choi, Ho Jung
Anggota	:	Ka Nen
Anggota	:	Marie Yovanka Engelina
Anggota	:	Daniel Adrian

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Manajemen Risiko:

Yap Tjay Hing
Ketua Komite Manajemen Risiko

Riwayat hidup Yap Tjay Hing dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Kisup Wi
Anggota Komite Manajemen Risiko

Riwayat hidup Kisup Wi dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Peter Halim
Anggota Komite Manajemen Risiko

Riwayat hidup Peter Halim dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Choi, Ho Jung
Anggota Komite Manajemen Risiko

Riwayat hidup Choi, Ho Jung dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Ka Nen
Anggota Komite Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Mengemban pendidikan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Diangkat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada bulan September 2023. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Collection Management di Perseroan (November 2022 - saat ini). Sebelumnya beliau menduduki beberapa jabatan strategis yakni menjabat sebagai Head Marketing PT Primaswadana Perkasa (1996 - 2001), Assistant Manager PT Kalimas Motor (2001 - 2003), RM Marketing PT Finansia Multi Finance (2003 - 2008), Director Business and Operation PT Mitra Investindo Tbk (2008 - 2013), General Manager External Affairs PT Bumi Suksesindo Tbk (2013 - 2015), dan General Manager PT Provident Capital Indonesia yang diperbantukan di Kredito dan JD.ID (2015 - 2020).

Marie Yovanka Engelina
Anggota Komite Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma pada tahun 2002 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gunadarma pada tahun 2005. Diangkat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Enterprise Risk Management Perseroan (Januari 2022 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Assistant Manager – System Integration and Information Technology Consultant Padma Consulting Indonesia (2002 – 2004), Management Development Program di GE Capital (2004-2006), Manager Business Transformation – Manager Client Service Center Payment & Cash Management PT Bank HSBC Indonesia (2008-2011), Manager Business Transformation – Manager Client Service Center Payment & Cash Management PT Bank HSBC Indonesia (2008-2011), Executive Manager – International Assignment PT Bank Commonwealth (2016-2017), Head of Inforce Optimisation and Operation Excellence PT Asuransi Cigna (2018), Head of Digital

Transformation - Customer Engagement Area Allianz Life Indonesia (2019-2020), dan Head of Risk Management Bank Neo Commerce (2021).

Daniel Adrian
Anggota Komite Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2002. Diangkat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada bulan November 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Credit Risk Management Perseroan (Oktober 2022 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Credit Support Department Head PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (2004 - 2012), Risk Senior Manager PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (2012-2016), Risk Management Head PT Nissan Financial Services Indonesia (2016), Credit & Collection Strategic Division Head PT MNC Finance (2016 - 2018), Credit Policy Division Head PT Bussan Auto Finance (2018), Chief Risk Officer PT Andalan Finance Indonesia (2018 - 2020), Risk Management Division Head PT BFI Finance Indonesia Tbk (2020), Chief Risk Officer/SVP Risk Management PT Crowde Membangun Bangsa (2021), dan Credit Risk Lead PT Spenmo Teknologi Indonesia (2021 - 2022).

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang juga merupakan anggota Direksi Perseroan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Direksi Perseroan adalah 3 tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Komite Manajemen Risiko melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pedoman Komite Manajemen Risiko telah disetujui melalui Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 19 April 2022 dan telah dimuat dalam website Perseroan yaitu *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/6304477d8664d-risk-management-committee-charter-19-april-2022.pdf*. Komite Manajemen Risiko dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berperan sebagai organisasi non struktural pemberi saran dan rekomendasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi sehubungan dengan penerapan manajemen risiko di lingkungan Perseroan.

Wewenang Komite Manajemen Risiko

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:
1. Berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya;
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Manajemen Risiko berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain; serta
3. Jika diperlukan, Komite Manajemen Risiko berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko periode Januari sampai dengan Juli 2024:

1. Membahas *update* pelaksanaan *Risk Control Self Assessment* (*RCSA*) Fase I;
2. Membahas terkait Implementasi *Loss Event Database* dan *Collection Updates;* dan
3. Membahas terkait *Update* Rencana Kontinjensi Kredit.

Sesuai Pedoman Komite Manajemen Risiko, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 kali dalam setiap kuartal, namun demikian Komite Manajemen Risiko dapat menyelenggarakan rapat lebih sering sesuai kebutuhan. Selama periode Januari sampai dengan Juli 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Yap Tjay Hing	100%
Kisup Wi	100%

Nama	Tingkat Kehadiran
Peter Halim	100%
Choi, Ho Jung	100%
Ka Nen	100%
Marie Yovanka Engelina	100%
Daniel Adrian	100%

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan NonBank, Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi ("**Komite Pengarah TI**") sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan anggota Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

Ketua : Yap Tjay Hing
Anggota : Kisup Wi
Anggota : Hery Susanto Dermawan
Anggota : Choi, Ho Jung
Anggota : David Wirawan
Anggota : Herman Jusup
Anggota : Marie Yovanka Engelina

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Pengarah TI:

Yap Tjay Hing
Ketua Komite Pengarah TI

Riwayat hidup Yap Tjay Hing dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Kisup Wi
Anggota Komite Pengarah TI

Riwayat hidup Kisup Wi dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Hery Susanto Dermawan
Anggota Komite Pengarah TI

Riwayat hidup Hery Susanto Dermawan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Choi, Ho Jung
Anggota Komite Pengarah TI

Riwayat hidup Choi, Ho Jung dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

David Wirawan
Anggota Komite Pengarah TI

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1999, dan Magister Administrasi Bisnis dari IPMI Business School pada tahun 2015. Diangkat sebagai anggota Komite Pengarah TI Perseroan pada bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of IT & Digitalization Perseroan (Januari 2018 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Director/ Chief Corporate IT OT Group (1999 – 2014) dan IT Director PT Dutalestari Sentratama – Kino Group (2015 – 2017).

Herman Jusup
Anggota Komite Pengarah TI

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada tahun 1994. Diangkat sebagai anggota Komite Pengarah TI Perseroan pada bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Operation Perseroan (November 2017 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Auditor & Special Auditor Kantor Akuntan Publik Hans, Tuanakotta & Mustofa (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) (1997-2000), Operational Regional & General Affairs Manager PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (2000-2010), dan Operational Manager PT Sinar Mitra Sepadan Finance (2010-2017).

Marie Yovanka Engelina
Anggota Komite Pengarah TI

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma pada tahun 2002 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gunadarma pada tahun 2005. Diangkat sebagai anggota Komite Pengarah TI pada bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Enterprise Risk Management Perseroan (Januari 2022 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Assistant Manager – System Integration and Information Technology Consultant Padma Consulting Indonesia (2002 – 2004), Management Development Program di GE Capital (2004-2006), Manager Business Transformation – Manager Client Service Center Payment & Cash Management PT Bank HSBC Indonesia (2008-2011), Manager Business Transformation – Manager Client Service Center Payment & Cash Management PT Bank HSBC Indonesia (2008-2011), Executive Manager – International Assignment PT Bank Commonwealth (2016-2017), Head of Inforce Optimisation and Operation Excellence PT Asuransi Cigna (2018), Head of Digital Transformation - Customer Engagement Area Allianz Life Indonesia (2019-2020), dan Head of Risk Management Bank Neo Commerce (2021).

Masa jabatan anggota Komite Pengarah TI yang juga merupakan anggota Direksi Perseroan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS dan masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Direksi Perusahaan adalah 3 tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikan anggota Komite Pengarah TI sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Pengarah TI melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pedoman Komite Pengarah TI telah disetujui melalui Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024 dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/667a461fba611-1-ii-a-itsc-charter.pdf.*

Komite Pengarah TI dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi ("**TI**") yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan;
2. Perumusan kebijakan dan prosedur TI;
3. Kesesuaian proyek TI yang disetujui dengan rencana pengembangan TI;
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek TI dengan proyek TI yang disetujui;
5. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Perseroan;
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI agar investasi Perseroan pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan;
7. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki Perseroan.

Mengacu pada Pedoman Komite Pengarah TI Perseroan, bahwa Komite Pengarah TI wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap kuartal, namun demikian Komite dapat menyelenggarakan rapat lebih sering sesuai kebutuhan. Selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2024, Komite Pengarah TI telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Yap Tjay Hing	100%
Kisup Wi	100%
Hery Susanto Dermawan	100%
Choi, Ho Jung	100%
David Wirawan	100%
Herman Jusup	100%
Marie Yovanka Engelina	100%

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah TI periode Januari sampai dengan Juli 2024:

1. Membahas terkait *Core System (Confins) Updates;*
2. Membahas terkait *Upgrade Core System (finalization)*; dan
3. Merekomendasikan kepada Direksi untuk memperbaharui *core system* teknologi informasi Perseroan.

Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Perseroan telah membentuk Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas adalah sebagai berikut:

Ketua : Yap Tjay Hing
Anggota : Kisup Wi
Anggota : Peter Halim
Anggota : Choi, Ho Jung
Anggota : Sea Hwan Lah
Anggota : Cun Pin
Anggota : Marie Yovanka Engelina

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas:

Yap Tjay Hing
Ketua Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Riwayat hidup Yap Tjay Hing dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Kisup Wi
Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Riwayat hidup Kisup Wi dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Peter Halim
Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Riwayat hidup Peter Halim dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Choi, Ho Jung
Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Riwayat hidup Choi, Ho Jung dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Sea Hwan Lah
Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Riwayat hidup Sea Hwan Lah dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Cun Pin
Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2005 dan Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Diangkat sebagai anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan pada bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Funding & Treasury, Finance & Accounting Perseroan (Desember 2018 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Senior Auditor di PricewaterhouseCoopers (2005-2008), Corporate Auditor di PT Chevron Pacific Indonesia (2008-2010), Joint Venture Finance Accountant di PT Chevron Pacific Indonesia (2010-2012), Audit and Compliance Advisor - Chevron Technology Company di Chevron Houston, USA (2012-2013), Project Business Service for South Africa Business Unit di Chevron Houston, USA (2013- 2014), Head of Corporate Audit Indonesia di PT Chevron Pacific Indonesia (2014-2016), Financial Forecasting, Analysis and Reporting Advisor di PT Chevron Pacific Indonesia (2016-2017), Financial and Accounting Manager PT Chevron Pacific Indonesia (2017-2018), dan Fixed Asset Manager di PT Chevron Pacific Indonesia (2018).

Marie Yovanka Engelina
Anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Gunadarma pada tahun 2002 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gunadarma pada tahun 2005. Diangkat sebagai anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan pada bulan Maret 2022. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Head of Enterprise Risk Management Perseroan (Januari 2022 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Assistant Manager – System Integration and Information Technology Consultant Padma Consulting Indonesia (2002 – 2004), Management Development Program di GE Capital (2004-2006), Manager Business Transformation – Manager Client Service Center Payment & Cash Management PT Bank HSBC Indonesia (2008-2011), Manager Business Transformation – Manager Client Service Center Payment & Cash Management PT Bank HSBC Indonesia (2008-2011), Executive Manager – International Assignment PT Bank Commonwealth (2016-2017), Head of Inforce Optimisation and Operation Excellence PT Asuransi Cigna (2018), Head of Digital Transformation - Customer Engagement Area Allianz Life Indonesia (2019-2020), dan Head of Risk Management Bank Neo Commerce (2021).

Masa jabatan anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang juga merupakan anggota Direksi Perseroan yakni sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang bukan merupakan anggota Direksi Perseroan adalah 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas telah disetujui melalui Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024 dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/667a370a7acac-31-asset-liability-committee-charter-27-may-2024.pdf*. Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan arah strategis dari Pengelolaan Aset & Liabilitas dan memastikan tindak lanjut taktis untuk menciptakan struktur *balance sheet* yang terus berkembang untuk mencapai tujuan kinerja didalam parameter-parameter risiko yang ditentukan;
2. Melakukan pengawasan dan pengelolaan secara konsolidasi posisi likuiditas dan risiko suku bunga Perseroan secara menyeluruh;
3. Mengelola struktur modal dan penggunaan modal di antara berbagai unit bisnis;
4. Mengelola portofolio investasi;

5. Menyetujui strategi lindung nilai/hedging terhadap modal yang ditanamkan dan keuntungan dalam mata uang asing untuk memitigasi eksposur risiko pasar;
6. Memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan pedoman yang relevan dari regulator;
7. Merumuskan dan me-review strategi dalam mengelola risiko pasar dan risiko likuiditas yang berkaitan dengan profil neraca, modal dan struktur pendanaan Perusahaan;
8. Mengaktifkan *Liquidity Contingency Plan* ("**LCP**") pada saat kondisi mengarah pada krisis likuiditas, melakukan evaluasi terhadap efektivitas LCP pasca krisis serta menilai posisi baru dan menentukan strategi tindak lanjut restrukturisasi neraca Perusahaan; dan
9. Berkoordinasi dengan Komite dan fungsi terkait pada Perseroan dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Mengacu pada Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan, Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap kuartal, namun demikian Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas dapat menyelenggarakan rapat lebih sering sesuai kebutuhan. Selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2024, Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perseroan telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Yap Tjay Hing	100%
Kisup Wi	100%
Peter Halim	100%
Choi, Ho Jung	100%
Sea Hwan Lah	100%
Cun Pin	100%
Marie Yovanka Engelina	100%

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas periode Januari sampai dengan Juli tahun 2024:

1. Update terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal 4 tahun 2023;
2. Update terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal 1 tahun 2024; dan
3. Update terkait Aset & Liabilitas Perseroan per posisi kuartal 2 tahun 2024.

Komite Dibawah Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta POJK No. 30/POJK.05/2014 sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/POJK.05/2020 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dengan susunan anggota Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Ketua : Nursalam Andi Tabusalla
Anggota : Peter Irawan Chandra
Anggota : Siti Rosyidah

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Audit:

Nursalam Andi Tabusalla
Ketua Komite Audit

Riwayat hidup Nursalam Andi Tabusalla dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Peter Irawan Chandra
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Meraih gelar Bachelor of Economics dari Monash University pada tahun 1986. Diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Maret 2024. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Mizuho-Balimor Finance (2018 - saat ini), Komisaris Independen PT Sinar Mas Asset Management (2018 - saat ini), dan Komisaris Independen PT Surya Semesta Internusa Tbk (2023 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Principal in Risk Consulting, Financial Institution, M&A Practices, KPMG Advisory, Indonesia (2017- 2020).

Siti Rosyidah
Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Borobudur pada tahun 2005. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Maret 2022. Sebelumnya beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis yakni menjabat sebagai Head of Risk Group and Corporate Supervision Subsidiary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk – PPA Division (2009-2017), Audit Committee PT BNI Multifinance (2015), Remuneration, Nomination and Governance Committee PT BNI Multifinance (2016), AVP Litigation of Criminal Cases and Claims PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017), dan Head of Legal Unit Supervision Group PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017-2018).

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak lebih lama dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya setelah berakhirnya masa jabatan awal. Sedangkan anggota Komite Audit yang juga merupakan Komisaris Independen penunjukannya sebagai anggota Komite Audit akan tunduk pada masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pedoman Komite Audit telah disetujui melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022 dan telah dimuat telah dimuat dalam website Perseroan dengan link *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62c7f8492fc41-audit-committee-charter.pdf*. Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian akuntan dan kantor akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; serta
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, keuangan, aset, dan sumber daya Perusahaan yang dianggap perlu;
2. Berkomunikasi langsung dengan pihak yang relevan termasuk karyawan, Direksi, dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai Pedoman Komite Audit, Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat Komite Audit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap kuartal. Selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Nursalam Andi Tabusalla	100%
Peter Irawan Chandra	100%
Siti Rosyidah	100%

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit periode Januari sampai dengan Juli tahun 2024:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2023, sesuai yang diamanatkan dalam POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan sebagai auditor independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2024;
3. Membahas terkait Rencana Audit Tahunan 2024;
4. Membahas terkait *updates* dari Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Tahun 2023;
5. Membahas terkait *updates* Q1 2024 Audit Internal & Aktivitas Manajemen Anti Fraud;
6. Membahas terkait *updates* dari Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan untuk Periode Tiga Bulan yang berakhir pada 31 Maret 2024;
7. Membahas terkait *updates* atas Audit Semester 1 2024;
8. Update Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Tengah Tahun yang Telah Diaudit untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024; dan
9. Membahas terkait penunjukkan Auditor Eksternal untuk penerbitan *public bonds.*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Nursalam Andi Tabusalla
Anggota	:	Moon Cheol Kang[*)]
Anggota	:	Juan Sumando Nababan

Catatan:

[*)] Beliau efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test)* dari OJK, yakni 18 Juli 2024.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:

Nursalam Andi Tabusalla
Ketua Komite Audit

Riwayat hidup Nursalam Andi Tabusalla dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Moon Cheol Kang
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Riwayat hidup Moon Cheol Kang dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Juan Sumando Nababan
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Meraih gelar Sarjana Psikologi daru Universitas Padjajaran pada tahun 2006 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Diangkat sebagai anggota Komite Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada bulan Juli 2023. Saat ini beliau juga menjabat sebagai People and Organization Development Division Head Perseroan (Juni 2023 - saat ini). Sebelumnya beliau pernah menduduki beberapa jabatan strategis yakni menjabat sebagai HR Generalist Perseroan (2006-2010), Organization Development Section Head PT Matahari Department Store Tbk (2011-2012), dan People and Organization Development Manager Perseroan (2013-2023).

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi telah disetujui melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022 dan telah dimuat telah dimuat dalam website Perseroan yaitu *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62c7f8053dc1e-nomination-and-remuneration-committee-charter.pdf*. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab antara lain:
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
   a. Komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, serta
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan dewan komisaris,
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Adapun melaksanakan fungsi remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab antara lain:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya;
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem nominasi dan remunerasi dalam Perseroan; dan

3. Jika diperlukan, Komite berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Sesuai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Nursalam Andi Tabusalla	100%
Moon Cheol Kang*)	-
Juan Sumando Nababan	100%

Catatan:
*) Beliau efektif menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test)* dari OJK, yakni 18 Juli 2024.

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi periode Januari sampai dengan Juli 2024:
1. Memberikan rekomendasi atas penyesuaian *range* gaji 2024;
2. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan Komisaris Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan;
3. Membahas *Sallary Band;*
4. Memberikan rekomendasi terkait hasil peninjauan ulang atas KPI Manajemen tahun 2023;
5. Memberikan rekomendasi terkait i) besaran total remunerasi keseluruhan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024; dan ii) besaran total remunerasi dan/atau honorarium keseluruhan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024;
6. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan anggota Direksi sebagai kandidat untuk Direktur;
7. Membahas terkait perubahan struktur organisasi Perseroan;
8. Menetapkan KPI Manajemen tahun 2024; dan
9. Membahas terkait pengangkatan kembali *Head of New Business*.

Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan POJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : Nursalam Andi Tabusalla
Anggota : Moon Cheol Kang*)
Anggota : Peter Irawan Chandra

*) Beliau efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test)* dari OJK, yakni 18 Juli 2024.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai anggota Komite Pemantau Risiko:

Nursalam Andi Tabusalla
Ketua Komite Pemantau Risiko

Riwayat hidup Nursalam Andi Tabusalla dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Moon Cheol Kang
Anggota Komite Pemantau Risiko

Riwayat hidup Moon Cheol Kang dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "Pengurus dan Pengawas."

Peter Irawan Chandra
Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Meraih gelar Bachelor of Economics dari Monash University pada tahun 1986. Diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan pada bulan Maret 2024. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Mizuho-Balimor Finance (2018 - saat ini), Komisaris Independen PT Sinar Mas Asset Management (2018 - saat ini), dan Komisaris Independen PT Surya Semesta Internusa Tbk (2023 - saat ini). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Principal in Risk Consulting, Financial Institution, M&A Practices, KPMG Advisory, Indonesia (2017- 2020).

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pedoman Komite Pemantau Risiko telah disetujui melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2022 dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62c7f87d9bc6d-risk-oversight-committee-charter.pdf*.
Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Wajibkan bertindak independen dalam menjalankan tugasnya. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko wajib tunduk pada Kode Etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain:
1. Komite Pemantau Risiko berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya;
2. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain;
3. Jika diperlukan, Komite Pemantau Risiko berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Sesuai Pedoman Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap kuartal.

Selama periode Januari sampai dengan Juli 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga)kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Nursalam Andi Tabusalla	100%
Moon Cheol Kang*)	-
Peter Irawan Chandra	100%

*) Beliau efektif menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan tanggal lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test)* dari OJK, yakni 18 Juli 2024.

Berikut adalah laporan singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko periode Januari sampai dengan Juli 2024:
1. Membahas terkait *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan tahun 2024;
2. Membahas terkait *risk profile* Perseroan (penyampaian kepada OJK pada Desember 2023 vs Laporan Q1 2024);
3. Membahas terkait Laporan Pertanggungjawaban Manajemen Risiko untuk semester 2 (dua) tahun 2023;
4. Memberikan persetujuan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perseroan tahun 2024; dan

5. Merekomendasikan perubahan komposisi anggota Komite Manajemen Risiko.

Unit Audit Internal – Internal Audit & *Fraud Management Division*

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022 dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62d6365c35891-62c7f724a0785-internal-audit-charter.pdf*. Perseroan telah mengangkat Ahmad Salman Farizy untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Internal Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT KB Finansia Multi Finance sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 Oktober 2022.

Ahmad Salman Farizy. Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2002 dan gelar Magister Manajemen dari Indonesia Banking School pada tahun 2019. Beliau telah berkarir di industri keuangan selama 20 tahun khususnya pada fungsi audit dan telah menempati posisi manajerial di beberapa perusahaan, antara lain Branch and Operation Auditor PT Bank Mandiri Syariah (2003 - 2004), Corporate Banking & Retail Banking Audit Team Leader PT Bank Mandiri Syariah (2005 - 2006), Manager - Treasury Audit Team Leader PT Bank Niaga (2006 - 2009), Assistant Vice President - Head Office and Treasury Audit Head PT Bank CIMB Niaga (2010 - 2013), Vice President – Product Audit Head PT Bank CIMB Niaga (2014 – 2015), Vice President - Head Office and IT Audit Head PT Bank BTPN (2015 – 2016), Vice President - Head Office Audit Head PT Bank BTPN (2016 -2018), dan Senior Vice President - Head of Funding and Corporate Function Audit PT Bank BTPN member of SMBC Group (2019 - 2022).

Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan melaksanakan kegiatannya secara independen, objektif, dan menghindar dari perbuatan yang dianggap sebagai benturan kepentingan. Unit Audit Internal melapor langsung kepada Direktur Utama dan membantu Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja. Unit Audit Internal melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi. Penilaian Audit Internal, rekomendasi dan saran perbaikan disampaikan kepada Direksi melalui Direktur Utama.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal antara lain meliputi:
1. Penyusunan program kerja dan perencanaan audit tahunan;
2. Pelaksanaan audit cabang untuk menilai kecukupan dan implementasi sistem pengendalian internal yang meliputi ruang lingkup marketing, credit, operations, dan collection;
3. Pelaksanaan audit tematik di Kantor Pusat seperti: Anti-Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, General Affairs, Strategic Collection Management, SLIK, Information Security Management System (ISO 27001), dan Consumer Handling Management;
4. Melakukan monitoring tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil audit;
5. Mengkomunikasikan setiap laporan hasil audit kepada Presiden Direktur dan Komite Audit secara periodik;
6. Melakukan pembahasan program kerja Audit Internal dan hasil audit bersama komite audit secara periodik;
7. Membantu Manajemen dalam memperkuat sistem pengendalian internal untuk mengendalikan risiko fraud dengan memberikan rekomendasi perbaikan desain pengendalian kepada *product owner* melalui aktivitas *continuous audit* dan *post booking review*.

Sesuai Bab XII Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaran Usaha Pembiayaan terkait pengendalian *fraud* dan strategi anti *fraud* perusahaan pembiayaan melalui pedoman anti *fraud*, Unit Anti *Fraud* Perseroan melaksanakan kegiatannya melalui 4 pilar penerapan startegi anti *fraud* yang meliputi 1) pencegahan, 2) pendeteksian, 3) investigasi, 4) pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut secara independen, objektif, dan menghindar dari perbuatan yang dianggap sebagai benturan kepentingan. Unit Anti *Fraud* melapor langsung kepada Direktur Utama dan membantu Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja.

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Unit Audit Internal tahunan;

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksanan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akutansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan komite audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus bila diperlukan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan Unit Anti Fraud meliputi:
1. Penerapan Pakta Integritas untuk seluruh karyawan
2. Melakukan program *employee awareness* untuk meningkatkan anti-fraud awareness melalui media komunikasi internal Perseroan
3. Melakukan kampanye anti-fraud
4. Melakukan pelatihan anti-*fraud awareness* untuk karyawan baru
5. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit dan investigasi untuk mencegah terjadinya pengulangan kasus fraud
6. Membangun *fraud detection alert report*
7. Melakukan *Fraud Risk Assessment*
8. Melakukan analisa data untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi *fraud* serta mencegah sejak awal terjadinya potensi kerugian yang lebih besar bagi Perseroan
9. Melakukan optimalisasi penerapan *whistle blowing system*
10. Mengembangkan mekanisme pelaksanaan *surveillance* dan *investigation* audit secara berkelanjutan
11. Memberikan laporan hasil investigasi kepada Komite Audit, Direksi, dan Manajemen Senior
12. Memantau pelaksanaan pemberian sanksi bagi pelaku *fraud* sesuai dengan peraturan Perseroan

Upaya Pengelolaan Risiko

Pedoman Kerangka Kerja Perseroan dalam sistem manajemen risiko adalah berdasarkan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang terdiri dari fungsi pengawasan, pengendalian serta pengelolaan.



1. Lini Pertahanan Pertama

Adalah unit kerja Bisnis dan Operasional Perseroanbeserta unit kerja pendukung Bisnis sebagai lini pertahanan pertama dan bertanggungjawab dalam mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan menanggulangi risiko. Tanggung jawab utama atas lini pertama ini adalah untuk melakukan pengelolaan atas eksposur risiko secara harian dan berkelanjutan sesuai dengan target pasar, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Lini Pertahanan Kedua

Adalah Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terdiri dari Divisi Enterprise Risk Management dan Divisi Credit Risk Management, Departemen Anti *Fraud*, dan Departemen Kepatuhan dan litigasi sebagai lini pertahanan kedua dalam melakukan fungsinya memantau dan mengawasi risiko Perseroan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan bertanggungjawab untuk melakukan kajian dan persetujuan atas strategi dan risiko yang dapat diterima, dan bekerja sama dengan unit kerja Bisnis dan Operasional Perseroan beserta unit kerja pendukung Bisnis untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh Perseroan dapat di identifikasi, diukur dan dikelola dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan.

Departemen Anti *Fraud* bertanggungjawab dalam pengendalian tindakan *Fraud*, yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *fraud* di Perseroan, dengan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk pengendalian *fraud*.

Departemen Kepatuhan dan Litigasi mengelola risiko kepatuhan maupun risiko hukum dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang berlaku baik dari regulator maupun undang-undang yang terkait Perseroan telah disosialisasikan dan dipatuhi oleh seluruh lini terkait Perseroan.

3. Lini Pertahanan Ketiga

Adalah Divisi Audit Internal yang melakukan serangkaian pengujian dan audit secara independen terhadap setiap proses yang dijalankan oleh Lini pertama dan Lini kedua Perseroan. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa setiap Lini tersebut melakukan peran dan tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Manajemen Risiko

Berikut adalah uraian mengenai mitigasi masing-masing risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan:

1. **Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan**
   Pengelolaan Risiko Kredit atau Risiko Pembiayaan dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan four eyes principles dalam proses penyaluran pembiayaan Perseroan. Untuk segment retail proses akuisisi telah didukung oleh otomasi *credit scoring* Perseroan yang dikembangkan dan dievaluasi secara berkala. Perseroan senantiasa mengembangkan strategi pengelolaan risiko kredit atau pembiayaan melalui penerapan *Risk Based Pricing* (RBP), segmentasi konsumen, pengembangan *credit scoring* dengan penerapan *telco scoring* dan *alternative credit scoring* serta digitalisasi penyaluran pembiayaan. Lebih lanjut dilakukan pemantauan atas konsentrasi pembiayaan, antara lain rasio debitur inti, wilayah geografis, produk, sektor ekonomi atau jenis pembiayaan tertentu yang ditetapkan dalam kebijakan *risk appetite* Perseroan. Disamping itu dilakukan pemantauan atas portofolio Perseroan dan *stress testing* sebagai *early warning* pengelolaan pembiayaan. Perseroan telah membukukan pencadangan sesuai dengan PSAK 71 terhadap setiap potensi risiko kredit macet tersebut agar tidak mempengaruhi performa keuangan Perseroan.

   Diversifikasi portofolio menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko kredit. Perseroan saat ini juga memperluas penyaluran pembiayaan ke produk lain, seperti kendaraan bermotor roda dua dan produk *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*), sehingga eksposur risiko tidak terkonsentrasi pada satu produk saja dan dapat memberikan stabilitas yang lebih baik terhadap risiko kredit.

2. **Risiko Operasional**
   Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan dengan penyempurnaan kebijakan dan prosedur operasional, penyempurnaan proses operasional serta pengembangan sistem guna meminimalisir proses manual. Lebih lanjut fungsi Manajemen Risiko telah menerapkan kerangka kerja manajemen risiko operasional melalui *Risk Control Self Assessment* (RCSA) dan *Loss Event Database* (LED) guna memantau insiden atas aktivitas operasional dan menetapkan mitigasi maupun rencana kerja perbaikan dan pencegahan risiko. Perseroan

juga senantiasa memastikan peningkatan budaya sadar risiko melalui sosialisasi *risk awareness*, *anti fraud awareness* serta mengoptimalisasikan penggunaan kanal *whistleblowing* untuk meminimalisir *fraud*.

3. Risiko Stratejik

Perseroan telah merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang yang selalu disesuaikan dengan rencana-rencana Perseroan dengan memperhatikan setiap perubahan kondisi ekonomi mikro maupun makro, persaingan usaha maupun kondisi external lainnya di pasar persaingan usaha. Untuk memitigasi hal tersebut maka Perseroan secara berkala melakukan pengukuran risiko strategik melalui pemantauan atas pencapaian rencana bisnis Perseroan yang dibahas dan dilaporkan kepada pihak manajemen secara berkala.

4. Risiko Likuiditas

Pada saat ini, Perseroan dikenal memiliki reputasi yang sangat baik dan aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menunjang aktivitas pembiayaan Perseroan selama tahun berjalan baik melalui pinjaman dari perbankan. Dimana Perseroan senantiasa melakukan pemantauan secara rutin atas indikator likuiditas dan melakukan koordinasi dengan departemen terkait untuk menjaga ketersediaan dana serta rasio likuiditas yang membaik.

Dukungan pemegang saham utama, yakni KB Kookmin Card Corp, lewat pemberian *corporate guarantee* juga mendorong Perseroan untuk mencari sumber-sumber pendanaan melalui pinjaman dari perbankan dengan suku bunga yang kompetitif.

5. Risiko Kepatuhan

Perseroan melalui Departemen Kepatuhan telah memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai untuk memastikan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu tunduk terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut Perseroan senantiasa melakukan kajian, pemantauan dan memperbaharui peraturan internal Perseroan sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan.

6. Risiko Pasar Terkait Perubahan Suku Bunga

Eksposur risiko pasar atas aset dan liabilitas tidak signifikan dikarenakan mayoritas rasio pinjaman dengan suku bunga tetap, dimana rasio pinjaman dengan suku bunga mengambang (*floating*) masih dalam batas *risk appetite* Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi atas kondisi aset dan liabilitas terutama yang memiliki sensitivitas terhadap suku bunga dan indikator keuangan yang terekspose risiko pasar diantaranya yaitu pemantauan perubahan suku bunga, pergerakan harga komoditas dan indikator makro ekonomi.

7. Risiko Hukum

Perseroan melalui Departemen Legal Corporate senantiasa memastikan bahwa perjanjian dengan pihak ketiga dan perjanjian pembiayaan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau asas konsensualitas. Lebih lanjut Perseroan melakukan pemantauan serta analisa atas mekanisme dan standar dari kemungkinan kalah atau menang atas gugatan yang dikenakan ke Perseroan. Pada saat ini risiko hukum dapat terjaga dan dikendalikan dengan baik oleh Perseroan sehingga secara umum tidak terdapat dampak yang signifikan.

8. Risiko Reputasi

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perseroan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja Perseroan. Perseroan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada debitur. Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan menerapkan strategi komunikasi yang baik dalam mengelola media sosial Perseroan, membangun hubungan baik dengan media untuk dapat menyampaikan berita positif dan periklanan Perseroan secara transparan, penerapan strategi komunikasi menghadapi publikasi negatif serta memastikan setiap bentuk pengaduan konsumen dapat diselesaikan secara baik.

Risiko Umum

1. Risiko Persaingan

Industri pembiayaan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang kompetitif, dengan peluang pasar yang masih besar. Strategi pertumbuhan Perseroan sangat bergantung pada kemampuannya untuk bersaing secara efektif di tengah dinamika pasar yang cepat berubah. Pergeseran fokus bisnis oleh beberapa perusahaan serta peningkatan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya pada sektor pembiayaan kendaraaan bermotor dan produk *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*) telah memperketat persaingan, terutama dalam hal penetapan suku bunga. Jika tidak dikelola dengan baik, meningkatnya persaingan ini dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan dan pengurangan pangsa pasar Perseroan.

2. Risiko Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Makro

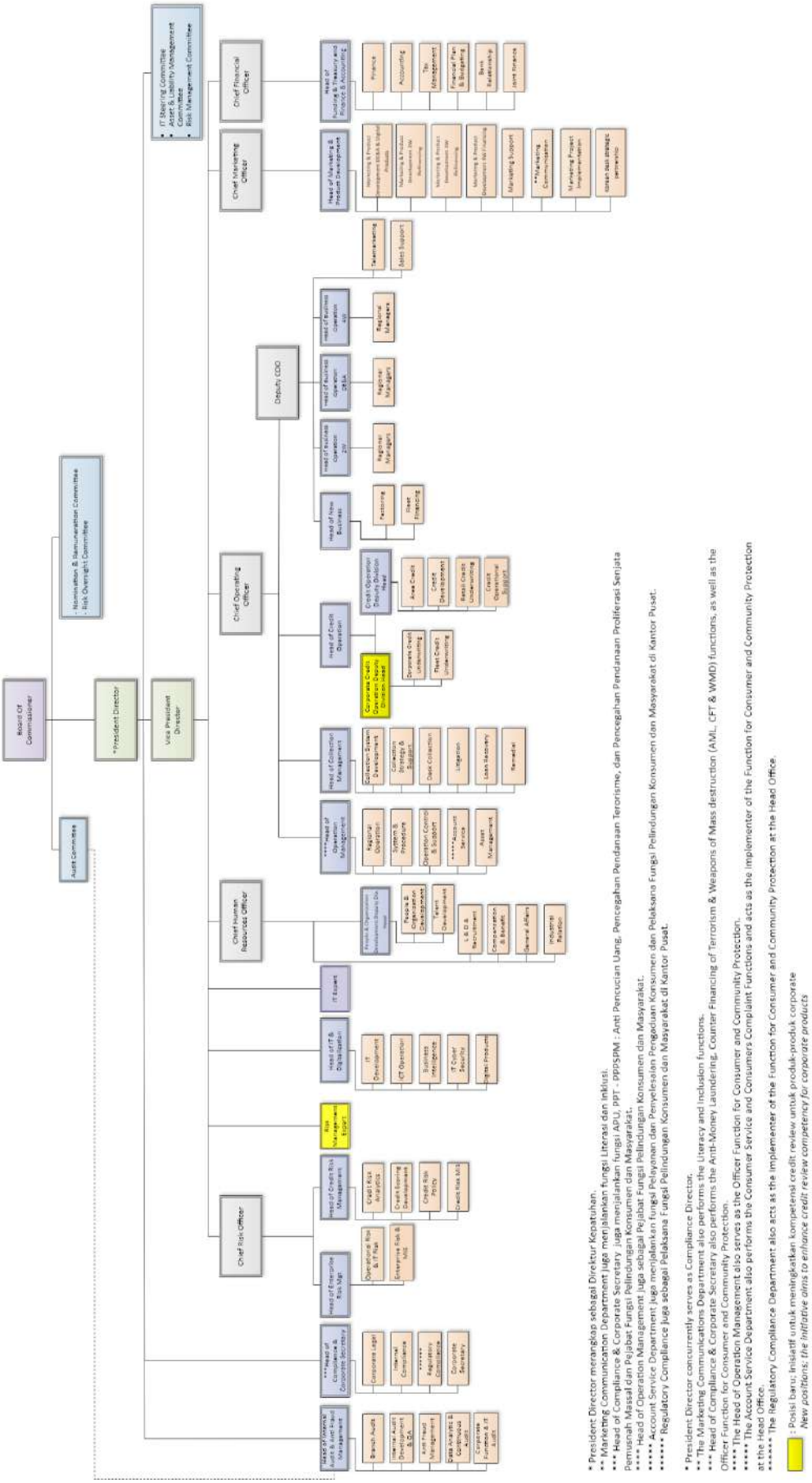
Risiko yang dihadapi Perseroan terkait dengan perubahan kondisi ekonomi makro mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan Risiko Strategis, yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini, portofolio terbesar Perseroan berfokus pada pembiayaan kendaraan bermotor dan produk *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*), dua segmen yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga komoditas. Perubahan ekonomi makro, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi atau lonjakan inflasi, dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kredit mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat gagal bayar *(non-performing loan)* dan mengakibatkan kerugian kredit bagi Perseroan. Risiko Pasar dapat muncul dari fluktuasi pasar yang signifikan, terutama selama krisis ekonomi, yang menyebabkan ketidaksesuaian *(mismatch)* antara aset dan kewajiban Perseroan. Volatilitas pasar yang tidak diantisipasi dapat berdampak negatif pada pendapatan Perseroan. Risiko Likuiditas juga berpotensi meningkat selama periode ketidakpastian ekonomi, mengingat kecenderungan penurunan perputaran dana dan berkurangnya likuiditas di pasar uang. Kondisi likuiditas yang semakin ketat dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Lebih lanjut, perubahan dalam kondisi ekonomi makro dapat memengaruhi pencapaian target bisnis Perseroan dan meningkatkan Risiko Strategis. Risiko ini terkait dengan ketidakmampuan Perseroan untuk beradaptasi secara cepat terhadap perubahan dalam lingkungan eksternal, yang dapat menghambat implementasi strategi bisnis secara efektif dan pertumbuhan Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap kondisi sumber dana dan penggunaan dana Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Kebijakan moneter yang ketat, seperti pengetatan likuiditas atau peningkatan suku bunga acuan, dapat membatasi akses terhadap sumber dana, yang akan mendorong kenaikan biaya pendanaan. Hal ini berpotensi meningkatkan suku bunga pinjaman yang ditawarkan Perseroan, sehingga menurunkan daya saing dan memperlambat aktivitas bisnis. Sebaliknya, deregulasi di sektor moneter dan keuangan cenderung memperlonggar akses terhadap sumber dana, yang dapat menyebabkan penurunan suku bunga. Walaupun penurunan suku bunga dapat meningkatkan likuiditas, kondisi ini juga dapat menurunkan pendapatan bunga dan memengaruhi profitabilitas Perseroan. Selain itu, kebijakan suku bunga yang tinggi berisiko menekan *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan, yang merupakan salah satu indikator penting profitabilitas. Penurunan NIM akibat peningkatan biaya dana tanpa diimbangi kenaikan pendapatan bunga dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perseroan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



* President Director merangkap sebagai Direktur Kepatuhan.
** Marketing Communication Department juga menjalankan fungsi Literasi dan inklusi.
*** Head of Compliance & Corporate Secretary juga menjalankan fungsi APU, PPT - PPPSPM : Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pejabat Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
**** Head of Operation Management juga sebagai Pejabat Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat.
***** Account Service Department juga menjalankan fungsi Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan Pelaksana Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Kantor Pusat.
****** Regulatory Compliance juga sebagai Pelaksana Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Kantor Pusat.

* President Director concurrently serves as Compliance Director.
** The Marketing Communications Department also performs the Literacy and Inclusion functions.
*** Head of Compliance & Corporate Secretary also performs the Anti-Money Laundering, Counter Financing of Terrorism & Weapons of Mass destruction (AML, CFT & WMD) functions, as well as the Officer Function for Consumer and Community Protection.
**** The Head of Operation Management also serves as the Officer Function for Consumer and Community Protection.
***** The Account Service Department also performs the Consumer Service and Consumers Complaint Functions and acts as the Implementer of the Function for Consumer and Community Protection at the Head Office.
****** The Regulatory Compliance Department also acts as the Implementer of the Function for Consumer and Community Protection at the Head Office.

: Posisi baru; Inisiatif untuk meningkatkan kompetensi credit review untuk produk-produk corporate
New positions; the initiative aims to enhance credit review competency for corporate products

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2024, Perseroan dan memiliki total karyawan sejumlah 7.507 orang. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Perseroan pada masing-masing tanggal:

Tabel komposisi karyawan berdasarkan status karyawan tetap

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Pekerja Tetap	3.401	3.536	3.931
Pekerja Kontrak	4.106	4.615	4.196
Jumlah	**7.507**	**8.151**	**8.127**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Sarjana (S1. S2. S3)	1.718	1.758	1.856
Akademi (D1. D2. D3)	384	400	447
Sekolah Menengah (SMA, SMK)	1.299	1.378	1.628
Jumlah	**3.401**	**3.536**	**3.931**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
>50 tahun	90	82	78
41-50 tahun	816	768	729
31-40 tahun	1.765	1.841	2.087
21-30 tahun	730	845	1.036
17-20 tahun	0	0	1
Jumlah	**3.401**	**3.536**	**3.931**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Direksi	8	11	6
Executive Officer	13	13	16
Manajer (Manajer ke atas)	450	439	426
Asst. manajer	79	74	48
Supervisor	1.121	1.155	1.183
Staff	1.730	1.844	2.252
Jumlah	**3.401**	**3.536**	**3.931**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Administrasi & Pembukuan	916	940	973
Advisor	0	2	4
Analisis Kelayakan Pembiayaan	111	107	210
Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme	2	2	1
Audit Internal	61	70	67
BOD	19	20	18

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
HR & GA	65	66	52
Legal	10	10	7
Manajemen Risiko	16	14	3
Pemasaran	889	892	1.063
Penagihan	1.186	1.290	1.447
Satuan Kerja Lainnya	0	5	5
Teknologi Informasi	126	118	81
Jumlah	**3.401**	**3.536**	**3.931**

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Kantor Pusat	572	550	521
Jabodetabek	1.079	1.145	1.174
Jawa Barat	315	316	474
Jawa Tengah	102	111	263
Jawa Timur	247	265	173
Sumatra	248	257	292
Kalimantan	267	288	338
Sulawesi	447	473	613
Indonesia Timur	124	131	83
Jumlah	**3.401**	**3.536**	**3.931**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja serta tidak memiliki karyawan yang mempunyai keahlian ataupun sertifikat khusus, yang dimana jika pegawai tersebut tidak ada akan mengganggu jalannya kegiatan operasional Perseroan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT KB Finansia Multi Finance 2023-2025, yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.230705013/B/XII/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT KB Finansia Multi Finance tanggal 11 Desember 2023, yang berlaku terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 10 Desember 2025.

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Tenaga Kerja Asing	Jabatan	Warga Negara	Dokumen Perizinan
1.	Kisup Wi	Wakil Direktur Utama	Korea Selatan	• E-ITAS No. 2C21JE0104-A berlaku hingga 21 Januari 2025. • Pengesahan RPTKA Perpanjangan No. B.3/166873/PK.04.01/XII/2023 tanggal 23 Desember 2023 berlaku hingga 21 Januari 2025.
2.	Sea Hwan Lah	Direktur Pemasaran	Korea Selatan	• E-ITAS No. 2C21JE0001AA berlaku hingga 11 Agustus 2025.

No.	Nama Tenaga Kerja Asing	Jabatan	Warga Negara	Dokumen Perizinan
				• Pengesahan RPTKA Perpanjangan No. B.3/33572/PK.04.00/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 berlaku hingga 31 Agustus 2025.
3.	Choi, Ho Jung	Direktur	Korea Selatan	• E-ITAS No. 2C21JE0008AA berlaku hingga 11 Agustus 2025. • Pengesahan RPTKA Perpanjangan No. B.3/33572/PK.04.00/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 berlaku hingga 31 Agustus 2025.
4.	Yongpil Jeong	Penasihat Bidang Manajemen Risiko	Korea Selatan	• E-ITAS No. C22C42JE001389-A berlaku hingga 03 Juni 2025. • Pengesahan RPTKA Perpanjangan No. B.3/060847/PK.04.01/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 berlaku hingga 21 Mei 2025.
5.	Tae Hee Lee	Penasihat Bidang Teknologi Informasi	Korea Selatan	• E-ITAS No. C22C42JE001417-A berlaku hingga 11 Juni 2025. • Pengesahan RPTKA Perpanjangan No. B.3/060845/PK.04.01/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 berlaku hingga 21 Mei 2025.

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pelatihan sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam organisasi. Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu bagi individu/pegawai dalam melakukan pekerjaan dengan efektif dan efesien. Dalam pelaksanaannya pelatihan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal Perseroan. Berikut adalah contoh beberapa program pelatihan yang dilaksanakan oleh Perseroan:

- ***Mandatory Program***: Program wajib yang persyaratan jabatan dan atau menjadi program wajib yang dipersyaratkan oleh OJK
- ***Orientation Program***: Program yang ditujukan bagi karyawan baru agar dapat segera menguasai proses dan teknis kerja pada jabatan barunya
- ***Reinforcement Program***: Program yang bertujuan untuk optimalisasi karyawan pada jabatan tertentu
- ***Career Development Program***: Program bagi karyawan yang secara kriteria tertentu telah mencukupi untuk dapat menjabat posisi pada level yang lebih tinggi

No	Judul Pelatihan	Kategori Pelatihan
1.	Basic Supervisory	Orientation Program
2.	Branch Development Program	Career Development Program
3.	Management Trainee	Career Development Program
4.	Branch Manager Development Program	Career Development Program
5.	Senior Supervisor Development Program	Career Development Program
6.	New Leader Development Program	Career Development Program
7.	Managerial Development	Career Development Program
8.	Technical Orientation Program	Orientation Program
9.	Certification - Collection	Mandatory Program

No	Judul Pelatihan	Kategori Pelatihan
10.	Certification - Basic Managerial	Mandatory Program
11.	Certification - Refreshment Point BOD / BOC	Mandatory Program
12.	IT & Product Certification	Reinforcement Program
13.	Human Resources / Corporate Event	Others Program
14.	Training Mandatory:	
	a. Orientasi Karyawan Baru (OKB)	Mandatory Program
	b. Pelatihan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	Mandatory Program
	c. Pelatihan Layanan Pengaduan	Mandatory Program
	d. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Mandatory Program
	e. Anti *Fraud*	Mandatory Program
	f. Management Dasar Risiko	Mandatory Program
15.	Training Kompetensi	Reinforcement Program

Sarana Kesejahteraan

Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan, antara lain:

1. **Sumbangan Kelahiran/Persalinan/Keguguran selama 1 tahun**
   Sumbangan yang diberikan kepada karyawan tetap, bagi karyawati / isteri karyawan untuk persalinan / keguguran (maksimal 3 orang anak), berdasarkan nominal pada berkas *claim* (maksimal sesuai limit).
2. **Sumbangan kacamata/softlens**
   Sumbangan berupa kacamata/softlens, yang diberikan kepada karyawan tetap, dengan minimal masa kerja 1 tahun sejak diangkat sebagai karyawan tetap.
3. **Sumbangan Pernikahan**
   Sumbangan pernikahan yang diberikan kepada karyawan/karyawati.
4. **Sumbangan Kedukaan/Kematian**
   Sumbangan yang diberikan kepada karyawan jika terjadi kedukaan/duka cita atas meninggalnya anggota keluarga inti karyawan.
5. **Sumbangan Fasilitas Olahraga**
   Sumbangan yang diberikan kepada level tertentu untuk fasilitas olahraga.
6. **Asuransi Kesehatan**
   Asuransi Jaminan Kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan yang diberikan untuk karyawan di luar dari BPJS kesehatan.
7. **BPJS Ketenagakerjaan**
   Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan untuk terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu pada Program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.
8. **BPJS Kesehatan**
   Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan beserta istri dan maksimal 3 orang anak untuk jaminan kesehatannya pada BPJS Kesehatan sesuai dengan persentase tanggungan Perseroan dan Karyawan di bawah ini:

Perseroan	Karyawan
4%	1%

9. Penghargaan masa kerja berupa cuti panjang
Cuti panjang diberikan sebagai penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memiliki masa kerja mencapai 5 tahun dan kelipatannya yaitu 22 Hari Kerja untuk kantor pusat dan 26 Hari Kerja karyawan cabang, atau dapat diuangkan sebesar 1 bulan gaji.

10. Mobil Operasional, *Car Ownership Program* (COP), dan *Motorcycle Ownership Program* (MOP)
Perseroan memberikan benefit berupa Mobil Operasional, COP atau MOP untuk karyawan pada level atau jabatan tertentu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

11. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan penutupan pertanggungan asuransi dengan rincian sebagai berikut:

	Polis Asuransi	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
1.	*Property All Risk Insurance No. 201910109240001*	PT KB Insurance Indonesia	22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025	- Grand Wijaya Center F-3, Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 121602 - Gedung Office 8 @ Senopati Lot. 28 Lantai 12, Unit A; - Gedung Office 8 @ Senopati Lot. 28 Lantai 17, Unit F; - Gedung Office 8 @ Senopati Lot. 28 Lantai 15, Unit A – G - Gedung Office 8 Senopati Lot. 28 Lantai 19, Unit H; - Ruko The Royal Palace Menteng Dalam, Tebet. - Jl. M. Yamin No. 1, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	Semua risiko kerugian fisik atau kerusakan harta benda yang dipertanggunggkan dari sebab apapun termasuk *Civil Commotion* (Huru-Hara), dan penjarahan sesuai RSMD 4.1 + CC kecuali dikecualikan oleh ketentuan polis.	Bangunan: - Grand Wijaya: Rp5.200.800.000,00 - Gd. Office 8 Lt. 12 Unit A: Rp10.388.436.000,00 - Gd. Office 8 Lt. 17 Unit F: Rp5.205.600.000,00 - Office8 Lt.15: Rp52.763.150.000,00 - Office8 Lt. 19: Rp9.558.250.000,00 - Royal Palace: Rp6.188.900.000,00 - Gedung di Samarinda: Rp5.450.000.000,00 Peralatan kantor: - Grand Wijaya: Rp718.424.229,00 - Gd. Office 8 Lt. 12 Unit A Rp1.065.170.841,47 - Gd. Office 8 Lt. 17 Unit F Rp1.065.170.841,47 - Office8 Lt.15: Rp7.456.195.890,28 - Office8 Lt. 19: Rp1.065.170.841,47 - Gedung di Samarinda: Rp416.000.000,00
2.	*Cash in Safe Policy No. 201911202240 0001*	PT KB Insurance Indonesia	22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025	Pada 192 lokasi yang terdiri dari Kantor Cabang dan	Semua risiko kerugian fisik atau kerusakan pada uang yang	Maksimal Rp3.483.141.160,00

Polis Asuransi	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
			Kantor Selain Kantor Cabang	dipertanggungkan oleh Penanggung dan sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung yang disebabkan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan dari siapapun selain karyawan Tertanggung.	
3. *Property All Risk Insurance No. 201910109240001*	PT KB Insurance Indonesia	22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025	Komplek Ruko Palm Spring Blok A3, No. 6-8, Kel. Taman Baloi, Batam, Kepulauan Riau.	Semua risiko kerugian fisik atau kerusakan harta benda yang dipertanggunggkan dari sebab apapun termasuk *Civil Commotion* (Huru-Hara), dan penjarahan sesuai RSMD 4.1 + CC kecuali dikecualikan oleh ketentuan polis.	Rp40.696.860.445,00
4. *Indonesian Earthquake Policy No.201910105240001*	PT KB Insurance Indonesia	22 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025	- Grand Wijaya Center F-3, Jalan Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 121602 - Gedung Office 8 @ Senopati Lot. 28 Lantai 12, Unit A; - Gedung Office 8 @ Senopati Lot. 28 Lantai 17, Unit F; - Gedung Office 8 @ Senopati Lot. 28 Lantai 15, Unit A – G; - Gedung Office 8 Senopati Lot. 28 Lantai 19, Unit H; - Ruko The Royal Palace Menteng Dalam, Tebet. - Jl. M. Yamin No. 1, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda	Bangunan beserta *Office Equipment*	Bangunan: - Grand Wijaya: Rp5.200.800.000,00 - Gd. Office 8 Lt. 12 Unit A: Rp10.388.436.000,00 - Gd. Office 8 Lt. 17 Unit F: Rp5.205.600.000,00 - Gd. Office 8 Lt. 15 Unit A-G: Rp52.763.150.000,00 - Gd. Office 8 Lt. 19 Unit H: Rp9.558.250.000,00 - Ruko Royal Place: Rp6.188.900.000,00 - Gedung di Samarinda: Rp5.450.000.000,00 Peralatan Kantor: - Grand Wijaya: Rp718.424.229,00 - Gd. Office 8 Lt. 12 Unit A Rp1.065.170.841,00 - Gd. Office 8 Lt. 17 Unit F Rp1.065.170.841,00

Polis Asuransi	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
					- Gd. Office 8 Lt. 15 Unit A-G: Rp7.456.195.890,00 - Gd. Office 8 Lt. 19 Unit H Rp1.065.170.841,00 - Gedung di Samarinda: Rp416.000.000,00

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT KB Insurance Indonesia karena dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu KB Financial Group Inc.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan.

12. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai HAKI berupa merek yang terdaftar di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek yang Dilindungi	Nomor Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Berakhir
1.	Kreditplus belanja nyaman tanpa tunai	IDM000073088	36 (jasa-jasa pembiayaan, jasa pinjam meminjam, jasa asuransi, pertanggungan segala macam asuransi, konsultasi asuransi, informasi asuransi, penjaminan, pialang asuransi, jasa-jasa keuangan, analisis keuangan, konsultasi keuangan, penilaian keuangan, penukaran uang, evaluasi keuangan, informasi keuangan, manajemen keuangan, pertanggung jawaban keuangan, biro perkreditan, jasa-jasa kartu kredit, pengeluaran kartu kredit, jasa-jasa kartu debit)	17 September 2034
2.	Prima Plus	IDM000233574	35 (Jasa pelayanan/service untuk memperlancar pembiayaan ke konsumen, pelayanan dalam rangka menyalurkan barang-barang kebutuhan konsumen untuk semua jenis produknya yang dibiayai oleh perusahaan seperti elektronik, kendaraan bermotor, spare part onderdil kendaraan dan lain-lain)	16 Mei 2028
3.	Kredit *plus*	IDM000449140	36 (jasa-jasa pembiayaan, jasa pinjam meminjam, jasa asuransi, pertanggungan segala macam asuransi, konsultasi asuransi, informasi asuransi, penjaminan, pialang asuransi, jasa-jasa keuangan,	31 Agustus 2031

No.	Merek yang Dilindungi	Nomor Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Berakhir
			analisis keuangan, konsultasi keuangan, penilaian keuangan, penukaran uang, evaluasi keuangan, informasi keuangan, manajemen keuangan, pertanggung jawaban keuangan, biro perkreditan, jasa-jasa kartu kredit, pengeluaran kartu kredit, jasa-jasa kartu debit)	
4.	Kreditplus 	IDM000333682 (warna)	36 (jasa-jasa pembiayaan, jasa pinjam meminjam, jasa asuransi, pertanggungan segala macam asuransi, konsultasi asuransi, informasi asuransi, penjaminan, pialang asuransi, jasa-jasa keuangan, analisis keuangan, konsultasi keuangan, penilaian keuangan, penukaran uang, evaluasi keuangan, informasi keuangan, manajemen keuangan, pertanggung jawaban keuangan, biro perkreditan, jasa-jasa kartu kredit, pengeluaran kartu kredit, jasa-jasa kartu debit)	9 Agustus 2030
5.	Kreditplus 	IDM000347448 (hitam putih)	36 (jasa-jasa pembiayaan, jasa pinjam meminjam, jasa asuransi, pertanggungan segala macam asuransi, konsultasi asuransi, informasi asuransi, penjaminan, pialang asuransi, jasa-jasa keuangan, analisis keuangan, konsultasi keuangan, penilaian keuangan, penukaran uang, evaluasi keuangan, informasi keuangan, manajemen keuangan, pertanggung jawaban keuangan, biro perkreditan, jasa-jasa kartu kredit, pengeluaran kartu kredit, jasa-jasa kartu debit)	18 November 2030
6.	Kreditmu 	IDM000777620	36 (jasa-jasa pemberian plafond limit kredit cicilan yang berbasis pada website yang bisa digunakan untuk transaksi belanja e-commerce, pemberian plafond pembiayaan atau kredit)	14 Juni 2027
7.	Kreditmu 	IDM001079122	36 (pembiayaan multiguna, pembiayaan pembelian konsumen, menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil, jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring, pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang	14 September 2032

No.	Merek yang Dilindungi	Nomor Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Berakhir
			dan/atau jasa layanan kredit konsumen, jasa kredit online, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit)	
8.	Kreditmu	IDM001079125	36 (pembiayaan multiguna, pembiayaan pembelian konsumen, menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil, jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring, pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang dan/atau jasa layanan kredit konsumen, jasa kredit online, pembiayaan pembelian konsumen, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil, layanan kredit konsumen)	14 September 2032
9.	Kreditmu	IDM001079245	36 (pembiayaan multiguna, pembiayaan pembelian konsumen, menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil, jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring, pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang dan/atau jasa layanan kredit konsumen, jasa kredit online, pembiayaan pembelian konsumen, menyediakan pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil, layanan kredit konsumen, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit)	14 September 2032
10.	Scorepro	IDM000764445	36 (jasa-jasa pemberian plafond limit kredit cicilan yang berbasis pada website yang bisa digunakan untuk transaksi belanja e-commerce, pemberian plafond pembiayaan atau kredit)	23 Oktober 2027
11.	Kreditplus Express	IDM000856823	42 (jasa penyediaan software digital interaktif dalam bentuk form aplikasi kredit berbasis digital yang didistribusikan ke merchant/partner)	17 Desember 2029
12.	Kreditplus yakin bisa	IDM001099903	36 (pembiayaan pembelian konsumen, menyediakan pembiayaan modal	29 September 2032

No.	Merek yang Dilindungi	Nomor Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Berakhir
	kreditplus #YAKINBISA		kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, pembiayaan multiguna, jasa kredit online, jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring pembeli dan penjual barang-barang dan/atau jasa, layanan kredit konsumen)	
13.	Snap and Buy Snap and Buy	IDM001022127	36 (pembiayaan multiguna)	24 Agustus 2031
14.	Snap & Buy Snap & Buy	IDM001009268	36 (pembiayaan multiguna)	30 Agustus 2031
15.	Kreditplus Mobile	JID2024018134	36 (pembayaran dan layanan kredit, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis, layanan kredit dan pinjaman, jasa kredit online, pembiayaan multiguna, pinjaman online, pembiayaan sewa-belas, jasa pinjaman, pembiayaan dan pengadaan pembiayaan)	Tahap Pemeriksaan Substansif
16.	Kreditplus Mobile	JID2024042961	36 (pembayaran dan layanan kredit, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis, layanan kredit dan pinjaman, jasa kredit online, pembiayaan multiguna, pinjaman online, pembiayaan sewa-belas, jasa pinjaman, pembiayaan dan pengadaan pembiayaan)	Tahap Pemeriksaan Substansif
17.	Kreditplus Mobile	JID2024058832	36 (pembayaran dan layanan kredit, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis, layanan kredit dan pinjaman, jasa kredit online, pembiayaan multiguna, pinjaman online, pembiayaan sewa-beli, jasa pinjaman, pembiayaan dan pengadaan pembiayaan)	Tahap Pemeriksaan Substansif
18.	Kreditplus Mobile	JID2024058830	36 (pembayaran dan layanan kredit, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis, layanan kredit dan pinjaman, jasa kredit online, pembiayaan multiguna, pinjaman online, pembiayaan sewa-	Tahap Pemeriksaan Substansif

No.	Merek yang Dilindungi	Nomor Pendaftaran	Kode Kelas	Tanggal Berakhir
			beli, jasa pinjaman, pembiayaan dan pengadaan pembiayaan)	
19.	Kreditplus Mobile 	JID2024058831	36 (pembayaran dan layanan kredit, menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit, penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis, layanan kredit dan pinjaman, jasa kredit online, pembiayaan multiguna, pinjaman online, pembiayaan sewa-beli, jasa pinjaman, pembiayaan dan pengadaan pembiayaan)	Tahap Pemeriksaan Substansif

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan sedang terlibat dalam perkara perdata, yaitu 5 (lima) di Pengadilan Negeri dan sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 4 (empat) perkara, serta secara tripartit pada Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 4 (empat) perkara.

No.	Keterangan Perkara	Pihak Penggugat	Potensi Nilai Gugatan
1.	Perkara No. 323/Pdt.G/2022/PN Tng Penggugat sebagai pemilik asli dari kendaraan bermotor yang digadaikan oleh adik kandungnya menggugat Perseroan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita	Jose Eka Putra	Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu Rupiah)
2.	Perkara No. 69/Pdt.G/2923/PN BJM Penggugat menggugat Perseroan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum terkait penggunaan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dan tidak dilakukannya penandatanganan akta jaminan fidusia dihadapan Notaris.	Nasir H	Tidak ada nilai gugatan karena Penggugat hanya ingin mengajukan negosiasi pelunasan (Pelunasan Khusus)
3.	Perkara No.286/Pdt.G/2023/PN Blb Penggugat mempermasalahkan Penarikan Agunan di jalan dengan cara kasar dan premanisme	Asep Ferdinan	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)
4.	Perkara No. 23/Pdt.G/2024/PN Tjk Penggugat mempermasalahkan Klausula Baku dan surat kuasa khusus untuk penerbitan akta fidusia dan sertifikat fidusia di dalam Perjanjian Pembiayaan Tergugat	Mayani	Rp125.203.508,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga ribu lima ratus delapan Rupiah)
5.	Perkara No. 755/Pdt.G/2024/PN.Sby Pemalsuan identitas/data serta BPKB Penggugat yang dijadikan jaminan oleh salah satu Debitur Tergugat (Perseroan) Cabang Surabaya	Christine Dwi Arini	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah)
6.	Penyelesaian Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan berat	Sony Aryanto Samau	Tidak terdapat nilai gugatan, karena merupakan perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan Perseroan telah

No.	Keterangan Perkara	Pihak Penggugat	Potensi Nilai Gugatan
			membayarkan hak-hak Penggugat
7.	Penyelesaian Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan berat	Yosi Irwanto Delu	Tidak terdapat nilai gugatan, karena merupakan perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan Perseroan telah membayarkan hak-hak Penggugat
8.	Penyelesaian Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh tidak tercapainya pencapaian standar yang ditetapkan oleh Tergugat	Prayitno	Tidak terdapat nilai gugatan, karena merupakan perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh tidak tercapainya pencapaian standar yang ditetapkan dan Perseroan telah membayarkan hak-hak Penggugat
9.	Penyelesaian Tripartit Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan berat	Youdy Maxi Bart Marthen Wohon	Tidak terdapat nilai gugatan, karena merupakan perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan Perseroan telah membayarkan hak-hak Penggugat
10.	Perkara No. 16/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gto Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan berat	Zulkifli Ahmad	Rp62.482.431,00 (enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu Rupiah)
11.	Perkara No. 24/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Ptk Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh kesalahan berat	Yuri Yanto	Tidak terdapat nilai gugatan, karena merupakan perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh kesalahan dan Perseroan telah membayarkan hak-hak Penggugat
12.	Perkara No. 133/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mdn Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat yang disebabkan oleh tidak tercapainya pencapaian standar yang ditetapkan oleh Tergugat	Jiwen	Tidak terdapat nilai gugatan, karena merupakan perkara Pemutusan Hubungan Kerja yang disebabkan oleh tidak tercapainya pencapaian standar yang ditetapkan dan Perseroan telah membayarkan hak-hak Penggugat
13.	Perkara No. 26/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plk Penggugat menolak pemberian Surat Peringatan oleh Tergugat dengan alasan Surat Peringatan diberikan tidak berdasarkan pada kondisi faktual yang terjadi	Muhammad Aikal Pansyah	Rp46.263.804,00 (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat Rupiah)

Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

Selain perkara sebagaimana dirinci di atas, Perseroan tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi serta rencana penggunaan dananya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap pihak manapun yang berkaitan dengan transaksi atau yang dapat memengaruhi rencana Penawaran Umum Obligasi, tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dalam rangka komitmen Perseroan untuk mendukung berbagai program yang membantu proses pemberdayaan masyarakat kurang mampu menjadi mandiri dan bisnis yang berkelanjutan, maka Perseroan secara aktif melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, terutama yang memberikan manfaat jangka panjang.

Berikut foto dokumentasi dari sebagian kegiatan CSR Perseroan:



Bantuan Makanan Bergizi untuk TK PAUD Permata Hati



Aksi Bersih Pantai & Penanaman 2000 Bibit Mangrove



Bantuan untuk Pembangunan Fasilitas Olahraga, Yayasan St. Antonius Padua Ri'i



Donasi untuk Acara Seni dan Budaya "Cares for Blooming Children"



Sumbangan untuk Karyawan Terdampak Gempa di Cabang Cianjur



Kreditplus Peduli Lingkungan Hidup

15. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. Umum

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang pembiayaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
ii. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Pari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Fasilitas Modal Usaha, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau
iii. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Fasilitas Dana, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau
iv. Sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan pembiayaan penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi terbaik di Indonesia.

Misi Perseroan adalah sebagai berikut:
- Menyediakan solusi dan layanan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- Membangun kerangka kerja untuk setiap orang belajar, berkembang dan bekerja, menciptakan nilai dan potensi pertumbuhan

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan izin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan usaha meliputi pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Saat ini Perseroan fokus pada sektor kegiatan pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan pembiayaan untuk i) pengadaan kendaraan bermotor bekas maupun baru baik roda dua dan roda empat atau lebih, ii) *Digital Electronics & Appliances (DE&A)* /barang modal/eletronik dengan target segmen pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah dengan metode pembayaran secara angsuran/berkala, iii) pembelian piutang usaha untuk tujuan modal kerja. Kegiatan pembiayaan konsumen tetap merupakan fokus usaha Perseroan dan menjadi pilar utama bisnis Perseroan untuk tahun-tahun mendatang.

***Service Product* Perseroan**

Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha pembiayaan konsumen. Melalui produk jasa pembiayaan konsumen ini, Penerbit menyediakan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua bekas untuk berbagai jenis dan merek. Di samping itu, Perseroan juga memberikan pelayanan pembiayaan konsumen untuk pengadaan produk *Digital Electronics & Appliances (DE&A)* /elektronik yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen serta pembiayaan untuk modal kerja dengan pembelian piutang usaha dengan jaminan.

Pembiayaan Konsumen

Pelayanan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor bekas roda empat dan roda dua ditawarkan oleh Perseroan untuk berbagai jenis dan merek kendaraan, mulai dari sedan, *special utility vehicle* (SUV), *minibus*, *pick-up*, sepeda motor hingga truk; baik untuk keperluan pribadi maupun penunjang keperluan bisnis. Sedangkan jasa pelayanan pembiayaan konsumen untuk *Digital Electronics & Appliances (DE&A)* ditawarkan oleh Perseroan untuk berbagai jenis barang termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang elektronik, komputer, *notebook*, *audio video*, alat-alat pertanian, *household appliances*, *furniture*, *handphone*/PDA, *music instruments*, *office equipments*, *multi equipments*, *health equipments*, *game console*, sepeda, *sport equipments*, dan atau barang-barang sejenis lainnya kepada konsumen kelas menengah ke bawah.

Alasan Perseroan berfokus pada kendaraan bermotor bekas dan *Digital Electronics & Appliances (DE&A)* adalah:
(i) skema pembiayaan yang lebih baik sehingga menghasilkan profit dan kualitas aset yang lebih menguntungkan dengan tingkat risiko yang terkendali.
(ii) ketergantungan pada produsen kendaraan lebih rendah. Hal ini dikarenakan untuk segmen kendaraan baru, perusahaan pembiayaan biasanya diharuskan untuk memberi pembiayaan pada kendaraan baru dengan uang muka rendah.
(iii) tingkat pesaingan pada pembiayaan *Digital Electronics & Appliances (DE&A)* relatif masih belum seketat persaingan pada pembiayaan kendaraan bermotor baru.
(iv) Pangsa pasar yang lebih besar dan hanya membutuhkan penetrasi lokal daripada melakukan penetrasi nasional yang tentu saja membutuhkan kerja sama dengan *supplier*.

Sejak tahun 2021, dalam rangka ekspansi lini bisnis, Perseroan juga mulai melayani pembiayaan anjak piutang atau *factoring* yang merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi yang memiliki TOP (*term of payment*). Dengan adanya pembiayaan anjak piutang, Perseroan bermaksud untuk membantu usaha atau bisnis konsumen sehingga arus keuangan konsumen dapat berjalan dengan baik dan lancar.

C. Proses Usaha

Proses Pembiayaan kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua

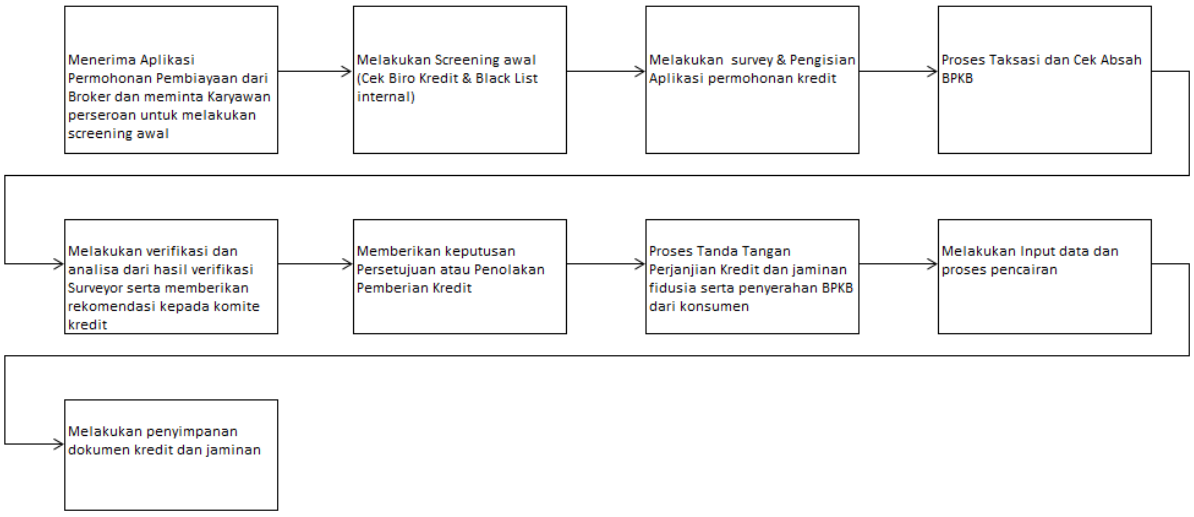
Melalui Karyawan Perseroan



Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen kepada calon konsumen Perseroan melalui Karyawan Perseroan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Karyawan Perseroan menerima aplikasi permohonan pembiayaan dari calon konsumen. Calon konsumen kemudian mengisi Aplikasi Kredit.
2. Karyawan Perseroan akan melakukan proses cek *blacklist* internal dan melakukan pengecekan atas aplikasi Kredit yang telah di isi oleh calon konsumen.
3. Melakukan verifikasi dan analisa calon konsumen serta memberikan rekomendasi atas kelayakan calon konsumen kepada komite kredit.
4. Karyawan Perseroan akan melakukan proses taksasi dan pengecekan absah atas BPKB konsumen.
5. Komite kredit akan memberikan keputusan Persetujuan atau Penolakan Pemberian Kredit.
6. Proses penandatanganan Perjanjian Kredit dan fidusia serta penyerahan BPKB dari konsumen kepada Perseroan.
7. Melakukan input data pada system dan melakukan proses pencairan.
8. Melakukan penyimpanan dokumen kredit dan jaminan.

Melalui Broker

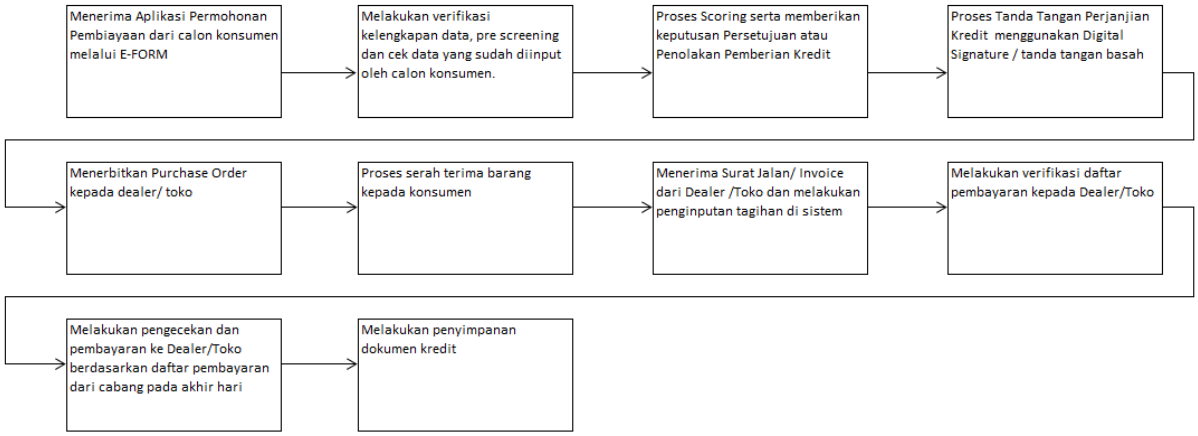


Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen kepada calon konsumen Perseroan melalui broker adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Broker memberikan aplikasi permohonan pembiayaan calon konsumen kepada *Marketing Support* dan meminta karyawan Perseroan untuk melakukan *screening* awal.
2. Dilakukan *screening* awal melalui biro kredit beserta dengan cek ke *data blacklist internal*.

3. Karyawan Perseroan akan melakukan kunjungan dan verifikasi ke konsumen dan meminta konsumen untuk mengisi Aplikasi Permohonan Kredit dan menyerahkan data untuk keperluan analisa kredit oleh Perseroan.
4. Karyawan Perseroan akan melakukan verifikasi dan analisa atas hasil survey yang dilakukan serta memberikan rekomendasi kepada komite kredit.
5. Komite kredit akan memberikan keputusan Persetujuan atau Penolakan Pemberian Kredit.
6. Proses penandatanganan Perjanjian Kredit dan fidusia serta penyerahan BPKB dari konsumen kepada Perseroan.
7. Melakukan input data pada system dan melakukan proses pencairan.
8. Melakukan penyimpanan dokumen kredit dan jaminan.

Proses Pembiayaan Digital Electronics & Appliances (DE&A)



Proses dalam memberikan pembiayaan *(DE&A)* kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Karyawan Perseroan menerima Aplikasi Permohonan Pembiayaan dari calon konsumen melalui E-FORM.
2. Karyawan Perseroan melakukan verifikasi kelengkapan data, melakukan *pre-screening* dan melakukan pemeriksaan atas data yang sudah di input oleh calon konsumen.
3. Proses Scoring serta memberikan keputusan Persetujuan atau Penolakan Pemberian Kredit.
4. Proses Tanda Tangan Perjanjian Kredit menggunakan *Digital Signature* atau Tanda Tangan Basah.
5. Perseroan menerbitkan *Purchase Order* kepada Dealer/Toko.
6. Proses serah terima barang kepada konsumen.
7. Perseroan menerima Surat Jalan/ Invoice dari Dealer/Toko dan melakukan penginputan tagihan di sistem.
8. Perseroan melakukan verifikasi daftar pembayaran kepada Dealer/Toko.
9. Melakukan pengecekan dan pembayaran ke Dealer/Toko berdasarkan daftar pembayaran dari cabang pada akhir hari.
10. Melakukan penyimpanan dokumen kredit.

Pendapatan

Rincian dari pendapatan Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembiayaan Konsumen	967.582	2.169.746	2.055.185
Anjak Piutang	31.908	44.847	25.215
Lain-lain	37.465	67.606	16.558
Total Pendapatan	**1.036.955**	**2.282.199**	**2.096.958**

Portofolio Kredit terbesar Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah, atau dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni		31 Desember			
	2024		2023		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Piutang Kendaraan Bermotor Roda Empat	4.874	60	5.042	62	4.424	59
Piutang Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.722	21	1.611	20	1.465	19
Piutang *Digital Electronics & Appliances (DE&A)*	1.080	13	1.114	14	1.396	19
Tagihan Anjak Piutang	491	6	426	4	249	3
Total	**8.167**	**100**	**8.193**	**100**	**7.534**	**100**

D. Pemasaran

Dalam pemasaran kegiatan usaha, Perseroan memiliki 129 kantor cabang dan 62 kantor selain kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Daerah Jabodetabek menempati kontribusi usaha yang terbesar sejalan dengan perkembangan industri perdagangan, pengangkutan, wisata dan pertanian serta konstruksi berkembang dengan cepat. Peluang yang terbuka luas bagi Perseroan untuk mengembangkan usahanya adalah Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Timur seiring dengan semakin bertumbuhan pembangunan di daerah dan juga peningkatan kesejahteraan dan bertambahnya daya beli masyarakat.

Dalam rangka mempertahankan pangsa pasar yang sudah tercipta dan menghadapi persaingan usaha di masa datang serta meraih peluang yang ada, Perseroan memiliki beberapa strategi pemasaran yaitu:

1. Melakukan pengembangan bisnis melalui penguatan pertumbuhan aset bernilai tinggi, yaitu dengan cara:
   a. Meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan daya saing jaringan penyaluran pembiayaan.
   b. Meningkatkan produktivitas penyaluran pembiayaan dan memperkuat hubungan dengan saluran eksternal.
   c. Meningkatkan loyalitas tenaga kerja eksternal dengan memperluas system penghargaan kepada tenaga kerja eksternal yang menunjukan performa yang sangat baik.
2. Diferensiasi pemasaran berdasarkan profitabilitas untuk produk pembiayaan elektronik, dengan cara:
   a. Meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan dan meningkatkan profitabilitas.
   b. Melakukan promosi yang selektif yang berpusat pada mitra berkualitas tinggi.
   c. Elaborasi harga dan meningkatkan efisiensi kerja.
3. Memperluas basis pelanggan dengan cara:
   a. Meningkatkan telemarketing (TMO) untuk *cross-selling*.
   b. Melakukan pembaruan informasi konsumen secara *real-time* untuk meningkatkan efisiensi penjualan TMO.
   c. Meningkatkan kecepatan pemrosesan aplikasi kredit dengan mengembangkan dan menerapkan sistem aplikasi untuk *Dealer.*
4. Berupaya untuk memasuki pasar yang dapat menghasilkan potensi nilai asset pembiayaan tinggi, seperti bidang usaha pertambangan dan penggalian. Disisi lain, hal ini juga bertujuan untuk menciptakan batu loncatan untuk bisnis masa depan.
5. Mendorong Transformasi Digital kegiatan bisnis Perseroan, dengan cara:
   a. Menciptakan Customer Experience yang lebih baik dengan melakukan desain ulang saluran pembiayaan, seperti penguatan terhadap pembiayaan melalui saluran seluler, melakukan efisiensi tenaga kerja operasional dengan cara pembaruan terhadap saluran pembiayaan Kreditplus Mobile (KPM) dan integrasi saluran Omni Channel *(on/offline).*
   b. Peningkatan kompetensi IT yang menjadi penunjang atas sistem operasi dan secara paralel mempersiapkan kebutuhan bisnis di masa depan.
6. Mendorong perluasan pembiayaan sebagai penunjang bisnis di masa depan dengan cara memperluas pasar pembiayaan korporasi, seperti; meningkatkan produk pembiayaan untuk perusahaan dengan harga satuan yang tinggi untuk tujuan logistik, sewa dan pertambangan, serta memperluas bisnis Anjak Piutang secara aktif dengan menggunakan KB premium.

Berikut ini adalah data penyaluran pembiayaan baru Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir menurut daerah pemasaran:

Region	Juni 2024	Desember 2023	Desember 2022
Jabodetabek	1.902.694.982.423	3.770.348.580.907	3.334.405.063.620
Jawa Barat	373.514.072.791	828.026.682.199	799.744.057.058
Jawa Tengah	150.531.871.091	366.027.042.749	300.483.254.689
Jawa Timur	315.188.354.284	756.074.787.214	862.613.593.988
Kalimantan	287.954.685.377	759.442.439.241	741.074.111.627
Sulawesi	552.769.751.089	1.164.931.180.072	1.204.642.964.058
Sumatera	385.558.886.196	960.774.267.941	942.479.967.846
Indonesia Timur	130.574.591.388	314.373.349.310	279.230.487.961
Total	**4.098.787.194.637**	**8.919.998.329.634**	**8.464.673.500.846**

E. Kolektabilitas Piutang

Piutang Macet (*Non-Performing Financing*)

Piutang Macet atau NPF Bersih (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari setelah dikurangi dengan pencadangan. Rasio piutang macet bersih dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar 2,79%, per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 2,01% dan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 1,73%.

Secara umum, Rasio NPF Perusahaan Pembiayaan mencapai 2,80% per 30 Juni 2024 atau meningkat sebesar 0,35% dibandingkan pada 31 Desember 2023 yaitu sebesar 2,44%. Peningkatkan rasio NPF ini juga dialami hampir oleh seluruh Perusahaan Pembiayaan lainnya. Bagi Perseroan, peningkatan rasio piutang macet ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan yang menyebabkan daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menurun sehingga berpengaruh pada kemampuan konsumen dalam membayar cicilan. Selain itu, adanya penurunan piutang pembiayaan Perseroan yang disebabkan oleh penurunan permintaan dari konsumen terutama di produk kendaraan bermotor roda empat juga mengakibatkan kenaikan rasio piutang macet Perseroan. Program relaksasi pelunasan terkait Covid-19 yang berakhir pada April 2024 juga turut berkontribusi terhadap peningkatan NPF Perseroan.

Peningkatan rasio piutang macet ini terutama disebabkan oleh tren inflasi yang menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun sehingga berpengaruh pada kemampuan konsumen dalam membayar cicilan serta adanya penurunan piutang pembiayaan perusahaan yang disebabkan oleh penurunan permintaan dari pelanggan terutama di produk kendaraan bermotor roda empat.

Perseroan terus melakukan peningkatan dalam kriteria pemberian kredit dan pembenahan tim penagihan dengan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Tabel Kolektibilitas Piutang

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPF	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
NPF Gross	4,75%	3,71%	3,49%
NPF Nett	2,79%	2,01%	1,73%

Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

(dalam miliaran Rupiah)

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPF	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
NPF Gross	388	304	263
NPF Nett	227	165	130

Berikut ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Perseroan dalam mengurangi piutang macet:

- Kendaraan Bermotor Roda Empat**:** Melakukan pembaharuan atas parameter *Loan to Value* (LTV) berdasarkan Branch Grading, Branch Manager Grading, Kategori Pelanggan, kepemilikan BPKB Kendaraan, jenis dan tahun kendaraan, tenor, dan mulai menggunakan sistem aplikasi Taksasi-Sally. Dengan menggunakan Taksasi-Sally, penilaian dilakukan oleh tim operasional dan konsumen membawa unit kendaraan yang akan dibiayai ke cabang/kantor pos dimana pengambilan dokumen, foto dan check list kendaraan dilakukan langsung secara online. Sistem aplikasi Taksasi-Sally menghasilkan penilaian kualitas kendaraan berupa penilaian interior kendaraan (termasuk *dashboard*, speedometer, dan jok kendaraan), eksterior (meliputi tampilan depan, belakang, kiri, kanan dan roda) dan grading mesin (termasuk tatanan dan mesin) yang hasilnya akan menjadi dasar penyesuaian nilai kendaraan yang akan dibiayai. Dalam proses lamarannya, Taksasi-Sally telah mengakomodir proses review berjenjang mulai dari tim marketing di lapangan, tim operasional di cabang, supervisor marketing dan supervisor operasional.

- Kendaraan Bermotor Roda Dua: Melakukan update skema minimum *Down Payment* berdasarkan kepemilikan BPKB (Nama Nasabah & Pasangan atau Nama Orang Lain), tenor, hasil Biro Kredit, Branch Cluster. Perseroan akan terus melakukan monitoring dan pembaharuan secara berkelanjutan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu Perseroan juga berencana untuk melakukan penerapan *Risk Based Pricing* (RBP) untuk memberikan *pricing* yang akurat dan selaras dengan profil dan risiko konsumen pada akhir tahun 2024.

- DE&A: Perseroan melakukan pembaharuan skema Uang Muka minimum berdasarkan hasil Biro Kredit Pelanggan Baru, hasil *scoring*, kategori Cabang, Perseroan juga telah melakukan penerapan *Risk Based Pricing* (RBP) untuk menawarkan *pricing* yang tepat dan sesuai dengan profil dan risiko konsumen dan Perseroan akan terus melakukan monitoring dan pembaharuan secara berkelanjutan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Per 30 Juni 2024, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola adalah sebesar 3,62%, mengalami penurunan sebesar 3,91% dari 7,53% di tanggal 31 Desember 2023. Penurunan ini terutama dikarenakan Perseroan terus melakukan upaya penagihan dan melakukan peningkatan dalam kriteria pemberian kredit dan pembenahan tim penagihan dengan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Per 31 Desember 2023, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami peningkatan sebesar 1,01% dari 6,52% di tanggal 31 Desember 2022 menjadi 7,53%, peningkatan rasio penghapusan piutang ini sehubungan dengan adanya penurunan kemampuan konsumen dalam membayar angsurannya. Untuk melakukan mitigasi ini, sepanjang tahun 2023, Perseroan terus berbenah dengan melakukan peningkatan dalam kriteria pemberian kredit dan pembenahan tim penagihan dengan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan, antara lain:

- **Kendaraan Bermotor Roda Empat**
  Melakukan pembaharuan atas parameter *Loan to Value* (LTV) berdasarkan Branch Grading, Branch Manager Grading, Kategori Pelanggan, kepemilikan BPKB Kendaraan, jenis dan tahun kendaraan, tenor, dan mulai menggunakan sistem aplikasi Taksasi-Sally. Dengan menggunakan Taksasi-Sally, penilaian dilakukan oleh tim operasional dan konsumen membawa unit kendaraan yang akan dibiayai ke cabang/kantor pos dimana pengambilan dokumen, foto dan check list kendaraan dilakukan langsung secara online. Sistem aplikasi Taksasi-Sally menghasilkan penilaian kualitas kendaraan berupa penilaian interior kendaraan (termasuk dashboard, speedometer, dan jok kendaraan), eksterior (meliputi tampilan depan, belakang, kiri, kanan dan roda) dan grading mesin (termasuk tatanan dan mesin) yang hasilnya akan menjadi dasar penyesuaian nilai kendaraan yang akan dibiayai. Dalam proses lamarannya, Taksasi-Sally telah mengakomodir proses review berjenjang mulai dari tim marketing di lapangan, tim operasional di cabang, supervisor marketing dan supervisor operasional. Selain itu jalur pelaporan bagi PIC yang melakukan survei (Credit Officer), yang sebelumnya berada di Tim Bisnis, kini berada di dalam Tim Operasi Kredit untuk memperkuat dual control dan pemisahan tugas.

- **Kendaraan Bermotor Roda Dua**
  Melakukan update skema minimum Down Payment berdasarkan kepemilikan BPKB (Nama Nasabah & Pasangan atau Nama Orang Lain), tenor, hasil Biro Kredit, Branch Cluster. Perseroan akan terus melakukan monitoring dan pembaharuan secara berkelanjutan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu Perseroan juga berencana untuk melakukan penerapan *Risk Based Pricing* (RBP) untuk memberikan pricing yang akurat dan selaras dengan profil dan risiko konsumen pada akhir tahun 2024. Selain itu, jalur pelaporan bagi PIC yang melakukan survei (Credit Officer), yang sebelumnya berada di Tim Bisnis, kini berada di dalam Tim Operasi Kredit untuk memperkuat dual control dan pemisahan tugas.

- **Digital, Electronic & Appliances (DE&A)**
  Perseroan melakukan pembaharuan skema Uang Muka minimum berdasarkan hasil Biro Kredit Pelanggan Baru, hasil scoring, kategori Cabang, dan di bulan Desember 2023, Perseroan juga mulai melakukan penerapan *Risk Based Pricing* (RBP) untuk menawarkan *pricing* yang tepat dan sesuai dengan profil dan risiko konsumen dan Perseroan akan terus melakukan monitoring dan pembaharuan secara berkelanjutan menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

  Digitalisasi sistem secara menyeluruh dan implementasi Konsep *DE&A*, dimana untuk menyelesaikan proses akuisisi dan analisa kredit sudah menggunakan *credit scoring* tanpa keterlibatan Analis Kredit.

Selain inisiatif di atas, Perseroan juga terus melakukan perluasan penggunaan telco scoring untuk mencakup pengguna Tri, Telkomsel, XL dan Axis, selain Indosat.

Tabel Penghapusan Piutang

	30 Juni 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Penghapusan Piutang	3,62%	7,53%	6,52%
Penghapusan Piutang (dalam miliar Rupiah)	296	617	491

F. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank serta Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai penilaian atas i) tata kelola perusahaan yang baik, ii) profil risiko, iii) rentabilitas, dan iv) permodalan. Berikut ini merupakan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perseroan tahun 2023 yang diukur di bulan Februari 2024:

No	Faktor Penilaian	Peringkat Individual
1	Tata kelola Perusahaan yang baik	2
2	Profil risiko	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat Tingkat Kesehatan		**2**

Berdasarkan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan yang dinilai dari indikator: tata kelola perusahaan, profil risiko, rentabilitas dan permodalan, Perseroan menilai bahwa secara umum kondisi kesehatan perusahaan berada di peringkat 2 (kategori “Sehat”). Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Komitmen manajemen Perusahaan terhadap upaya pencapaian target-target yang tertuang dalam rencana strategis Perusahaan tahun 2023, telah terbukti berhasil terpenuhi dengan ditunjukkannya dengan tercapainya target penyaluran pembiayaan baru yang didukung dengan upaya pendanaan yang cukup dan manajemen juga berhasil dalam meningkatkan kapasitas permodalan melalui penerbitan perpetual convertible bonds dan penambahan modal melalui setoran tunai, serta pencapaian laba usaha yang sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun nilainya masih dibawah dari tahun sebelumnya.

G. Persaingan Usaha

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditopang oleh tingginya aktivitas ekonomi di dalam negeri, maka kegiatan usaha pembiayaan pada saat ini semakin diminati oleh investor mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha ini.

Secara umum, industri pembiayaan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor dan *Digital Electronics & Appliances (DE&A)*. Sektor usaha ini juga diramaikan oleh perbankan yang juga meningkatkan kredit kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama dalam penetapan suku bunga.

Untuk menghadapi persaingan dalam industri pembiayaan yang ketat, Perseroan mengedepankan berbagai langkah dan strategi untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan, diantaranya adalah:
- membina hubungan yang baik dengan dealer maupun *merchant*.
- menyediakan paket pembiayaan yang kompetitif untuk menunjang penjualan *dealer* dan *merchant*
- meningkatkan secara terus menerus kualitas layanan kepada konsumen yang dapat meningkatkan *repeat order* transaksi pembiayaan.
- menyediakan pilihan ragam jenis produk bagi masyarakat (pembiayaan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan komersial dan *(DE&A)*.
- kerjasama dengan bank maupun *payment point* seperti kantor pos, sebagai kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembayarang angsuran.
- meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan risiko atas aset produktif Perseroan.

Perseroan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan nasional, secara khusus menghadapi persaingan usaha dengan seluruh perusahaan pembiayaan di Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan analisa pangsa pasar yang dapat dilihat melalui perbandingan jumlah aset yang dimiliki dan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap industri pembiayaan nasional, yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 Juni 2024
Penyaluran Pembiayaan	
Perusahaan Pembiayaan Nasional	97.965
Perseroan	4.098
Pangsa Pasar	4,18%

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per 30 Juni 2024, pangsa pasar Perseroan berdasarkan jumlah penyaluran pembiayaan sebesar 4,18% terhadap total penyaluran pembiayaan nasional. Dengan menganalisis kondisi tersebut, Perseroan tetap optimis untuk memperkuat pangsa pasar dan meningkatkan market *positioning* di industri pembiayaan nasional.

Tabel berikut ini menyajikan informasi pesaing Perseroan dalam industri pembiayaan:

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat - Bekas:

Nama Perusahaan	Pangsa Pasar	Penjualan (dalam jutaan rupiah)
BFI Finance Indonesia	12,1%	6.127.279
Astra Credit Companies	9,9%	5.050.202
Mandiri Tunas Finance	5,4%	2.730.244
KB Finansia Multi Finance	3,1%	1.602.038

Sumber : Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per 30 Juni 2024

Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Dua - Bekas:

Nama Perusahaan	Pangsa Pasar	Penjualan (dalam jutaan rupiah)
Federal International Finance	43,69%	6.645.948
Mandala Multi Finance	10,72%	1.630.748

Nama Perusahaan	Pangsa Pasar	Penjualan (dalam jutaan rupiah)
BFI Finance Indonesia	7,17%	1.091.036
KB Finansia Multi Finance	6,21%	944.413

Sumber : Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per 30 Juni 2024

Pembiayaan *Digital Electronics & Appliances*:

Nama Perusahaan	Pangsa Pasar	Penjualan (dalam jutaan rupiah)
Home Credit Indonesia	61,2%	3.731.945
Astra Multi Finance	11,3%	687.196
KB Finansia Multi Finance	11,1%	674.494
AEON Credit Service Indonesia	4,2%	258.509

Sumber : Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) per 30 Juni 2024

H. Prospek Usaha

Berdasarkan Siaran Pers Kementrian Keuangan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dalam World Economic Outlook (WEO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% (YoY) di tahun 2024, atau tetap stabil seperti tahun lalu. Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stabil, IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2024 tetap tumbuh di level 5% seperti pada tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia memiliki daya tahan yang baik di tengah berbagai tantangan yang melanda perekonomian global.

Dari segi suku bunga, berdasarkan data Bloomberg, di bulan September 2024 suku bunga Fed Fund Rate (FFR) telah menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 poin dari posisi 5,25%-5,50% menjadi 4,75%-5,00%. Sebelumnya, Bank Indonesia memperkirakan bahwa The FED akan memangkas suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebanyak tiga kali pada tahun ini dengan total 75basis poin sehingga suku bunga FFR pada akhir tahun akan menuju level 4,5% - 4,75%.

Seain itu, berdasarkan data dari Bank Indonesia dimana Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1%, penguatan dan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar Rupiah yang stabil dan cenderung menguat, serta pertumbuhan ekonomi yang perlu terus didorong agar lebih tinggi. Penurunan ini tentu saja menjadi angin segar bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari pemberi pinjaman.

Akan tetapi beberapa kondisi ekonomi domestik di tahun 2024 juga masih memiliki tantangan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, peningkatan harga komoditas pangan berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum mayoritas naik tentunya hal ini juga mempengaruhi daya beli konsumen serta keputusan masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Hal ini lah yang menyebabkan tahun 2024 ini menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan pembiayaan khususnya dalam menyalurkan pembiayaan pada produk kendaraan bermotor roda empat dimana penurunan permintaan dari pelanggan masih menjadi isu dalam menyalurkan pembiayaan baru di produk kendaraan bermotor roda empat. Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan permintaan di produk kendaraan bermotor roda empat, Perseroan saat ini juga telah mengembangkan penyaluran pembiayaan melalui produk kendaraan bermotor roda dua dan juga *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*). Melalui pengembangan penyaluran pembiayaan di kedua produk ini, Perseroan berharap kinerja keuangan Perseroan bisa semakin meningkat.

Dari sisi pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna, nilai piutang perusahaan pembiayaan per bulan Juni 2024 mengalami kenaikan 4,4% dari sebesar Rp445,95 triliun tahun 2023 menjadi sebesar Rp465,42 triliun di bulan Juni 2024. Industri pembiayaan nasional juga lebih banyak menyalurkan pembiayaan untuk multiguna, hal ini ditandai dengan pembiayaan multiguna yang memberikan kontribusi sebesar 54,5% dari total pembiayaan nasional. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja sebesar 35,2% dan 10,3% terhadap total pembiayaan nasional

Sedangkan untuk nilai pendapatan, industri pembiayaan nasional membukukan pendapatan sebesar Rp67,1 triliun untuk periode enam bulan yang berakhir pada bulan Juni 2024, atau meningkat 13,2% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada bulan Juni 2023 sebesar Rp59,2 triliun. Dengan perolehan pendapatan tersebut, pertumbuhan kredit diperkirakan akan terus membaik, dipengaruhi oleh makin meningkatnya aktivitas ekonomi domestik yang berdampak pada naiknya kebutuhan pembiayaan baik dari korporasi maupun rumah tangga, termasuk dari golongan generasi muda yang makin besar perannya dalam perekonomian.

Melihat kondisi tersebut, Perseroan selaku perusahaan pembiayaan akan memonitor setiap aspek risiko yang dihadapi Perusahaan secara *up-to-date* dan memberikan respon yang cepat, tepat, dan akurat melalui kebijakan terkait operasional Perseroan. Perseroan juga senantiasa menguatkan strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang diharapkan mampu mendongkrak kinerja bisnis Perseroan.

Pembiayaan kendaraan bermotor roda empat

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) jumlah penjualan kendaraan bermotor roda empat untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar 408.012 unit, mengalami penurunan sebesar 98.415 unit atau 19,4% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar 506.427 unit. Data ini mengindikasikan bahwa saat ini kondisi sektor kendaraan bermotor roda empat di Indonesia masih dalam kondisi lesu.

Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) jumlah penjualan kendaraan bermotor roda dua untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar 3.170.994 unit, mengalami penurunan sebesar 30.936 unit atau 1,0% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar 3.201.930 unit. Walaupun sedikit mengalami penurunan, data ini mengindikasikan bahwa saat ini kondisi sektor otomotif terutama untuk kendaraan bermotor roda dua masih stabil dan masih akan terus bertumbuh serta diharapkan akan terus naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Prospek pembiayaan produk *Digital Electronics & Appliances (DE&A)*

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) jumlah penyaluran pembiayaan baru untuk produk Elektronik *Digital Electronics & Appliances* untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp6,1 Triliun, mengalami penurunan sebesar Rp118 Miliar atau 2,0% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sebesar Rp6,2 Triliun. Walaupun sedikit mengalami penurunan, data ini mengindikasikan bahwa saat ini kondisi sektor produk *Digital Electronics & Appliances* (*DE&A*) masih stabil dan masih akan terus bertumbuh serta diharapkan akan terus naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia.

I. Strategi Usaha

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan menjalankan berbagai strategi usaha. Ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, maka strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Strategis Jangka Pendek Periode 1 (Satu) Tahun

    a) Dari sisi pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan upaya mengatur ulang portofolio bisnis dengan memperkuat profitabilitas aset, diantaranya dengan: i) mengelola jaringan kantor cabang untuk setiap produk dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi dan risiko di area tersebut, ii) memperkuat tenaga penjualan di daerah-daerah yang tengah direvitalisasi secara ekonomi, seperti daerah-daerah yang terkait dengan rencana relokasi ibukota, iii) membangun titik penjualan baru di area kecil hingga menengah yang belum terjangkau.

b) Memasuki pasar pembiayaan korporasi dengan mempromosikan pembiayaan bagi perusahaan untuk pembiayaan unit yang memiliki harga satuan yang tinggi (logistik, rental, dan lain lain), serta memperluas lingkup pembiayaan Anjak Piutang secara aktif.
c) Dari sisi transformasi digital, Perseroan berencana akan melakukan digitalisasi pada proses pinjaman konvensional, dengan cara; i) Memberlakukan tanda tangan digital untuk seluruh dokumen pembiayaan roda dua dan roda empat (2W dan 4W), ii) Menerapkan digitalisasi dalam tugas-tugas yang bersifat administratif iii) Meningkatkan upgrade core system TI yang dapat mendukung kegiatan bisnis di masa depan.
d) Perseroan juga melakukan penambahan sistem pengelolaan terhadap risiko operasional, dengan cara; i) pelaksanaan latihan *loss event database* (berbasis pada data kejadian kerugian), ii) menetapkan matriks *Key Risk Indicator* (KRI) sebagai alat indikator peringatan dini risiko operasional, iii) Pengimplementasian RCSA *(Risk Control Self Assessment)* tahap II untuk mengurangi risiko inheren menjadi risiko residual dan titik pemeriksaan rencana mitigasi.
e) Mempertimbangkan dari sisi kompleksitas bisnis Perusahaan dan perlunya pemisahan fungsi (spesialisasi) antara fungsi IT Operasional dan IT Digitalisasi, maka Perseroan akan melakukan pemisahan direktorat antara IT Digitalisasi dan IT Operasional serta divisi terkait yang dibawahnya.
f) Dalam upaya membangun budaya kerja baru di era digital serta menyebarkan budaya Perseroan, maka Perseroan akan i) meningkatkan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan memperkuat kemampuan organisasi, ii) pengembangan portal komunikasi internal berbasis *e-learning* pada sistem Compass, iii) memperkuat identitas Perseroan dengan meningkatkan komunikasi melalui *Core Values* perusahaan kepada karyawan.
g) Menetapkan rencana penerbitan obligasi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengoperasian tenaga kerja yang efisien.

2. Strategis Jangka Menengah Periode 3 (Tiga) Tahun
a) Memperkuat hubungan kerjasama dengan dealer dan broker melalui i) memperluas program yang menarik untuk dealer *DE&A*, ii) memperluas target nasabah pembiayaan roda empat (4W), iii) menetapkan proses digitalisasi untuk pengajuan pinjaman dari broker, iv) memperluas program promosi untuk distributor pembiayaan roda empat (4W), v) meningkatkan penjualan melalui broker berskala besar pada pembiayaan roda dua (2W).
b) Perluasan jumlah penjualan melalui telemarketing berbiaya rendah seperti menetapkan panggilan keluar kepada konsumen dan penjualan silang dengan menawarkan pembiayaan roda dua kepada konsumen *DE&A*.
c) Menstandarisasi proses manajemen penagihan melalui memberikan edukasi kepada petugas penagihan dan standarisasi untuk strategi penagihan berdasarkan tingkat kesulitan yang dihadapi.
d) Peningkatan atas manajemen keberlangsungan bisnis untuk mengelola eksposur risiko melalui i) menerapkan kepatuhan terhadap kerangka kerja standar manajemen keberlangsungan bisnis menurut ISO 22301, ii) merencanakan kelangsungan bisnis dalam hal rencana tanggap darurat, rencana manajemen krisis dan rencana pemulihan bencana/pasca insiden.
e) Mengendalikan risiko operasional dengan meningkatkan sistem pemantauan kepatuhan internal dan memperkuat kesadaran etika pada perusahaan.
f) Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan kelas atas di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan yang menyeluruh dan kompetitif.

3. Strategis Jangka Panjang Periode 5 (Lima) Tahun
a) Melakukan inovasi teknologi dengan pengadaan aplikasi inti baru yang secara khusus dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan.
b) Memperluas jaringan pemasaran yang dimiliki Perseroan.
c) Memfokuskan perusahaan untuk membentuk kerangka kerja guna pengelolaan pihak ketiga perusahaan penagihan dengan kinerja yang sangat baik dalam penanganan *problem accounts*.
d) Pengembangan layanan yang lebih baik lagi bagi konsumen melalui i) penambahan fasilitas saluran pembayaran agar konsumen semakin mudah dalam membayar angsuran nya, ii) meningkatkan layanan asuransi yang dapat meningkatkan manfaat bagi konsumen dan juga meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

J. Teknologi Informasi

Perseroan menggunakan sistem teknologi utama (*core system*) yang bersifat tersentralisasi dan selalu dilakukan penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya sesuai perkembangan bisnis dari tahun ke tahun, Sistem inti saat ini memiliki fungsionalitas antarmuka berbasis web dan terintegrasi dengan sistem-sistem pendukung lainnya. Dengan demikian, Perseroan dapat memastikan bahwa seluruh proses bisnis utama di setiap lokasi operasional Perseroan dapat dipantau secara *real time* dan sistematis. Perseroan dapat mengakses seluruh informasi secara *real time* dan proses bisnis yang ada dapat dipercepat dan lebih terkontrol. Semua ini akan berdampak pada efisiensi dan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

K. Riset dan Pengembangan

Selama 5 tahun terakhir, Perseroan memfokuskan pada proses otomatisasi dan digitalisasi pada proses *customer acquisition, collection & corporate* administrasi. Penggunaan teknologi pada *underwriting process, verification eKY*C & *digital credit scoring* serta pengembangan aplikasi mobile Perseroan yaitu Kredit Plus Mobile untuk konsumen dan pelanggan. Melalui aplikasi Kredit Plus Mobile yang bisa diakses melalui smartphone nasabah dapat mengajukan pengajuan kredit, mengecek status pengajuan aplikasi kredit, melihat *marketing promotion* dan juga membayar cicilan yang jatuh tempo secara online menggunakan *bank transfer* dan eWallet tanpa harus datang ke kantor Perseroan.

Perseroan memulai pengembangan teknologi *Artificial Intelligence, Machine Learning pada Credit Scoring* sejak tahun 2018, dilanjutkan pada penerapan digitalisasi pada *Loan Origination System*, Kreditplus Mobile. Pada tahun 2019 dilanjutkan pengembangan kepada *Collection Scoring*. Pada tahun 2021 Perseroan melakukan penerapan teknologi *Machine Learning* pada *Biometric Checking* untuk memperkuat digital eKYC dan Anti *Fraud*. Perseroan juga melakukan perbaikan dari sisi keamanan & perlindungan data pada konsumen dan pada tahun 2022 Perseroan mendapatkan sertifikasi ISO-27001 untuk sistem manajemen keamanan informasi untuk aplikasi Kreditplus Mobile. Pada tahun 2022 Perseroan juga melakukan modernisasi IT Infrastruktur dan *Information Security* yang merupakan tulang punggung (*backbone*) dalam perjalanan transformasi digital.

Selain itu, di tahun 2023 Perseroan berfokus pada melanjutkan proses digitalisasi yang sudah dilakukan, melakukan penyempurnaan, meningkatkan keamanan dan produktivitas lingkungan bisnis dan melakukan *upgrade* pada IT infrastuktur sehingga KBFMF dapat memaksimalkan sinergi antara *online & offline channel*. Penerapan Agile Development dengan kerangka kerja yang lebih sesuai kebutuhan Perusahaan yaitu Scaled Agile Framework (SAFe), yang memungkinan kolaborasi antar semua pihak, IT, *business & supporting function* agar menghasilkan *digital product / process* yang lebih efektif, produktif dan efisien

Pada tahun 2024, Perseroan melakukan riset pada penerapan teknologi modern Generative AI (GenAI) dalam Perusahaan. Teknologi ini merupakan teknologi modern yang memiliki banyak benefit. Perseroan berencana mulai menerapkan GenAI dilingkungan internal process Perseroan sebelum melanjutkan kepada proses yang berhubungan dengan konsumen dan pelanggan. Fokus penerapan GenAI pada 3 area, Productivity Karyawan, *Cost Efficiency* dan *Revenue Growth*.

L. Kecenderungan Usaha

Dalam menjalankan usahanya, kecenderungan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan Perseroan adalah terkait dengan perkembangan ekonomi nasional dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Tentunya, kecenderungan tersebut dapat mempengaruhi penjualan, pendapatan, kolektibiltas dan profitabilitas Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan dan/atau pemerintah.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

a. Atas bunga obligasi dengan kupon *(interest bearing debt securities)* sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan *(holding period)* obligasi;

b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan *(accrued interest)*;

c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon *(zero coupon bond)* atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;

d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan

b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;

b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, KEPEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh *(full commitment)*.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Penjaminan (Rp jutaan)			(%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT KB Valbury Sekuritas	76.000	68.000	144.000	36,54%
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	250.025	10	250.035	63,46%
TOTAL		**326.025**	**68.010**	**394.035**	**100,00%**

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum Obligasi ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, kecuali PT KB Valbury Sekuritas sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu KB Financial Group.

Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal *(bookbuilding)*, kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

Tenor	Yield Obligasi Pemerintah (IGS)	Yield Obligasi Korporasi "AAA"	*Risk Premium*	Bunga Obligasi
370 Hari	6,501759	6,752637	25,09	6,70%
3 Tahun	6,683751	7,061195	37,74	7,00%

Sumber: https://newbips.phei.co.id/Home/Welcome.aspx, 3 Desember 2024

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
Office 8, 15th floor Suite H
Jl. Senopati Raya No.8B
Jakarta 12190

Nama Rekan	:	Helen Marsinih, S.H.
STTD	:	No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Pasar Modal ("HKHPM") No. 200427
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukkan	:	No. 8162/MMI-HJM/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International)
Prudential Tower, Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta Selatan 12910

Nama Rekan	:	Santanu Chandra, CPA
STTD	:	STTD.AP-331/NB.122/2018 tanggal 10 Oktober 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia No.1102
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual
Surat Penunjukkan	:	No. K1191/SSF/SA24/121/07-24 tanggal 23 Juli 2024

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.
Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Gandaria Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan 12420

STTD	:	No. STTD.N-90/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Notaris**"), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukkan	:	No. 94/Srt-KBFMF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190 - Indonesia

STTD	:	No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja	:	Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.
Surat Penunjukkan	:	No. 0581/KBFMF-FT/JUL/2024 tanggal 17 Juli 2024

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower Lantai 24
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telpon/Faksimili: +62 21 29886800/+62 21 29886822

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi dan Perseroan.

Pedoman Kerja	:	Peraturan OJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.
Tugas Utama	:	Pemeringkatan atas Obligasi Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi. Kode etik Fitch mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies in Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan

oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB").

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, Bank Mandiri:

1. Tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi;
2. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Penawaran Umum Obligasi;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Bank Mandiri.

Bank Mandiri sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Bank Mandiri.

Berdasarkan:
- Surat Pernyataan No. TIB.FIB/CMS.126/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Bank Mandiri selaku Wali Amanat menyatakan:
  (i) tidak merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan;
  (ii) tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi;
  (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi sesuai ketentuan POJK No. 20/2020.
- Surat Pernyataan No. TIB.FIB/CMS.127/2024 tanggal 26 Agustus 2024, Bank Mandiri selaku Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas atau *Due Dilligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mandiri berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998, dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.10, tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No.C2 16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, No.3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No.6859.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 07 tertanggal 3 April 2024 yang dibuat dihadapan UTIEK R. ABDURACHMAN, S.H., MLI., MKn., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0085149 tertanggal 05 April 2024, dan berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0022201.AH.01.02 tertanggal 05 April 2024.

2. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 30 Juni 2024 sesuai Laporan Keuangan Inhouse PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,0
- Saham Biasa Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	**128.000.000.000**	**16.000.000.000.000**	**100,0**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	125	0,0
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	48.533.333.333	6.066.666.666.625	52,0
Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	933.333.333.250	8,0
Direksi dan Komisaris	93.572.200	11.696.525.000	0,1
Publik (masing-masing di bawah 5%)	37.263.493.632	4.657.936.704.000	39,9
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**93.333.333.332**	**11.666.666.666.500**	**100,0**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**34.666.666.668**	**4.333.333.333.500**	**100,0**

Catatan:
nm : menjadi nol karena pembulatan.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 4 tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Zainudin Amali
Komisaris	:	Rionald Silaban
Komisaris	:	Arif Budimanta
Komisaris	:	Faried Utomo
Komisaris	:	Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris	:	Tedi Bharata
Komisaris Independen	:	Heru Kristiyana
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Loeke Larasati Agoestina

Direksi

Direktur Utama	:	Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	:	Alexandra Askandar
Direktur *Corporate Banking*	:	Riduan
Direktur *Commercial Banking*	:	Totok Priyambodo
Direktur *Treasury dan International Banking*	:	Eka Fitria
Direktur Jaringan dan *Retail Banking*	:	Aquarius Rudianto
Direktur *Operation*	:	Toni Eko Boy Subari
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	:	Agus Dwi Handaya
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Rohan Hafas
Direktur Manajemen Risiko	:	Danis Subyantoro
Direktur *Information Technology*	:	Timothy Utama
Direktur Keuangan dan Strategi	:	Sigit Prastowo

4. KEGIATAN USAHA

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 07 tertanggal 3 April 2024 No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan usaha di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   - Menghimpun dana dari masyarakat;
   - Memberikan kredit;
   - Menerbitkan surat pengakuan utang;
   - Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   - Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
   - Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
   - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
   - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
   - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
   - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia;
   - Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
   - Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
   - Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
3. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam poin No. 2 di atas, Bank Mandiri dapat pula:
   - Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
   - Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
   - Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
   - Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun;
   - Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 30 Juni 2024, Bank Mandiri telah memiliki jaringan kantor yang terdiri atas: 1 (satu) kantor pusat, kantor wilayah dalam negeri, 139 kantor cabang dan kantor cabang pembantu, 2.104 kantor kas yang tersebar di seuruh Indonesia, 7 kantor Luar Negeri Bank Mandiri yang tersebar luas di seluruh dunia meliputi Singapura, Hongkong, Cayman Island, Shanghai, Dili, London, dan Malaysia cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza serta Kantor Remittance yang berlokasi Hong Kong.

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. PENUNJUKKAN, PENGGANTIAN, DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamantan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut :

a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
   i. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   ii. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
   iii. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
   iv. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   v. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   vi. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan;
   vii. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
   viii. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   ix. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
   x. Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
   xi. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian/cidera janji sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.

c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
   i. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
   ii. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
   iii. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
   iv. setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. PENGALAMAN DI PASAR MODAL

Berikut adalah pengalaman Bank Mandiri selaku Wali Amanat di Pasar Modal selama 2 (dua) tahun terakhir:

1. Wali amanat (trustee) dalam penerbitan obligasi sebagai berikut:
   - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)
   - PT Bank Bukopin Tbk
   - PT Maybank Indonesia Finance
   - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
   - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
   - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
   - PT Bank Panin Tbk
   - PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
   - PT Bank DKI
   - PT PP Properti Tbk
   - PT Bank UOB Indonesia
   - PT Oto Multiartha
   - PT Bussan Auto Finance

- PT Bank Sumut
- PT Bank NTT
- PT Bank Maybank Indonesia
- PT Bank Lampung
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- PT Bank Commonwealth
- PT Ketrosden Triasmitra

2. Agen pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:
   - PT Belitang Panen Raya
   - PT HK Realtindo
   - PT LEN Industri (Persero)
   - PT Wika Realty
   - PT Radana Bhaskara Finance
   - PT Semen Indonesia Tbk
   - PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura

3. Jasa receiving bank dalam penawaran umum saham perdana:
   - PT Hartadinata Abadi Tbk
   - PT MAP Boga Adiperkasa Tbk
   - PT M Cash Integrasi Tbk
   - PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
   - PT PP Presisi Tbk
   - PT Jasa Armada Indonesia Tbk
   - PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
   - PT Medikalola Hermina Tbk
   - PT Asuransi Tugu Indonesia Tbk
   - PT MNC Studios International Tbk
   - PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk
   - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
   - PT NFC Indonesia Tbk
   - PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk
   - PT Bali Bintang Sejahtera Tbk
   - PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
   - PT MNC Visions Network Tbk
   - PT Telefast Indonesia Tbk
   - PT Digital Mediatama Maxima Tbk
   - PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

4. Mengelola rekening penampungan *(escrow agent)* & agen penjaminan *(security agent)*

5. Menyelenggarakan jasa penitipan efek-efek *(custodian)*

8. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan (i) laporan keuangan konsolidasian interim Bank Mandiri dan perusahaan anak Bank Mandiri pada tanggal 30 Juni 2024; dan (ii) laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan perusahaan anak Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
Kas	24.063.481	27.212.759	23.948.485
Giro pada Bank Indonesia	88.662.881	107.349.158	99.023.492
Giro pada bank lain	49.693.621	47.789.700	25.417.618
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	46.334.762	95.320.511	47.783.516
Efek-efek - neto	86.398.394	82.799.818	98.103.670
Obligasi Pemerintah	305.664.579	329.211.764	289.054.774
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	24.927.986	32.188.559	27.817.547
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	7.395.340	11.705.989	27.317.000
Tagihan derivatif	4.183.685	2.252.141	1.669.838
Kredit	1.436.571.809	1.107.987.237	957.636.147
Piutang Pembiayaan Konsumen	38.565.936	23.147.366	18.633.307
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.461.519	5.733.387	4.693.806
Tagihan akseptasi	15.245.823	11.719.618	10.076.751
Penyertaan Saham	2.245.497	2.688.954	2.432.393
Biaya dibayar dimuka	3.841.625	1.895.503	1.470.251
Pajak dibayar dimuka	830.872	1.164.925	2.073.725
Aset Tetap	58.573.660	56.540.566	49.144.792
Aset Tidak berwujud	5.728.290	5.093.609	5.111.759
Aset lain-lain	44.669.793	28.697.644	23.847.463
Aset Pajak Tangguhan	8.668.747	12.045.479	10.354.794
JUMLAH ASET	**2.257.801.434**	**1.429.334.484**	**1.318.246.335**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	4.590.796	4.056.029	5.380.474
Giro dan giro wadiah	577.715.577	519.077.962	399.791.311
Tabungan dan tabungan wadiah	547.557.925	480.482.766	422.314.545
Deposito Berjangka	300.321.369	296.015.201	293.172.857
Simpanan dari Bank Lain	22.822.915	5.734.401	5.260.016
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	28/145.835	29.710.227	30.657.570
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli Kembali	49.433.079	24.325.475	5.427.998
Liabilitas Derivatif	3.387.377	2.126.769	1.018.751
Liabilitas Akseptasi	15.150.494	11.781.581	10.273.444
Efek-efek yang diterbitkan	38.595.801	45.774.139	45.138.342
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	1.059.843	2.073.429	2.295.241
Beban yang masih harus dibayar	3.298.649	6.493.794	6.526.489
Utang Pajak	1.032.876	3.590.522	2.862.716
Liabilitas Imbalan Kerja	7.008.015	12.607.759	11.205.546
Provisi	270.598	323.365	413.876
Liabilitas lain-lain	44.644.085	27.336.753	25.276.602
Pinjaman yang diterima	104.255.615	62.840.118	51.398.940
Pinjaman subordinasi	213.895	633.333	637.143
Total Liabilitas	**1.749.434.246**	**1.544.096.631**	**1.326.592.237**
Total Dana Syirkah Temporer	**226.034.647**	**196.202.601**	**83.462.230**
EKUITAS			
Modal saham	11.666.667	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	18.095.274	17.643.264	17.643.264
Modal saham yang diperoleh kembali dan dimiliki (saham treasuri)	-	-	(150.895)
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata			

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
uang asing	56.119	(60.427)	(88.985)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(2.665.312)	(2.768.553)	1.692.145
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(2.784)	(3.156)	(370)
Keuntungan revaluasi aset tetap	34.716.693	34.716.693	30.140.345
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.587.873	1.510.016	1.217.456
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(4.452)	(97.202)	(106.001)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	185.438.095	161.614.963	137.207.666
Kepentingan non pengendali	27.979.048	22.566.669	17.424.670
Jumlah Ekuitas	**282.332.541**	**252.245.455**	**222.111.282**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER & EKUITAS	**2.257.801.434**	**1.992.544.687**	**1.725.611.128**

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni	31 Desember	
	2024	2023	2022
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	72.223.848	132.544.470	112.382.118
Beban bunga dan beban syariah	(23.142.786)	(36.657.896)	(24.478.764)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	**49.081.062**	**95.886.574**	**87.903.354**
Pendapatan premi - neto	**1.101.479**	**2.123.046**	**2.467.698**
Pendapatan bunga, syariah dan premi - neto	**50.182.541**	**98.009.620**	90.371.052
Pendapatan operasional lainnya	19.259.565	40.522.846	34.280.703
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(7.001.265)	(11.152.853)	(16.096.382)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	88.605	918.531	255.268
Pembentukan penyisihan lainnya	(475)	85.615	(282.073)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, Obligasi Subordinasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link			
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Subordinasi pemerintah	153.477	125.295	899.579
Beban operasional lainnya	(26.076.698)	(53.867.491)	(53.260.058)
Laba operasional	**36.605.750**	**74.641.563**	**56.168.089**
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(625)	43.318	209.637
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan non pengendali	**36.605.125**	**74.684.881**	**56.377.726**
Beban pajak - neto	(7.334.398)	(14.633.011)	(11.425.358)
Laba tahun berjalan	**29.270.727**	**60.051.870**	**44.952.368**

9. INFORMASI LAINNYA

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: (021) 526 8216, 524 5161
Faksimili: (021) 526 8201
Website: www.bankmandiri.co.id
Up. Vice President - Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 17 Desember 2024.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("**FPPO**") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik *(hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik *(hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 12 Desember 2024 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik *(hardcopy)* maupun bentuk elektronik *(softcopy)* melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 13 Desember 2024.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan

Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 16 Desember 2024 *(in good funds)* ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB Valbury Sekuritas	PT Bank Central Asia Tbk Cabang Kuningan No. Rekening: 217 313 0554 A.n. PT KB Valbury Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH. M Mansyur No. Rekening: 179.303.0707 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
   i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.;
iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
iv. Dalam hal masa Penawaran Umum ditunda atau Penawaran Umum yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada nomor 11 diatas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada nomor 11 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud pada nomor 11 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang

pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum;

b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi dan Bunga Obligasi per tahun yang diperhitungkan secara proporsional untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda tersebut di atas dihitung dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum;
c. Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 12 Desember 2024 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT KB Valbury Sekuritas
Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Tel. (021) 250 98 300
Fax. (021) 2509 8400
Email: dcm.ib@kbvalbury.com
Situs web: www.kbvalbury.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9168
Email : fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dkosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office.

Halaman ini sengaja dkosongkan

MMI LAW OFFICE
MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR

Ref. No.: 8271/MMI-HJM/XII/2024 Jakarta, 4 Desember 2024

Kepada Yth.
PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
Gedung Office 8 Lantai 15
SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta Selatan 12190

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024

PT KB VALBURY SEKURITAS (Terafiliasi)
Sahid Sudirman Center Lantai 41 Unit AC
Jalan Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT KB FINANSIA MULTI FINANCE DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I KB FINANSIA MULTI FINANCE TAHAP I TAHUN 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Unit H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT KB Finansia Multi Finance, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Surat No. 8162/MMI-HJM/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan kepada masyarakat, menerbitkan Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 dengan nama "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance**" dengan target dana sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp394.035.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga puluh lima juta Rupiah) terdiri dari:

   a. Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Seri A sebesar Rp326.025.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar dua puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Office 8, 15 Floor Suite H
Jl. Senopati Raya No. 8B
Jakarta 12190 - Indonesia
P. +62.21-2933 2858, 2933 2859
F. +62.21-2933 2857

b. Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Seri B sebesar Rp68.010.000.000,00 (enam puluh delapan miliar sepuluh juta Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

2. Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance yang ditawarkan dikurangi dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I yang kepastian setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance.

Dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai Wali Amanat untuk penerbitan obligasi, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan obligasi Perseroan, namun memiliki hubungan kredit dengan Perseroan yang jumlahnya tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) *outstanding* efek bersifat utang yang diwaliamanati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 6 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 1 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 152 tanggal 30 Oktober 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 19 tanggal 4 Desember 2024 yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**"). PT KB Valbury Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian oleh pihak yang sama. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 23 tanggal 6 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 1 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 153 tanggal 30 Oktober 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 4 Desember 2024 yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan berupa pembiayaan konsumen.

Perseroan telah menunjuk PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch Ratings**") untuk melakukan pemeringkatan atas rencana pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024. Berdasarkan Surat Fitch Ratings No. 184/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Peringkat Privat PT KB Finansia Multi Finance, Fitch Ratings menetapkan:

a. Peringkat Nasional Jangka Panjang di AAA(idn) terhadap Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahun 2024 sejumlah maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
b. Peringkat Nasional Jangka Panjang di AAA(idn) terhadap Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sejumlah maksimum Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**"), dalam rangka Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance, Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance ("**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT KB Finansia Multi Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 8270/MMI-HJM/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT KB Finansia Multi Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 Ref No. 8259/MMI-HJM/XI/2024 tanggal 19 November 2024.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi aspek (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini, dan (b) hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 35/POJK.05/2018 jo. POJK No. 7/POJK.05/2022**") (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada PT Bank KB Bukopin Tbk sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham yang merupakan 0,287% (nol koma dua delapan tujuh persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor PT Bank KB Bukopin Tbk, kami juga melakukan pemeriksaan uji tuntas terbatas sesuai kebutuhan terhadap PT Bank KB Bukopin Tbk.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

   3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas, utamanya sehubungan dengan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan.

   3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.

5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.

10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, berdomisili di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 9 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Pondok Gede, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.254 HT.01.01.Th.94 tanggal 5 Juli 1994, dan telah didaftarkan dalam Buku Register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1457/1994 tanggal 25 Juli 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

   Pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Perseroan dari PT Finansia Multi Finance menjadi PT KB Finansia Multi Finance sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Finansia Multi Finance menjadi PT KB Finansia Multi Finance No. 23 tanggal 6 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0045638.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106732.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 9 Maret 2021, Tambahan No. 009606.

   Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam:

   2.1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 178 tanggal 23 Maret 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0199860 tanggal 24 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058641.AH.01.11.Tahun

2022 tanggal 24 Maret 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2023, Tambahan No. 003993 ("**Akta No. 178/2022**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

2.2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 151 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S..H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0028078.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0227782 tanggal 19 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077039.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 13 Maret 2023, Tambahan No. 013701 ("**Akta No. 151/2022**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui (i) perubahan status Perseroan dari semula Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan (ii) penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020.

2.3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 114 tanggal 12 Desember 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0077607.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154549 tanggal 12 Desember 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251114.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2024, Tambahan No. 024031 ("**Akta No. 114/2023**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui (i) penambahan modal dasar Perseroan dari semula Rp126.250.040.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah), (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula Rp126.250.040.000,00 (seratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah), dan (iii) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.

2.4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 130 tanggal 27 Mei 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0120998 tanggal 27 Mei 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101634.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2024, Tambahan No. 024032 ("**Akta No. 130/2024**"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan tentang Direksi.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam akta-akta pada butir 2.1 sampai dengan 2.4 di atas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU PT**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**").

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembiayaan (KBLI 64911). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

   a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Pembiayaan Proyek, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau
   b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan cara Jual dan Sewa Balik, Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Pari Penjual Piutang, Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang, Fasilitas Modal Usaha, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau
   c. Pembiayaan Multiguna yang dilakukan dengan cara Sewa Pembiayaan, Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Fasilitas Dana, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK; dan/atau
   d. Sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

   Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah di bidang pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP No. 5 Tahun 2021**"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi dikarenakan harus memastikan aspek keselamatan jaminan serta perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko ("**NIB OSS-RBA**") dan Izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

   Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), yaitu KBLI No. 64911. Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 8120219271486 yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2018 dan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan ke-1 tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Oleh karenanya, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 114/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari 226.250.040 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah) terdiri dari 126.250.040 (seratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat puluh) saham.

Modal Disetor : Rp226.250.040.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Susunan Pemegang Saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 114/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp226.250.040,00	**226.250.040**	**226.250.040.000,00**	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
KB Kookmin Card Corp	181.000.032	181.000.032.000,00	80,00
PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000,00	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	**226.250.040**	**226.250.040.000,00**	**100,00**
Saham Dalam Pertopel	**-**	**-**	**-**

Perseroan telah melaporkan kepada OJK terkait perubahan kepemilikan melalui penambahan modal disetor berdasarkan Surat Perseroan No. 82/KBFMF/RC/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023. Perubahan pemegang saham pengendali telah dicatat dalam Sistem Informasi Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) berdasarkan Surat Laporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan PT KB Finansia Multi Finance No.S-43/PL.021/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh OJK.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham tanggal 13 Desember 2023 dan Daftar Khusus tanggal 31 Juli 2024 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 50 UU PT.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Pemilik Manfaat Perseroan adalah Yang Jong Hee. Perseroan telah menyampaikan pengkinian informasi terkait Pemilik Manfaat dari Perseroan pada sistem AHU online pada 11 November 2024 sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perpres No. 13/2018.

KB Kookmin Card Corp dan PT Finansia Pacifica Raya telah memenuhi ketentuan penyertaan modal pada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

6. Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp45.250.008.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta delapan ribu Rupiah) yang merupakan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. Perseroan membukukan laba sebesar Rp45.250.008.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta delapan ribu Rupiah), hal ini telah melebihi kewajiban cadangan pada Pasal 70 ayat (1) UU PT.

7. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Moon Cheol Kang *)
Komisaris Independen	: Nursalam Andi Tabusalla

Direksi

Direktur Utama	: Yap Tjay Hing
Wakil Direktur Utama	: Kisup Wi
Direktur	: Peter Halim
Direktur	: Hery Susanto Dermawan
Direktur Pemasaran	: Sea Hwan Lah
Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs	: Martina Hariyanto
Direktur	: Choi, Ho Jung

*) Tidak berdomisili di Indonesia

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 131 tanggal 25 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0231390 tanggal 25 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0152674.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Juli 2024 serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 73/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024, sehubungan dengan pengangkatan Moon Cheol Kang sebagai Komisaris Utama Perseroan.

b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 4 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AH-AH.01.09-0138674 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070868.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 April 2024 serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 26/Srt-KBFMF/IV/2024 tanggal 5 April 2024, sehubungan dengan pengangkatan Kisup Wi sebagai Wakil Direktur Utama.

c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 2 November 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0181727 tanggal 6 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222084.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 99/Srt-KBFMF/XI/2023 tanggal 6 November 2023, sehubungan dengan pengangkatan Peter Halim sebagai Direktur Perseroan.

d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 122 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0144272 tanggal 26 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141523.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 72/Srt-KBFMF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, sehubungan dengan pengangkatan Choi, Ho Jung sebagai

Direktur Perseroan dan Martina Hariyanto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan General Affairs.

e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077571 tanggal 18 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231982.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 November 2022, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 131/Srt-KBFMF/XI/2022 tanggal 21 November 2022, sehubungan dengan pengangkatan Sea Hwan Lah sebagai Direktur Pemasaran Perseroan.

f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 06 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030147 tanggal 06 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129000.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 06 Juli 2022, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 83/Srt-KBFMF/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, sehubungan dengan pengangkatan Yap Tjay Hing sebagai Direktur Utama.

g. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 52 tanggal 8 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0225393 tanggal 9 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065727.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 9 April 2021, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 51/Srt-KBFMF/I/2021 tanggal 12 April 2021, sehubungan dengan pengangkatan Hery Susanto Dermawan sebagai Direktur Perseroan.

h. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 93 tanggal 13 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0287790 tanggal 14 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112408.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Juli 2020, serta telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 131/Srt-KBFMF/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, sehubungan dengan pengangkatan Nursalam Andi Tabusalla sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, kemudian berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/POJK.04/2014. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

8. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/POJK.04/2014**"), Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/KBFMF/CC-BOD/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT KB Finansia Multi Finance telah mengangkat Antonius Padua Wisuda Adhitama sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

   Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) POJK No. 35/POJK.04/2014, Perseroan telah telah mengungkapkan pada website Perseroan dengan link *https://kreditplus.com/corporate-secretary*. Pengangkatan Antonius Padua Wisuda sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

   Ketua : Nursalam Andi Tabusalla
   Anggota : Peter Irawan Chandra
   Anggota : Siti Rosyidah

   Setiap anggota Komite Audit akan bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 55/POJK.04/2015, Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 21 Maret 2022, yang telah memuat ketentuan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) POJK No. 55/POJK.04/2015, serta telah dimuat pada situs web Perseroan dengan link *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62c7f8492fc41-audit-committee-charter.pdf*. Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015.

10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024 dengan susunan anggota sebagai berikut:

    Ketua : Nursalam Andi Tabusalla
    Anggota : Juan Sumando Nababan
    Anggota : Moon Cheol Kang

    Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 Maret 2022. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi telah dimuat dalam website Perseroan yaitu *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62c7f8053dc1e-nomination-and-remuneration-committee-charter.pdf*.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ("**POJK No. 44/POJK.05/2020**"), Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

    Ketua : Yap Tjay Hing
    Anggota : Kisup Wi

Anggota : Peter Halim
Anggota : Choi, Ho Jung
Anggota : Ka Nen
Anggota : Marie Yovanka Engelina
Anggota : Daniel Adrian

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang juga merupakan anggota Direksi Perusahaan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Direksi Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan POJK No. 44/POJK.05/2020. Perseroan telah membuat Pedoman Komite Manajemen Risiko sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 19 April 2022 dan telah dimuat dalam website Perseroan yaitu *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/6304477d8664d-risk-management-committee-charter-19-april-2022.pdf*.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:
Ketua : Nursalam Andi Tabusalla
Anggota : Moon Cheol Kang
Anggota : Peter Irawan Chandra

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Mandat Komite Pemantau Risiko diatur dalam Pedoman Komite Pemantau Risiko, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Pemantau Risiko tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pemantau Risiko sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 April 2022, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Pedoman Komite Pemantau Risiko dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62c7f87d9bc6d-risk-oversight-committee-charter.pdf*.

13. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank ("**POJK No. 4/POJK.05/2021**"), Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Yap Tjay Hing
Anggota : Hery Susanto Dermawan
Anggota : Kisup Wi
Anggota : Choi, Ho Jung
Anggota : David Wirawan
Anggota : Herman Jusup
Anggota : Marie Yovanka

Masa jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang juga merupakan anggota Direksi Perusahaan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan masa jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi yang bukan merupakan anggota Direksi Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi sebelum masa jabatannya berakhir. Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024 dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/667a461fba611-1-ii-a-itsc-charter.pdf*.

14. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Perseroan telah membentuk Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 16 Maret 2024 jo. Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 22 Maret 2024, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Yap Tjay Hing
Anggota : Peter Halim
Anggota : Kisup Wi
Anggota : Sea Hwan Lah
Anggota : Choi, Ho Jung
Anggota : Cun Pin
Anggota : Marie Yovanka

Masa jabatan anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang juga merupakan anggota Direksi Perusahaan sama dengan masa tugas penunjukannya sebagai anggota Direksi yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan masa jabatan anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang bukan merupakan anggota Direksi Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Direksi untuk memberhentikan anggota Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas sebelum masa jabatannya berakhir. Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 27 Mei 2024 dan telah dimuat dalam website Perseroan *https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/667a370a7acac-31-asset-liability-committee-charter-27-may-2024.pdf*.

15. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Perseroan telah membuat Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan (Internal Audit Charter) tanggal 21 Maret 2022 dan telah dimuat dalam website *Perseroan https://kreditplus.com/site/uploads/corporateinfo/files/62d6365c35891-62c7f724a0785-internal-audit-charter.pdf*, Direksi Perseroan telah mengangkat Ahmad Salman Farizy sebagai Kepala Divisi Internal Audit dan Fraud Management berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/KBFMF/CC-BOD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Penetapan Piagam Audit Internal Perseroan serta penunjukan Ahmad Salman Farizy sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/POJK.04/2015.

16. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) butir (vi) Anggaran Dasar Perseroan Direksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018 Perseroan wajib memperoleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tanggal Pendapat Hukum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 25 Juli 2024 dan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KB Finansia Multi Finance tanggal 18 Oktober

2024 sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) POJK No. 35/POJK.05/2018, yang menyetujui rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Bersifat Utang yaitu yaitu Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance dengan nilai penerbitan sebanyak-banyaknya Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dan menyediakan jaminan sehubungan dengan penerbitan Obligasi PUB berupa Piutang Usaha (*Performing*) milik Perseroan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai pokok Obligasi PUB setiap tahap pada tanggal emisi. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal emisi, total nilai penjaminan atas Piutang Usaha (*Performing*) menjadi sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari nilai pokok Obligasi PUB.

17. Untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 35/POJK.05/2018 jo. POJK No. 7/POJK.05/2022, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada OJK melalui Surat No. 71/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I 2024 Perseroan dan OJK telah mencatat rencana penerbitan efek melalui penawaran umum dalam administrasi OJK sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-2210/PL.111/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura.

18. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha memiliki jaringan kerja 1 (satu) Kantor Pusat, 129 (seratus dua puluh sembilan) Kantor Cabang dimana 1 (satu) diantaranya yaitu Kantor Cabang Bengkulu telah ditutup dan masih dalam proses persiapan dokumen persyaratan administratif untuk pelaporan penutupan kepada OJK dan 62 (enam puluh dua) Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

    Perseroan telah memperoleh izin-izin, persetujan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah setempat. Perizinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang jasa pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan masih berlaku.

    Perseroan masih dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi atas bangunan yang dimiliki pada lokasi usaha Samarinda dan telah terbit rekomendasi dari Tim Penilai Ahli sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Kesesuaian Standar Teknis tanggal 15 November 2024 perihal Hasil Konsultasi I SLF Bangunan Fungsi Usaha, dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Sertifikat Laik Fungsi Ruko Samarinda sedang dalam proses penerbitan Berita Acara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat konsekuensi hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana atas belum diperolehnya SLF Perseroan sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemilik bangunan dalam hal ini Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif dikarenakan belum memenuhi kewajiban berupa kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Perseroan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 24 ayat (42) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan pembangunan;
    c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
    d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
    e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
    f. pencabutan persetujuan bangunan;
    g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
    h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
    i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 24 ayat (42) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu:

a. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
b. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang - Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
c. Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
d. Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), hakim memperhatikan pertimbangan dari Profesi Ahli.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

19.1. Bidang tanah dan bangunan berupa 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan beserta bangunan yang berada diatasnya dan 1 (satu) Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset tanah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

19.2. Kendaraan bermotor terdiri dari 18 (delapan belas) kendaraan roda empat dan 4 (empat) kendaraan roda dua, yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dan seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di kantor cabang. Seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.

19.3. Investasi dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, Deposito milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19.4. Hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 14 (empat belas) sertifikat merek dan 5 (lima) merek yang masih dalam tahap Pemeriksaan Substansif. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan selaku pemilik merek-merek terdaftar sebagaimana disebutkan di atas, tidak memberikan Lisensi atau mengadakan suatu Perjanjian Lisensi atas merek-merek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("**UU No. 20/2016**").

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran atas 5 (lima) merek yaitu "Kreditplus Mobile" kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama dua bulan Masa Pengumuman, tidak terdapat keberatan dari pihak lain, sehingga permohonan merek tersebut saat ini sedang dalam masa Pemeriksaan Substantif. Sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 UU No. 20/2016, Perseroan telah memperoleh perlindungan atas merek tersebut, walaupun belum didaftarkan atas nama Perseroan.

20. Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi dari PT KB Insurance Indonesia atas aset material yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pada beberapa lokasi usaha Perseroan sebagai upaya untuk memitigasi kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan, dengan jumlah nilai pertanggungan yang memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung oleh Perseroan sebagaimana telah dinyatakan Perseroan dalam Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2024. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha dan masih berlaku sampai dengan tahun 2025.

21. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT KB Finansia Multi Finance 2023 – 2025 yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.230705013/B/XII/2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT KB Finansia Multi Finance tanggal 11 Desember 2023, yang berlaku terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan 10 Desember 2025.

22. Perseroan telah melaksanakan pembayaran gaji yang telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi, dan telah memenuhi kewajiban terkait Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah dinyatakan oleh Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 6 September 2024.

23. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. No. 97GJ5009 tertanggal 21 Juli 2020 dan Kode Badan Usaha/Entitas BPJS Kesehatan No. 01126921 tanggal 10 Januari 2015.

24. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan dimana Perseroan melaporkan karyawan sebanyak 8.634 (delapan ribu enam ratus tiga puluh empat) karyawan berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan.

    Perseroan telah memperoleh perizinan dari Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing sebanyak 5 (lima) orang dengan jabatan 3 (tiga) orang sebagai Direktur dan 2 (dua) orang sebagai tenaga ahli dan telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas.

25. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. e-0274/KT.03.01 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT KB Finansia Multi Finance Periode 2024-2027, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan.

26. Perseroan memiliki investasi berupa penyertaan saham pada PT Bank KB Bukopin Tbk ("**Bank KB Bukopin**") sebanyak 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar Rupiah) atau sebesar 0,287% (nol koma dua delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Bank KB Bukopin

sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. DE/IX/2024-3928 tanggal 3 September 2024 yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek.

Sesuai ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS Perseroan dalam melakukan penyertaan pada Bank KB Bukopin. Penyertaan Perseroan dalam Bank KB Bukopin telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sedang dijadikan agunan dalam bentuk apapun dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

27. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak:

27.1. Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, mengingat dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, yaitu pembiayaan.

27.2. Tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga lainnya sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

27.3. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang obligasi serta menghalangi penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024. Lebih lanjut, Perseroan sesuai Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 September 2024 menyatakan bahwa selama umur Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, tidak akan membuat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban, termasuk tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban untuk menjaga rasio keuangan, yang timbul atas adanya perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan dan masih berlaku sebagaimana diungkapkan di atas dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2024. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, tidak menyebabkan dilanggarnya ketentuan batas *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 POJK No. 35/POJK.05/2018 dimana proyeksi *gearing ratio* Perseroan setelah penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 adalah sebesar 5,88x (lima koma delapan delapan kali).

Sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Obigasi Bunga Abadi tanggal 30 November 2023, Obigasi Bunga Abadi senilai Rp165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) yang diterbitkan oleh Perseroan merupakan komponen ekuitas yang dapat dikonversikan kepada saham yang tidak memberikan tambahan kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Perseroan secara material. Sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai pembayaran kupon terkait Obligasi Bunga Abadi tersebut, mempertimbangkan jumlah kewajiban keuangan atau penurunan pendapatan atas pembayaran

kupon Obligasi Bunga Abadi adalah sebesar 1,05% dari total laba bersih atau sebesar 0,07% dari total ekuitas Perseroan, maka ketentuan sehubungan dengan pembayaran kupon tidak akan mempengaruhi keputusan pemodal dan calon pemodal Obligasi Berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan Perjanjian Pembelian Obigasi Bunga Abadi tanggal 30 November 2023 Perseroan memiliki hak untuk membatalkan pembayaran kupon. Dengan demikian, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi sebagaimana diatur pada Pasal 6 butir (y) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015.

28. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 72 POJK No. 35/POJK.05/2018 terkait:
    a. Telah dicantumkannya rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dalam rencana bisnis Perseroan Tahun 2024 yang telah disampaikan kepada OJK IKNB sebagaimana dibuktikan dalam Surat No. 71/Srt-KBFMF/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan I 2024;
    b. Tingkat Kesehatan keuangan Perseroan minimum sehat dimana Perseroan berada pada 2,40 atau Peringkat 2 (kategori sehat);
    c. Tingkat risiko Perseroan minimum sedang rendah dimana Perseroan berada pada Peringkat 2 (sedang rendah); dan
    d. Memenuhi ketentuan *gearing ratio* dimana Perseroan memiliki *gearing ratio* sebesar 5,67. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, tidak menyebabkan dilanggarnya ketentuan batas *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 POJK No. 35/POJK.05/2018 dimana proyeksi *gearing ratio* Perseroan setelah penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 adalah sebesar 5,88x (lima koma delapan delapan kali).

29. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

    a. Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri B sebesar Rp313.615.000.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar enam ratus lima belas juta Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu tanggal 22 Juli 2025.
    b. Obligasi II KB Finansia Multi FinanceTahun 2023 Seri B sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, yaitu 7 Juli 2026.

    Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

    Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari wali amanat masing-masing Obligasi yang telah terbit sebelumnya dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, mengingat dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

30. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dan tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan obligasi Perseroan, namun memiliki hubungan kredit dengan Perseroan yang jumlahnya tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) *outstanding* efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

31. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:

31.1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 6 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance No. 2 tanggal 1 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance No. 151 tanggal 30 Oktober 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance No. 18 tanggal 4 Desember 2024 yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

31.2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 6 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 1 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No.152 tanggal 30 Oktober 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 19 tanggal 4 Desember 2024 yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.

31.3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 23 tanggal 6 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 1 Oktober 2024, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 153 tanggal 30 Oktober 2024, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 4 Desember 2024 yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh Perseroan dengan PT KB Valbury Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

31.4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 24 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan.

31.5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. Pendaftaran SP-091/OBL/KSEI/0824 tanggal 6 September 2024, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

31.6. Akta Pengakuan Utang No. 21 tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk untuk Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek yaitu Fitch Ratings, Wali Amanat yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan Penjamin

Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT KB Valbury Sekuritas karena dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu KB Financial Group.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

32. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang dari PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S-10899/BEI.PP2/10-2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

33. Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 ini dijamin dengan suatu jaminan khusus, berupa piutang (*performing*) yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dimiliki oleh dan merupakan kekayaan Perseroan. Total nilai piutang (*performing*) yang diikat dalam akta jaminan fidusia dengan nilai penjaminan adalah (i) sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pokok obligasi pada saat tanggal emisi, dan (ii) selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal emisi obligasi menjadi sekurang-kurangnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai pokok obligasi. Hak pemegang obligasi atas objek jaminan yang dijaminkan (piutang (*performing*)) memiliki peringkat yang lebih tinggi atau didahulukan dengan jaminan kebendaan (*preferen*) dibanding hak-hak kreditur perseroan lainnya yang tidak memiliki jaminan (baik jaminan kebendaan maupun perorangan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

34. Perseroan telah memenuhi "persyaratan pihak" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (**"POJK No. 36/POJK.04/2014**") yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak sedang mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 9 September 2024 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No. 287/KAP-PIC/KBFMF/SC/VIII-2024 tanggal 23 Agustus 2024.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 telah mematuhi "persyaratan efek" yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal sesuai Surat Fitch Ratings No. 184/DIR/RATLTR/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Peringkat Privat PT KB Finansia Multi Finance, Fitch Ratings menetapkan:

a. Peringkat Nasional Jangka Panjang di AAA(idn) terhadap Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahun 2024 sejumlah maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah).
b. Peringkat Nasional Jangka Panjang di AAA(idn) terhadap Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sejumlah maksimum Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun.

Hasil pemeringkatan yang telah dilakukan oleh Fitch Ratings tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

35. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan berupa pembiayaan konsumen.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kemudian, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan terkait dengan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terkait.

36. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam perkara perdata 5 (lima) di Pengadilan Negeri dan sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 4 (empat) perkara dan secara tripartit pada Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 4 (empat) perkara. Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024.

    Selain perkara sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

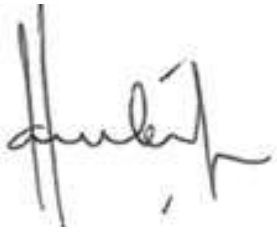
    Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

37. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Pendapat Hukum, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,
MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.
No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023
Tanda Pengenal Advokat No.99.10636
Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:
1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International).

Halaman ini sengaja dkosongkan

PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yap Tjay Hing
   Alamat Kantor : PT KB Finansia Multi Finance
   Office 8, Lantai 15
   Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
   Jakarta 12910
   Alamat Domisili : Jl. Kencana Permai II/19,
   RT/RW : 005/015
   Pondok Pinang, Kebayoran Lama
   Jakarta Selatan
   No. Telepon : (021) 2933 3646
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Kisup Wi
   Alamat Kantor : PT KB Finansia Multi Finance
   Office 8, Lantai 15
   Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
   Jakarta 12910
   Alamat Domisili : Apartemen Botanica Tower 3
   Lantai 06 Unit AG
   Jl. Teuku Nyak Arief No.8
   RT 05 RW 03 Grogol Selatan
   Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   No. Telepon : (021) 2933 3646
   Jabatan : Wakil Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan interim PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan interim Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan interim Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan interim Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan;
5. Kami bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

STATEMENT OF DIRECTORS CONCERNING TO THE RESPONSIBILITY FOR INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 JUNE 2024 AND 31 DECEMBER 2023 AND 2022 AND FOR SIX-MONTH PERIOD ENDED 30 JUNI 2024 AND 2023 (UNAUDITED) AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022 PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

We, the undersigned:

1. *Name* : *Yap Tjay Hing*
   Office Address : *PT KB Finansia Multi Finance*
   Office 8, Lantai 15
   Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
   Jakarta 12910
   Residential Address : *Jl. Kencana Permai II/19,*
   RT/RW : 005/015
   Pondok Pinang, Kebayoran Lama
   Jakarta Selatan
   Phone number : *(021) 2933 3646*
   Position : *President Director*
2. *Name* : *Kisup Wi*
   Office Address : *PT KB Finansia Multi Finance*
   Office 8, Lantai 15
   Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
   Jakarta 12910
   Residential Address : *Apartemen Botanica Tower 3*
   Lantai 06 Unit AG
   Jl. Teuku Nyak Arief No.8
   RT 05 RW 03 Grogol Selatan
   Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   Phone number : *(021) 2933 3646*
   Position : *Vice President Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT KB Finansia Multi Finance ("The Company") interim financial statements;*
2. *The Company's interim financial statements have been prepared and presented in with Indonesian Financial Accounting Standard;*
3. *a. All information has been presented completely and correctly disclosed in the Company's interim financial statements;*
   b. The Company's interim financial statements do not contain any incorrect infomation or material fact, nor do they omit infomation or material facts;
4. *We are responsible for the Company's internal control system;*
5. *We are responsible for the Company's compliances with laws and regulations.*

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 1 Oktober/*October* 2024



Yap Tjay Hing
Direktur Utama/
President Director

Kisup Wi
Wakil Direktur Utama/
Vice President Director

PT. KB Finansia Multi Finance
15th Floor, OFFICE 8, SCBD Lot 28
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Indonesia
www.kreditplus.com
Telp +62.21. 2933 3646
Fax +62.21. 2933 3648

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
30 JUNE 2024 AND 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
ASET					***ASSETS***
Kas dan setara kas	**3,33**	210.910.304.167	150.519.339.731	174.432.851.427	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan	**4**	7.342.751.555.511	7.433.339.955.102	6.924.429.799.378	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	**5**	483.221.406.233	421.457.986.752	246.356.356.729	*Factoring receivables*
Beban dibayar dimuka	**6**	36.948.803.817	12.493.315.992	8.364.942.335	*Prepaid expenses*
Uang muka	**7**	6.080.400.701	13.151.197.542	8.716.650.576	*Advances*
Pajak dibayar dimuka	**17a**	1.690.604.831	-	-	*Prepaid tax*
Piutang lain-lain	**8,33**	233.652.858.315	142.313.254.003	55.106.392.570	*Other receivables*
Aset hak-guna	**9,33**	86.941.595.661	94.258.698.881	81.086.075.391	*Right-of-use assets*
Aset tetap	**10**	127.846.783.444	120.032.653.247	91.792.499.373	*Property and equipment*
Aset takberwujud	**11,33**	83.621.509.689	77.100.499.712	58.493.857.563	*Intangible asset*
Investasi jangka panjang	**12,33**	27.000.000.000	43.200.000.000	-	*Long term investment*
Aset pajak tangguhan	**17e**	102.993.678.175	86.981.461.395	82.785.292.866	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	**13**	24.593.329.817	26.079.280.177	28.013.525.413	*Other assets*
JUMLAH ASET		8.768.252.830.361	8.620.927.642.534	7.759.578.243.621	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Pinjaman yang diterima	**14,33**	5.846.678.265.536	5.588.833.273.490	5.272.818.454.858	*Fund borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	**15**	1.310.139.605.588	1.307.358.888.360	993.627.928.646	*Securities issued*
Utang lain-lain	**16,33**	70.996.296.096	90.744.751.885	77.945.598.010	*Other payables*
Utang pajak	**17b**	4.557.327.776	8.464.724.102	45.545.040.483	*Taxes payables*
Beban yang masih harus dibayar	**31**	87.939.890.117	109.213.246.303	138.190.892.893	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan pasca-kerja	**18**	119.748.944.094	115.760.442.178	101.995.414.854	*Post-employment benefits obligation*
Liabilitas sewa	**19**	21.615.178.157	28.965.512.886	36.618.303.515	*Lease liabilities*
Jumlah Liabilitas		7.461.675.507.364	7.249.340.839.204	6.666.741.633.259	***Total Liabilities***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham – nilai nominal Rp 1.000 per saham					*Share capital - par value of Rp 1,000 per share*
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh 226.250.040 saham (31 Desember 2022: 126.250.040 saham)	**20**	226.250.040.000	226.250.040.000	126.250.040.000	*Authorized capital, issued and fully paid capital 226,250,040 shares (31 December 2022: 126,250,040 shares)*
Tambahan modal disetor	**21**	288.886.785.571	288.886.785.571	288.886.785.571	*Additional paid-in capital*
(Rugi) penghasilan komprehensif lain					*Other comprehensive (loss) income*
Perubahan nilai wajar asset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain		(21.060.000.000)	(8.424.000.000)	-	*Changes in fair value of financial assets measured through other comprehensive income*
Pengukuran Kembali atas program imbalan pasti		(47.704.241.941)	(47.704.241.941)	(35.736.991.642)	*Remeasurement of defined benefit pension schemes*
Saldo laba					*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	**22**	45.250.008.000	25.250.008.000	25.250.008.000	*Appropriated*
Tidak ditentukan penggunaannya		214.954.731.367	287.328.211.700	253.186.768.433	*Unappropriated*
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	**23,33**	600.000.000.000	600.000.000.000	435.000.000.000	*Perpetual convertible bonds*
Jumlah Ekuitas		1.306.577.322.997	1.371.586.803.330	1.092.836.610.362	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		8.768.252.830.361	8.620.927.642.534	7.759.578.243.621	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Interim Financial Statements which are on Exhibit E an integral part of the Interim Financial Statements taken as a whole

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
INTERIM STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2024 AND 2023 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
PENDAPATAN						***INCOME***
Pembiayaan konsumen	**24,33**	967.582.035.475	1.145.496.565.514	2.169.745.601.660	2.055.185.087.948	*Consumer financing*
Anjak piutang	**25**	31.907.978.271	19.226.502.666	44.847.346.302	25.214.834.739	*Factoring*
Lain-lain	**26,33**	37.465.936.662	27.475.748.430	67.606.504.009	16.558.054.379	*Others*
Jumlah Pendapatan		1.036.955.950.408	1.192.198.816.610	2.282.199.451.971	2.096.957.977.066	***Total Income***
BEBAN						***EXPENSES***
Beban kepegawaian	**27**	297.943.756.611	295.076.118.883	633.906.106.762	576.207.958.723	*Personnel expenses*
Beban keuangan	**28,33**	261.721.755.551	238.463.885.502	503.950.268.476	355.060.182.759	*Finance cost*
Beban umum dan administrasi	**29,33**	130.301.731.055	151.025.493.110	310.166.826.556	259.080.667.181	*General and administrative expenses*
Cadangan kerugian penurunan nilai						*Allowances for impairment losses for*
Piutang pembiayaan	**4**	295.828.303.680	366.701.949.307	587.820.882.676	601.316.832.921	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	**5**	3.032.520.462	564.676.523	4.050.664.557	7.700.840.775	*Factoring receivables*
Beban penyusutan dan amortisasi	**9,10,11**	54.263.265.389	50.393.196.543	103.553.159.199	87.927.847.261	*Depreciation and amortization expenses*
Beban lain-lain	**30**	7.948.152.520	6.790.146.733	27.289.535.264	6.874.641.610	*Other expenses*
Jumlah Beban		1.051.039.485.268	1.109.015.466.601	2.170.737.443.490	1.894.168.971.230	***Total Expenses***
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(14.083.534.860)	83.183.350.009	111.462.008.481	202.789.005.836	***(LOSS) PROFIT BEFORE INCOME TAX***
PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX***
Kini	**17c,d**	-	(2.677.130.720)	(18.663.626.740)	(68.679.279.900)	*Current*
Tangguhan	**17c,e**	12.448.216.780	(10.848.768.024)	(1.252.252.474)	24.018.481.234	*Deferred*
Penghasilan (Beban) Pajak Penghasilan		12.448.216.780	(13.525.898.744)	(19.915.879.214)	(44.660.798.666)	***Income Tax Benefit (Expense)***
(RUGI) LABA BERSIH PERIODE /TAHUN BERJALAN		(1.635.318.080)	69.657.451.265	91.546.129.267	158.128.207.170	***NET (LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD/YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:						***ITEMS THAT WILL NOT BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:***
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	**18**	-	-	(15.039.671.302)	(4.673.893.025)	*Loss on defined benefit actuarial program*
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**12**	(16.200.000.000)	1.080.000.000	(10.800.000.000)	-	*(Loss) gain on changes in value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	**17e**	3.564.000.000	(237.600.000)	5.448.421.003	907.293.863	*Income tax relating to item that will not be reclassified to profit or loss*
Jumlah (Rugi) Penghasilan Komprehensif Lain		(12.636.000.000)	842.400.000	(20.391.250.299)	(3.766.599.162)	***Total Other Comprehensive (Loss) Income***
JUMLAH (RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE /TAHUN BERJALAN		(14.271.318.080)	70.499.851.265	71.154.878.968	154.361.608.008	***TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
(RUGI) LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	**2v,35**	(7)	552	680	1.253	***BASIC (LOSS) EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Interim Financial Statements which are on Exhibit E an integral part of the Interim Financial Statements taken as a whole

These Interim Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language

Ekshibit C

Exhibit C

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Note*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Komponen ekuitas lain/ *Other equity component*	Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan/ *Perpetual convertible bonds*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022		126.250.040.000	288.886.785.571	-	150.497.065.539	(31.970.392.480)	435.000.000.000	968.663.498.630	*Balance as of 1 January 2022*
Pembayaran atas kupon perpetual *bonds*	**22**	-	-	-	(13.775.991.076)	-	-	(13.775.991.076)	*Issuance of perpetual convertible bonds*
Pembayaran dividen tunai	**22**	-	-	-	(16.412.505.200)	-	-	(16.412.505.200)	*Payment of cash dividends*
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	**22**	-	-	25.250.008.000	(25.250.008.000)	-	-	-	*Appropriated retained earnings*
Laba tahun berjalan		-	-	-	158.128.207.170	-	-	158.128.207.170	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	(3.766.599.162)	-	(3.766.599.162)	*Other comprehensive loss*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022		126.250.040.000	288.886.785.571	25.250.008.000	253.186.768.433	(35.736.991.642)	435.000.000.000	1.092.836.610.362	*Balance as of 31 December 2022*
		Catatan 20/ *Note 20*	**Catatan 21/ *Note 21***	**Catatan 22/ *Note 22***			**Catatan 23/ *Note 23***		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Interim Financial Statements which are on Exhibit E an integral part of the Interim Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C/2 | ***Exhibit C/2***

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Note*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Komponen ekuitas lain/ *Other equity component*	Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan/ *Perpetual convertible bonds*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
				Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		126.250.040.000	288.886.785.571	25.250.008.000	253.186.768.433	(35.736.991.642)	435.000.000.000	1.092.836.610.362	*Balance as of 1 January 2023*
Penerbitan modal saham		100.000.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000.000	*Issuance of share capital*
Penerbitan obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	**23**	-	-	-	-	-	165.000.000.000	165.000.000.000	*Issuance of perpetual convertible bonds*
Pembayaran atas kupon perpetual *bonds*	**22**	-	-	-	(32.154.678.000)	-	-	(32.154.678.000)	*Payment of coupon perpetual Bonds*
Pembayaran dividen tunai	**22**	-	-	-	(25.250.008.000)	-	-	(25.250.008.000)	*Payment of cash dividends*
Laba tahun berjalan		-	-	-	91.546.129.267	-	-	91.546.129.267	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	(20.391.250.299)	-	(20.391.250.299)	*Other comprehensive loss*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		226.250.040.000	288.886.785.571	25.250.008.000	287.328.211.700	(56.128.241.941)	600.000.000.000	1.371.586.803.330	*Balance as of 31 December 2023*
		Catatan 20/ *Note 20*	**Catatan 21/ *Note 21***	**Catatan 22/ *Note 22***			**Catatan 23/ *Note 23***		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Interim Financial Statements which are on Exhibit E an integral part of the Interim Financial Statements taken as a whole

These Interim Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language

Ekshibit C/3 | ***Exhibit C/3***

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT)
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
INTERIM STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED
30 JUNE 2024 AND 2023 (UNAUDITED)
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Uang muka setoran modal/ *Advance paid-in capital*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Komponen ekuitas lain/ *Other equity component*	Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan/ *Perpetual convertible bonds*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
					Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo 1 Januari 2023		126.250.040.000	288.886.785.571	-	25.250.008.000	253.186.768.433	(35.736.991.642)	435.000.000.000	1.092.836.610.362	*Balance as of 1 January 2023*
Pembayaran atas kupon perpetual *bonds*	22	-	-	-	-	(32.154.678.000)	-	-	(32.154.678.000)	*Issuance of perpetual convertible bonds*
Pembayaran dividen tunai	22	-	-	-	-	(25.250.008.000)	-	-	(25.250.008.000)	*Payment of cash dividends*
Uang muka setoran modal		-	-	90.000.000.000	-	-	-	-	90.000.000.000	*Advance paid-in capital*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	-	-	842.400.000	-	842.400.000	*Other comprehensive income*
Laba periode berjalan		-	-	-	-	69.657.451.265	-	-	69.657.451.265	*Profit for the period*
Saldo 30 Juni 2023		126.250.040.000	288.886.785.571	90.000.000.000	25.250.008.000	265.439.533.698	(34.894.591.642)	435.000.000.000	1.195.931.775.627	*Balance as of 30 June 2023*
Saldo 1 Januari 2024		226.250.040.000	288.886.785.571	-	25.250.008.000	287.328.211.700	(56.128.241.941)	600.000.000.000	1.371.586.803.330	*Balance as of 1 January 2024*
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	22	-	-	-	20.000.000.000	(20.000.000.000)	-	-	-	*Appropriated retained earnings*
Pembayaran dividen tunai	22	-	-	-	-	(5.203.750.920)	-	-	(5.203.750.920)	*Payment of cash dividends*
Pembayaran atas kupon perpetual bonds	22	-	-	-	-	(45.534.411.333)	-	-	(45.534.411.333)	*Payment of coupon perpetual bonds*
Rugi periode berjalan		-	-	-	-	(1.635.318.080)	-	-	(1.635.318.080)	*Loss for the period*
Rugi komprehensif lain		-	-	-	-	-	(12.636.000.000)	-	(12.636.000.000)	*Other comprehensive loss*
Saldo 30 Juni 2024		226.250.040.000	288.886.785.571	-	45.250.008.000	214.954.731.367	(68.764.241.941)	600.000.000.000	1.306.577.322.997	*Balance as of 30 June 2024*
		Catatan 20/ *Note 20*	Catatan 21/ *Note 21*		Catatan 22/ *Note 22*			Catatan 23/ *Note 23*		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Interim Financial Statements which are on Exhibit E an integral part of the Interim Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D | ***Exhibit D***

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
LAPORAN ARUS KAS INTERIM
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT KB FINANSIA MULTI FINANCE
INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2024 AND 2023 (UNAUDITED) AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari transaksi pembiayaan		4.371.545.033.902	4.671.011.778.837	8.680.703.173.007	7.427.318.583.212	*Proceeds from financing transactions*
Penerimaan dari pendapatan keuangan	**26**	1.421.137.016	3.577.646.856	9.872.631.198	5.241.729.480	*Proceeds from finance income*
Pembayaran atas transaksi pembiayaan		(3.489.927.377.911)	(3.792.794.028.154)	(7.583.522.487.699)	(7.807.789.873.664)	*Payment of financing transactions*
Pembayaran atas pajak penghasilan		(1.690.604.831)	(53.190.413.237)	(37.527.964.349)	(33.447.037.385)	*Payment of income tax*
Pembayaran beban keuangan		(291.748.894.113)	(264.383.532.313)	(541.833.271.764)	(305.093.201.386)	*Payment of financing cost*
Pembayaran beban operasional		(665.981.207.417)	(976.998.757.734)	(1.157.020.890.617)	(1.124.327.961.396)	*Payment of operating expenses*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi		(76.381.913.354)	(412.777.305.745)	(629.328.810.224)	(1.838.097.761.139)	***Net cash flows used in operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penempatan investasi jangka panjang		-	(54.000.000.000)	(54.000.000.000)	-	*Placement of long term investment*
Perolehan aset takberwujud	**11**	(17.225.260.943)	(22.619.630.456)	(41.131.532.430)	(31.146.885.307)	*Acquisitions of intangible asset*
Perolehan aset tetap	**10**	(22.226.941.722)	(29.800.223.595)	(48.929.575.918)	(57.052.104.810)	*Acquisitions of property and equipment*
Perolehan atas aset hak-guna	**9,32**	(20.191.642.867)	(26.466.035.581)	(71.458.195.572)	(66.341.368.408)	*Acquisitions of right-of-use assets*
Hasil dari penjualan aset tetap	**10**	165.916.306	126.276.609	4.659.015.073	1.334.296.378	*Proceeds from sale of property and equipment*
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(59.477.929.226)	(132.759.613.023)	(210.860.288.847)	(153.206.062.147)	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	**14,32**	4.191.447.637.600	2.360.000.000.000	4.860.000.000.000	2.965.287.433.774	*Proceeds from fund borrowings*
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan		-	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	*Proceeds from issuance of securities issued*
Pembayaran atas pinjaman yang diterima		(3.935.005.356.791)	(1.775.252.816.664)	(4.546.818.418.375)	(2.020.605.154.381)	*Payments of fund borrowings*
Pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan		-	-	(686.385.000.000)	-	*Payments of debt securities issued*
Pembayaran dividen tunai	**22**	(5.203.750.920)	(25.250.008.000)	(25.250.008.000)	16.412.505.200	*Payment of cash dividends*
Penerimaan dari penerbitan obligasi perpetual yang dapat dikonversikan	**22**	-	-	165.000.000.000	-	*Proceed from issuance of perpetual convertible bonds*
Penerimaan dari penerbitan modal saham		-	-	100.000.000.000	-	*Proceed from issuance of share capital*
Pembayaran bunga obligasi perpetual yang dapat dikonversikan		(45.534.411.333)	(32.154.678.000)	(32.154.678.000)	(13.775.991.077)	*Interest payment of perpetual convertible bonds*
Pembayaran atas liabilitas sewa		(9.294.685.757)	(9.015.422.106)	(18.257.561.857)	(14.250.781.002)	*Payments of lease liabilities*
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan		196.409.432.799	1.518.327.075.230	816.134.333.768	1.900.243.002.114	***Net cash flows provided by financing activities***
(PENURUNAN) KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS LAINNYA	**26,30**	(158.625.783)	(1.987.048.308)	141.253.607	263.966.805	***OTHER (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS		60.390.964.436	970.803.108.154	(23.913.511.696)	(90.796.854.367)	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	**3**	150.519.339.731	174.432.851.427	174.432.851.427	265.229.705.794	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	**3**	210.910.304.167	1.145.235.959.581	150.519.339.731	174.432.851.427	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/YEAR***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Interim pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Interim secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Interim Financial Statements which are on Exhibit E an integral part of the Interim Financial Statements taken as a whole

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan") dahulu PT Finansia Multi Finance berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 9 Juni 1994 dari Rachmad Umar, S.H., Notaris di Pondok Gede. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/"Kemenkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10254-HT.01.01. Th 94 tanggal 5 Agustus 1994 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 4 Oktober 1994, Tambahan No. 7572. Berdasarkan akta Notaris No. 23 tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Perusahaan melakukan perubahan nama menjadi PT KB Finansia Multi Finance, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 6 Juli 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No.130 tanggal 27 Mei 2024 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Pasal 12 terkait nomenklatur jabatan Direksi. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-0101634.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Mei 2024 dan disimpan di dalam sistem administrasi berdasarkan Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0120998.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sewa operasi dan atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, serta kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994 dan yang telah dilakukan pembaharuan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-177/NB.11/2020 tanggal 5 Agustus 2020 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1994.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Office 8, Lantai 15, SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki masing-masing 132, 132 dan 134 kantor cabang yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT KB Finansia Multi Finance ("the Company") formerly PT Finansia Multi Finance was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 4 dated 9 June 1994 of Rachmad Umar, S.H., Notary in Pondok Gede. The deed of establishment approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (recently known as Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia"Kemenkumham") by his Decision Letter No. C2-10254-HT.01.01.Th 94 dated 5 August 1994 and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.79 dated 4 October 1994, Supplement No. 7572. Based on Notarial deed No. 23 dated 6 July 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the Company changed its name to PT KB Finansia Multi Finance, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0045638.AH.01.02.TAHUN 2020 dated 6 July 2020.

The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 130 dated 27 May 2024 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, about amendment to article 12 regarding nomenclature of directors. This change had been has been received and recorded in the System Legal Entity Administration by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No.AHU-0101634.AH.01.11 TAHUN 2024 dated 27 May 2024 and stored in the administration system based on the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.03-0120998.

In accordance with Article 3 of the Company's Article of Association, the scope of its activities comprises of investment financing, working capital financing, multipurpose financing, operating lease and/or fee-based activities so far as they do not conflict with the provisions of legislation in the financial services sector and other financing activities based on approval from Financial Service Authority (OJK).

The Company obtained its operating license as multi finance company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on his Decision Letter No. 460/KMK.017/1994 dated 14 September 1994 and that has been updated based on the Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number: KEP-177/NB.11/2020 dated 5 August 2020 and started its commercial operation in 1994.

The Company domiciled in Jakarta with its head office located in Office 8 Building, 15th Floor, SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12910.

As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022, the Company have 132, 132 and 134 branch offices, respectively, which were located throughout Indonesia.

1. **UMUM** (Lanjutan)

b. **Penawaran umum obligasi Perusahaan**

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

Pada tanggal 22 Juli 2022, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan jangka waktu 370 hari dan 3 tahun yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan Surat Keputusan No. S-126/D.04/2022. Obligasi tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan menerima surat dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 124/DIR/RATLTR/VII/2022 yang menyatakan Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AA+(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. Peringkat Nasional 'AAA' menunjukan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Pada tanggal 13 September 2022, Perusahaan menerima surat dari Fitch No.143/DIR/RATLTR/IX/2022 yang menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang telah dinaikan menjadi 'AAA(idn)' dari 'AA+(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. Peringkat Nasional 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perusahaan menerima surat dari Fitch No. 131/DIR/RATLTR/VIII/2023 yang mengafirmasi bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan menerbitkan "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 untuk jangka waktu 370 hari dan 3 tahun yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. S-133/D.04/2023. Obligasi tersebut terdafar di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perusahaan menerima surat dari Fitch No. 131/DIR/RATLTR/VIII/2023 yang mengafirmasi bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang di 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023. Peringkat Nasional 'AAA' menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala Peringkat Nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.

*1. **GENERAL** (Continued)*

*b. **Public offering of the Company's bonds***

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

On 22 July 2022, the Company offered to the public "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" with nominal value of Rp 1,000,000,000,000 with maturities 370 days and 3 years which became effective on 14 July 2022 based on the Decision Letter No.S-126/D.04/2022 of the Financial Services Authority ("OJK"). This bond is listed in the Indonesia Stock Exchange.

On 29 July 2022, the Company received a letter from PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 124/DIR/RATLTR/VII/2022 which affirmed the National Long-Term Rating of the Company "AA+(idn) for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022. The National Rating of 'AAA' indicates the highest rating which is given by Fitch on the National Rating scale for the country. It indicates the lowest expected default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union.

On 13 September 2022, the Company received a letter from Fitch No.143/DIR/RATLTR/IX/2022 which affirmed the credit rating of the Company has been upgraded to "AAA(idn)" from "AA+(idn) for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Year 2022. The National Rating of 'AAA' indicates the highest rating which is given by Fitch on the National Rating scale for the country. It indicates the lowest expected of default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union.

On 18 August 2023, the Company received a letter No. 131/DIR/RATLTR/VIII/2023 from Fitch which affirmed that the National Long-Term Rating "AAA(idn)" for Obligasi I KB Finansia Multi Finance Year 2022.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

On 27 June 2023, the Company issued "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Year 2023" with a nominal value of Rp 1,000,000,000,000 with maturities 370 days and 3 years which became effective on 19 June 2023 based on the Decision Letter No. S-133/D.04/2023. This bond is listed in the Indonesia Stock Exchange.

On 18 August 2023, the Company received a letter No. 131/DIR/RATLTR/VIII/2023 which affirmed the National Long-Term Rating 'AAA(idn)' for Obligasi II KB Finansia Multi Finance Year 2023. The National Rating of 'AAA' indicates the highest rating which is given by Fitch on the National Rating scale for the country. It indicates the lowest expected default risk compared to other issuers or bonds in the same country or monetary union.

1. **UMUM** (Lanjutan)

b. **Penawaran umum obligasi Perusahaan** (Lanjutan)

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 (Lanjutan)

Pada tanggal 18 Agustus 2023, Perusahaan telah menerima surat dari Fitch No.131/DIR/RATLTR/VIII/2023 yang menetapkan kembali Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*1. **GENERAL** (Continued)*

*b. **Public offering of the Company's bonds** (Continued)*

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 (Continued)

On 18 August 2023, the Company received a letter from Fitch No.131/DIR/RATLTR/VIII/2023 which reffirmed the National Long Term Rating of "AAA(idn)" for Obligasi II KB Finansia Multi Finance Year 2023.

The bonds issued by the Company as of 30 June 2024 were as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Nilai Nominal/ *Nominal Value*	Tingkat Bunga Tetap/ *Fixed Interest Rate*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Status Pembayaran/ *Payment Status*	Peringkat/ *Rating*	Wali Amanat/ *The Trustee*
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri/*Series* A	686.385.000.000	4,70%	2 Agustus/ *August* 2023	Lunas/ *Paid*	AAA (idn)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri/Series B	313.615.000.000	7,40%	22 Juli/ *July* 2025	Belum Jatuh Tempo/ *Not Yet Due*	AAA (idn)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 II Seri/*Series* A	500.000.000.000	6,20%	7 Juli/ *July* 2024	Belum Jatuh Tempo/ *Not Yet Due*	AAA (idn)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri/*Series* B	500.000.000.000	7,30%	27 Juni/ *June* 2026	Belum Jatuh Tempo/ *Not Yet Due*	AAA (idn)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

c. **Dewan Komisaris, Direksi dan Komite**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah melalui Akta Notaris No. 33 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan ini telah dicatatkan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang disampaikan melalui surat No. AHU-AH.01.09-0138674 tanggal 04 April 2024, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*c. **Boards of Commissioners, Directors and Committee***

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors has undergone several changes, most recently amended through Notarial Deed No. 33 dated 04 April 2024 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. This amendment has been registered in the Legal Entity Administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia submitted through letter No. AHU-AH.01.09-0138674 dated 04 April 2024, so that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

		30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022		
Dewan Komisaris						***Board of Commisioners***
Komisaris Utama	:	-	Song, Yong Hun	Song, Yong Hun	:	*President Commisioner*
Komisaris Independen	:	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla	:	*Independent Commisioner*
Direksi						***Directors***
Direktur Utama	:	Yap Tjay Hing	Yap Tjay Hing	Yap Tjay Hing	:	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Kisup Wi	Joohyun Hwang	Joohyun Hwang	:	*Vice President Director*
Direktur	:	Peter Halim	Peter Halim	Peter Halim	:	*Director*
Direktur	:	Hery Susanto Dermawan	Hery Susanto Dermawan	Hery Susanto Dermawan	:	*Director*
Direktur Keuangan	:	-	Kisup Wi	Kisup Wi	:	*Finance Director*
Direktur Pemasaran	:	Sea Hwan Lah	Sea Hwan Lah	Sea Hwan Lah	:	*Marketing Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan *General Affairs*	:	Martina Hariyanto	Martina Hariyanto	-	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur	:	Choi, Ho Jung	Choi, Ho Jung	-	:	*Director*

1. **UMUM** (Lanjutan)

c. **Dewan Komisaris, Direksi dan Komite (**Lanjutan)

Komposisi Komite Manajemen Risiko Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah melalui Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 27 Mei 2024, susunan Komite Manajemen Risiko Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*1. **GENERAL** (Continued)*

*c. **Boards of Commissioners, Directors and Committee** (Continued)*

The composition of the Company's Risk Management Committee has undergone several changes, most recently amended through the Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 27 May 2024, the composition of the Company's Risk Management Committee as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

		30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**		
Komite Manajemen Risiko						***Risk Management Committee***
Ketua	:	Yap Tjay Hing	Choi, Ho Jung	Yap Tjay Hing	:	*Chairman*
Anggota	:	Choi, Ho Jung	Yap Tjay Hing	-	:	*Member*
Anggota	:	-	Joohyun Hwang	Joohyun Hwang	:	*Member*
Anggota	:	Kisup Wi	Kisup Wi	Kisup Wi	:	*Member*
Anggota	:	Peter Halim	Peter Halim	Peter Halim	:	*Member*
Anggota	:	Ka Nen	Ka Nen	Herman Jusup	:	*Member*
Anggota	:	Marie Yovanka Angelina	Marie Yovanka Angelina	Marie Yovanka Angelina	:	*Member*
Anggota	:	Daniel Adrian	Daniel Adrian	Daniel Adrian	:	*Member*

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 22 Maret 2024, susunan Komite Pengarah TI Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 22 March 2024, the composition of the Company's IT Steering Committee as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

		30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**		
Komite Pengarah TI						***IT Steering Committee***
Ketua	:	Yap Tjay Hing	Yap Tjay Hing	Yap Tjay Hing	:	*Chairman*
Anggota	:	-	Joohyun Hwang	Joohyun Hwang	:	*Member*
Anggota	:	Kisup Wi	Kisup Wi	Kisup Wi	:	*Member*
Anggota	:	Hery Susanto Dermawan	Hery Susanto Dermawan	Hery Susanto Dermawan	:	*Member*
Anggota	:	Choi, Ho Jung	Choi, Ho Jung	-	:	*Member*
Anggota	:	David Wirawan	David Wirawan	David Wirawan	:	*Member*
Anggota	:	Herman Jusup	Herman Jusup	Herman Jusup	:	*Member*
Anggota	:	Marie Yovanka Angelina	Marie Yovanka Angelina	Marie Yovanka Angelina	:	*Member*

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Direksi Perusahaan tanggal 22 Maret 2024, susunan Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on Circular Resolution of the Company's Board of Directors in lieu of the Company's Board of Directors Meeting dated 22 March 2024, the composition of the Company's Asset and Liability Management Committee as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

		30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**		
Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas						***Asset & Liabilities Management Committee***
Ketua	:	Yap Tjay Hing	Yap Tjay Hing	Yap Tjay Hing	:	*Chairman*
Anggota	:	-	Joohyun Hwang	Joohyun Hwang	:	*Member*
Anggota	:	Kisup Wi	Kisup Wi	Kisup Wi	:	*Member*
Anggota	:	Peter Halim	Peter Halim	Peter Halim	:	*Member*
Anggota	:	Sea Hwan Lah	Sea Hwan Lah	-	:	*Member*
Anggota	:	Choi, Ho Jung	Choi, Ho Jung	-	:	*Member*
Anggota	:	Cun Pin	Cun Pin	Cun Pin	:	*Member*
Anggota	:	Marie Yovanka Angelina	Marie Yovanka Angelina	Marie Yovanka Angelina	:	*Member*

1. **UMUM** (Lanjutan)

c. **Dewan Komisaris, Direksi dan Komite** (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 22 Maret 2024, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*1. **GENERAL** (Continued)*

*c. **Boards of Commissioners, Directors and Committee** (Continued)*

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners in lieu of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 22 March 2024, the composition of the Company's Audit Committee as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

Komite Audit					***Audit Committee***
Ketua	:	Nursalam Andi Tabusalla	:		*Chairman*
Anggota	:	Peter Irawan Chandra	:		*Member*
Anggota	:	Siti Rosyidah	:		*Member*

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 22 Maret 2024, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners in lieu of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 22 March 2024, the composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

		30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**		
Komite Nominasi dan Remunerasi						***Nomination and Remuneration Committee***
Ketua	:	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla	:	*Chairman*
Anggota	:	Moon Cheol Kang*)	Song, Yong Hun	Song, Yong Hun	:	*Member*
Anggota	:	Juan Sumando Nababan	Juan Sumando Nababan	Martina Hariyanto	:	*Member*

*) Berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan *(Fit and Proper Test)* dari OJK.

*) *Effective from the date since the person concerned passes the Fit and Proper Test from OJK.*

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perusahaan sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 22 Maret 2024, susunan Komite Pemantau Risiko Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Based on the Circular Resolution of the Company's Board of Commissioners in lieu of the Company's Board of Commissioners Meeting dated 22 March 2024, the composition of the Company's Risk Oversight Committee as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 is as follows:

		30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**		
Komite Pemantau Risiko						***Risk Oversight Committee***
Ketua	:	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla	Nursalam Andi Tabusalla	:	*Chairman*
Anggota	:	Moon Cheol Kang*)	Song, Yong Hun	Song, Yong Hun	:	*Member*
Anggota	:	Peter Irawan Chandra	Peter Irawan Chandra	Peter Irawan Chandra	:	*Member*

*) Berlaku efektif sejak tanggal yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan *(Fit and Proper Test)* dari OJK.

*) *Effective from the date since the person concerned passes the Fit and Proper Test from OJK.*

Gaji, bonus dan tunjangan yang diberikan kepada manajemen Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 39.207.645.829, Rp 45.290.798.310, Rp 80.512.801.177 dan Rp 63.470.153.383.

Salaries, bonuses and benefits provided to the Company's management for the six months period ended 30 June 2024 and 2023 and year ended 31 December 2023 and 2022 amounted to Rp 39,207,645,829, Rp 45,290,798,310, Rp 80,512,801,177 and Rp 63,470,153,383, respectively.

Entitas induk utama Perusahaan adalah KB Financial Group. Entitas induk Perusahaan adalah KB Kookmin Card Corp. Keduanya adalah perusahaan yang berkedudukan di Seoul, Korea Selatan.

The ultimate parent entity of the Company is KB Financial Group. The Company's parent entity is KB Kookmin Card Corp. Both are the company located in Seoul, South Korea.

1. **UMUM** (Lanjutan)

c. **Dewan Komisaris, Direksi dan Komite** (Lanjutan)

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (Tidak diaudit):

*1. **GENERAL** (Continued)*

*c. **Boards of Commissioners, Directors and Committee** (Continued)*

The total number of the Company's employees as of 30 June 2024 and 31 December 2023 and 2022 was as follows (Unaudited):

	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Karyawan tetap	3.401	3.536	3.931	*Permanent employees*
Karyawan tidak tetap	4.106	4.615	4.196	*Non-permanent employees*
Jumlah	7.507	8.151	8.127	***Total***

d. **Otorisasi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan interim telah diotorisasi oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2024.

*d. **Authorization Of Financial Statements***

These interim financial statements were authorized by the Company's Board of Directors for issuance on 1 October 2024.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini merupakan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten untuk tahun-tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. **Dasar Penyusunan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), termasuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun berdasarkan atas akrual dan konsep nilai historis, kecuali dinyatakan secara khusus.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan Perusahaan disajikan dalam Rupiah Indonesia ("IDR" atau "Rp") yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal dimana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 2u.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

The significant accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are set out below. The policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

*a. **Basis of Preparation***

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SFAS"), which includes the Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by Financial Accounting Standards Board Institute of Accountants in Indonesia and regulations prescribed by Financial Service Authority ("OJK").

The financial statements were prepared on the accrual basis and historical costs concept, unless otherwise stated.

The statements of cash flows were prepared using the direct method and present the sources and uses of cash and cash equivalents according to operating, investing and financing activities.

The financial statements of the Company are presented in Indonesian Rupiah ("IDR" or "Rp") which is the functional currency of the Company.

The preparation of financial statement in compliance with SFAS requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company's management to exercise judgement in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgements and estimates have been made in preparing the financial statements and their effect are disclosed in Note 2u.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

b. **Standar Baru, Amandemen dan Penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan**

Efektif 1 Januari 2024

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 namun tidak berdampak secara substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan pengaruh material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan – Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan"
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan – Klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek atau Jangka Panjang"
- Amendemen PSAK No. 207, "Laporan Arus Kas"
- Amendemen PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan – Pengaturan Pembiayaan Pemasok"
- Amendemen PSAK No. 116, "Sewa - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik"

Belum efektif

- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran"

Amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen pada laporan keuangan Perusahaan.

c. **Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas mencakup kas, bank dan deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

b. ***New Standards, Amendments and Improvements of Financial Accounting Standards***

Effective from 1 January 2024

The adoption of new standards, amendments and improvements issued and effective for the financial year at or after 1 January 2024 which do not have substantial changes to the Company's accounting policies and had material impact on the financial statement are as follows:

- *Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements - Non-current Liabilities with Covenants"*
- *Amendment to SFAS No. 201, "Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-current"*
- *Amendment to SFAS No. 207, "Statement of Cash Flows"*
- *Amendment to SFAS No. 107, "Financial Instruments: Disclosure - Supplier Finance Arrangements"*
- *Amendment to SFAS No. 116, "Leases - Lease Liability in a Sale and Leaseback"*

Not effective yet

- *Amendment to SFAS No. 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability"*

The above amendment is effective beginning 1 January 2025.

As at the completion date of these financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these amendment on the Company's financial statements.

c. ***Cash and Cash Equivalents***

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

d. **Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

(1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (a) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (b) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (c) manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   (f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (1).
   (g) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1)(a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
   (h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk entitas pelapor.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

d. ***Related Party Transactions***

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

(1) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   (a) has control or joint control over the reporting entity;
   (b) has significant influence over the reporting entity; or
   (c) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

(2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

   (a) The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   (b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member).
   (c) Both entities are joint ventures of the same third party.
   (d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   (e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   (f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1).
   (g) A person identified in (1)(a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
   (h) An entity, or member of a group in which the entity is a part of that group, provides the services of key management personnel to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

d. **Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi** (Lanjutan)

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan ini, suatu pihak disebut sebagai pihak berelasi terhadap Perusahaan, apabila:

i. Entitas tersebut, baik secara langsung maupun tak langsung melalui satu atau lebih perantara, untuk mengendalikan Perusahaan atau melakukan pengaruh signifikan terhadap Perusahaan di dalam membuat keputusan kebijakan keuangan dan operasional, atau memiliki pengendalian bersama terhadap Perusahaan;
ii. Perusahaan dan entitas tersebut adalah subjek pengendalian bersama;
iii. Entitas tersebut adalah entitas asosiasi Perusahaan atau ventura bersama dimana Perusahaan adalah venturer;
iv. Pihak tersebut adalah anggota personel manajemen kunci atau anggota keluarga dekat individu yang bersangkutan, atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan Perusahaan;
v. Pihak tersebut adalah anggota keluarga dekat pihak yang disebut pada butir (i) atau merupakan entitas di bawah pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan individu tersebut; atau
vi. Pihak tersebut merupakan program imbalan pasca kerja yang merupakan manfaat karyawan atau merupakan entitas yang berelasi dengan pihak berelasi dengan Perusahaan.

Anggota keluarga dekat merupakan individu anggota keluarga yang diharapkan mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh orang, dalam hubungan mereka dengan entitas.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 33).

e. **Instrumen Keuangan**

(i) **Aset Keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

1. Biaya perolehan diamortisasi;
2. Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL");
3. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

d. ***Related Party Transactions*** *(Continued)*

For the purposes of these financial statements, a party is considered to be related to the Company if:

i. The party has the ability, directly or indirectly through one or more intermediaries, to control the Company or exercise significant influence over the Company in making financial and operating policy decisions, or has joint control over the Company;

ii. The Company and the party are subject to common control;
iii. The party is an associate of the Company or a joint venture in which the Company is a venturer;

iv. The party is a member of the key management personnel of the Company or a close family member of such an individual, or is an entity under the control, joint control or significant influence of the Company;
v. The party is a close family member of a party referred to in (i) or is an entity under the control, joint control or significant influence of such individuals; or

vi. The party is a post-employment benefit plan which is for the benefit of employees of the Company or of any entity that is a related party of the Company.

Close family members of an individual are those family members who may be expected to influence, or be influenced by, that individual in their dealings with the entity.

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements (Note 33).

e. ***Financial Instruments***

(i) ***Financial Assets***

The Company classifies its financial assets and financial liabilities in the following categories:

1. *Amortised cost;*
2. *Fair value through profit or loss ("FVTPL");*
3. *Fair value through other comprehensive income ("FVOCI").*

The classification depends on the purpose for which the financials assets and financial liabilities are acquired and is determined at initial recognition.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(i) **Aset Keuangan** (Lanjutan)

Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

Aset keuangan Perusahaan, terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang pembiayaan, piutang lain-lain investasi jangka panjang dan pinjaman kepada karyawan (dicatat sebagai bagian dari "aset lain-lain").

Perusahaan mengklasifikasi aset keuangannya dalam kategori:

(i) Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi Perusahaan diakui pada nilai wajarnya ditambah atau dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pemberian suatu pinjaman maupun perolehan piutang dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila pinjaman maupun piutang tersebut tidak diperoleh. Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari 'pendapatan piutang pembiayaan'.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

e. ***Financial Instrument*** *(Continued)*

(i) ***Financial Assets*** *(Continued)*

The Company determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year-end.

The Company's financial assets, consist of cash and cash equivalents, restricted cash, financing receivables, other receivables, long term investments and loans to employees (recorded as part of "other assets").

The Company assets into the following category:

(i) The Company's financial classified as financial assets measured at amortised cost

A financial assets is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions:

- *Financial assets is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and*
- *Contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.*

At initial recognition, the Company's financial assets measured at amortised cost are measured at fair values plus or minus directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of loans or receivables and they are incremental costs that would not have been incurred if the loan or receivables had not been acquired or issued. Income on financial assets classified as financial assets measured at amortised cost is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of 'financing receivables'.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(i) **Aset Keuangan** (Lanjutan)

(i) Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan)

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai" atas piutang pembayaran konsumen.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada intrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

(iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar pendapatan komprehensif lain adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

(ii) **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan, beban yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan liabilitas sewa.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

e. ***Financial Instruments*** *(Continued)*

(i) ***Financial Assets*** *(Continued)*

(i) The Company's financial classified as financial assets measured at amortised cost (Continued)

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as financial assets measured at amortised cost recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Allowance for Impairment Losses" for financing receivables.

(ii) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets classified as held for trading. Company may determine at initial classification of an uncancellable chosen category of a financial asset on a certain equity instrument which commonly measured the fair value through profit and loss rise change in the fair value presented under fair value through other comprehensive income.

(iii) Financial assets at fair value through other comprehensive income

Fair value through other comprehensive income are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and fixed maturities that the management has positive intention and ability to hold to maturity, other than:

a) Financial assets managed under business model which its objective is to both collect the contractual cash flows and sell the financial assets; and

b) Contractual cash flows characteristics test resulting rights on certain basic term of cashflows meets the solely payments of principal and interest.

(ii) ***Financial Liabilities***

The Company's financial liabilities consist of fund borrowings, securities issued, accrued expenses, other payables and lease liabilities.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(ii) **Liabilitas Keuangan** (Lanjutan)

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pengakuan suatu pinjaman yang diterima, dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila pinjaman yang diterima tidak diakui. Beban atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat sebagai bagian dari "beban keuangan".

(iii) **Instrumen Ekuitas**

Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan di klasifikasikan sebagai ekuitas hanya sebatas ketika instrumen keuangan tersebut tidak memenuhi definisi aset atau liabilitas keuangan.

Saham biasa Perusahaan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas.

(iv) **Hierarki Pengukuran Nilai Wajar**

PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

a. harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
b. input selain harga kuotasi yang termasuk di dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
c. input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

e. ***Financial Instruments*** *(Continued)*

(ii) ***Financial Liabilities*** *(Continued)*

The Company classified its financial liabilities as financial liabilities measured at amortized cost.

Financial liabilities measured at amortized cost are initially recognized at fair value plus transaction costs. After initial recognition, the Company measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method. Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the recognition of loan received and they are incremental costs that would not have been incurred if the loan has not been recognized. Expenses on financial liabilities measured at amortized cost is charged in the statement of profit or loss and other comprehensive income and recorded as part of "finance cost".

(iii) ***Equity Instruments***

Financial instruments issued by the Company are classified as equity only to the extent that they do not meet the definition of a financial liability or financial asset.

The Company's ordinary shares are classified as equity instruments.

(iv) ***Fair Value Measurement Hierarchy***

SFAS 60 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the fair value measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

a. quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
b. inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) (level 2); and
c. inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(iv) **Hierarki Pengukuran Nilai Wajar** (Lanjutan)

Tingkatan di dalam hierarki nilai wajar dimana aset keuangan atau liabilitas keuangan dikategorikan penetapnya pada basis tingkatan input paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

(v) **Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

e. ***Financial Instruments*** *(Continued)*

(iv) ***Fair Value Measurement Hierarchy*** *(Continued)*

The level in the fair value hierarchy within which the financial asset or financial liability is categorised is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Financial assets and financial liabilities are classified in their entirety into only one of the three levels.

(v) ***Fair Value Estimation***

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments; and*
- *other techniques, such as discounted cashflows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.*

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(vi) **Penghentian Pengakuan**

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dmana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan menghentikan pengakuan piutang pembiayaan pada saat dilakukannya penarikan jaminan kendaraan. Selain itu, penghentian pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perusahaan menentukan bahwa piutang pembiayaan tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada kemampuan keuangan konsumen sehingga konsumen tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau konsumen atau unit yang dibiayai tidak dapat ditemukan atau dikuasai oleh pihak ketiga atau hasil penjualan agunan diperkirakan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh ekposur piutang pembiayaan.

2. *MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)*

e. Financial Instruments (Continued)

(vi) Derecognition

The Company derecognized a financial asset when the contractual rights to the cash flow from asset expire, or when the Company transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and reward of ownership are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Company is recognized as a separate asset or liability.

The Company derecognize financing receivables at the time when the collateral vehicle has been taken out. In addition, derecognition of financial liabilities when they have been redeemed or otherwise extinguished.

In a transaction where the Company has substantially own or did not transfer all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company terminate the recognition of such assets, if the Company no longer has control over those assets. The rights and obligations arising or that still exists in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In transfers where control over the assets still owned, the Company continued to recognize the transferred assets in the amount of involvement that is sustainable, where the level of sustainability of the Company in the transferred assets amounted to changes in the value of the transferred assets.

Companies write off any outstanding financing receivables and reserves related to impairment losses, when the Company determines that the financing receivables cannot be collectible. This decision was taken after consideration of information such as the occurrence of significant changes to the financial ability of consumers so that consumers can no longer pay the loan, or consumer or units being financed cannot be found or is controlled by third party or the sale of collateral is not expected to be sufficient to pay the entire exposure for the financing receivables.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(vii) **Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar yang relevan.

(viii) **Penurunan Nilai dari Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami konsumen;
(b) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
(c) Perusahaan, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami konsumen, memberikan keringanan (konsesi) pada konsumen yang tidak mungkin diberikan jika konsumen tidak memiliki kesulitan tersebut;
(d) terdapat kemungkinan bahwa konsumen akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan, atau

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

e. ***Financial Instruments*** *(Continued)*

(vii) ***Offsetting***

Financial assets and liabilities are off-set and the net amount is presented in the statements of financial position when, and only when, the Company has the legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or realize the asset and settle the liabilities simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by relevant standards.

(viii) ***Impairment of Financial Assets***

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a 'loss event') and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

(a) significant financial difficulty of the consumer;
(b) a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
(c) the Company, for economic or legal reasons relating to the consumer's financial difficulty, granting to the consumer a concession that the lender would not otherwise consider;
(d) it becomes probable that the consumer will enter bankruptcy or other financial reorganization;
(e) the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(viii) **Penurunan Nilai dari Aset Keuangan** (Lanjutan)

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

(f) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
(1) memburuknya status pembayaran konsumen dalam kelompok tersebut; dan
(2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karekteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

*2. **MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION** (Continued)*

*e. **Financial Instruments** (Continued)*

*(viii) **Impairment of Financial Assets** (Continued)*

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include: (Continued)

(f) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:

(1) adverse changes in the payment status of consumers in the portfolio; and
(2) national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by the management for each identified portfolio.

The Company firstly assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(viii) **Penurunan Nilai dari Aset Keuangan** (Lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi beban-beban untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur untuk membayar seluruh utang yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (Continued)

e. Financial Instruments (Continued)

(viii) Impairment of Financial Assets (Continued)

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statements of comprehensive income. If financial assets measured at amortised cost has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate the debtors' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the group and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

e. **Instrumen Keuangan** (Lanjutan)

(viii) **Penurunan Nilai dari Aset Keuangan** (Lanjutan)

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya. Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala oleh Perusahaan untuk mengurangi perbedaan antara taksiran jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

Ketika piutang pembiayaan tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang pembiayaan tidak tertagih diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas aset keuangan yang telah dihapus-bukukan sebelumnya, diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembayaran konsumen dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

f. **Piutang Pembiayaan**

Piutang pembiayaan merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*), pendapatan piutang pembiayaan yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan piutang pembiayaan yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan, akan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian piutang pembiayaan dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

e. ***Financial Instruments*** *(Continued)*

(viii) ***Impairment of Financial Assets*** *(Continued)*

Estimates of changes in future cash flows for group of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period. The methodology and assumptions used in estimating future cash flows are reviewed periodically by the Company to reduce the difference between the estimated amount of loss with the amount of actual loss.

When a financing receivable account is uncollectible, such receivable is written-off against the related allowance for impairment losses. Such receivable is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment expense related to financing receivables are classified into "Allowance for Impairment Losses".

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss is reversed by adjusting the allowance for impairment losses. The amount of the reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Subsequent recoveries of financial assets written-off, in the previous period are recognized as allowances for impairment losses for financing receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

f. ***Financing Receivables***

Financing receivables are stated net of joint financing receivables where joint financing providers bear credit risk in accordance with its portion (without recourse), unearned financing receivables income and allowance for impairment losses.

Unearned income on financing receivables, which represents the difference between total installments to be received from the customers and the principal amount financed deducted with the unamortized cost, will be recognized as income over the terms of the contract using effective interest method of the financing receivables.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

f. **Piutang Pembiayaan (**Lanjutan)

Penyelesaian kontrak sebelum masa piutang pembiayaan berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan dan pendapatan yang timbul terkait penyelesaian kontrak diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

Piutang pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 180 hari. Perusahaan juga dapat melakukan *write off* sebelum 180 hari dan dapat melakukan penundaan *write off*. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan

Pembiayaan investasi diberikan untuk pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi.

Pembiayaan modal kerja diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha.

Kegiatan pembiayaan investasi dan modal kerja ditunjukan untuk debitur yang:

a. Memiliki usaha produktif; dan/atau
b. Memiliki ide untuk pengembangan usaha produktif.

Pembiayaan multiguna diberikan untuk pembiayaan barang dan/atau jasa untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif.

Pembiayaan Bersama

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perusahaan merupakan pembiayaan bersama *without recourse* dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan piutang pembiayaan disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, antara Perusahaan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perusahaan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Piutang Pembiayaan".

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

f. ***Financing Receivables*** *(Continued)*

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting income related to this early termination of a contract is recognized in the current year's statement of profit or loss.

Financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 180 days. The Company can perform a write-off before 180 days and postpone the write-off. Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon received.

Financing receivables based on purpose of financing

Investment financing were extended to finance capital goods and services needed for business/ investment activities.

Working capital financing were extended for working capital needs which fully utilized within one cycle of business activities.

Investment and working capital financing activities were intended to borrowers which:

a. Have productive businesses; and/or
b. Have ideas to develop the productive businesses

Multipurpose financing were extended for financing of goods/services for consumption and non-business related or productive activities.

Joint Financing

All joint financing contracts entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments is recorded as financing receivables in the statement of financial position (net approach). Financing receivables income is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income after deducting the portions which belong to other parties participating to these joint financing transactions.

In joint financing without recourse, arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates to consumer than the interest rates stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider. The difference is recognized as revenue and disclosed as "Financing Receivables Income".

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

f. **Piutang Pembiayaan** (Lanjutan)

Pembiayaan Bersama (Lanjutan)

Piutang pembiayaan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

g. **Tagihan Anjak Piutang**

Tagihan anjak piutang *with recourse* merupakan piutang yang dibeli dari Perusahaan lain. Tagihan anjak piutang *with recourse* diklasifikasikan dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai, penghentian pengakuan tagihan anjak piutang dan nilai wajar mengacu pada Catatan 2e.

h. **Piutang dalam Proses Penyelesaian**

Piutang dalam proses penyelesaian merupakan piutang atas jaminan yang dikuasai kembali dan dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat atau pokok piutang pembiayaan terkait, yaitu piutang pembiayaan dikurangi penyisihan penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan direklasifikasikan menjadi piutang dalam proses penyelesaian ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah melalui proses tahapan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan dengan konsumen.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual objek yang dijaminkan atau melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kelebihan hasil penyelesaian dengan jumlah seluruh kewajiban konsumen merupakan hak dari konsumen, sedangkan kekurangan hasil penyelesaian akan dibebankan sebagai penghapusan piutang pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Piutang dalam proses penyelesaian diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

f. ***Financing Receivables*** *(Continued)*

Joint Financing *(Continued)*

Financing receivables are classified as financial assets measured at amortised cost. See Note 2e for the accounting policy of financial assets measured at amortised cost.

g. ***Factoring Receivables***

Factoring receivables with recourse are purchased receivables from other companies. Factoring receivables with recourse are classified as financial assets at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment, derecognition of factoring receivables and fair value are discussed in Note 2e.

h. ***Receivables in the Settlement Process***

Receivables in the settlement process represent receivables from collateral recovered and stated at net realizable value which is carrying amount or principal amount of related financing receivables, namely financing receivables lease less allowance for decline in market value of the collateral retained. Financing receivables is reclassified to receivables in the settlement process when the collateral is withdrawn because the consumer is not able to meet its obligations after going through the stages stipulated in the financing agreement with the consumer.

Customer authorizes the Company to sell the pledged object or performing other actions in solving the debts in the event of default of the financing agreement. Excess result of a settlement with the total obligations of the consumer is the right of the customer, while the shortage of the settlement proceeds will be charged to written-off receivables in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Receivables in the settlement process are classified as financial assets classified as financial assets measured at fair value through profit or loss.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

i. **Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing beban yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

j. **Aset Hak-Guna**

Aset hak-guna diakui pada saat tanggal mulai sewa. Aset hak-guna dinilai pada harga perolehan, yang mana dinilai pada jumlah sewa liabilitas disesuaikan pada pembayaran sewa dibuat pada saat atau sebelum tanggal sewa dimulai. Aset hak-guna kemudian disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus mulai tanggal mulai sewa sampai dengan tanggal berakhir umur penggunaan aset hak-guna atau tanggal akhir sewa.

k. **Aset Tetap**

Perusahaan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

i. ***Prepaid Expenses***

Prepaid expenses are amortized over the useful-life beneficial periods using the straight-line method.

j. ***Right-of-use assets***

Right-of-use assets are recognised at the lease commencement date. It is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date. It is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end the lease term.

k. ***Property and Equipment***

The Company uses the cost model for its property and equipment measurement.

Property and equipment are stated at cost, less accumulated depreciation and any impairment value, if any.

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and purchase taxes that should not be credited and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the property and equipment have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the property and equipment beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of property and equipment.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the property and equipment useful lives as follows:

	Masa manfaat/*Useful lives* (dalam tahun/*in years*)	
Bangunan	20	*Building*
Peralatan kantor	5	*Office equipment*
Kendaraan	5	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	5	*Furniture and fixtures*
Renovasi bangunan	5	*Building renovation*

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

k. **Aset Tetap** (Lanjutan)

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi tahun berjalan pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam pembangunan untuk pengembangan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Penurunan nilai aset non-keuangan

PSAK 48 menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan Perusahaan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

k. ***Property and Equipment*** *(Continued)*

Land is stated at cost and not depreciated. Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these cost area not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the land rights.

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are removed from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of property and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is included in the current year profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Asset in progress under development are stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

Impairment of non-financial assets

SFAS 48 prescribes the procedures to be employed by the Company to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. An asset is carried at more than its recoverable amount if its carrying amount exceeds the amount to be recovered through use or sale of the asset. If this is the case, the asset is described as impaired and this revised SFAS requires the Company to recognise an impairment loss. This revised SFAS also specifies when an entity should reverse an impairment loss and prescribes disclosures.

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimation of the asset's recoverable amount.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

l. **Aset Takberwujud**

Biaya yang terkait dengan mengembangkan atau mempertahankan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran untuk memperoleh hak paten, merek dagang dan lisensi dikapitalisasi.

(i) **Piranti lunak**

Piranti lunak pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal pirantilunak meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa piranti lunak siap dipakai. Setelah pengakuan awal, piranti lunak diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk asset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

(ii) **Lisensi ekslusif**

Lisensi pada awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan awal lisensi meliputi harga pembelian, termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa lisensi siap dipakai. Setelah pengakuan awal, lisensi diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk lisensi akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat sebagai berikut:

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

l. ***Intangible Asset***

Costs associated with developing or maintaining computer software programmes are recognized as an expense as incurred. Expenditure to acquire patents, trademarks and licences is capitalized.

(i) ***Software***

Software is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of software consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the software to its intended use. After initial recognition, software is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Subsequent expenditure on software assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

(ii) ***Exclusive License***

Licence is initially recognized at acquisition cost. The acquisition cost of licence consists of its purchase price, including any directly attributable costs in bringing the licence to its intended use. After initial recognition, licence is measured using cost model, stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Subsequent expenditure on licence assets is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Intangible asset is amortized using the straightline method over the following useful lives:

	Masa manfaat/*Useful lives* (dalam tahun/*in years*)	
Piranti lunak	5	*Software*
Lisensi ekslusif	5	*Exclusive License*

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

l. **Aset Takberwujud** (Lanjutan)

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal lisensi dan piranti lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat lisensi dan piranti lunak adalah lima tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset takberwujud ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

m. **Investasi jangka panjang**

Investasi dengan kepemilikan kurang dari 20% diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diakui sebesar nilai wajarnya.

Investasi dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50%, baik dimiliki secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi entitas asosiasi sejak perolehan sebesar persentase pemilikan, dikurangi dengan dividen yang diterima (metode ekuitas). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Investasi pada instrumen ekuitas

Perusahaan memiliki investasi strategis dalam entitas yang listed. Untuk investasi tersebut, Perusahaan telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengklasifikasikan investasi pada FVTOCI daripada FVTPL karena Perusahaan menganggap pengukuran ini paling representatif untuk model bisnis aset ini.

Investasi pada instrumen ekuitas pada FVTOCI pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Kemudian, aset diukur pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam keuntungan belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI.

Akumulasi keuntungan atau kerugian tidak direklasifikasi ke laba rugi pada saat penarikan investasi pada instrumen ekuitas, sebaliknya, ditransfer ke saldo laba (defisit). Dividen atas investasi pada instrumen ekuitas ini diakui dalam laba rugi, kecuali dividen jelas merupakan pemulihan sebagian dari biaya perolehan investasi.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

l. ***Intangible Asset*** *(Continued)*

Amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line method over the estimated useful life of licence and software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of licence and software are five years.

Amortization methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

Gains or losses on disposal of intangible asset are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

m. ***Long term investment***

Investment with ownership interest of less than 20% are classified as financial assets at fair value through other comprehensive income and recognised at its fair value.

Investments with ownership interest of 20% to 50%, directly or indirectly owned, are accounted for using the equity method whereby the Company proportionate share in the net income or loss of the associated company after the date of acquisition is added to or deducted from, and dividends subsequently received are deducted from, the acquisition cost of the investments. The carrying amount of the investments is written-down to recognize any permanent decline in value of the individual investments. Any such write-down is charged directly to the current year's statement of comprehensive income.

Investment in equity instruments

The Company has a number of strategic investments in listed entity. For those investments, the Company has made an irrevocable election to classify the investments at FVTOCI rather than FVTPL as the Company considers this measurement to be the most representative of the business model for these assets.

Investments in these equity instruments at FVTOCI are initially measured at fair value plus transaction costs. Subsequently, they are measured at fair value with gains and losses arising from changes in fair value recognised in other comprehensive income and accumulated in the unrealized gain from changes in fair value of FVTOCI financial assets.

The cumulative gain or loss is not reclassified to profit or loss on disposal of the investment in equity instruments, instead, it is transferred to retained earnings (deficit). Dividends on these investments in equity instruments are recognized in profit or loss, unless the dividends clearly represent a recovery of part of the cost of the investment.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

n. **Pinjaman yang Diterima**

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari berbagai bank dan institusi keuangan, termasuk fasilitas pembiayaan bersama *(joint financing) with recourse*. Fasilitas pembiayaan bersama (*joint financing) with recourse* disajikan secara *gross*, yaitu sebanyak pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan pinjaman yang diterima dari bank dicatat dalam nilai penuh dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

o. **Surat Berharga yang Diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan meliputi utang obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu surat berharga yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

p. **Imbalan Kerja**

Imbalan Pasca Kerja - Program imbalan pasti

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2015), "Imbalan Kerja", dimana semua keuntungan (kerugian) aktuaria dari liabilitas imbalan kerja Perusahaan harus diakui secara langsung di dalam penghasilan komprehensif lain, secara retrospektif. Kebijakan akuntansi Perusahaan sebelumnya yang masih menangguhkan keuntungan (kerugian) aktuaria dengan metode koridor tidak lagi diperbolehkan.

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pasti manfaat pasca kerja kepada para karyawannya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan "Undang-undang Omnibus".

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

n. ***Fund Borrowings***

Borrowings represent funds received from various banks and financial institutions, including with recourse joint financing facilities. With recourse joint financing facilities are presented gross, i.e loans granted to customers and borrowings received from banks are recorded at their full amount with repayment obligations in accordance with the terms of the agreement.

Borrowings are classified as financial liabilities measured unamortized cost. Additional costs that are directly attributable to the acquisition of loans are deducted from total borrowings. See Note 2e for the accounting policy on financial liabilities measured at amortized cost.

o. ***Securities Issued***

Securities issued consist of bonds payable.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortized cost.

Additional cost directly attributable to the issuance of securities are recognized as a discount and offset directly from the proceeds derived from such offerings and amortized over the period of the securities issued using effective interest rate method.

p. ***Employees' Benefits***

Post-employment Benefits - Defined benefit plans

The Company adopted SFAS 24 (Revised 2015), "Employee Benefit", which all actuarial gains (losses) of the Company employee benefit liability will have to be recognised immediately in other comprehensive income, which applied retrospectively. The Company prior accounting policy of deferring the recognition of unrecognised actuarial gains (losses) using the corridor method will no longer be permitted.

The Company provides defined benefit post-employment benefits to their employees in accordance with the Law No. 11 Year 2020 concerning Job Creation that known as the "Omnibus Law".

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

p. **Imbalan Kerja** (Lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja - Program imbalan pasti (Lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau jumlah kompensasi.

Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait, dan beban jasa lalu adalah metode *Projected Unit Credit*.

Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atau perubahan asumsi aktuarial diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan disajikan dalam laporan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian aktuaria dan penyesuaian yang timbul yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan diakui segera dalam saldo laba. Keuntungan dan kerugian Aktuaria tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

q. **Sewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

p. ***Employees' Benefits*** *(Continued)*

Post-employment Benefits - Defined benefit plans *(Continued)*

Defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation.

The actuarial valuation method used to determine the present value of the defined benefit liability, related current service cost and past service costs is the Projected Unit Credit.

Current service costs, interest costs, vested past service costs, and effect of curtailment or settlement (if any) are charged directly to the current statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs which are not yet vested and actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions recognised in other comprehensive income and presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Actuarial gains and losses and adjustments arising which recognised in other comprehensive income will be immediately recognised in retained earnings. Actuarial gains and losses are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Short-term employee benefits

Short-term employees' benefits are recognized when they are owed to the employees based on an accrual method.

q. ***Lease***

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

q. **Sewa** (Lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan asset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Perusahaan bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non sewa dan mencatat komponen sewa dan non sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

q. ***Lease*** *(Continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assess whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*

- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  1. *The Company has the right to operate the asset;*
  2. *The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Company recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- *fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*

- *amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

q. **Sewa** (Lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

r. **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dari piutang pembiayaan (Catatan 2e) diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa mendatang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, entitas mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut (seperti pelunasan dipercepat, opsi beli (*call option*) dan opsi serupa lainnya), namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh biaya transaksi yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Biaya transaksi merupakan biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Biaya tambahan merupakan biaya yang tidak akan terjadi apabila Perusahaan tidak memperoleh, menerbitkan atau melepaskan instrumen keuangan.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

q. ***Lease*** *(Continued)*

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Company by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

r. ***Revenue and Expenses Recognition***

Income from financing receivables (Note 2e) are recognised over the term of the contract based on the effective interest method.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flow considering all contractual term of the financial instrument (for example, prepayment options, call option and other similar options) but does not consider future credit losses. The calculation includes all fees, commissions and other fees paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs and all other premiums or discounts.

Transaction costs are additional charges that are directly attributable to the acquisition, issuance or disposal of financial assets or financial liabilities.

Additional costs are costs that would not occur if the Company does not obtain, publish or otherwise dispose of financial instruments.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

r. **Pengakuan Pendapatan dan Beban** (Lanjutan)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan piutang pembiayaan Perusahaan disajikan bersih setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank atau pihak lain sehubungan dengan transaksi-transaksi penerusan pinjaman, pembiayaan bersama, anjak piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang.

Untuk piutang pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, pendapatan bunga yang sudah diakui tetapi belum ditagih akan dicadangkan.

Pendapatan administrasi dari pembiayaan konsumen diakui pada saat perjanjian piutang pembiayaan ditandatangani.

s. **Transaksi dan Penjabaran Mata Uang Asing**

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Kurs utama yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut:

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

r. ***Revenue and Expenses Recognition*** *(Continued)*

Once a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

The Company's financing receivables income is presented net of with financing receivables income belongs to the bank in relation with channeling transactions, joint financing cooperations, factoring, and the appointment as manager of accounts receivable.

For financing receivables with principal or interest has been past due for 90 (ninety) days or more, the interest income accrued but not yet collected is provided with allowance.

Administration income from consumer financing is recognized when the financing receivables agreement signed off.

s. ***Foreign Currency Transactions and Translations***

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the current period statement of profit or loss and other comprehensive income.

The main exchange rates used for translating the foreign currency as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 are based of the mid rates published by Bank Indonesia, are as follows:

	30 Juni/ ***June* 2024**	**31 Desember/** ***December* 2023**	**31 Desember/** ***December* 2022**	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.421	15.416	15.731	*1 Unites States Dollars (USD)*

Penjabaran mata uang asing dicatat sesuai dengan PSAK 10 (Revisi 2010) – Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.

Foreign currency translation is recorded in accordance with SFAS 10 (Revised 2010) - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

t. **Pajak Penghasilan**

Pajak kini

Aset dan/atau liabilitas pajak kini terdiri dari liabilitas kepada, atau klaim dari kantor pelayanan pajak terkait dengan periode kini dan periode sebelum periode pelaporan, yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pajak kini dihitung sesuai dengan tarif pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode fiskal yang terkait, berdasarkan laba kena pajak periode berjalan. Semua perubahan aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen beban pajak penghasilan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer antara basis komersial dan basis fiskal atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset direalisasi atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika mengajukan keberatan dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut diterima.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui, diukur kembali pada tiap tanggal laporan posisi keuangan dan diakui apabila terdapat kemungkinan pendapatan kena pajak di masa depan memulihkan aset pajak tangguhan.

Perpajakan lainnya

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima dan/atau, jika mengajukan keberatan dan/atau banding oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan dan/atau banding tersebut telah ditetapkan.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

t. ***Income Tax***

Current tax

Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the statement of financial position date.

Current income tax are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which it's relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantially enacted at the statements of financial position date.

Amendments to tax obligations are recorded when an Assessment Letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each statement of financial position date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each statement of financial position date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax asset to be recovered.

Other taxation matters

Amendments to tax obligations are recorded when an Assessment Letter is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Company, when the result of the objection and/or appeal is determined.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

u. **Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi**

Penyajian laporan keuangan Perusahaan memerlukan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan liabilitas kontijensi pada tanggal pelaporan. Namun demikian, ketidakpastian tentang asumsi dan estimasi ini dapat mengakibatkan hasil penyesuaian material untuk nilai buku aset atau liabilitas yang berpengaruh pada periode di masa depan.

I. **Penggunaan Pertimbangan**

Di dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah melakukan pertimbangan-pertimbangan, terpisah dari masalah estimasi, yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui di dalam laporan keuangan:

(i) **Pajak penghasilan**

Perusahaan memiliki eksposur atas pajak penghasilan, pertimbangan signifikan dilakukan di dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan. Ada beberapa transaksi dan komputasi dimana penentuan akhir perpajakan adalah tidak pasti di dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitias atas isu pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah penambahan pajak akan jatuh tempo. Pada saat hasil final perpajakan berbeda dari jumlah yang sebelumnya diakui, maka selisih tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan kini dan provisi pajak tangguhan di dalam periode dimana penentuan tersebut dibuat.

(ii) **Penentuan mata uang fungsional**

Dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan, penilaian diperlukan untuk menentukan mata uang yang terutama mempengaruhi seluruh transaksi jasa yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan Perusahaan.

II. **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama berkenaan dengan sumber utama dan sumber lainnya ketidakpastian estimasi di masa depan, yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas pada tahun buku mendatang, didiskusikan di bawah.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

u. ***Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions***

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

I. ***Use of Judgements***

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, apart from those involving estimations, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

(i) ***Income tax***

The Company has exposure to income taxes, significant judgement is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the current income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.

(ii) ***Determination of functional currency***

In determining the functional currency of the Company, an assessment is required to determine the currency that mainly affects the entire transaction services rendered and costs of the Company.

II. ***Estimates and Assumptions***

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

u. **Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

II. **Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

(i) **Masa manfaat aset tetap**

Biaya aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap. Manajemen memperkirakan masa manfaat aset tetap adalah 5 – 20 tahun. Hal ini sesuai taksiran masa manfaat yang umum diaplikasikan pada industri. Perubahan tingkat yang diharapkan dalam penggunaan dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat peralatan dan nilai sisa atas aset-aset tersebut. Oleh karena itu, biaya penyusutan di masa yang akan datang dapat saja berubah. Nilai tercatat aset tetap Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 10 atas laporan keuangan.

(ii) **Sewa**

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan asset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan rata-rata tingkat suku bunga pinjaman sebagai tingkat suku bunga inkremental Perusahaan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

Penilaian tersebut ditinjau jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang memengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Perusahaan.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

u. ***Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions*** *(Continued)*

II. ***Estimates and Assumptions*** *(Continued)*

(i) ***Useful lives of property and equipment***

The cost of property and equipment is depreciated on a straight-line method over the assets' estimated useful economic lives. Management estimates the useful lives of these plant and equipment is 5 - 20 years. These are common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets. Therefore, future depreciation charges could be revised. The carrying amount of the Company's property and equipment at the end of the reporting period is disclosed in Note 10 to the financial statements.

(ii) ***Leases***

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement. Since the Company could not readily determine the implicit rate, management use the Company's average loan interest rate as the Company's incremental interest rate.

There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

The assessment is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Company.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

u. **Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

II. **Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

(iii) **Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua kerugian fiskal yang belum dipergunakan yang memiliki kemungkinan tersedianya laba kena pajak terhadap kerugian yang dapat dikurangkan akan dapat diutilisasi. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan perbedaan temporer dan tingkat laba fiskal di masa depan bersama-sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 17e atas laporan keuangan.

(iv) **Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2e.

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kolektif.

Nilai tercatat penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perusahaan pada akhir periode pelaporan diungkapkan dalam Catatan 4 dan 5 atas laporan keuangan.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

u. ***Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions*** *(Continued)*

II. ***Estimates and Assumptions*** *(Continued)*

(iii) ***Deferred tax assets***

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The carrying amount of the Company's deferred tax assets at the end of reporting period in disclosed in Note 17e to the financial statements.

(iv) ***Allowance for impairment losses of financial assets***

Financial assets accounted for at amortized cost are evaluated for impairment on a basis described in Note 2e.

Collectively assessed impairment allowance cover credit losses inherent in portfolios of financing receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired receivables, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors, In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

The carrying amount of the company's allowance for impairment losses of financial assets of the Company at the end of reporting period is disclosed in Note 4 and 5 to the financial statements.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

u. **Pertimbangan Akuntansi yang Penting, Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

II. **Estimasi dan Asumsi** (Lanjutan)

(v) **Penentuan nilai wajar**

Perusahaan menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi menggunakan teknik penilaian. Teknik tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan, termasuk tingkat diskonto dan perkiraan arus kas masa depan. Maka dari itu, perkiraan nilai wajar yang diperoleh tidak selalu dapat dibuktikan dengan membandingkan pada pasar independen dan, dalam banyak kasus, mungkin tidak dapat segera direalisasi.

Metode dan asumsi yang digunakan, serta teknik penilaian yang digunakan, diungkapkan di dalam Catatan 2e di dalam laporan keuangan.

(vi) **Asumsi pensiun**

Biaya, aset dan liabilitas dari program imbalan pasti yang diselenggarakan oleh Perusahaan ditentukan dengan menggunakan metode-metode yang mengandalkan estimasi dan asumsi aktuarial.

Rincian dari asumsi-asumsi utama ditetapkan dalam Catatan 18 atas laporan keuangan, Perusahaan menerima masukan dari aktuaris independen berkaitan dengan kelayakan asumsi, Perubahan dalam asumsi yang digunakan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan posisi keuangan.

v. Laba per Saham (PSAK 233)

Sesuai dengan PSAK 233 "Laba per saham", laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang berjalan.

w. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisi ditelaah pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dipulihkan.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

u. ***Significant Accounting Judgements, Estimates and Assumptions*** *(Continued)*

II. ***Estimates and Assumptions*** *(Continued)*

(v) ***Determining fair value***

The Company determines the fair value of financial instruments that are not quoted, using valuation techniques. Those techniques are significantly affected by the assumptions used, including discount rates and estimates of future cash flows. In that regard, the derived fair value estimates cannot always be substantiated by comparison with independent markets and, in many cases, may not be capable of being realized immediately.

The methods and assumptions applied, and the valuation techniques used, are disclosed in Note 2e to the financial statements.

(vi) ***Pension assumptions***

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Company are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions.

Details of the key assumptions are set out in Note 18 to the financial statements, the Company takes advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions, Changes in the assumptions used may have a significant effect on the statement of profit or loss and other comprehensive income and the statements of financial position.

v. Earnings per Share (SFAS 233)

In accordance with SFAS 233 "Earning per share", earnings per share is calculated by dividing net profit available to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during current year.

w. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

2. **INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL** (Lanjutan)

x. **Dividen**

Dividen diakui ketika terhutang secara legal. Dividen kepada pemegang saham diakui ketika diumumkan oleh direksi. Dividen final diakui ketika disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Tahunan (RUPS).

y. **Kontijensi**

Liabilitas kontijen tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontijensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Aset kontijen tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis.

z. **Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa setelah periode pelaporan yang menyajikan bukti dari kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan bila material.

2. ***MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION*** *(Continued)*

*x. **Dividend***

Dividends are recognised when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the Annual General Meeting.

*y. **Contingencies***

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

*z. **Events After the Reporting Period***

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. **KAS DAN SETARA KAS** / *3. **CASH AND CASH EQUIVALENTS***

Kas dan setara kas terdiri dari: / *Cash and cash equivalents consist of the followings:*

	30 Juni/ *June 2024*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*	
Kas				***Cash on hand***
Rupiah	11.463.603.431	11.196.720.546	14.833.195.604	*Rupiah*
Jumlah kas	11.463.603.431	11.196.720.546	14.833.195.604	*Total cash on hand*
Bank				***Cash in banks***
Rupiah				*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.880.250.545	47.674.667.419	28.518.346.131	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	32.548.051.068	28.035.870.789	42.016.559.375	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.658.096.590	14.287.775.207	12.327.451.287	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.929.698.641	4.169.476.819	6.060.202.590	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	5.482.327.197	298.778.539	370.753.578	*PT Bank Jtrust Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.845.956.387	2.165.445.147	4.184.916.116	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank BTPN Tbk	427.677.313	159.931.859	1.480.874.185	*PT Bank BTPN Tbk*
PT Bank Mega Tbk	328.844.476	32.013.079.241	494.614.422	*PT Bank Mega Tbk*
Lain-lain (Saldo di bawah Rp 300.000.000)	1.508.809.944	556.834.458	4.267.559.247	*Others (Balances below Rp 300,000,000)*
Sub-jumlah	113.609.712.161	129.361.859.478	99.721.276.931	*Sub-total*
Pihak berelasi (Catatan 33)				*Related party (Note 33)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	70.721.342	35.043.518	91.977.786	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Jumlah	113.680.433.503	129.396.902.996	99.813.254.717	*Total*
USD				*USD*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Central Asia Tbk	1.663.119	2.486.292	4.424.816	*PT Bank Central Asia Tbk*
Jumlah bank	113.682.096.622	129.399.389.288	99.817.679.533	*Total cash in banks*
Jumlah (Dipindahkan)	125.145.700.053	140.596.109.834	114.650.875.137	*Total (Brought forward)*

3. **KAS DAN SETARA KAS** (Lanjutan) / *3. **CASH AND CASH EQUIVALENTS** (Continued)*

Kas dan setara kas terdiri dari: (Lanjutan) / *Cash and cash equivalents consist of the followings: (Continued)*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Jumlah (Pindahan)	125.145.700.053	140.596.109.834	114.650.875.137	*Total (Carried forward)*
Setara kas				***Cash equivalents***
Deposito berjangka				***Time deposits***
Rupiah				*Rupiah*
Pihak ketiga				*Third parties*
PT Bank Mega Tbk	76.000.000.000	-	50.000.000.000	*PT Bank Mega Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 33)				*Related party (Note 33)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Jumlah deposito	86.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	*Total time deposits*
Jumlah kas dan setara kas	211.145.700.053	150.596.109.834	174.650.875.137	***Total cash and cash equivalents***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(235.395.886)	(76.770.103)	(218.023.710)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah kas dan setara kas - bersih	210.910.304.167	150.519.339.731	174.432.851.427	***Total cash and cash equivalents - net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *Movements of allowance for impairment losses were as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	76.770.103	218.023.710	481.990.515	*Beginning balance*
Penambahan (pembalikan) cadangan selama periode berjalan (Catatan 26 dan 30)	158.625.783	(141.253.607)	(263.966.805)	*Additional (reversal) of allowance during the period (Note 26 and 30)*
Saldo akhir	235.395.886	76.770.103	218.023.710	***Ending balance***

Kisaran suku bunga dari deposito berjangka diatas adalah sebagai berikut: / *The range of interests earned from the above time deposits is as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun				*Time deposit interest rate per annum*
Rupiah	4,5% - 5,5%	4,50%	5,00% - 6,00%	*Rupiah*

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 36 atas laporan keuangan. / *Information with respect to the classification and fair value of cash and cash equivalents was disclosed in Note 36 to the financial statements.*

Rincian kontrak deposito Perusahaan berdasarkan periode jatuh temponya adalah sebagai berikut: / *The details of the deposit contract of the Company based on the maturity period are as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Deposito berjangka	86.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	*Time deposits*
Dikurangi :				*Less:*
Periode jatuh tempo dibawah enam bulan	86.000.000.000	10.000.000.000	60.000.000.000	*Due date period below six months*
Periode jatuh tempo di atas enam bulan	-	-	-	*Due date period above six months*

4. PIUTANG PEMBIAYAAN / *4. FINANCING RECEIVABLES*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Piutang pembiayaan - bruto:				***Financing receivables - gross:***
Pihak ketiga	9.337.748.760.964	9.555.609.776.995	9.211.719.314.812	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.431.625.348.950)	(1.491.287.654.057)	(1.790.607.110.902)	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah	7.906.123.412.014	8.064.322.122.938	7.421.112.203.910	*Total*
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):				*Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):*
Pembiayaan bersama	(229.610.897.309)	(296.968.367.781)	(136.137.029.788)	*Joint financing*
Jumlah piutang pembiayaan	7.676.512.514.705	7.767.353.755.157	7.284.975.174.122	*Total financing receivables*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(333.760.959.194)	(334.013.800.055)	(360.545.374.744)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	7.342.751.555.511	7.433.339.955.102	6.924.429.799.378	***Total financing receivables - net***

Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Details of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of financing receivables according to their respective due dates as of 30 June 2024 and 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
< 1 tahun	5.698.095.625.269	5.892.645.396.436	4.081.298.539.482	*< 1 year*
1 - 2 tahun	2.294.661.689.647	2.262.957.119.351	1.959.662.147.562	*1 - 2 years*
> 2 tahun	1.344.991.446.048	1.400.007.261.208	3.170.758.627.768	*> 2 years*
Jumlah	9.337.748.760.964	9.555.609.776.995	9.211.719.314.812	***Total***

Kendaraan bermotor dan barang-barang yang dibiayai oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan kepada 6 (enam) perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bintang, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, PT Pan Pacific Insurance dan PT Asuransi Artarindo.

The vehicles and goods financed by the Company are covered by insurance against losses to 6 (six) insurance companies, which are PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Bintang, PT Kookmin Best Insurance Indonesia, PT Pan Pacific Insurance and PT Asuransi Artarindo.

Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang pembiayaan bruto adalah sebagai berikut:

The detailed aging analysis of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of installment portion of the gross financing receivables were as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Belum jatuh tempo	8.944.445.656.098	9.182.644.699.152	8.861.332.903.495	*Current*
Telah jatuh tempo:				*Overdue:*
1-30 hari	163.735.145.188	151.553.949.916	137.900.825.489	*1-30 days*
31-90 hari	135.015.553.484	140.000.527.145	135.224.896.481	*31-90 days*
91-120 hari	33.555.609.898	37.451.562.604	37.687.855.183	*91-120 days*
121-150 hari	39.013.596.800	25.723.835.734	24.501.960.877	*121-150 days*
151-180 hari	21.356.639.980	18.235.202.444	15.070.873.287	*151-180 days*
> 180 hari	626.559.516	-	-	*> 180 days*
Jumlah	9.337.748.760.964	9.555.609.776.995	9.211.719.314.812	***Total***

4. **PIUTANG PEMBIAYAAN** (Lanjutan) / *4. **FINANCING RECEIVABLES** (Continued)*

Piutang pembiayaan berdasarkan tujuan pembiayaan: / *Financing receivables based on purpose of financing:*

	30 Juni/*June* 2024			
	Investasi/ *Investment*	**Modal kerja/ *Working capital***	**Multiguna/ *Multipurpose***	
Piutang pembiayaan - bruto:				***Financing receivables - gross:***
Pihak ketiga	801.645.711.661	3.683.361.561.741	4.852.741.487.564	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(103.283.404.949)	(538.448.754.914)	(789.893.189.087)	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah	698.362.306.712	3.144.912.806.827	4.062.848.298.477	*Total*
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):				*Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):*
Pembiayaan bersama	(15.568.609.601)	(153.272.950.549)	(60.769.337.159)	*Joint financing*
Jumlah piutang pembiayaan	682.793.697.111	2.991.639.856.278	4.002.078.961.318	*Total financing receivables*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.263.360.463)	(105.340.594.112)	(214.157.004.619)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	668.530.336.648	2.886.299.262.166	3.787.921.956.699	***Total financing receivables - net***

	31 Desember/*December* 2023			
	Investasi/ *Investment*	**Modal kerja/ *Working capital***	**Multiguna/ *Multipurpose***	
Piutang pembiayaan - bruto:				***Financing receivables - gross:***
Pihak ketiga	913.345.774.498	3.811.378.270.067	4.830.885.732.430	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(122.308.723.275)	(564.508.047.340)	(804.470.883.442)	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah	791.037.051.223	3.246.870.222.727	4.026.414.848.988	*Total*
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):				*Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):*
Pembiayaan bersama	(24.389.934.579)	(196.456.855.650)	(76.121.577.552)	*Joint financing*
Jumlah piutang pembiayaan	766.647.116.644	3.050.413.367.077	3.950.293.271.436	*Total financing receivables*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(21.280.739.602)	(108.336.881.609)	(204.396.178.844)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	745.366.377.042	2.942.076.485.468	3.745.897.092.592	***Total financing receivables - net***

	31 Desember/*December* 2022			
	Investasi/ *Investment*	**Modal kerja/ *Working capital***	**Multiguna/ *Multipurpose***	
Piutang pembiayaan - bruto:				***Financing receivables - gross:***
Pihak ketiga	1.083.808.069.411	3.413.020.014.644	4.714.891.230.757	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(199.333.755.127)	(726.812.084.719)	(864.461.271.056)	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah	884.474.314.284	2.686.207.929.925	3.850.429.959.701	*Total*
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi (Catatan 34):				*Less amounts financed by bank relating to the transactions (Note 34):*
Pembiayaan bersama	(4.789.685.552)	(29.626.372.790)	(101.720.971.446)	*Joint financing*
Jumlah piutang pembiayaan	879.684.628.732	2.656.581.557.135	3.748.708.988.255	*Total financing receivables*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.601.080.364)	(81.536.419.651)	(249.407.874.729)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah piutang pembiayaan - bersih	850.083.548.368	2.575.045.137.484	3.499.301.113.526	***Total financing receivables - net***

4. **PIUTANG PEMBIAYAAN** (Lanjutan)

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan untuk kendaraan bermotor yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Suku bunga efektif per tahun untuk kontrak piutang pembiayaan rata-rata berkisar 11,40% - 70,30% pada 30 Juni 2024 (31 Desember 2023 dan 2022: 12,00% - 70,02%, 2022: 11,60% - 58,20%).

Piutang pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.234.794.219.775, Rp 1.690.287.913.106 dan Rp 1.077.418.729.765 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 14) dan sebesar Rp 788.169.400.867, Rp 788.169.360.282 dan Rp 600.000.266.057 digunakan sebagai jaminan surat berharga yang diterbitkan (Catatan 15).

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, piutang pembiayaan yang telah direstrukturisasi terkait dengan pandemi Covid-19 adalah masing-masing sebesar 9,90%, 8,40% dan 8,20% dari jumlah piutang pembiayaan.

Piutang pembiayaan digunakan sebagai jaminan pinjaman yang diterima dari bank dan surat berharga yang diterbitkan (lihat Catatan 14 dan 15).

Rekonsiliasi jumlah pencadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

*4. **FINANCING RECEIVABLES** (Continued)*

As the collateral to the financing receivables for vehicles, the Company receives the Book of Vehicle Ownership (BPKB).

The effective annual interest rates for financing receivables contracts in average ranged between 11.40% - 70.30% in 30 June 2024 (31 December 2023 and 2022: 12.00% - 70.02%, 2022: 11.60% - 58.20%).

Financing receivable as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 3,234,794,219,775, Rp 1,690,287,913,106 and Rp 1,077,418,729,765 were used as collateral to borrowings (Note 14) and amounting to Rp 788,169,400,867, Rp 788,169,360,282 and Rp 600,000,266,057 were used as collateral to securities issued, respectively (Note 15).

As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022, financing receivable has been restructured as impact of the Covid-19 pandemic amounted to 9.90%, 8.40% and 8.20% of total financing receivables, respectively.

Financing receivables are used as collateral for credit facilities obtained from the banks and securities issued (see Notes 14 and 15).

Reconciliation of expected credit loss allowance amount:

	30 Juni/*June* 2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal - 1 Januari 2024	146.132.059.463	40.969.514.069	146.912.226.523	334.013.800.055	*Begining balance - 1 January 2024*
Transfer ke tahap 1 [1)]	10.984.194.697	(7.349.622.572)	(3.634.572.125)	-	*Transfer to stage 1 [1)]*
Transfer ke tahap 2 [1)]	(9.418.927.603)	11.022.965.509	(1.604.037.906)	-	*Transfer to stage 2 [1)]*
Transfer ke tahap 3 [1)]	(8.445.939.055)	(3.647.144.338)	12.093.083.393	-	*Transfer to stage 3 [1)]*
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali [2)]	54.935.046.448	96.909.446.466	143.983.810.766	295.828.303.680	*Net change in exposures and remeasurement [2)]*
Penghapusan	(64.349.984.299)	(101.388.675.189)	(130.342.485.053)	(296.081.144.541)	*Written off*
Saldo akhir - 30 Juni 2024	129.836.449.651	36.516.483.945	167.408.025.598	333.760.959.194	***Ending balance - 30 June 2024***

	31 Desember/*December* 2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal - 1 Januari 2023	116.515.267.153	101.789.221.568	142.240.886.022	360.545.374.743	*Begining balance - 1 January 2023*
Transfer ke tahap 1 [1)]	93.215.318.822	(40.761.200.397)	(52.454.118.425)	-	*Transfer to stage 1 [1)]*
Transfer ke tahap 2 [1)]	(7.035.447.407)	8.532.965.007	(1.497.517.600)	-	*Transfer to stage 2 [1)]*
Transfer ke tahap 3 [1)]	(4.130.543.616)	(1.674.235.567)	5.804.779.183	-	*Transfer to stage 3 [1)]*
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali [2)]	192.607.003.561	179.568.837.964	215.645.041.152	587.820.882.677	*Net change in exposures and remeasurement [2)]*
Penghapusan	(245.039.539.050)	(206.486.074.506)	(162.826.843.809)	(614.352.457.365)	*Written off*
Saldo akhir - 31 Desember 2023	146.132.059.463	40.969.514.069	146.912.226.523	334.013.800.055	***Ending balance - 31 December 2023***

4. **PIUTANG PEMBIAYAAN** (Lanjutan) / 4. ***FINANCING RECEIVABLES*** *(Continued)*

Rekonsiliasi jumlah pencadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut: (Lanjutan) / *Reconciliation of expected credit loss allowance amount: (Continued)*

	31 Desember/*December* 2022				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal - 1 Januari 2022	78.834.835.571	60.638.695.498	104.960.331.367	244.433.862.436	*Begining balance - 1 January 2022*
Transfer ke tahap 1 [1)]	2.273.008.161	(1.887.801.662)	(385.206.499)	-	*Transfer to stage 1 [1)]*
Transfer ke tahap 2 [1)]	(7.285.142.943)	16.080.334.169	(8.795.191.226)	-	*Transfer to stage 2 [1)]*
Transfer ke tahap 3 [1)]	(2.923.141.269)	(987.457.722)	3.910.598.991	-	*Transfer to stage 3 [1)]*
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali [2)]	278.103.110.532	232.286.830.889	90.926.891.500	601.316.832.921	*Net change in exposures and remeasurement [2)]*
Penghapusan	(232.487.402.899)	(204.341.379.604)	(48.376.538.111)	(485.205.320.614)	*Written off*
Saldo akhir - 31 Desember 2022	116.515.267.153	101.789.221.568	142.240.886.022	360.545.374.743	***Ending balance - 31 December 2022***

[1)] Mutasi kerugian kredit ekspektasian terkait perubahan tahap dari periode sebelumnya / *[1)] ECL movement due to change to account stage from prior period*

[2)] Pembiayaan baru dikurangi dengan pembayaran (termasuk pelunasan) / *[2)] New booking less payment (including repayment)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *Movements of allowance for impairment losses were as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Saldo awal	334.013.800.055	360.545.374.744	244.433.862.437	*Beginning balance*
Penambahan cadangan selama tahun berjalan	295.828.303.680	587.820.882.676	601.316.832.921	*Additional of allowance during the year*
Penghapusan selama tahun berjalan	(296.081.144.541)	(614.352.457.365)	(485.205.320.614)	*Write-off during the year*
Saldo akhir	333.760.959.194	334.013.800.055	360.545.374.744	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. / *Management believes that the amount of the allowance for impairment losses for financing receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.*

Nilai tercatat piutang pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak melebihi nilai wajarnya. / *The carrying amounts of financing receivables classified as financial assets measured at amortised cost approximate their fair values.*

Akun ini merupakan piutang dalam Rupiah yang dikenakan bunga, yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian barang konsumen kepada pemakai akhir dengan pembayaran angsuran secara berkala. / *This account represents interest bearing receivables denominated in Rupiah arising from financing activities in the form of providing goods to end users with periodic installment payment schedule.*

5. TAGIHAN ANJAK PIUTANG / *5. FACTORING RECEIVABLES*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Tagihan anjak piutang - bruto:				***Factoring receivables - gross:***
Pihak ketiga	498.167.605.892	434.200.407.009	254.082.911.603	*Third parties*
Pendapatan anjak piutang yang belum diakui	(7.596.527.816)	(8.485.268.876)	(4.681.066.550)	*Unearned income on factoring*
Jumlah tagihan anjak piutang	490.571.078.076	425.715.138.133	249.401.845.053	*Total factoring receivables*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.349.671.843)	(4.257.151.381)	(3.045.488.324)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah tagihan anjak piutang - bersih	483.221.406.233	421.457.986.752	246.356.356.729	***Total factoring receivables - net***

Rincian atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari piutang anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh temponya masing-masing pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Details of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of factoring receivables according to their respective due dates as of 30 June 2024 and 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
< 3 bulan	483.226.901.357	434.200.407.009	254.082.911.603	*< 3 months*
3 – 6 bulan	14.940.704.535	-	-	*3 - 6 months*
Jumlah	498.167.605.892	434.200.407.009	254.082.911.603	***Total***

Rincian analisa umur atas jatuh tempo kontraktual (ditunjukkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskonto) dari angsuran piutang anjak piutang bruto adalah sebagai berikut:

The detailed aging analysis of the contractual maturities (representing undiscounted contractual cash flows) of installment portion of the gross factoring receivables were as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Belum jatuh tempo	407.093.034.390	422.466.010.366	252.957.462.880	*Current*
Telah jatuh tempo:				*Overdue:*
1-30 hari	-	11.734.396.643	-	*1-30 days*
31-90 hari	58.484.419.929	-	-	*31-90 days*
91-120 hari	32.590.151.573	-	-	*91-120 days*
121-150 hari	-	-	1.125.448.723	*121-150 days*
151-180 hari	-	-	-	*151-180 days*
Jumlah	498.167.605.892	434.200.407.009	254.082.911.603	***Total***

Suku bunga efektif per tahun untuk kontrak tagihan anjak piutang rata-rata berkisar 11,82% - 15,93% pada 30 Juni 2024 (31 Desember 2023 dan 2022: 11,82% - 15,93% dan 12,00% - 12,70%).

The effective annual interest rates for factoring receivables contracts in average ranged between 11.82% - 15.93% in 30 June 2024 (31 December 2023 and 2022: 11.82% - 15.93% and 12.00% - 12.70%).

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing terdapat konsumen-konsumen yang memiliki saldo tagihan anjak piutang melebihi 10% dari jumlah tagihan anjak piutang Perusahaan yaitu PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Rukun Mitra Sejati, PT Uninet Media Sakti dan PT Vadhana International (2023: PT Eka Artha Buana, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Rukun Mitra Sejati dan PT Uninet Media Sakti, 2022: PT Rajawali Citra Televisi Indonesia dan PT Rukun Mitra Sejati).

As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022, there are few customers whose factoring receivables balance exceeded 10% of the Company's total factoring receivables, namely PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Rukun Mitra Sejati, PT Uninet Media Sakti dan PT Vadhana International (2023: PT Eka Artha Buana, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Rukun Mitra Sejati dan PT Uninet Media Sakti, 2022: PT Rajawali Citra Televisi Indonesia and PT Rukun Mitra Sejati ,respectively).

5. **TAGIHAN ANJAK PIUTANG** (Lanjutan) / *5. **FACTORING RECEIVABLES** (Continued)*

Tagihan anjak piutang berdasarkan tujuan pembiayaan: / *Factoring receivables based on purpose of financing:*

	30 Juni/*June* 2024			
	Investasi/ *Investment*	**Modal kerja/ *Working capital***	**Multiguna/ *Multipurpose***	
Tagihan anjak piutang - bruto:				***Factoring receivables - gross:***
Pihak ketiga	-	498.167.605.892	-	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(7.596.527.816)	-	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah tagihan anjak piutang - bruto	-	490.571.078.076	-	*Total factoring receivables - gross*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(7.349.671.843)	-	*Allowance for impairment losses*
Tagihan anjak piutang - bersih	-	483.221.406.233	-	***Factoring receivables - net***

	31 Desember/*December* 2023			
	Investasi/ *Investment*	**Modal kerja/ *Working capital***	**Multiguna/ *Multipurpose***	
Tagihan anjak piutang - bruto:				***Factoring receivables - gross:***
Pihak ketiga	-	434.200.407.009	-	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(8.485.268.876)	-	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah tagihan anjak piutang - bruto	-	425.715.138.133	-	*Total factoring receivables - gross*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4.257.151.381)	-	*Allowance for impairment losses*
Tagihan anjak piutang - bersih	-	421.457.986.752	-	***Factoring receivables - net***

	31 Desember/*December* 2022			
	Investasi/ *Investment*	**Modal kerja/ *Working capital***	**Multiguna/ *Multipurpose***	
Tagihan anjak piutang - bruto:				***Factoring receivables - gross:***
Pihak ketiga	-	254.082.911.603	-	*Third parties*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	(4.681.066.550)	-	*Unearned income on consumer financing*
Jumlah tagihan anjak piutang - bruto	-	249.401.845.053	-	*Total factoring receivables - gross*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(3.045.488.324)	-	*Allowance for impairment losses*
Tagihan anjak piutang - bersih	-	246.356.356.729	-	***Factoring receivables - net***

5. **TAGIHAN ANJAK PIUTANG** (Lanjutan) / 5. ***FACTORING RECEIVABLES*** *(Continued)*

Rekonsiliasi jumlah pencadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut: / *Reconciliation of expected credit loss allowance amount:*

	30 Juni/*June* 2024				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal - 1 Januari 2024	4.257.151.381	-	-	4.257.151.381	*Begining balance - 1 January 2024*
Transfer ke tahap 1 [1)]		-	-	-	*Transfer to stage 1 [1)]*
Transfer ke tahap 2 [1)]		-	-	-	*Transfer to stage 2 [1)]*
Transfer ke tahap 3 [1)]	(315.142.865)	-	315.142.865	-	*Transfer to stage 3 [1)]*
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali [2)]	(7.043.451)	1.443.572.841	1.595.991.072	3.032.520.462	*Net change in exposures and remeasurement [2)]*
Penghapusan	60.000.000	-	-	60.000.000	*Written off*
Saldo akhir - 30 Juni 2024	3.994.965.065	1.443.572.841	1.911.133.937	7.349.671.843	***Ending balance - 30 June 2024***

	31 Desember/*December* 2023				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal - 1 Januari 2023	2.482.763.963	-	562.724.361	3.045.488.324	*Begining balance - 1 January 2023*
Transfer ke tahap 1 [1)]	-	-	-	-	*Transfer to stage 1 [1)]*
Transfer ke tahap 2 [1)]	-	-	-	-	*Transfer to stage 2 [1)]*
Transfer ke tahap 3 [1)]	-	-	-	-	*Transfer to stage 3 [1)]*
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali [2)]	3.776.387.418	-	274.277.139	4.050.664.557	*Net change in exposures and remeasurement [2)]*
Penghapusan	(2.002.000.000)	-	(837.001.500)	(2.839.001.500)	*Written off*
Saldo akhir - 31 Desember 2023	4.257.151.381	-	-	4.257.151.381	***Ending balance - 31 December 2023***

	31 Desember/*December* 2022				
	Tahap 1/ *Stage 1*	**Tahap 2/ *Stage 2***	**Tahap 3/ *Stage 3***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal - 1 Januari 2022	1.218.987.484	51.744.245	-	1.270.731.729	*Begining balance - 1 January 2022*
Transfer ke tahap 1 [1)]	-	-	-	-	*Transfer to stage 1 [1)]*
Transfer ke tahap 2 [1)]	-	-	-	-	*Transfer to stage 2 [1)]*
Transfer ke tahap 3 [1)]	-	(51.744.245)	51.744.245	-	*Transfer to stage 3 [1)]*
Perubahan bersih eksposur dan pengukuran kembali [2)]	7.189.860.659	-	510.980.116	7.700.840.775	*Net change in exposures and remeasurement [2)]*
Penghapusan	(5.926.084.180)	-	-	(5.926.084.180)	*Written off*
Saldo akhir - 31 Desember 2022	2.482.763.963	-	562.724.361	3.045.488.324	***Ending balance - 31 December 2022***

[1)] Mutasi kerugian kredit ekspektasian terkait perubahan tahap dari periode sebelumnya / *[1)] ECL movement due to change to account stage from prior period*

[2)] Pembiayaan baru dikurangi dengan pembayaran (termasuk pelunasan) / *[2)] New booking less payment (including repayment)*

5. **TAGIHAN ANJAK PIUTANG** (Lanjutan) / *5. **FACTORING RECEIVABLES** (Continued)*

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *Movements of allowance for impairment losses were as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	4.257.151.381	3.045.488.324	1.270.731.729	*Beginning balance*
Penambahan cadangan selama tahun berjalan	3.032.520.462	4.050.664.557	7.700.840.775	*Additional of allowance during the year*
Pemulihan (penghapusan) selama tahun berjalan	60.000.000	(2.839.001.500)	(5.926.084.180)	*Recovery (write-off) during the year*
Saldo akhir	7.349.671.843	4.257.151.381	3.045.488.324	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas tagihan anjak piutang adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. / *Management believes that the amount of the allowance for impairment losses for factoring receivables is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.*

Nilai tercatat tagihan anjak piutang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak melebihi nilai wajarnya. / *The carrying amounts of factoring receivables classified as financial assets measured at amortised cost approximate their fair values.*

6. **BEBAN DIBAYAR DIMUKA** / *6. **PREPAID EXPENSES***

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Beban dibayar dimuka				***Prepaid expenses***
Pihak ketiga				***Third parties***
Asuransi dibayar dimuka	1.429.611.646	1.442.430.307	2.096.340.378	*Prepaid insurance*
Lain-lain	35.519.192.171	11.050.885.685	6.268.601.957	*Prepaid others*
Jumlah	36.948.803.817	12.493.315.992	8.364.942.335	***Total***

Beban dibayar di muka pos lain-lain adalah biaya-biaya untuk kegiatan operasional Perusahaan yang akan diamortisasi selama periode kontrak, contohnya: maintenance system fee, license office 365, subscription, renewal enterprise agreement , renewal CISCO Meraki, Anti virus dan renewal HPE. / *Prepaid expenses - others are expenses for the Company's operational activities which will be amortized over the contract period, for example: maintenance system fee, license office 365, subscription, renewal of enterprise agreement, renewal of CISCO Meraki, Anti Virus and renewal of HPE.*

7. **UANG MUKA** / *7. **ADVANCES***

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Uang muka				***Advances***
Pihak ketiga				***Third parties***
Uang muka operasional	6.080.400.701	13.151.197.542	8.716.650.576	*Operational advance*
Jumlah	6.080.400.701	13.151.197.542	8.716.650.576	***Total***

Uang muka operasional merupakan jumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu untuk perjalanan dinas, promosi, pembelian aset tetap. / *Operational advances are the sum of money paid in advance for business travels, promotion, purchase of property and equipment.*

8. PIUTANG LAIN-LAIN / *8. OTHER RECEIVABLES*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak berelasi (Catatan 33)	1.505.907.397	2.567.709.480	3.554.301.125	***Related party** (Note 33)*
Pihak ketiga				***Third parties***
Piutang dalam proses penyelesaian	171.565.083.190	147.400.494.258	44.498.595.300	*Receivables in the settlement process*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(40.582.898.328)	(32.941.589.353)	(5.859.276.233)	*Allowance for impairment losses*
Piutang dalam proses penyelesaian – bersih	130.982.184.862	114.458.904.905	38.639.319.067	*Receivables in the settlement process - net*
Lain -lain	101.164.766.056	25.286.639.618	12.912.772.378	*Others*
	232.146.950.918	139.745.544.523	51.552.091.445	
Jumlah	233.652.858.315	142.313.254.003	55.106.392.570	***Total***

Piutang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga adalah transaksi piutang atas komisi asuransi yang dilakukan dengan PT Kookmin Best Insurance Indonesia dan pihak ketiga.

Besarnya rate yang dikenakan ke PT Kookmin Best Insurance Indonesia berkisar antara 0,88% - 4,39%, menggunakan rate yang sama dengan perusahaan asuransi lainnya yaitu berdasarkan persentase dari *gross* premi dan disesuaikan dengan produk yang dibiayai.

Piutang dalam proses penyelesaian adalah transaksi atas jaminan konsumen yang dititipkan ke Perusahaan untuk dijual.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian dari pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 40.582.898.328, Rp 32.941.589.353 dan Rp 5.859.276.233 cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih.

Other receivables from related parties and third parties are transactions receivable on insurance commissions made with PT Kookmin Best Insurance Indonesia and third parties.

The rate charged to PT Kookmin Best Insurance Indonesia ranging from 0.88% - 4.39%, uses the same rate as other insurance companies, which is based on a percentage of the gross premium and adjusted for the product being financed.

Receivables in the settlement process are transactions for consumer guarantees that are entrusted to the Company for sale.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables in the settlement process from third parties as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 amounting to Rp 40,582,898,328, Rp 32,941,589,353 and Rp 5,859,276,233 is adequate to cover possible losses on uncollectible other receivables accounts.

Management believes that all other receivables are collectible.

9. ASET HAK-GUNA / *9. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	30 Juni/*June* 2024				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Sewa bangunan	100.858.871.363	20.729.123.715	(14.635.996.434)	106.951.998.644	*Rental building*
Sewa kendaraan	50.233.426.434	910.464.906	-	51.143.891.340	*Rental vehicle*
Lain-lain	149.906.654	285.773.246	-	435.679.900	*Others*
Jumlah biaya perolehan	151.242.204.451	21.925.361.867	(14.635.996.434)	158.531.569.884	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Sewa bangunan	34.425.377.944	20.804.401.518	(14.635.996.434)	40.593.783.028	*Rental building*
Sewa kendaraan	22.547.009.231	8.309.068.723	-	30.856.077.954	*Rental vehicle*
Lain-lain	11.118.395	128.994.846	-	140.113.241	*Others*
Jumlah akumulasi penyusutan	56.983.505.570	29.242.465.087	(14.635.996.434)	71.589.974.223	***Total accumulated depreciation***
Jumlah tercatat	94.258.698.881			86.941.595.661	***Carrying amount***

9. **ASET HAK-GUNA** (Lanjutan) / 9. ***RIGHT-OF-USE ASSETS*** *(Continued)*

	31 Desember/*December* 2023				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Sewa bangunan	83.213.960.527	66.209.004.115	(48.564.093.279)	100.858.871.363	*Rental building*
Sewa kendaraan	46.082.208.530	8.694.344.302	(4.543.126.398)	50.233.426.434	*Rental vehicle*
Lain-lain	-	149.906.654	-	149.906.654	*Others*
Jumlah biaya perolehan	129.296.169.057	75.053.255.071	(53.107.219.677)	151.242.204.451	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Sewa bangunan	38.106.240.632	44.883.230.592	(48.564.093.280)	34.425.377.944	*Rental building*
Sewa kendaraan	10.103.853.034	16.556.189.397	(4.113.033.200)	22.547.009.231	*Rental vehicle*
Lain-lain	-	11.118.395	-	11.118.395	*Others*
Jumlah akumulasi penyusutan	48.210.093.666	61.450.538.384	(52.677.126.480)	56.983.505.570	***Total accumulated depreciation***
Jumlah tercatat	81.086.075.391			94.258.698.881	***Carrying amount***

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan					***Acquisition cost***
Sewa bangunan	137.650.171.966	29.408.150.060	(83.844.361.499)	83.213.960.527	*Rental building*
Sewa kendaraan	34.825.539.087	39.553.391.348	(28.296.721.905)	46.082.208.530	*Rental vehicle*
Jumlah biaya perolehan	172.475.711.053	68.961.541.408	(112.141.083.404)	129.296.169.057	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Sewa bangunan	82.864.015.131	39.086.587.000	(83.844.361.499)	38.106.240.632	*Rental building*
Sewa kendaraan	25.293.046.591	12.876.298.617	(28.065.492.174)	10.103.853.034	*Rental vehicle*
Jumlah akumulasi penyusutan	108.157.061.722	51.962.885.617	(111.909.853.673)	48.210.093.666	***Total accumulated depreciation***
Jumlah tercatat	64.318.649.331			81.086.075.391	***Carrying amount***

Beban penyusutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 was allocated as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	**30 Juni/ *June* 2023 (tidak diaudit/ *unaudited)***	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Beban penyusutan dan amortisasi	29.242.465.087	29.894.496.628	61.450.538.384	51.962.885.617	*Depreciation And amortization*

10. ASET TETAP / *10. PROPERTY AND EQUIPMENT*

	30 Juni/*June* 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	5.761.595.000	-	-	-	5.761.595.000	*Land*
Bangunan	10.495.177.790	-	-	-	10.495.177.790	*Building*
Renovasi bangunan	100.142.876.952	2.114.289.291	(56.773.950)	10.080.534.320	112.280.926.613	*Building renovation*
Kendaraan	10.905.034.672	-	(5.592.547.388)	-	5.312.487.284	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	16.420.440.339	337.848.816	(1.362.238.096)	116.272.000	15.512.323.059	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	142.597.344.459	1.396.416.277	(5.342.713.612)	58.201.437.000	196.852.484.124	*Office equipment*
Jumlah biaya perolehan	286.322.469.212	3.848.554.384	(12.354.273.046)	68.398.243.320	346.214.993.870	***Total acquisition cost***
Aset dalam pembangunan	52.139.907.553	18.378.387.338	-	(68.398.243.320)	2.120.051.571	***Construction in progress***
Jumlah	338.462.376.765	22.226.941.722	(12.354.273.046)	-	348.335.045.441	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	6.178.550.799	262.379.445	-	-	6.440.930.244	*Building*
Renovasi bangunan	78.566.211.792	4.301.510.201	(56.773.948)	-	82.810.948.045	*Building renovation*
Kendaraan	10.016.870.948	165.023.082	(5.592.547.307)	-	4.589.346.723	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	14.061.504.441	482.971.283	(1.355.358.612)	-	13.189.117.112	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	109.606.585.538	9.104.665.325	(5.253.330.990)	-	113.457.919.873	*Office equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	218.429.723.518	14.316.549.336	(12.258.010.857)	-	220.488.261.997	***Total accumulated depreciation***
Jumlah tercatat	120.032.653.247				127.846.783.444	***Carrying amount***

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	6.666.930.000	-	(905.335.000)	-	5.761.595.000	*Land*
Bangunan	11.984.668.390	-	(1.489.490.600)	-	10.495.177.790	*Building*
Renovasi bangunan	87.158.330.106	2.362.131.635	-	10.622.415.211	100.142.876.952	*Building renovation*
Kendaraan	20.425.939.353	58.500.000	(9.579.404.681)	-	10.905.034.672	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	25.664.802.568	1.138.822.336	(10.383.184.565)	-	16.420.440.339	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	144.620.990.648	19.294.360.898	(21.905.202.087)	587.195.000	142.597.344.459	*Office equipment*
Jumlah biaya perolehan	296.521.661.065	22.853.814.869	(44.262.616.933)	11.209.610.211	286.322.469.212	***Total acquisition cost***
Aset dalam pembangunan	37.273.756.715	26.075.761.049	-	(11.209.610.211)	52.139.907.553	***Construction in progress***
Jumlah	333.795.417.780	48.929.575.918	(44.262.616.933)	-	338.462.376.765	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	6.966.304.959	565.599.862	(1.353.354.022)	-	6.178.550.799	*Building*
Renovasi bangunan	71.798.419.721	6.767.792.071	-	-	78.566.211.792	*Building renovation*
Kendaraan	19.252.411.161	332.155.896	(9.567.696.109)	-	10.016.870.948	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan Kantor	23.384.180.422	1.044.910.733	(10.367.586.714)	-	14.061.504.441	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	120.601.602.144	10.867.271.972	(21.862.288.578)	-	109.606.585.538	*Office equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	242.002.918.407	19.577.730.534	(43.150.925.423)	-	218.429.723.518	***Total accumulated depreciation***
Jumlah tercatat	91.792.499.373				120.032.653.247	***Carrying amount***

10. **ASET TETAP** (Lanjutan) / *10. **PROPERTY AND EQUIPMENT** (Continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	6.666.930.000	-	-	-	6.666.930.000	*Land*
Bangunan	11.984.668.390	-	-	-	11.984.668.390	*Building*
Renovasi bangunan	81.566.558.636	2.148.438.257	(2.457.030.943)	5.900.364.156	87.158.330.106	*Building renovation*
Kendaraan	22.087.361.105	1.128.752.000	(2.790.173.752)	-	20.425.939.353	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	24.773.592.164	1.113.069.532	(221.859.128)	-	25.664.802.568	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	134.787.649.745	10.642.556.098	(1.267.822.795)	458.607.600	144.620.990.648	*Office equipment*
Jumlah biaya perolehan	281.866.760.040	15.032.815.887	(6.736.886.618)	6.358.971.756	296.521.661.065	***Total acquisition cost***
Aset dalam pembangunan	1.613.439.548	42.019.288.923	-	(6.358.971.756)	37.273.756.715	***Construction in progress***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	6.387.091.440	579.213.519	-	-	6.966.304.959	*Building*
Renovasi bangunan	68.660.581.215	5.377.081.038	(2.239.242.532)	-	71.798.419.721	*Building renovation*
Kendaraan	21.609.971.106	296.113.786	(2.653.673.731)	-	19.252.411.161	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	22.419.865.315	1.182.440.097	(218.124.990)	-	23.384.180.422	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	112.335.102.975	9.504.139.615	(1.237.640.446)	-	120.601.602.144	*Office equipment*
Jumlah akumulasi penyusutan	231.412.612.051	16.938.988.055	(6.348.681.699)	-	242.002.918.407	***Total accumulated depreciation***
Jumlah tercatat	52.067.587.537				91.792.499.373	***Carrying amount***

Beban penyusutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 was allocated as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	**30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)**	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Beban penyusutan dan amortisasi	14.316.549.336	9.661.812.340	19.577.730.534	16.938.988.055	*Depreciation and amortization*

Rincian aset dalam pembangunan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The detail of construction progress as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follow:

	Perkiraan % penyelesaian/ *Estimated % of completion* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	**Jumlah tercatat/ *Carrying amount***	**Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)**	
30 Juni 2024				***30 June 2024***
Bangunan dan prasarana	54%	2.072.709.571	2024	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor	54%	47.341.500	2024	*Office equipment*
	74%	2.120.051.071		
31 Desember 2023				***31 December 2023***
Bangunan dan prasarana	62%	4.011.165.553	2024	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor	62%	48.128.742.000	2024	*Office equipment*
	74%	52.139.907.553		
31 Desember 2022				***31 December 2022***
Bangunan dan prasarana	71%	2.604.319.715	2023	*Buildings and infrastructures*
Peralatan kantor	71%	34.669.437.000	2023	*Office equipment*
	74%	37.273.756.715		

10. **ASET TETAP** (Lanjutan) / *10. **PROPERTY AND EQUIPMENT** (Continued)*

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Gross carrying amount of fixed assets which were fully depreciated and still used are as follows (unaudited):

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah				***Rupiah***
Bangunan	66.459.027.846	64.064.529.699	400.398.000	*Building*
Kendaraan	894.779.314	6.476.987.867	12.866.229.945	*Vehicles*
Perabot dan perlengkapan kantor	8.866.343.548 16.095.564.711	9.169.955.157 15.691.985.878	15.502.933.035 63.372.037.345	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	56.148.392.027	53.398.168.954	400.398.000	*Office equipment*
Jumlah	148.464.107.446	148.801.627.555	92.141.598.325	***Total***

Rincian laba atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of gain on sales of property and equipment were as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Hasil penjualan	165.916.306	126.276.609	4.659.015.073	1.334.296.378	*Sale proceeds*
Jumlah tercatat	(96.262.189)	(43.932.958)	(1.111.691.510)	(388.204.919)	*Carrying amount*
Laba atas penjualan aset tetap	69.654.117	82.343.651	3.547.323.563	946.091.459	*Gain on sale of property and equipment*

Laba atas penjualan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" pada laporan laba rugi (Catatan 26).

Gain on sale of property and equipment is recognized as part of "Other revenues" in the statements of profit or loss (Note 26).

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap.

As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022, there were no contractual commitment for the acquisition of property and equipment.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat beban bunga pinjaman yang dikapitalisasi sebagai aset tetap.

As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022, there were no interest expenses from borrowings which were capitalised to fixed assets.

Seluruh aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya *(all risks)* kepada perusahaan asuransi, pihak ketiga, dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp 103.337.887.975 (31 Desember 2023: Rp 131.833.518.924 dan 31 Desember 2022: Rp 70.666.492.000). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

All property and equipment, except for land, are covered against losses from fire, theft and other risks (all risks) to insurance company, third parties, with sum insured as of 30 June 2024 amounted to Rp 103,337,887,975 (31 December 2023: Rp 131,833,518,924 and 31 December 2022: Rp 70,666,492,000). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover potential losses on the assets insured.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.

There were no fixed assets pledged as collateralas of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.

Management believes that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of property and equipment as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022.

11. ASET TAKBERWUJUD / *11. INTANGIBLE ASSET*

	30 Juni/*June* 2024					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Piranti lunak	152.872.077.851	-	-	6.917.418.242	159.789.496.093	*Software*
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	*Exclusive licence*
Piranti lunak dalam penyelesaian	18.605.051.974	17.225.260.943	-	(6.917.418.242)	28.912.894.675	*Software under development*
Jumlah biaya perolehan	179.427.129.825	17.225.260.943	-	-	196.652.390.768	***Total acquisition cost***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	94.376.630.113	10.704.250.966	-	-	105.080.881.079	*Software*
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	*Exclusive licence*
Jumlah akumulasi	102.326.630.113	10.704.250.966	-	-	113.030.881.079	***Total accumulated***
Jumlah tercatat	77.100.499.712				83.621.509.689	***Carrying amount***

	31 Desember/*December* 2023					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Piranti lunak	123.991.038.315	9.936.262.788	-	18.944.776.748	152.872.077.851	*Software*
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	*Exclusive licence*
Piranti lunak dalam penyelesaian	6.354.559.080	31.195.269.642	-	(18.944.776.748)	18.605.051.974	*Software under development*
Jumlah biaya perolehan	138.295.597.395	41.131.532.430	-	-	179.427.129.825	***Total acquisition cost***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	71.851.739.832	22.524.890.281	-	-	94.376.630.113	*Software*
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	*Exclusive licence*
Jumlah akumulasi	79.801.739.832	22.524.890.281	-	-	102.326.630.113	***Total accumulated***
Jumlah tercatat	58.493.857.563				77.100.499.712	***Carrying amount***

	31 Desember/*December* 2022					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***Acquisition cost***
Piranti lunak	89.667.325.151	4.641.626.598	-	29.682.086.566	123.991.038.315	*Software*
Lisensi eksklusif	7.950.000.000	-	-	-	7.950.000.000	*Exclusive licence*
Piranti lunak dalam penyelesaian	9.531.386.937	26.505.258.709	-	(29.682.086.566)	6.354.559.080	*Software under development*
Jumlah biaya perolehan	107.148.712.088	31.146.885.307	-	-	138.295.597.395	***Total acquisition cost***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	54.415.766.243	17.435.973.589	-	-	71.851.739.832	*Software*
Lisensi eksklusif	6.360.000.000	1.590.000.000	-	-	7.950.000.000	*Exclusive licence*
Jumlah akumulasi	60.775.766.243	19.025.973.589	-	-	79.801.739.832	***Total accumulated***
Jumlah tercatat	46.372.945.845				58.493.857.563	***Carrying amount***

11. **ASET TAKBERWUJUD** (Lanjutan) / *11. INTANGIBLE ASSET (Continued)*

Rincian piranti lunak pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: / *The detail of software under development as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follow:*

	Perkiraan % penyelesaian/ *Estimated % of completion* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	Jumlah tercatat/ *Carrying amount*	Tahun perkiraan penyelesaian/ *Estimated year of completion* (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	
30 Juni 2024				***30 June 2024***
Piranti lunak	40%	28.912.894.675	2025	*Software*
31 Desember 2023				***31 December 2023***
Piranti lunak	75%	18.605.051.974	2024	*Software*
31 Desember 2022				***31 December 2022***
Piranti lunak	32%	6.354.559.080	2023	*Software*

Berdasarkan perjanjian pembelian lisensi eksklusif layanan pembiayaan antara Perusahaan dan PT Siwarga Indo Media dengan No 020/LGL-PW/I/2018 pada tanggal 2 Januari 2018, telah disepakati pembelian lisensi eksklusif sebesar Rp 7.950.000.000.

Based on the agreement of the purchase of an exclusive licence for financing services between the Company and PT Siwarga Indo Media with No 020/LGL-PW/I/2018 on 2 January 2018, it was agreed that the purchase of an exclusive licence Rp 7,950,000,000.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani hingga 2 Januari 2023 dan tidak diperpanjang kembali.

This Agreement is valid for a period of 5 (five) years from the date of this agreement signed up to 2 January 2023 and not renewed.

Beban amortisasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense for the six-month periods ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 was allocated as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Beban penyusutan dan amortisasi	10.704.250.966	10.836.887.575	22.524.890.281	19.025.973.589	*Depreciation and amortization*

12. **INVESTASI JANGKA PANJANG** / *12. LONG TERM INVESTMENT*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	*31 Desember/ December* 2022	
Aset keuangan pada FVTOCI				***Financial asset at FVTOCI***
Pihak berelasi (Catatan 33)				***Related party*** *(Note 33)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	27.000.000.000	43.200.000.000	-	*PT Bank KB Bukopin Tbk*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	43.200.000.000	54.000.000.000	-	*Beginning balance*
Kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai wajar	(16.200.000.000)	(10.800.000.000)	-	*Unrealized loss from changes in fair value*
Saldo akhir	27.000.000.000	43.200.000.000	-	*Ending balance*

Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk No. DE/V/2023-3892 tanggal 31 Mei 2023 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk No. 33 tanggal 9 Juni 2023, Perusahaan terdaftar sebagai pemegang saham PT Bank KB Bukopin Tbk dengan jumlah kepemilikan 540.000.000 saham kelas B dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 54.000.000.000 dengan kepemilikan investasi sebesar 0,29%.

Based on Statement of Shares Ownership of PT Bank KB Bukopin Tbk No. DE/V/2023-3892 dated 31 May 2023 and Notarial Deed of Statement of Meeting Resolutions Amendment to the Articles of Association PT Bank KB Bukopin Tbk No. 33 dated 9 June 2023, the Company is registered as the shareholder of PT Bank KB Bukopin Tbk with total ownership of 540,000,000 class B shares with a nominal value of Rp 100 per share and total nominal value amounted to Rp 54,000,000,000 with investment ownership amounted to 0.29%.

12. **INVESTASI JANGKA PANJANG** (Lanjutan) / *12. **LONG TERM INVESTMENT** (Continued)*

Perusahaan mengakui (kerugian)/keuntungan belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar (Rp 16.200.000.000) dan Rp 1.080.000.000 (31 Desember 2023 dan 2022: Rp 10.800.000.000 dan nihil) sebagai (rugi) penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan.

As of 30 June 2024 and 2023, the Company recognized unrealized (loss)/gains from changes in the fair value of FVTOCI's financial asset as of 30 June 2024 and 2023 amounted to (Rp 16,200,000,000) and Rp 1,080,000,000 (31 December 2023 and 2022: Rp 10,800,000,000 and nil) as other comprehensive (loss) income in the current period.

Mutasi kerugian belum direalisasi dari perubahan nilai wajar aset keuangan FVTOCI adalah sebagai berikut:

Movements in unrealized gains from changes in the fair value of FVTOCI's financial asset are as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal	(10.800.000.000)	-	-	*Beginning balance*
Kerugian belum direalisasi	(16.200.000.000)	(10.800.000.000)	-	*Unrealized loss*
Saldo akhir	(27.000.000.000)	(10.800.000.000)	-	*Ending balance*

13. **ASET LAIN-LAIN** / *13. **OTHER ASSETS***

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aset pembiayaan karyawan	23.067.673.351	24.559.349.110	26.965.008.446	*Employee financing assets*
Uang jaminan	1.525.656.466	1.519.931.067	1.048.516.967	*Security deposits*
Jumlah	24.593.329.817	26.079.280.177	28.013.525.413	***Total***

Nilai tercatat aset lain-lain tidak melebihi nilai wajarnya.

The carrying amounts of other assets approximate their fair values.

14. **PINJAMAN YANG DITERIMA** / *14. **FUND BORROWINGS***

Pinjaman yang diterima terdiri dari:

Fund borrowings consist of the followings:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Bank HSBC Indonesia	670.000.000.000	500.000.000.000	700.000.000.000	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank BTPN Tbk	550.000.000.000	330.000.000.000	410.000.000.000	*PT Bank BTPN Tbk*
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta	550.000.000.000	376.666.666.667	750.000.000.000	*MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch*
PT Bank Jago Tbk	494.583.709.215	-	-	*PT Bank Jago Tbk*
PT Bank Shinhan Indonesia	440.000.000.000	440.000.000.000	190.000.000.000	*PT Bank Shinhan Indonesia*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	434.722.222.222	337.500.000.000	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank KEB Hana Indonesia	397.500.000.000	419.166.666.667	430.000.000.000	*PT Bank KEB Hana Indonesia*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	394.305.555.556	349.166.666.666	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	365.000.000.000	610.000.000.000	715.000.000.000	*Standard Chartered Bank, Jakarta Branch*
PT Bank DBS Indonesia	300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	256.362.811.167	139.865.350.672	210.115.243.823	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	237.500.000.000	233.333.333.334	-	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Permata Tbk	184.166.666.666	197.500.000.000	41.666.666.668	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	77.916.666.651	141.666.666.645	235.416.666.639	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Mega Tbk	7.083.333.333	24.583.333.333	32.068.525.203	*PT Bank Mega Tbk*
International Finance Corporation	-	703.250.000.000	703.250.000.000	*International Finance Corporation*
PT Bank Mizuho Indonesia	-	-	300.000.000.000	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank Oke Indonesia Tbk	-	-	21.999.999.988	*PT Bank Oke Indonesia Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 33)				***Related party** (Note 33)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	500.000.000.000	500.000.000.000	250.000.000.000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
	5.859.140.964.810	5.602.698.683.984	5.289.517.102.321	
Dikurangi:				***Less:***
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(12.462.699.274)	(13.865.410.494)	(16.698.647.463)	*Unamortized transaction costs*
Jumlah	5.846.678.265.536	5.588.833.273.490	5.272.818.454.858	***Total***

14. **PINJAMAN YANG DITERIMA** (Lanjutan) *14. **FUND BORROWINGS** (Continued)*

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut: *The detail of borrowings are as follows:*

Nama Bank/ *Bank's Name*	Perjanjian terakhir/ *Latest agreement*	Jatuh tempo fasilitas/ *Facility due date*	Batas fasilitas/ *Facility limit*	Saldo pinjaman/ *Outstranding loan* 30 Juni/ *June 2024*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*
PT Bank HSBC Indonesia	7 Des/*Dec* 2021	23 Jun/*Jun* 2023		-	-	150.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	23 Jun/*Jun* 2023		-	-	70.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	29 Jun/*Jun* 2023		-	-	200.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	12 Jul/*Jul* 2023		-	-	150.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	29 Mar/*Mar* 2024		-	70.000.000.000	70.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	22 Apr/*Apr* 2024	700.000.000.000	-	30.000.000.000	30.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	24 Jun/*Jun* 2024		-	30.000.000.000	30.000.000.000
	7 Des/*Dec* 2021	23 Jun/*Jun* 2025		150.000.000.000	150.000.000.000	-
	7 Des/*Dec* 2021	23 Jun/*Jun* 2025		70.000.000.000	70.000.000.000	-
	7 Des/*Dec* 2021	27 Jun/*Jun* 2025		150.000.000.000	150.000.000.000	-
	25 Apr/*Apr* 2024	29 Apr/*Apr* 2026		100.000.000.000	-	-
	25 Apr/*Apr* 2024	29 Apr/*Apr* 2026		200.000.000.000	-	-
PT Bank BTPN Tbk	1 Apr/*Apr 2022*	7 Mar/*Mar* 2023		-	-	80.000.000.000
	1 Apr/*Apr 2022*	5 Apr/*Apr* 2023	1.100.000.000.000	-	-	30.000.000.000
	1 Apr/*Apr 2022*	25 Apr/*Apr* 2023		-	-	200.000.000.000
	1 Apr/*Apr 2022*	19 Mei /*May 2023*		-	-	100.000.000.000
	29 Mar/*Mar* 2023	5 Apr/*Apr* 2024		-	30.000.000.000	-
	29 Mar/*Mar* 2023	26 Apr/*Apr* 2024	1.000.000.000.000	-	200.000.000.000	-
	29 Mar/*Mar* 2023	19 Mei/*May* 2024		-	100.000.000.000	-
	28 Mar/*Mar* 2024	1 Jul/*Jul* 2024		50.000.000.000	-	-
	28 Mar/*Mar* 2024	5 Jul/*Jul* 2024		174.000.000.000	-	-
	28 Mar/*Mar* 2024	5 Jul/*Jul* 2024	500.000.000.000	176.000.000.000	-	-
	28 Mar/*Mar* 2024	5 Jul/*Jul* 2024		50.000.000.000	-	-
	28 Mar/*Mar* 2024	5 Jul/*Jul* 2024		50.000.000.000	-	-
	28 Mar/*Mar* 2024	5 Jul/*Jul* 2024	500.000.000.000	50.000.000.000	-	-
MUFG Bank Ltd, Cabang Jakarta	*16 Agu/Aug 2021*	25 Jan/*Jan* 2023		-	-	30.000.000.000
	16 Agu/Aug 2021	14 Feb/*Feb* 2023		-	-	30.000.000.000
	16 Agu/Aug 2021	17 Feb/*Feb* 2023		-	-	45.000.000.000
	16 Agu/Aug 2021	24 Feb/*Feb* 2023		-	-	65.000.000.000
	23 Agu/*Aug* 2022	22 Sep/*Sep* 2023	350.000.000.000	-	-	15.000.000.000
	23 Agu/*Aug* 2022	21 Okt/*Oct* 2023		-	-	15.000.000.000
	23 Agu/*Aug* 2022	16 Nov/*Nov* 2023		-	-	15.000.000.000
	23 Agu/*Aug* 2022	16 Des/*Dec* 2023		-	-	135.000.000.000
	7 Nov/*Nov* 2023	31 Okt/*Oct* 2024		350.000.000.000	110.000.000.000	-
	23 Agu/*Aug* 2022	24 Okt/*Oct* 2025	400.000.000.000	50.000.000.000	66.666.666.667	100.000.000.000
	23 Agu/*Aug* 2022	7 Nov/*Nov* 2025		150.000.000.000	200.000.000.000	300.000.000.000
PT Bank Jago Tbk	27 Feb/*Feb* 2024	7 Mar/*Mar* 2027		54.030.725.742	-	-
	27 Feb/*Feb* 2024	27 Mar/*Mar* 2027		38.826.042.837	-	-
	27 Feb/*Feb* 2024	22 Apr/*Apr* 2027		47.488.319.216	-	-
	27 Feb/*Feb* 2024	25 Apr/*Apr* 2027	500.000.000.000	94.976.638.432	-	-
	27 Feb/*Feb* 2024	29 Apr/*Apr* 2027		136.766.359.341	-	-
	27 Feb/*Feb* 2024	22 Mei/*May* 2027		97.495.623.647	-	-
	27 Feb/*Feb* 2024	22 Mei/*May* 2027		25.000.000.000	-	-
PT Bank Shinhan Indonesia	27 Feb/Feb 2023	26 Feb/*Feb* 2024	190.000.000.000	-	-	190.000.000.000
	28 Feb/*Feb* 2023	28 Feb/*Feb* 2025	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	-
	13 Des/*Dec* 2023	13 Des/*Dec* 2025	240.000.000.000	240.000.000.000	240.000.000.000	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	18 Jan/*Jan* 2024	10 Jan/*Jan* 2025		87.500.000.000	162.500.000.000	-
	18 Jan/*Jan* 2024	3 Feb/*Feb* 2025		33.333.333.333	58.333.333.333	-
	18 Jan/*Jan* 2024	26 Apr/*Apr* 2026	750.000.000.000	61.111.111.111	77.777.777.778	-
	18 Jan/*Jan* 2024	26 Apr/*Apr* 2026		30.555.555.556	38.888.888.889	-
	18 Jan/*Jan* 2024	29 Jan/*Jan* 2027		172.222.222.222	-	-
	18 Jan/*Jan* 2024	2 Jul/*Jul* 2024		50.000.000.000	-	-
Jumlah (Dipindahkan)/*Total (Brought forward)*				3.139.305.931.437	1.984.166.666.667	2.050.000.000.000

14. **PINJAMAN YANG DITERIMA** (Lanjutan) / *14. **FUND BORROWINGS** (Continued)*

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut: (Lanjutan) / *The detail of borrowings are as follows: (Continued)*

Nama Bank/ *Bank's Name*	Perjanjian terakhir/ *Latest agreement*	Jatuh tempo fasilitas/ *Facility due date*	Batas fasilitas/ *Facility limit*	Saldo pinjaman/ *Outstranding loan* 30 Juni/ *June 2024*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*
Jumlah (Pindahan)/*Total (Carried forward)*				3.139.305.931.437	1.984.166.666.667	2.050.000.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	24 Sep/*Sep* 2023	29 Sep/*Sep* 2023		-	-	156.934.062.006
	24 Sep/*Sep* 2023	6 Okt/*Oct* 2023		-	-	58.550.224.155
	24 Sep/*Sep* 2023	23 Okt/*Oct* 2023	430.000.000.000	-	-	214.515.713.839
	26 Sep/*Sep* 2023	29 Sep/*Sep* 2026		300.000.000.000	300.000.000.000	-
	26 Sep/*Sep* 2023	29 Sep/*Sep* 2026		97.500.000.000	119.166.666.667	-
PT Maybank Indonesia	13 Jul/*Jul* 2023	10 Agt/*Aug* 2026		36.111.111.111	44.444.444.444	-
	13 Jul/*Jul* 2023	27 Sep/*Sep* 2026		37.500.000.000	45.833.333.333	-
	13 Jul/*Jul* 2023	27 Sep/*Sep* 2026	500.000.000.000	22.500.000.000	27.500.000.000	-
	13 Jul/*Jul* 2023	23 Okt/*Oct* 2026		35.000.000.000	42.500.000.000	-
	13 Jul/*Jul* 2023	30 Okt/*Oct* 2026		155.555.555.556	188.888.888.889	-
	13 Jul/*Jul* 2023	29 Jan/*Jan* 2027		107.638.888.889	-	-
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	2 Sep/*Sep* 2021	27 Okt/Oct 2023	365.000.000.000	-	-	165.000.000.000
	2 Sep/*Sep* 2021	27 Okt/Oct 2023		-	-	200.000.000.000
	7 Apr/*Apr* 2022	5 Apr/*Apr* 2024	350.000.000.000	-	70.000.000.000	175.000.000.000
	7 Apr/*Apr* 2022	5 Apr/*Apr* 2024		-	175.000.000.000	175.000.000.000
	22 Agu/*Aug* 2023	22 Agu/*Aug* 2025	365.000.000.000	165.000.000.000	165.000.000.000	-
	22 Agu/*Aug* 2023	22 Agu/*Aug* 2025		200.000.000.000	200.000.000.000	-
PT Bank DBS Indonesia	26 Okt/*Oct* 2021	12 Jan/*Jan* 2024	150.000.000.000	-	-	150.000.000.000
	26 Okt/*Oct* 2021	28 Okt/*Oct* 2024	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
	3 Feb/*Feb* 2023	9 Feb/*Feb* 2024	150.000.000.000	-	150.000.000.000	-
	5 Mar/*Mar* 2024	14 Mar/*Mar* 2025	150.000.000.000	150.000.000.000	-	-
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	27 Mei/*May* 2020	27 Mei/*May* 2024	100.000.000.000	-	-	15.278.992.406
	23 Nov/*Nov* 2021	23 Nov/*Nov* 2023	80.000.000.000	-	-	5.581.642.672
	11 Feb/*Feb* 2022	11 Feb/*Feb* 2024	200.000.000.000	-	2.580.748.019	189.254.608.745
	18 Apr/*Apr* 2023	18 Apr/*Apr* 2025	200.000.000.000	81.615.978.121	137.284.602.653	-
	15 Des/*Dec* 2023	15 Des/*Dec* 2027	200.000.000.000	174.746.833.046	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	30 Agu/*Aug* 2023	26 Sep/*Sep* 2026	250.000.000.000	75.000.000.000	91.666.666.667	-
	30 Agu/*Aug* 2023	4 Okt/*Oct* 2026		116.666.666.667	141.666.666.667	-
	19 Mar/*Mar* 2024	27 Mar/*Mar* 2027	250.000.000.000	45.833.333.333	-	-
PT Bank Permata Tbk	30 Mar/*Mar* 2022	8 Feb/*Feb* 2025		8.333.333.333	13.333.333.333	23.333.333.335
	30 Mar/*Mar* 2022	23 Sep/*Sep* 2025	280.000.000.000	8.333.333.333	11.666.666.667	18.333.333.333
	30 Mar/*Mar* 2022	20 Mar/*Mar* 2026		46.666.666.667	60.000.000.000	-
	30 Mar/*Mar* 2022	24 Mar/*Mar* 2026		87.500.000.000	112.500.000.000	-
	31 Jan/*Jan* 2024	28 Feb/*Feb* 2025	100.000.000.000	33.333.333.333	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22 Jun/*Jun* 2022	29 Jun/*Jun* 2026		24.999.999.984	31.249.999.980	43.749.999.972
	22 Jun/*Jun* 2022	25 Nov/*Nov* 2024	250.000.000.000	41.666.666.667	91.666.666.665	191.666.666.667
	22 Jun/*Jun* 2022	16 Mar/*Mar* 2025		11.250.000.000	18.750.000.000	-
PT Bank Mega Tbk	4 Sep/*Sep* 2020	4 Mar/*Mar* 2024	130.916.000.000	-	-	25.000.000.000
	31 Mar/*Mar* 2021	31 Mar/*Mar* 2025	125.000.000.000	-	-	7.068.525.203
	31 Mar/*Mar* 2021	31 Mar/*Mar* 2026	200.000.000.000	7.083.333.333	24.583.333.333	-
International Finance Corporation	21 Des/*Dec* 2020	21 Jan/*Jan* 2024	703.250.000.000	-	703.250.000.000	703.250.000.000
Jumlah (Dipindahkan)/Total (*Brought forward*)				5.359.140.964.810	5.102.698.683.984	4.717.517.102.333

14. **PINJAMAN YANG DITERIMA** (Lanjutan) / *14. **FUND BORROWINGS** (Continued)*

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut: (Lanjutan) / *The detail of borrowings are as follows: (Continued)*

Nama Bank/ *Bank's Name*	Perjanjian terakhir/ *Latest agreement*	Jatuh tempo fasilitas/ *Facility due date*	Batas fasilitas/ *Facility limit*	Saldo pinjaman/ *Outstranding loan* 30 Juni/ *June 2024*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*
Jumlah (Pindahan)/*Total (Carried forward)*				5.359.140.964.810	5.102.698.683.984	4.717.517.102.333
PT Bank Mizuho	30 Sep/*Sep* 2022	10 Okt/*Oct* 2023	300.000.000.000	-	-	150.000.000.000
Indonesia	30 Sep/*Sep* 2022	17 Nov/*Nov* 2023		-	-	150.000.000.000
PT Bank Oke	6 Mei/*May* 2020	6 Nov/*Nov* 2023	100.000.000.000	-	-	1.861.111.099
Indonesia Tbk	10 Sep/*Sep* 2020	10 Mar/*Mar* 2024	50.000.000.000	-	-	1.250.000.000
	13 Nov/*Nov* 2020	13 Mei/*May* 2024	100.000.000.000	-	-	6.388.888.889
	30 Mar/*Mar* 2021	30 Sep/*Sep* 2024	200.000.000.000	-	-	12.500.000.000
PT Bank KB	7 Sep/*Sep* 2022	8 Sep/*Sep* 2023	250.000.000.000	-	-	250.000.000.000
Bukopin Tbk	15 Feb/Feb 2024	6 Sep/Sep 2024		250.000.000.000	250.000.000.000	-
	5 Sep/*Sep* 2023	16 Feb/*Feb* 2024	250.000.000.000	-	250.000.000.000	-
	15 Feb/*Feb* 2024	14 Feb/*Feb* 2025		250.000.000.000		-
Jumlah / *Total*				5.859.140.964.810	5.602.698.683.984	5.289.517.102.321

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas adalah sebesar 6,35%, 10,00%, 5% - 10% masing-masing untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022.

The range of contractual interest rates per annum on the above bank loans are amounted to 6.35%, 10.00%, 5% - 10% for the periode and years ended as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2023, respectively.

Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Perusahaan, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Perusahaan seperti mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain kecuali pinjaman yang didapat sehubungan dengan kegiatan usaha yang sehari-hari atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

On loans received by the Company, the creditors generally entails restrictions and certain obligation that should be met by the Company such as obtain loans from other parties except loans obtained in the normal course of business, or changes in its capital structure and/or articles of association without notification to/prior written approval from creditors and maintenance of certain agreed financial ratios.

Rasio-rasio keuangan tertentu sebagai berikut: / *Certain agreed financial ratios as follow:*

Rasio Keuangan/ *Financial Ratio*	Persyaratan/ *Requirements*	Tingkat Pemenuhan/ *Fulfillment Level* 30 Juni/ *June 2024*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2022*
Rasio piutang pembiayaan bermasalah - neto/ *Non performing financing - net*	Maksimum 5,00%/ *Maximum 5.00%*	2,79%	2,01%	1,73%
Rasio utang terhadap ekuitas/*Gearing ratio*	Maksimum 9 kali/ *Maximum 9 times*	5,59 kali	5,19 kali	5,73 kali
Rasio kecukupan modal/*Capital adequacy ratio*	Minimum 9,20%/ Minimum 9.20%	22,82%	23,84%	20,52%
Rasio lancar/*Current ratio*	Minimum 100%/ *Minimum 100%*	127,35%	127,36%	118,55%

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

The Company has complied with covenants on loan agreements.

Tidak ada pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan.

There are no principal and interest of loans that have been due but not yet paid.

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *15. SECURITIES ISSUED*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rupiah				***Rupiah***
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri A	-	-	686.385.000.000	*Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Series A*
Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Seri B	313.615.000.000	313.615.000.000	313.615.000.000	*Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022 Series B*
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri A	500.000.000.000	500.000.000.000	-	*Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Series A*
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	500.000.000.000	500.000.000.000	-	*Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Series B*
	1.313.615.000.000	1.313.615.000.000	1.000.000.000.000	
Dikurangi:				***Less:***
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(3.475.394.412)	(6.256.111.640)	(6.372.071.354)	*Unamortized bonds issuance costs*
Jumlah	1.310.139.605.588	1.307.358.888.360	993.627.928.646	***Total***

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

Pada tanggal 22 Juli 2022, Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" dimana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai Pokok Obligasi.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, Perusahaan telah melakukan pelunasan pokok dan pembayaran bunga Obligasi I Seri A kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebesar Rp 695.346.140.551.

Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022

On 22 July 2022, the Company has issued "Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2022" in which according to the Bonds Trustee Agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of performing financing receivables, namely account receivables that have no delay nor late payments in principal and/or interest exceeding 90 (ninety) calender days, amounting to 20% of the principal amount of the Bonds on the Emission Date and no later than 5 (five) months after the Emission Date to be at least 60% of the principal amount of the Bonds.

On 1 August 2023, the Company has paid the principal and interest of Obligasi I Series A to PT Kustodian Sentral Efek Indonesia amounting to Rp 695,346,140,551.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" dimana sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori *performing*, yakni piutang yang tidak terdapat keterlambatan atau piutang yang tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebesar 20% dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% dari nilai Pokok Obligasi.

Semua pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi dilakukan secara triwulan.

Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023

On 27 June 2023, the Company has issued "Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023" in which according to the Bonds Trustee Agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of performing financing receivables, namely account receivables that have no delay nor late payments in principal and/or interest exceeding 90 (ninety) calender days, amounting to 20% of the principal amount of the Bonds on the Emission Date and no later than 5 (five) months after the Emission Date to be at least 60% of the principal amount of the Bonds.

The principal's bonds are paid in full as they fall due. The interest's bonds are paid on quarterly basis.

16. UTANG LAIN-LAIN / *16. OTHER PAYABLES*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga				***Third parties***
Asuransi	19.054.598.840	15.777.692.567	26.339.943.812	*Insurance*
Dealer	16.401.012.915	27.468.607.545	18.489.524.122	*Dealer*
Utang restorasi	6.614.253.722	6.425.989.722	7.028.073.667	*Restoration liabilities*
Lain-lain	22.445.929.548	23.442.491.775	19.900.801.996	*Others*
	64.515.795.025	73.114.781.609	71.758.343.597	
Pihak berelasi (Catatan 33)				***Related parties*** *(Note 33)*
Asuransi	3.219.393.504	13.506.959.899	3.127.524.754	*Insurance*
Dealer	3.261.107.567	4.123.010.377	3.059.729.659	*Dealer*
	6.480.501.071	17.629.970.276	6.187.254.413	
Jumlah	70.996.296.096	90.744.751.885	77.945.598.010	***Total***

Utang restorasi merupakan kewajiban atas biaya renovasi kantor cabang kembali keadaan semula jika sudah tidak diperpanjang kontraknya.

Restoration liabilities represent the obligation to renovate the branch office returns to its original state if the contract is not renewed.

Utang lain-lain merupakan kelebihan pembayaran konsumen yang harus dikembalikan, kelebihan klaim asuransi konsumen, dan pendapatan bunga diterima dimuka atas transaksi anjak piutang.

Other payables represent excess consumer payments that must be returned, excess consumer insurance claims, and interest income received in advance on factoring transactions.

Jumlah tercatat utang lain-lain tidak melebihi nilai wajarnya dan seluruhnya didenominasikan dalam mata uang Rupiah Indonesia.

The carrying amounts of other payables approximate their fair values and denominated in Indonesian Rupiah.

17. PERPAJAKAN / *17. TAXATION*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Tax*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak Penghasilan:				*Income Taxes:*
Pasal 23	546.604.937	-	-	*Article 23*
Pasal 25	1.143.999.894	-	-	*Article 25*
Jumlah	1.690.604.831	-	-	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payables*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak Penghasilan:				*Income Taxes:*
Pasal 21	3.174.986.175	3.864.599.830	2.961.502.210	*Article 21*
Pasal 23/26	294.803.076	439.892.007	499.942.465	*Article 23/26*
Pasal 4 (2) – Final	366.277.360	2.914.378.971	92.435.359	*Article 4(2) - Final*
Pasal 25	-	-	4.714.606.157	*Article 25*
Pajak Pertambahan Nilai	721.261.165	798.205.326	502.222.308	*Value Added Tax*
Taksiran Pajak Penghasilan Badan Terutang	-	447.647.968	36.774.331.984	*Estimated Corporate Income Tax Payable*
Jumlah	4.557.327.776	8.464.724.102	45.545.040.483	***Total***

17. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) / *17. **TAXATION** (Continued)*

c. **Penghasilan (beban) Pajak Penghasilan** / *c. **Income Tax Benefit (Expense)***

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pajak kini	-	(2.677.130.720)	(18.663.626.740)	(68.679.279.900)	*Current tax*
Pajak tangguhan	12.448.216.780	(10.848.768.024)	(1.252.252.474)	24.018.481.234	*Deferred tax*
Jumlah Pajak Penghasilan	12.448.216.780	(13.525.898.744)	(19.915.879.214)	(44.660.798.666)	***Total Income Taxes***

d. **Pajak Penghasilan** / *d. **Income Taxes***

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the six months period ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(14.083.534.860)	83.183.534.860	111.462.008.481	202.789.005.836	*(Loss) profit before income tax*
Beda tetap:					*Permanent differences:*
Perjamuan dan donasi	1.078.528.263	1.411.712.388	2.597.259.426	2.811.241.320	*Entertainment and donation*
Beban pajak	2.262.110	73.230.345	251.412.545	252.984.865	*Tax expense*
Beban lain-lain	3.375.489.300	12.545.389.911	18.243.353.117	16.168.119.763	*Other expense*
Kupon perpetual *bonds*	(45.534.411.333)	(32.154.678.000)	(32.154.678.000)	(13.775.991.075)	*Coupon perpetual bonds*
Pendapatan keuangan yang telah dikenakan pajak bersifat final	(1.421.137.016)	(3.577.646.856)	(9.872.631.198)	(5.241.729.480)	*Financing income subjected to final tax*
Jumlah beda tetap	(42.499.268.676)	(21.701.992.212)	(20.935.284.110)	214.625.393	*Total permanent difference*
Jumlah (Dipindahkan)	(56.582.803.536)	61.481.542.648	90.526.724.371	203.003.631.229	*Total (Brought forward)*

17. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) / *17. **TAXATION** (Continued)*

d. **Pajak Penghasilan** (Lanjutan) / *d. **Income Taxes** (Continued)*

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

A reconciliation between profit (loss) before income tax, as presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the six months period ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 are as follows: (Continued)

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Jumlah (Pindahan)	(56.582.803.536)	61.481.542.648	90.526.724.371	203.003.631.229	*Total (Carried forward)*
Beda temporer:					*Temporary differences:*
Imbalan pasca-kerja	12.108.726.094	9.120.255.592	23.154.079.201	19.381.005.864	*Post-employment benefits*
Pembayaran pesangon	(8.123.181.540)	(3.652.531.711)	(25.932.965.470)	(13.751.127.781)	*Severance payment*
Penyusutan aset tetap	(496.434.251)	(33.694.853)	1.904.659.088	(818.336.799)	*Depreciation of property and equipment*
Aset hak-guna	255.715.248	497.573.601	718.473.159	804.506.293	*Right-of-use assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	7.641.308.975	4.535.968.701	27.082.313.120	2.111.814.352	*Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	(2.780.717.228)	2.943.498.825	(115.959.715)	6.372.071.354	*Unamortized issuance cost on securities issued*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	(1.402.711.219)	(3.994.908.583)	(2.833.236.970)	(148.097.257)	*Unamortized issuance cost on fund borrowings*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(31.313.554.676)	(96.133.340.753)	(1.380.882.367)	(26.329.322.442)	*Unamortized transaction cost on financing receivables*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	(315.973.710)	(65.049.450)	221.518.336	190.654.800	*Unamortized transaction cost on factoring receivables*
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	(252.840.861)	37.395.705.042	(26.531.574.690)	116.111.512.307	*Allowance for impairment of financing receivables*
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	3.092.520.461	1.071.054.758	1.211.663.059	1.774.756.595	*Allowance for impairment of factoring receivables*
Cadangan penyisihan kas yang dibatasi penggunaannya	-	153.900.000	-	-	*Allowance of impairment of restricted cash*
Cadangan limit belum terpakai	(403.352.920)	(3.138.061.406)	(3.048.889.840)	3.739.444.222	*Allowance of limit of unused*
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	158.625.783	1.987.048.308	(141.253.607)	(263.966.805)	*Allowance for impairment of cash and cash equivalents*
Jumlah beda temporer	(21.831.869.844)	(49.312.581.929)	(5.692.056.696)	109.174.914.703	*Total temporary differences*
Taksiran (rugi) laba kena pajak	(78.414.673.380)	12.168.775.868	84.834.667.675	312.178.545.932	***Estimated taxable (loss) income***
Pembulatan	-	12.168.775.000	84.834.667.000	312.178.545.000	***Rounding***
Beban pajak penghasilan:					***Estimated income tax expense:***
30 Juni 2024	-	-	-	-	*30 June 2023*
30 Juni 2023 : 22% x Rp 12.168.775.000	-	2.677.130.720	-	-	*30 June 2023 : 22% x Rp 12,168,775,000*
31 Desember 2023 : 22% x Rp 84.834.667.000	-	-	18.633.626.740	-	*31 December 2023 : 22% x Rp 84,834,667,000*
31 Desember 2022 : 22% x Rp 312.178.545.000	-	-	-	68.679.279.900	*31 December 2022 : 22% x Rp 312,178,545,000*
Jumlah beban pajak penghasilan	-	2.677.130.720	18.633.626.740	68.679.279.900	*Total estimated income tax*
Dikurangi: kredit pajak penghasilan					***Less: income tax credit***
Pasal 23	(546.604.937)	(793.714.255)	(1.372.562.519)	(1.263.960.023)	*Article 23*
Pasal 25	(1.143.999.894)	(15.622.366.998)	(16.843.416.253)	(30.640.987.893)	*Article 25*
Pajak penghasilan badan (lebih) / kurang bayar	(1.690.604.831)	(13.738.950.533)	417.647.968	36.774.331.984	***Corporate income tax (over) / under payment***

17. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) / *17. **TAXATION** (Continued)*

d. **Pajak Penghasilan** (Lanjutan) / *d. **Income Taxes** (Continued)*

Jumlah taksiran laba kena pajak tahun 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan yang disampaikan ke Kantor Pajak.

The estimated amount of taxable profit for 2023 and 2022 is used as the basis for preparation of the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the Tax Office.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak *(self-assessment)*. Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak dalam waktu 5 (lima) tahun sejak pajak terhutang.

The determination of the tax liabilities is based on self-assessment. The tax office can perform examination of income taxes within 5 (five) years after the tax becomes due.

e. **Pajak Tangguhan** / *e. **Deferred Tax***

Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara laporan komersial dan laporan fiskal terdiri dari:

The deferred tax effects of the significant temporary differences between commercial and fiscal reporting are as follows:

	31 Desember/ *December* 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	30 Juni/ *June* 2024	
Aset Pajak Tangguhan					***Deferred Tax Assets***
Imbalan pasca-kerja	25.664.256.373	876.819.802	-	26.541.076.175	*Post-employment benefits*
Rugi fiskal	-	17.251.228.144	-	17.251.228.144	*Fiscal loss*
Penyusutan aset tetap	(3.115.141.688)	(109.215.535)	-	(3.224.357.223)	*Depreciation of property and equipment*
Aset hak-guna	1.798.601.014	56.257.354	-	1.854.858.368	*Right-of-use assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	7.247.149.657	1.681.087.975	-	8.928.237.632	*Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(26.109.063.910)	(6.888.982.029)	-	(32.998.045.939)	*Unamortized transaction cost on financing receivables*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	104.504.377	(69.514.216)	-	34.990.161	*Unamortized transaction cost factoring receivables*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	3.050.390.308	(308.596.468)	-	2.741.793.840	*Unamortized issuance cost on fund borrowings*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	1.376.344.561	(611.757.790)	-	764.586.771	*Unamortized issuance cost on securities issued*
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	73.483.036.012	(55.624.989)	-	73.427.411.023	*Allowance for impairment of financing receivables*
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	936.573.304	680.354.502	-	1.616.927.806	*Allowance for impairment of factoring receivables*
Cadangan limit yang belum terpakai	151.921.964	(88.737.642)	-	63.184.322	*Allowance for limit of unused*
Penyesuaian nilai wajar investasi jangka panjang	2.376.000.000	-	3.564.000.000	5.940.000.000	*Fair value adjustment of long term investment*
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	16.889.423	34.897.672	-	51.787.095	*Allowance for impairment of cash and cash equivalents*
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	86.981.461.395	12.448.216.780	3.564.000.000	102.993.678.175	***Deferred Tax Asset - Net***

17. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) / *17. **TAXATION** (Continued)*

e. **Pajak Tangguhan** (Lanjutan) / *e. **Deferred Tax** (Continued)*

	31 Desember/ *December* 2022	**Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss***	**Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income***	**31 Desember/ *December* 2023**	
Aset Pajak Tangguhan					***Deferred Tax Assets***
Imbalan pasca-kerja	23.203.190.349	(611.354.979)	3.072.421.003	25.664.256.373	*Post-employment benefits*
Penyusutan aset tetap	(3.534.166.687)	419.024.999	-	(3.115.141.688)	*Depreciation of property and equipment*
Aset hak-guna	1.640.536.919	158.064.095	-	1.798.601.014	*Right-of-use assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	1.289.040.771	5.958.108.886	-	7.247.149.657	*Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(25.805.269.789)	(303.794.121)	-	(26.109.063.910)	*Unamortized transaction cost on financing receivables*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	55.770.343	48.734.034	-	104.504.377	*Unamortized transaction cost factoring receivables*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	3.673.702.441	(623.312.133)	-	3.050.390.308	*Unamortized issuance cost on fund borrowings*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	1.401.855.698	(25.511.137)	-	1.376.344.561	*Unamortized issuance cost on securities issued*
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	79.319.982.444	(5.836.946.432)	-	73.483.036.012	*Allowance for impairment of financing receivables*
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	670.007.431	266.565.873	-	936.573.304	*Allowance for impairment of factoring receivables*
Cadangan limit yang belum terpakai	822.677.729	(670.755.765)	-	151.921.964	*Allowance for limit of Unused*
Penyesuaian nilai wajar investasi jangka panjang	-	-	2.376.000.000	2.376.000.000	*Fair value adjustment of long term investment*
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	47.965.217	(31.075.794)	-	16.889.423	*Allowance for impairment of cash and cash equivalents*
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	82.785.292.866	(1.252.252.474)	5.448.421.003	86.981.461.395	***Deferred Tax Asset - Net***

17. **PERPAJAKAN** (Lanjutan) / *17. **TAXATION** (Continued)*

e. **Pajak Tangguhan** (Lanjutan) / *e. **Deferred Tax** (Continued)*

	31 Desember/ *December* 2021	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/*Credited to other comprehensive income*	31 Desember/ *December* 2022	
Aset Pajak Tangguhan					***Deferred Tax Assets***
Imbalan pasca-kerja	21.057.323.308	1.238.573.178	907.293.863	23.203.190.349	*Post-employment benefits*
Penyusutan aset tetap	(3.354.132.591)	(180.034.096)	-	(3.534.166.687)	*Depreciation of property and equipment*
Aset hak-guna	1.463.545.535	176.991.384	-	1.640.536.919	*Right-of-use assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang dalam proses penyelesaian	824.441.614	464.599.157	-	1.289.040.771	*Allowance for impairment losses of receivables in the settlement process*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang pembiayaan	(20.012.818.852)	(5.792.450.937)	-	(25.805.269.789)	*Unamortized transaction cost on financing receivables*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi atas tagihan anjak piutang	13.826.287	41.944.056	-	55.770.343	*Unamortized transaction cost factoring receivables*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas pinjaman yang diterima	3.706.283.838	(32.581.397)	-	3.673.702.441	*Unamortized issuance cost on fund borrowings*
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi atas surat berharga yang diterbitkan	-	1.401.855.698	-	1.401.855.698	*Unamortized issuance cost securities issued*
Cadangan penyisihan piutang pembiayaan	53.775.449.736	25.544.532.708	-	79.319.982.444	*Allowance for impairment of financing receivables*
Cadangan penyisihan tagihan anjak piutang	279.560.980	390.446.451	-	670.007.431	*Allowance for impairment of factoring receivables*
Cadangan limit yang belum terpakai	-	822.677.729	-	822.677.729	*Allowance for limit of unused*
Cadangan penyisihan kas dan setara kas	106.037.914	(58.072.697)	-	47.965.217	*Allowance for impairment of cash and cash equivalents*
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	57.859.517.769	24.018.481.234	907.293.863	82.785.292.866	***Deferred Tax Asset - Net***

Pemanfaatan aset pajak tangguhan yang diakui oleh Perusahaan tergantung pada laba kena pajak di masa yang akan datang dan kelebihan laba yang dihasilkan oleh pemulihan beda temporer yang dapat dikenakan pajak.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Company is dependent upon future taxable income and in excess of profits resulting from the reserval of existing taxable temporary differences.

f. **Pengampunan Pajak** / *f. **Tax Amnesty***

Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3735/PP/ WPJ.04/2016 tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 tahun 2016 dengan nominal aset pengampunan pajak yang diakui pada laporan posisi keuangan sebesar Rp 2.207.850.000 (Catatan 21).

Based on Tax Amnesty Certificate No. KET-3735/PP/ WPJ.04/2016 dated 31 December 2016, the Company has participated in the Tax Amnesty Program in accordance with Tax Amnesty Law No.11 year 2016 with nominal of assets from tax amnesty which has been recognized in the statement of financial position amounted to Rp 2,207,850,000 (Note 21).

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA / *18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION*

Sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

In accordance with the Indonesian Law No.11 Year 2020 and Government Regulation No.35 Year 2021 on Job Creation, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perusahaan.

The Company has defined contribution pension program covering its qualified permanent employees who meets the Company's criteria.

Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan keuangan interim dan beban imbalan kerja untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan, sedangkan saldo 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA Nurichwan, aktuaria independen, yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2024 dan 4 Januari 2023.

The post-employment benefits liabilities recognized in the interim financial statements and post employment benefits expenses for the six month periods ended 30 June 2024 was based on calculation conducted by the management, while the balance as of 31 December 2023 and 2022 was based on calculation conducted by KKA Nurichwan, an independent actuary, in its report dated 12 January 2024 and 4 January 2023.

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan:

The amounts recognised in the statement of financial position:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	120.641.255.347	116.655.710.793	105.469.047.048	*Present value of defined benefit obligation*
Nilai wajar aset program	(892.311.253)	(895.268.615)	(3.473.632.194)	*Fair value of plan assets at end of the year*
Kewajiban yang diakui dalam laporan posisi keuangan	119.748.944.094	115.760.442.178	101.995.414.854	*Liabilities recognized in the statement of financial position*

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut:

Movements in the present value of defined benefit obligation recognised in the statement of financial position are as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	116.655.710.793	105.469.047.048	95.715.105.951	*Present value of defined benefit obligation*
Beban jasa kini	8.220.519.911	15.412.651.148	13.627.151.539	*Current service cost*
Biaya bunga	3.888.206.183	7.741.428.053	7.054.203.308	*Interest cost*
Dampak IFRIC	-	-	(1.300.348.983)	*The impact of IFRIC*
Pembayaran imbalan yang diharapkan	(8.123.181.540)	(25.932.965.470)	(13.751.127.781)	*Expected benefit payment*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diharapkan	120.641.255.347	102.690.160.779	101.344.984.034	*Expected present value of defined benefit obligation*
Kerugian aktuarial	-	13.965.550.014	4.124.063.014	*Actuarial loss*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	120.641.255.347	116.655.710.793	105.469.047.048	*Present value of defined benefit obligation*

18. **LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA** (Lanjutan) / *18. **POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION** (Continued)*

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan sebagai berikut: / *Movements in the liability recognised in the statement of financial position are as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Saldo awal 1 Januari	115.760.442.178	101.995.414.854	92.671.685.936	*Beginning balance as of 1 January*
Beban yang diakui pada tahun berjalan (Catatan 26)	12.076.498.854	21.944.914.598	18.714.505.809	*Expense recognized in year (Note 26)*
Beban yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	-	15.039.671.302	4.673.893.025	*Expense recognized in the other comprehensive income*
Penarikan dana dari aset program	3.535.184.602	15.713.406.894	5.686.457.865	*Withdrawal of funds from program assets*
Iuran yang dibayarkan oleh Perusahaan	(3.500.000.000)	(13.000.000.000)	(6.000.000.000)	*Company contributions*
Pembayaran imbalan	(8.123.181.540)	(25.932.965.470)	(13.751.127.781)	*Benefit payment*
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan	119.748.944.094	115.760.442.178	101.995.414.854	*Liability recognized in statement of financial position*

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *The amounts recognised in the statement of profit or loss are as follows:*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Biaya jasa kini	8.220.519.911	6.195.900.545	15.412.651.148	13.627.151.539	*Current service cost*
Biaya bunga	3.888.206.183	2.924.355.047	7.741.428.053	7.054.203.308	*Interest cost*
Imbal hasil ekspektasian aset program	(32.227.240)	(67.261.330)	(1.209.164.603)	(666.500.055)	*The expected return form the plan assets*
Dampak IFRIC	-	-	-	(1.300.348.983)	*The impact of IFRIC*
Jumlah beban	12.076.498.854	9.052.994.262	21.944.914.598	18.714.505.809	***Total expenses***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut: / *The movement in the fair value of plan asset is follows:*

	Program pensiun/*Pension program*			
	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Nilai wajar aset awal tahun	895.268.615	3.473.632.194	3.043.420.015	*Fair value of plan assets at beginning of the year*
Iuran yang dibayarkan oleh Perusahaan	3.500.000.000	13.000.000.000	6.000.000.000	*Company contributions*
Imbal hasil ekspektasian aset program	32.227.240	1.209.164.603	666.500.055	*The expected return form the plan assets*
Penarikan dana dari aset program	(3.535.184.602)	(15.713.406.894)	(5.686.457.865)	*Withdrawals from the plan asset*
Nilai ekspektasi aset program	892.311.253	1.969.389.903	4.023.462.205	*Estimated of plan assets at ending period*
Kerugian aktuaria atas aset program	-	(1.074.121.288)	(549.830.011)	*Actuarial losses on plan assets*
Nilai aset program pada akhir periode	892.311.253	895.268.615	3.473.632.194	***Fair value of plan assets at end of period***

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022: / *The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the obligation for post-employment and current service cost as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022:*

	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ *Obligation for post-employment benefit*			
	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	111.137.798.378	106.620.086.857	97.584.663.816	*Increase in interest rate 100 in basis point*
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	134.613.231.710	128.208.549.626	115.399.185.458	*Decrease in interest rate 100 in basis point*

18. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan) / ***18. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION*** *(Continued)*

Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan beban dan penyisihan imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Actuarial assumptions used in determining employee benefits expense and liabilities as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31Desember/ *December* 2022**	
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Normal pension age*
Tingkat diskonto	6,87%	6,87%	7,34%	*Discount rate*
Estimasi kenaikan gaji di masa datang	5,00%	5,00%	5,00%	*Estimated future salary increase*
Tabel mortalita	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	TMI-IV 2019	*Mortality table*
Tingkat cacat	5,00%	5,00%	5,00%	*Disability rate*

Tingkat pengunduran diri	**Umur/ *Age***	**Persentase/ *Rate***	*Resignation rate*
	0 - 39	5%	
	40 - 44	3%	
	45 - 49	2%	
	50 - 54	1%	
	>55	-	

Metode	*Projected unit credit*	*Method*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension and other long-term employee benefits is as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	
Analisis jatuh tempo pembayaran kewajiban imbalan pasti:		*Maturity analysis of defined benefit obligation payments:*
Tahun ke 1	6.872.979.292	*In 1st year*
Tahun ke 2	5.183.958.978	*In 2nd year*
Tahun ke 3	2.840.102.751	*In 3rd year*
Tahun ke 4	4.764.552.208	*In 4th year*
Tahun ke 5	5.373.739.720	*In 5th year*
Tahun ke 6 - 10	27.670.629.870	*In 6 - 10th years*
Tahun ke 11 - 15	31.757.346.875	*In 11 - 15th years*
Tahun ke 16 - 20	21.375.602.067	*In 16 - 20th years*
Lebih dari 20 tahun	13.910.032.333	*Over 20th years*
Jumlah	119.748.944.094	*Total*

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 19,00, 19,00 dan 19,68.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 30 June 2024, 31 December 2023 are 19.00, 19.00 and 19.68 respectively.

19. LIABILITAS SEWA / ***19. LEASE LIABILITIES***

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

Maturity analysis of lease liabilities is as follows:

	30 Juni/*June* 2024			
	Pembayaran sewa minimum/*Minimum lease payment*	**Bunga/ *Interest***	**Nilai kini/ *Present value***	
Tidak lebih dari satu tahun	18.330.515.230	898.793.568	17.431.721.662	*Not later than one year*
Antara satu dan lima tahun	4.321.486.477	138.029.982	4.183.456.495	*Between one year and five years*
Jumlah	22.652.001.707	1.036.823.550	21.615.178.157	***Total***

19. **LIABILITAS SEWA** (Lanjutan) / *19. **LEASE LIABILITIES** (Continued)*

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut: (Lanjutan) / *Maturity analysis of lease liabilities is as follows: (Continued)*

	31 Desember/*December* 2023			
	Pembayaran sewa minimum/*Minimum lease payment*	**Bunga/ *Interest***	**Nilai kini/ *Present value***	
Tidak lebih dari satu tahun	18.332.974.740	1.397.483.650	16.935.491.090	*Not later than one year*
Antara satu dan lima tahun	12.408.253.370	378.231.574	12.030.021.796	*Between one year and five years*
Jumlah	30.741.228.110	1.775.715.224	28.965.512.886	***Total***

	31 Desember/*December* 2022			
	Pembayaran sewa minimum/*Minimum lease payment*	**Bunga/ *Interest***	**Nilai kini/ *Present value***	
Tidak lebih dari satu tahun	16.188.710.820	1.954.009.426	14.234.701.394	*Not later than one year*
Antara satu dan lima tahun	23.589.947.788	1.206.345.667	22.383.602.121	*Between one year and five years*
Jumlah	39.778.658.608	3.160.355.093	36.618.303.515	***Total***

Jumlah biaya bunga yang dibebankan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan sebagai berikut:

Interest expense changed for the six months period ended 30 June 2024 and 2023 and for the years ended 31 December 2023 and 2022 was allocated as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	**30 Juni/ *June* 2023 (tidak diaudit/ *unaudited*)**	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Beban bunga atas liabilitas sewa	863.766.910	1.239.551.009	2.310.951.804	1.539.627.811	*Interest expense on lease liabilities*

20. **MODAL SAHAM** / *20. **SHARE CAPITAL***

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/*June* 2024			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Nilai nominal/ *Amount***	**%**	***Shareholders***
KB Kookmin Card Corp	181.000.032	181.000.032.000	80.00	*KB Kookmin Card Corp*
PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000	20.00	*PT Finansia Pacifica Raya*
Jumlah	226.250.040	226.250.040.000	100.00	***Total***

	31 Desember/*December* 2023			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Nilai nominal/ *Amount***	**%**	***Shareholders***
KB Kookmin Card Corp	181.000.032	181.000.032.000	80.00	*KB Kookmin Card Corp*
PT Finansia Pacifica Raya	45.250.008	45.250.008.000	20.00	*PT Finansia Pacifica Raya*
Jumlah	226.250.040	226.250.040.000	100.00	***Total***

20. **MODAL SAHAM** (Lanjutan)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

*20. **SHARE CAPITAL** (Continued)*

The composition of the Company's shareholders as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 were as follows: (Continued)

	31 Desember/*December* 2022			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Number of shares***	**Nilai nominal/ *Amount***	**%**	***Shareholders***
KB Kookmin Card Corp	101.000.032	101.000.032.000	80.00	*KB Kookmin Card Corp*
PT Finansia Pacifica Raya	25.250.008	25.250.008.000	20.00	*PT Finansia Pacifica Raya*
Jumlah	126.250.040	126.250.040.000	100.00	***Total***

Berdasarkan Akta Notaris No. 114 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 12 Desember 2023 dan disimpan di dalam sistem administrasi berdasarkan Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.03-0154549, Perusahaan telah menyetujui dan memutuskan untuk:

1. penambahan modal dasar Perusahaan dari sebesar Rp 126.250.040.000 yang terdiri dari 126.250.040 saham biasa menjadi sebesar Rp 226.250.040.000 yang terdiri dari 226.250.040 saham biasa dengan masing-masing saham bernilai per saham Rp 1.000;
2. perubahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan melalui penyetoran modal secara tunai sebesar Rp 100.000.000.000 yang diperoleh dari KB Kookmin Card Corp sebesar Rp 80.000.000.000 dan PT Finansia Pacifica Raya sebesar Rp 20.000.000.000;
3. perubahan susunan modal saham Perusahaan melalui penambahan modal disetor sebanyak 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham yang terbagi atas KB Kookmin Card Corp sebanyak 80.000.000 saham dan PT Finansia Pacifica Raya sebanyak 20.000.000 saham.
4. susunan pemegang saham Perusahaan menjadi sebagai berikut:
   - KB Kookmin Card Corp, selaku pemegang 181.000.032 saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 181.000.032.000;
   - PT Finansia Pacifica Raya, selaku pemegang 45.250.008 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 45.250.008.000.

Based on Notarial Deed No. 114 dated 12 December 2023 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-0077607.AH.01.02.TAHUN 2023 dated 12 December 2023 and stored in the administration system based on the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.03-0154549, the Company has agreed and decided to:

1. *the increase of the Company's authorized capital from amounted to Rp 126,250,040,000 consisting of 126,250,040 shares becomes amounted to Rp 226,250,040,000 consisting of 226,250,040 shares with a nominal value of Rp 1,000 per share;*
2. *the changes of the Company's issued and paid-up capital through cash capital payment amounted to Rp 100,000,000,000 that obtained from KB Kookmin Card Corp amounted to Rp 80,000,000,000 and PT Finansia Pacifica Raya amounted to Rp 20,000,000,000;*
3. *the changes in the composition of the Company's share capital through additional paid-in capital of 100,000,000 shares with a nominal value of Rp 1,000 per share that divided to KB Kookmin Card Corp with 80,000,000 shares and PT Finansia Pacifica Raya with 20,000,000 shares.*
4. *the composition of the Company's shareholders are as follow:*
   - *KB Kookmin Card Corp, as the holder of 181,000,032 shares with a total value of Rp 181,000,032,000;*
   - *PT Finansia Pacifica Raya, as the holder of 45,250,008 shares with a total nominal value of Rp 45,250,008,000.*

21. **TAMBAHAN MODAL DISETOR**

*21. **ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL***

	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Agio saham	286.678.935.571	286.678.935.571	286.678.935.571	*Addtional paid-in capital*
Aset pengampunan pajak (Catatan 17f)	2.207.850.000	2.207.850.000	2.207.850.000	*Tax amnesty assets (Note 17f)*
Jumlah	288.886.785.571	288.886.785.571	288.886.785.571	***Total***

22. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024 tanggal 16 April 2024, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2023 sebesar Rp 91.546.129.267 sebagai berikut:

1) pembagian dividen sebesar Rp 5.203.750.920 kepada pemegang saham secara proporsional:
   - KB Kookmin Card Corp sebesar Rp 4.163.000.736;
   - PT Finansia Pacifica Raya sebesar Rp 1.040.750.184;
2) pembayaran kupon *Perpetual Bonds* Rp 45.534.411.333;
3) sejumlah Rp 20.000.000.000, akan digunakan untuk dialokasikan menjadi dana Cadangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan ("Dana Cadangan"), yang mana total Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar Rp 45.250.008.000 atau sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4) alokasi sebagai saldo laba sebesar Rp 20.807.967.014.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2022 sebesar Rp 158.128.207.170 untuk:
1) pembagian dividen sebesar Rp 25.250.008.000 kepada pemegang saham secara proporsional:
   - KB Kookmin Card Corp sebesar Rp 20.200.006.400;
   - PT Finansia Pacifica Raya sebesar Rp 5.050.001.600;
2) pembayaran kupon *Perpetual Bonds* Rp 32.154.678.000;
3) alokasi sebagai saldo laba sebesar Rp 100.723.521.170.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2021 sebesar Rp 95.454.436.300 untuk:
1) pembagian dividen sebesar Rp 16.412.505.200 kepada pemegang saham secara proporsional:
   - KB Kookmin Card Corp sebesar Rp 13.130.004.160
   - PT Finansia Pacifica Raya sebesar Rp 3.282.501.040;
2) pembayaran kupon *Perpetual Bonds* Rp 13.775.991.076;
3) alokasi sebagai laba ditahan sebesar Rp 65.265.940.025.

Berdasarkan Akta Notaris No. 151 tanggal 19 April 2022 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan memutuskan dan menyetujui untuk penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2021 yang sebelumnya telah disimpan sebagai saldo laba, untuk dialokasikan sebagian menjadi dana cadangan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan ("Dana Cadangan") yang mana alokasi dana cadangan yang disetujui sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yaitu sebesar Rp 25.250.008.000.

22. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

Based on Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders Year 2024 dated 16 April 2024, all of the shareholders of the Company decided and agreed to the use of net profit in 2023 amounted to Rp 91,546,129,267 for:

1) distributed as dividends amounted to Rp 5,203,750,920 to each shareholder proportionally:
   - KB Kookmin Card Corp amounted to Rp 4,163,000,736;
   - PT Finansia Pacifica Raya amounted to Rp 1,040,750,184;
2) payment of Perpetual Bonds coupon amounted to Rp 45,534,411,333;
3) an amount of Rp 20,000,000,000 shall be used to be allocated as reserved as required under Article 70 of the Company Law and Article 20 Company's Article of Association ("Reserved Fund"), in which the total of Reserved Fund of the Company becomes Rp 45,250,008,000 or amounting to 20% of the issued and paid up capital in the Company.
4) allocated as retained earnings amounted to Rp 20,807,967,014.

Based on Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders Year 2023 dated 31 March 2023, all of the shareholders of the Company decided and agreed to the use of net profit in 2022 amounted to Rp 158,128,207,170 for:
1) distributed as dividends amounted to Rp 25,250,008,000 to each shareholder proportionally:
   - KB Kookmin Card Corp amounted to Rp 20,200,006,400;
   - PT Finansia Pacifica Raya amounted to Rp 5,050,001,600;
2) payment of Perpetual Bonds coupon amounted to Rp 32,154,678,000;
3) allocated as retained earnings amounted to Rp 100,723,521,170.

Based on Circular Resolution of Shareholders in Lieu of Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 dated 21 March 2022, all of the shareholders of the Company decided and agreed to the use of net profit in 2021 amounted to Rp 95,454,436,300 for:
1) distributed as dividends amounted to Rp 16,412,505,200 to each shareholder proportionally:
   - KB Kookmin Card Corp amounted to Rp 13,130,004,160
   - PT Finansia Pacifica Raya amounted to Rp 3,282,501,040;
2) payment of Perpetual Bonds coupon amounted to Rp 13,775,991,076;
3) allocated as retained earnings amounted to Rp 65,265,940,025.

Based on Notarial Deed No. 151 dated 19 April 2022 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, all of the shareholders of the Company decided and agreed to the use of the Company's net profits for the financial year 2021 which had previously been allocated as retained earnings, to be partially allocated as reserved as required under Article 70 of the Companies Law and Article 20 of the Company's Articles of Association ("Reserved Fund") in which allocation of reserved fund being approved is amounting to 20% of the issued and paid-up capital in the Company, in equivalent to Rp 25,250,008,000.

23. OBLIGASI PERPETUAL YANG DAPAT DI KONVERSIKAN

Pada tanggal 27 Juli 2021 dan 30 November 2023, Perusahaan menerbitkan obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (PCB) kepada KB Kookmin Card Corp dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 435.000.000.000 dan Rp 165.000.000.000 yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas dengan fitur sebagai berikut:

a. Opsi penebusan

Penerbit tidak berkewajiban untuk menebus jumlah pokok PCB namun berhak atas kebijakannya sendiri dan tunduk pada peraturan terkait termasuk namun tidak terbatas pada memperoleh persetujuan dari OJK jika menebus PCB sebelum tanggal penebusan, sebagaimana berlaku.

b. Opsi konversi

Konversi nilai dari PCB menjadi saham biasa (jika di konversi) adalah sebesar maksimal 600.000.000 lembar saham. Harga konversi ditetapkan Rp 1.000 per lembar saham. Pada waktu konversi, pemegang saham kepentingan minoritas akan melakukan setoran modal sehingga struktur permodalan perusahaan tidak melebihi batas maksimum kepemilikan modal asing yang diperbolehkan oleh OJK. Jika dilakukan konversi parsial, porsi yang tidak dikonversi bisa dibayar penuh menggunakan dana perusahaan atau diteruskan sampai kepentingan minoritas memiliki dana yang cukup untuk ikut dalam penerbitan saham. Kedua opsi tersebut tersedia.

c. Kelangsungan

Tenor dari PCB ini ditetapkan "selamanya" atau 30 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang lagi untuk 30 tahun kedepan (*embedded rollover*), dimana tidak ada batas untuk jumlah perpanjangan.

d. Kupon *Perpetual Bonds*

Pembayaran kupon *perpetual bonds* akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 6 bulan setelah selesainya laporan keuangan tahunan audit sesuai dengan kemampuan keuangan serta diskresi Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Catatan 22).

Jumlah obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (PCB) Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

23. PERPETUAL CONVERTIBLE BONDS

On 27 July 2021 and 30 November 2023, the Company issued perpetual convertible bound ("PCB") to KB Kookmin Card Corp with a nominal value of Rp 435,000,000,000 and Rp 165,000,000,000, respectively, which has been classified as on equity instrument with the following features:

a. Redemption option

The issuer is not obliged to redeem the principal amount of the PCB but would have the right, at its discretion and subject to relevant regulations including but not limited to obtaining the approval from OJK if redeeming the PCB prior to the redemption date, as applicable.

b. Convertion option

The conversion value of the PCB into ordinary shares (if exercised) is a maximum of 600,000,000 shares. The conversion price is fixed at Rp 1,000 per share. At the time of conversion, the minority interest shareholder will make a capital deposit so that the Company's capital structure does not exceed the maximum foreign capital ownership allowed by OJK. In the event of partial conversion, the remaining unconverted portion can be settled (paid in full) using Company's fund or be carried over until minority interest have enough fund to bid in the share issuance. Both options are available.

c. Perpetuity

The tenor of the PCB is set to be perpetual or 30 years since the issuance date, and extendable for another 30 years (embedded rollover), whereby there is no limitation on the number of extensions.

d. Perpetual Bonds coupon

Coupon payments for perpetual bonds will be made annually within 6 months after the completion of the annual audited financial statements in accordance with the Company's financial capacity and discretion based on applicable regulations (Note 22).

The amount of convertible perpetual bonds ("PCB") as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (PCB)	600.000.000.000	600.000.000.000	435.000.000.000	*Convertible perpetual bonds ("PCB")*

24. PEMBIAYAAN KONSUMEN / *24. CONSUMER FINANCING*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 *(Tidak diaudit/ Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga					***Third parties***
Pendapatan piutang pembiayaan	823.409.733.423	1.020.650.176.722	1.859.782.047.518	1.835.106.662.487	*Financing receivables income*
Pendapatan penalti	25.702.829.871	39.416.982.335	99.278.651.165	110.908.974.086	*Penalty income*
Pendapatan administrasi	114.121.197.356	77.067.216.279	195.695.037.061	97.695.051.403	*Administration income*
	963.233.760.650	1.137.134.375.336	2.154.755.735.744	2.043.710.687.976	
Pihak berelasi (Catatan 33)					***Related party*** *(Note 33)*
Pendapatan piutang pembiayaan	4.348.274.825	8.362.190.178	14.989.865.916	11.474.399.972	*Financing receivables income*
Jumlah	967.582.035.475	1.145.496.565.514	2.169.745.601.660	2.055.185.087.948	***Total***

25. ANJAK PIUTANG / *25. FACTORING*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 *(Tidak diaudit/ Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan anjak piutang	29.372.815.621	19.129.864.966	44.577.129.552	25.188.812.539	*Factoring income*
Pendapatan pinalti	2.535.162.650	96.637.700	270.216.750	26.022.200	*Penalty income*
Jumlah	31.907.978.271	19.226.502.666	44.847.346.302	25.214.834.739	***Total***

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *26. OTHER REVENUES*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 *(Tidak diaudit/ Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga					***Third parties***
Bunga giro dan deposito	1.240.111.970	3.372.546.591	9.483.622.913	4.308.259.028	*Interest income from current account and time deposit*
Laba atas penjualan aset tetap (Catatan 10)	69.654.117	82.343.651	3.547.323.563	946.091.459	*Gain on sale of property and equipment (Note 10)*
Pencadangan keuntungan nilai atas penurunan kas kas dan bank (Catatan 3)	-	-	141.253.607	263.966.805	*Allowance for Impairment of cash and cash equivalent (Note 3)*
Keuntungan atas selisih kurs	-	-	32.778.073	-	*Gain on foreign exchange*
Pembalikan cadangan limit belum terpakai	403.352.920	3.138.061.406	3.048.889.840	-	*Reversal allowance for limit unused credit limit*
Lain-lain	35.571.792.609	20.677.696.517	50.963.627.728	10.106.266.635	*Others*
	37.284.911.616	27.270.648.165	67.217.495.724	15.624.583.927	
Pihak berelasi (Catatan 33)					***Related party*** *(Note 33)*
Bunga giro dan deposito	181.025.046	205.100.265	389.008.285	933.470.452	*Interest income from current accounts and time deposit*
Jumlah	37.465.936.662	27.475.748.430	67.606.504.009	16.558.054.379	***Total***

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan dari penyimpanan BPKB dan pengurusan STNK konsumen.

Other income represents income from BPKB storage and consumer STNK processing.

27. BEBAN KEPEGAWAIAN / *27. PERSONNEL EXPENSES*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 *(*Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Gaji, bonus dan tunjangan	285.867.257.757	286.023.124.621	611.961.192.164	557.493.452.914	*Salaries, bonuses and allowances*
Imbalan pasca-kerja (Catatan 18)	12.076.498.854	9.052.994.262	21.944.914.598	18.714.505.809	*Post-employment benefits (Note 18)*
Jumlah	297.943.756.611	295.076.118.883	633.906.106.762	576.207.958.723	***Total***

28. BEBAN KEUANGAN / *28. FINANCE COST*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 *(*Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak ketiga					***Third parties***
Beban bunga pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan	240.837.703.819	218.345.547.704	461.553.079.786	320.247.627.557	*Interest expense on fund borrowings and securities issued*
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 19)	863.766.910	1.239.551.009	2.310.951.804	1.539.627.811	*Interest expense on lease liabilities (Note 19)*
Pihak berelasi (Catatan 33)					***Related parties*** *(Note 33)*
Beban bunga pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan	20.020.284.822	18.878.786.789	40.086.236.886	33.272.927.391	*Interest expense on fund Borrowings and securitites issued*
Jumlah	261.721.755.551	238.463.885.502	503.950.268.476	355.060.182.759	***Total***

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 *(*Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	*31 Desember/ December* 2022	
Pihak ketiga					***Third parties***
Penagihan	30.436.530.786	36.439.318.687	74.921.288.008	51.828.966.970	*Collection fee*
Perbaikan dan pemeliharaan	25.335.955.211	18.578.689.391	41.065.577.551	25.485.647.261	*Repair and maintance*
Telekomunikasi dan pos	12.964.781.916	13.470.147.344	29.756.440.962	28.836.631.707	*Telecommunication and postage*
Perlengkapan kantor	11.068.776.850	15.379.952.599	27.219.459.265	27.727.323.353	*Office supplies*
Pendidikan dan pelatihan	8.504.931.838	3.065.330.468	16.434.630.932	6.543.421.579	*Education and training*
Perjalanan dinas	7.379.166.153	7.806.043.369	16.712.259.565	13.391.269.840	*Traveling*
Administrasi bank	6.316.681.481	8.899.093.349	16.895.427.889	17.074.310.377	*Bank administration*
Jasa keamanan dan kebersihan	4.697.047.688	4.949.639.072	9.765.192.061	9.895.834.351	*Security and cleaning service*
Listrik dan air	3.825.255.063	4.413.108.111	9.262.985.284	8.650.795.707	*Utilities*
Sewa	3.510.702.443	3.852.379.540	7.305.574.565	7.935.302.171	*Rental*
Promosi	3.239.814.757	12.401.117.837	19.273.390.266	15.906.458.962	*Promotions*
Jasa professional	1.803.770.079	2.117.808.271	4.020.723.037	4.038.328.933	*Professional fees*
Perjamuan	1.078.528.263	1.411.712.388	2.597.259.426	2.811.241.320	*Entertainment*
Asuransi	1.009.073.805	993.231.178	2.033.465.520	1.470.516.239	*Insurance*
Perijinan	163.542.396	264.175.057	372.800.146	340.992.714	*Licenses*
Lain-lain	4.755.576.573	9.379.014.120	18.225.960.253	20.220.593.277	*Others*
Pihak berelasi (Catatan 33)					***Related party*** *(Notes 33)*
Administrasi bank	4.211.595.753	7.604.732.329	14.304.391.826	16.923.032.420	*Bank administration*
Jumlah	130.301.731.055	151.025.493.110	310.166.826.556	259.080.667.181	***Total***

30. BEBAN LAIN-LAIN / *30. OTHER EXPENSES*

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Penurunan nilai atas piutang dalam proses proses penyelesaian	7.641.308.975	4.535.968.701	27.082.313.120	2.111.814.352	*Impairment of receivables in the settlement process*
Cadangan limit belum terpakai	-	-	-	3.739.444.222	*Allowance for limit unused credit limit*
Kerugian atas selisih kurs	-	-	-	745.644.491	*Loss on foreign exchange*
Pencadangan penurunan nilai atas penurunan penurunan kas dan bank (Catatan 3)	158.625.783	1.987.048.308	-	-	*Allowance for impairment of cash in banks (Note 3)*
Beban lain-lain	148.217.762	267.129.724	207.222.144	277.738.545	*Other expenses*
Jumlah	7.948.152.520	6.790.146.733	27.289.535.264	6.874.641.610	***Total***

31. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *31. ACCRUED EXPENSES*

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pihak Ketiga				***Third Parties***
Beban bunga dan surat berharga	57.913.321.817	65.191.628.029	86.237.000.177	*Interest Expenses and securities*
Gaji dan tunjangan	3.802.929.252	17.204.971.047	20.223.399.722	*Salaries and allowances*
Sewa	3.725.487.095	2.684.705.500	3.423.334.614	*Rental*
Perbaikan dan pemeliharaan	3.131.080.351	4.426.761.689	1.978.644.901	*Repair and maintenance*
Telekomunikasi dan pos	2.110.140.875	4.006.683.102	2.356.053.062	*Telecommunication and postage*
Perlengkapan kantor	1.394.486.986	1.051.442.261	1.082.047.483	*Office supplies*
Jasa profesional	1.015.772.060	1.335.272.500	1.357.098.114	*Professional fees*
Lain-lain	8.349.999.764	9.401.706.011	14.149.610.710	*Others*
	81.443.218.200	105.303.170.139	130.807.188.783	
Pihak berelasi (Catatan 33)				***Related Party*** *(Notes 33)*
Corporate Guarantee	6.496.671.917	3.910.076.164	7.383.704.110	*Corporate Guarantee*
Jumlah	87.939.890.117	109.213.246.303	138.190.892.893	***Total***

32. INFORMASI ARUS KAS / *32. CASH FLOW INFORMATION*

a. **Transaksi non-kas** / *a. **Non-cash transaction***

Tabel dibawah ini menunjukkan transaksi non-kas Perusahaan selama periode berjalan sebagai berikut:

The table shows the Company's non-cash transactions during the period is as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Aktivitas investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:				*Investing activities not affecting cash flows:*
Perolehan atas aset hak-guna dari restorasi liabilitas	1.733.719.000	3.595.059.499	2.620.173.000	*Acquisitions of right-of-use assets from restoration liabilities*

32. **INFORMASI ARUS KAS** (Lanjutan) / *32. **CASH FLOW INFORMATION** (Continued)*

b. **Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan** / *b. **Reconciliation of liabilities arising from financing activities***

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut: / *Changes in liabilities arise from financing activities are as follows:*

	30 Juni/*June* 2024					
			Pergerakan non-kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Arus kas/ Cash flows*	Pergerakan valuta asing/ *Movement in foreign exchange*	Pergerakan beban transaksi dan lain-lain/ *Changes in transaction cost and other*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman yang diterima	5.588.833.273.490	256.442.280.809	-	1.402.711.237	5.846.678.265.536	*Funds borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.307.358.888.360	-	-	2.780.717.228	1.310.139.605.588	*Securities issued*
Liabilitas sewa	28.965.512.886	(9.294.685.757)	-	1.944.351.028	21.615.178.157	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	6.925.157.674.736	247.147.595.052	-	6.127.779.493	7.178.433.049.281	***Total liabilities from financing activities***

	30 Juni/*June* 2023					
			Pergerakan non-kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Arus kas/ Cash flows*	Pergerakan valuta asing/ *Movement in foreign exchange*	Pergerakan beban transaksi dan lain-lain/ *Changes in transaction cost and other*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman yang diterima	5.272.818.454.858	584.747.183.336	-	3.994.908.608	5.861.560.546.802	*Funds borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	993.627.928.646	1.000.000.000.000	-	(2.943.498.825)	1.990.684.429.821	*Securities issued*
Liabilitas sewa	36.618.303.515	(9.015.422.106)	-	6.019.115.833	33.621.997.242	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	6.303.064.687.019	1.575.731.761.230	-	7.070.525.616	7.885.866.973.865	***Total liabilities from financing activities***

	31 Desember/*December* 2023					
			Pergerakan non-kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	*Arus kas/ Cash flows*	Pergerakan valuta asing/ *Movement in foreign exchange*	Pergerakan beban transaksi dan lain-lain/ *Changes in transaction cost and other*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman yang diterima	5.272.818.454.858	313.181.581.625	-	2.833.237.007	5.588.833.273.490	*Funds borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	993.627.928.646	313.615.000.000	-	115.959.714	1.307.358.888.360	*Securities issued*
Liabilitas sewa	36.618.303.515	(18.257.561.857)	-	10.604.771.228	28.965.512.886	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	6.303.064.687.019	608.539.019.768	-	13.553.967.949	6.925.157.674.736	***Total liabilities from financing activities***

32. **INFORMASI ARUS KAS** (Lanjutan) / *32. **CASH FLOW INFORMATION** (Continued)*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan (Lanjutan) / ***b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities** (Continued)*

	31 Desember/*December* 2022					
			Pergerakan non-kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	***Arus kas/ Cash flows***	**Pergerakan valuta asing/ *Movement in foreign exchange***	**Pergerakan beban transaksi dan lain-lain/ *Changes in transaction cost and other***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Pinjaman yang diterima	4.327.988.078.199	944.682.279.393	-	148.097.266	5.272.818.454.858	*Funds borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	-	1.000.000.000.000	-	(6.372.071.354)	993.627.928.646	*Securities issued*
Liabilitas sewa	10.349.217.046	(14.250.781.002)	-	32.716.739.559	36.618.303.515	*Lease liabilities*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	4.338.337.295.245	1.930.431.498.391	-	26.492.765.471	6.303.064.687.019	***Total liabilities from financing activities***

33. **SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI** / *33. **RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS***

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan dengan pihak-pihak berelasi.

In conducting its business, the Company entered into certain business and financial transactions with its related parties.

Sifat hubungan dan transaksi Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	**Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship***	**Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction***
KB Kookmin Card Corp	Pemegang saham/ *The shareholder*	Biaya yang masih harus dibayar, biaya umum dan administrasi, obligasi perpetual yang dapat dikonversikan/ *Accrued expense, general and administrative expense, perpetual convertible bonds*
PT Finansia Pacifica Raya	Pemegang saham/ *The shareholder*	Aset hak-guna/ *Right-of-use assets*
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	Perusahaan asosiasi/ *Association Company's*	Piutang lain-lain, utang lain-lain, dan pendapatan pembiayaan konsumen/*Other receivable, other payable, and financing receivables income*
PT Bank KB Bukopin Tbk	Perusahaan asosiasi/ *Association Company's*	Kas dan setara kas, pinjaman yang diterima, beban keuangan, pendapatan lain-lain, dan investasi jangka panjang/*Cash and cash equivalent, fund borrowings, financial charges, other revenue and long term-investment*
PT Prima Sentra Abadi	Pemegang saham yang sama/ *The same shareholders*	Utang lain-lain/ *Other payables*
PT Siwarga Indo Media	Pemegang saham yang sama/ *The same shareholders*	Utang lain-lain/ *Other payables*
Kookmin Bank, Hong kong Branch	Perusahaan asosiasi/ *Association Company's*	Biaya umum dan administrasi/ *General and administrative expense*
PT KB Valbury Sekuritas	Perusahaan asosiasi/ *Association Company's*	Beban keuangan/ *Finance charges*
PT KB Data System Indonesia	Perusahaan asosiasi/ *Association Company's*	Aset takberwujud/ *Intangible asset*
Personel manajemen kunci/ *Key management personnel*	Direktur, komisaris dan pejabat eksekutif/ *Directors, commissioners and executive*	Beban kepegawaian/ *Personnel expenses*

33. **SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI** (Lanjutan) / *33. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (Continued)*

Saldo-saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The significant balances with related parties as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Kas dan setara kas (Catatan 3)				***Cash and cash equivalent*** *(Note 3)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	10.070.721.342	10.035.043.518	10.091.977.786	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Aset hak-guna (Catatan 9)				***Right-of-use assets*** *(Note 9)*
PT Finansia Pacifica Raya	28.267.609.989	32.301.817.487	13.491.324.000	*PT Finansia Pacifica Raya*
Piutang lain-lain (Catatan 8)				***Other receivables*** *(Note 8)*
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	1.505.907.397	2.567.709.480	3.554.301.125	*PT Kookmin Best Insurance Indonesia*
Aset takberwujud (Catatan 11)				***Intangible asset*** *(Note 11)*
PT KB Data Systems Indonesia	432.900.000	129.870.000	-	*PT KB Data Systems Indonesia*
Investasi jangka panjang (Catatan 12)				***Long term investment*** *(Note 12)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	27.000.000.000	43.200.000.000	-	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Jumlah	67.277.138.728	88.234.440.485	27.137.602.911	***Total***
Persentase terhadap jumlah aset	0,77%	1,02%	0,35%	***Percentage to total assets***
Pinjaman yang diterima (Catatan 14)				***Fund borrowings*** *(Note 14)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	500.000.000.000	500.000.000.000	250.000.000.000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Utang lain-lain (Catatan 16)				***Other payable*** *(Note 16)*
PT Prima Sentra Abadi	3.261.107.564	4.123.010.377	3.059.729.659	*PT Prima Sentra Abadi*
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	3.219.393.504	13.506.959.899	3.127.524.754	*PT Kookmin Best Insurance Indonesia*
Beban yang masih harus dibayar				***Accrued expenses***
KB Kookmin Card Corp	6.496.671.917	3.910.076.164	7.383.704.110	*KB Kookmin Card Corp*
Jumlah	512.977.172.985	521.540.046.440	263.570.958.523	***Total***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	6,87%	7,19%	3,95%	***Percentage to total liabilities***
Obligasi perpetual yang dapat dikonversikan (Catatan 23)				***Perpetual convertible bonds*** *(Note 23)*
KB Kookmin Card Corp	600.000.000.000	600.000.000.000	435.000.000.000	*KB Kookmin Card Corp*
Persentase terhadap jumlah ekuitas	45,92%	43,74%	39,80%	***Percentage to total equity***

	30 Juni/ *June* 2024	30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited)*	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Pendapatan pembiayan konsumen (Catatan 24)					***Financing receivables income*** *(Note 24)*
PT Kookmin Best Insurance Indonesia	4.348.274.825	8.362.190.178	14.989.865.916	11.474.399.972	*PT Kookmin Best Insurance Indonesia*
Pendapatan lain - lain (Catatan 26)					***Other revenue*** *(Note 26)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	181.025.046	205.100.265	389.008.285	933.470.452	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
Jumlah	4.529.299.871	8.567.290.443	15.378.874.201	12.407.870.424	***Total***
Persentase terhadap jumlah pendapatan	0,44%	0,72%	0,67%	0,59%	***Percentage to total revenue***

33. **SALDO DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI** (Lanjutan)

Saldo–saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 dan adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

*33. **RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS** (Continued)*

The significant balances with related parties as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 are as follows: (Continued)

	30 Juni/ *June* 2024	**30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)**	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Beban keuangan (Catatan 28)					***Finance cost** (Note 28)*
PT Bank KB Bukopin Tbk	19.745.347.222	18.874.305.555	39.805.555.553	5.342.638.884	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT KB Valbury Sekuritas	274.937.600	4.481.234	280.681.333	-	*PT KB Valbury Sekuritas*
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)					***General and administrative expense** (Note 29)*
KB Kookmin Card Corp	2.586.595.753	5.817.232.329	9.727.308.493	15.893.865.753	*KB Kookmin Card Corp*
Kookmin Bank, Hong Kong *Branch*	1.625.000.000	1.787.500.000	4.577.083.333	1.029.166.667	*Kookmin Bank, Hong Kong Branch*
Jumlah	24.231.880.575	26.483.519.118	54.390.628.712	22.265.671.304	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban	2,09%	2,38%	2,51%	1,18%	***Percentage to total expenses***

Beban gaji, bonus dan tunjangan yang diberikan kepada manajemen perusahaan (Catatan 1c).

Salaries, bonuses and benefits provided to the Company management (Note 1c).

	30 Juni/ *June* 2024	**30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)**	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Kompensasi personel manajemen kunci					***Compensation of key management personnel***
Gaji, bonus dan tunjangan (Catatan 1c)	34.808.031.305	35.060.670.023	70.282.672.890	58.539.248.112	*Salaries, bonuses and benefits (Note 1c)*
Imbalan kerja jangka pendek (Catatan 1c)	4.399.614.524	10.230.128.287	10.230.128.287	4.930.905.271	*Short term employee benefits (Note 1c)*
Jumlah	39.207.645.829	45.290.798.310	80.512.801.177	63.470.153.383	***Total***
Persentase terhadap jumlah beban	3,73%	4,08%	3,71%	3,35%	***Percentage to total expenses***

34. **PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN**

- **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**

  Pada tanggal 13 Desember 2018, Perusahaan dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya disebut "BTPN") telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama yang bersifat "*revolving*" untuk pembiayaan *durable goods*, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 500.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari penandatanganan perjanjian tersebut.

*34. **SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS***

- ***PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk***

  On 13 December 2018, the Company and PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (known as "BTPN") have signed a "revolving" Joint Financing cooperation agreement for durable goods, two wheelers and four wheelers vehicles or more, with the maximum financing limit amounted to Rp 500,000,000,000. The maturity date of this credit service agreement will be 36 (thirty six) months from the signing of the agreement.

34. **PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN** (Lanjutan)

- **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk** (Lanjutan)

Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perusahaan dan BTPN telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama No: PKS-JFNo.024/BSBSC/X/2022 yang bersifat "*revolving*" untuk pembiayaan *durable goods*, kendaraan roda dua, dan kendaraan roda empat atau lebih dengan batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 300.000.000.000. Jangka waktu penarikan fasilitas adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dari penandatanganan perjanjian tersebut.

Pada tanggal 9 Maret 2023, Perusahaan dan BTPN telah menandatangani Addendum I Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk menambah ketentuan Credit Limit Determination.

Pada tanggal 11 Agustus 2023, Perusahaan dan BTPN telah menandatangani Addendum II Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama untuk menambah batas maksimum pembiayaan menjadi sebesar Rp 600.000.000.000 dan perubahan kewajiban.

Pada tanggal 1 November 2023, Perusahaan dan BTPN telah menandatangani Addendum III Perjanjian Kerja Sama Fasilitas Pembiayaan Bersama terkait dengan perubahan kewajiban.

- **PT Bank Permata Tbk**

Pada tanggal 5 Maret 2009, Perusahaan dan PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) mengadakan kerjasama No: 015/BP/TB/III/09 dalam penerimaan pembayaran tagihan konsumen melalui jaringan pelayanan Bank Permata. Perjanjian tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan diperpanjang setiap tahunnya.

- **International Finance Corporation**

Pada tanggal 28 Maret 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Investment Number 48819 dari International Finance Corporation dengan plafon USD 100.000.000 dengan suku bunga 2,0% per tahun. Perjanjian tersebut yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2025.

- **PT Sinar Digital Terdepan**

Pada tanggal 12 Juli 2019, Perusahaan dan PT Sinar Digital Terdepan mengadakan kerjasama No: 1153/XEN-SA/VII/2019 dalam hal penerimaan pembayaran tagihan konsumen. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dimana akan secara otomatis diperpanjang dalam 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu awal untuk jangka waktu tambahan setiap 1 tahun dan berlaku selanjutnya kecuali salah satu pihak mengakhiri dengan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya.

*34. **SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (Continued)*

- ***PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk** (Continued)*

On 28 October 2022, the Company and BTPN have signed a "revolving" Joint Financing cooperation agreement No: PKS-JF No.024/BSBSC/X/2022 for durable goods, two wheeler and four wheeler vehicles or more, with the maximum financing limit amounted to Rp 300,000,000,000. The maturity date of this credit service agreement will be 36 (thirty six) months from the signing of the agreement.

On 9 March 2023, the Company and BTPN have signed Addendum I Joint Financing Cooperation Agreement to change the Credit Limit Determination.

On 11 August 2023, the Company and BTPN have signed Addendum II Joint Financing Cooperation Agreement to increase the maximum financing limit amounted to Rp 600,000,000,000 and change the covenants.

On 1 November 2023, the Company and BTPN have signed Addendum III Joint Financing Cooperation Agreement to change the covenants.

- ***PT Bank Permata Tbk***

On 5 March 2009, the Company and PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) have entered in cooperation No: 015/BP/TB/III/09for receiving installment payments through Bank Permata's services network. This agreement is valid for 2 (two) years and will extended yearly.

- ***International Finance Corporation***

On 28 March 2024, the Company signed a Investment Credit Agreement Number 48819 from International Finance Corporation with plafond of USD 100,000,000 with an interest rate of 2.0% per year. The agreement will be mature on 30 June 2025.

- ***PT Sinar Digital Terdepan***

On 12 July 2019, the Company and PT Sinar Digital Terdepan entered into a collaboration No: 1153/XEN-SA/VII/2019 in consumer bill payment services. The agreement is valid for a period of 1 year which will be automatically renewed within 30 days prior to the expiration of the initial term for an additional term every 1 year and apply hereinafter unless one of the parties end up with a written notice 60 days in advance.

34. **PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN** (Lanjutan)

- **PT Sarana Yukti Bandhana**

  Perusahaan dan PT Sarana Yukti Bandhana (SYB) telah menjalin kerjasama sejak 2007 tentang Implementasi Sistem *Host to Host* Dalam Pengelolaan Data Tagihan Secara *Online* dimana telah mengalami beberapa perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Di dalam perjanjian No: 02/PAYP/KBFMF-SYB/VI/2021, disepakati bahwa SYB akan berperan sebagai *Collecting Agent Aggregator* sehingga pembayaran tagihan nasabah Perusahaan dapat dilakukan oleh Mitra SYB dan/atau dilokasi *payment point* yang dikelola oleh Mitra SYB. Pada perubahan perjanjian terakhir, Perusahaan dan SYB sepakat menambah mitra SYB untuk *payment point* menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI), PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI), PT Pos Indonesia (Pos Indonesia), PT Tokopedia (Tokopedia), PT Shopee Internasional Indonesia (Shopee), PT Espay Debit Indonesia (DANA) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTagihan). Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya.

- **PT Inovasi Daya Solusi**

  Pada tanggal 3 November 2022, Perusahaan dan PT Inovasi Daya Solusi ("IDS") telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama *Platform Service* Setorku tentang Implementasi Layanan *Payment Point* dan Layanan Setorku dimana telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 31 Januari 2024. Di dalam perjanjian No: KBFMF/RPKS/ASR/2022/09 /005, disepakati bahwa IDS akan berperan sebagai *Collecting Agent Aggregator* sehingga pembayaran tagihan nasabah Perusahaan dapat dilakukan oleh Mitra IDS dan/atau dilokasi *payment point* yang dikelola oleh Mitra IDS. Pada perubahan perjanjian terakhir, Perusahaan dan IDS sepakat mengubah ketentuan layanan Payment Point dalam daftar produk/layanan & biaya transaksi. Mitra IDS untuk *payment point* adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan PT Sumber Indah Lestari (DanDan). Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

- **PT Mitra Sentral Terpadu**

  Pada tanggal 8 November 2021, Perusahaan dan PT Mitra Sentral Terpadu ("MST") telah menandatangani Penerimaan Transaksi Pembayaran Produk di *Collecting Agent* No. 03/PAYP/KBFMF-MST/XI/2021 tentang Implementasi layanan transaksi pembayaran produk secara langsung untuk nasabah serta layanan jasa di *Channel Delivery* milik *Collecting Agent* dimana telah mengalami beberapa perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal 12 Desember 2023. Pada perubahan perjanjian terakhir No: 252/PKS/MST-KP/XI/2021, Perusahaan dan MST sepakat mengubah ketentuan Daftar *Biller* dan/atau *Merchant* serta biaya transaksi. Mitra MST sebagai *Collecting Agent* adalah PT lndomarco Prismatama, PT Inti Dunia Sukses, PT Inti Cakrawala Citra, PT Lion Super Indo. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

*34. **SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (Continued)*

- ***PT Sarana Yukti Bandhana***

  The Company and PT Sarana Yukti Bandhana ("SYB") have established cooperaton since 2007 for Host to Host system implementation in managing online billing data, the latest amendment on 30 June 2021. In the agreement stated that, SYB will be act as Collecting Agent Aggregator thus the Company customer billing payment can be done by SYB partner and/or in payment point which manage by SYB. In the latest amendment No: 02/PAYP/KBFMF-SYB/VI/2021, The company and SYB agreed to add SYB partners for payment points to become PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank CIMB Niaga), PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI), PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI), PT Pos Indonesia (Pos Indonesia), PT Tokopedia (Tokopedia), PT Shopee Internasional Indonesia (Shopee), PT Espay Debit Indonesia (DANA) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTagihan). The agreement is valid for a period of 1 (one) year and can be extended for a next period of 2 (two) years.

- ***PT Inovasi Daya Solusi***

  On 3 November 2022, the Company and PT Inovasi Daya Solusi ("IDS") have signed a Setorku Service Platform Cooperation Agreement for Implementation of Payment Point Services and Setorku Services, the latest amendment on 31 January 2024. In the agreement No: KBFMF/RPKS/ASR/2022/09 /005 stated that, IDS will be act as Collecting Agent Aggregator thus the Company customer billing payment can be done by IDS partner and/or in payment point which manage by IDS. In the latest amendment, the Company and IDS agreed to change the terms of Payment Point services in the list of products/services & transaction fees. IDS partner for payment point are PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart), PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) dan PT Sumber Indah Lestari (DanDan). The agreement is valid for a period of 2 (two) years and can be extended for a next period of 1 (one) year.

- ***PT Mitra Sentral Terpadu***

  On 8 November 2021, the Company and PT Mitra Sentral Terpadu ("MST") have signed Acceptance of Product Payment Transactions at Collecting Agent No. 03/PAYP/KBFMF-MST/XI/2021 for Implementation of direct product payment transaction services for customers as well as services in the Delivery Channel owned by Collecting Agent, the latest amendment on 12 December 2023. In the last amendment to the agreement No: 252/PKS/MST-KP/XI/2021, the Company and MST agreed to change the provisions of the Biller List and/or Merchants and transaction fees. MST's partners as Collecting Agent are PT lndomarco Prismatama, PT Inti Dunia Sukses, PT Inti Cakrawala Citra, PT Lion Super Indo. The agreement is valid for a period of 2 (two) years and can be extended for a next period of 1 (one) year.

34. **PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN** (Lanjutan)

- **PT Ayopop Teknologi Indonesia**

  Pada tanggal 12 Desember 2023, Perusahaan dan PT Ayopop Teknologi Indonesia ("ATI") telah menandatangani Perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Layanan *Direct Debit* Penerimaan Transaksi Pembayaran Produk di *Collecting Agent* No. ATI : PKS12023 I 121008 dimana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir Perjanjian No: KBFMF/PKS/ASN2023/11/052 pada tanggal 1 April 2024. ATI akan menyediakan layanan *Direct Debit* melalu API kepada pelanggan untuk diimplementasi oleh Pelanggan dan disediakan kepada pengguna akhir dan atas penyediaan layanan *Direct Debit*. Salah satu mitra API sebagai aggregator untuk Direct Debit melalui Kreditplus Mobile (KPM) milik Perseroan. Perjanjian tersebut diperpanjang secara otomatis untuk setiap periode I (satu) tahun berikutnya secara berturut-turut.

- **Kookmin Bank, Hong Kong Branch**

  Pada tanggal 6 September 2022, Perusahaan dan Kookmin Bank, Hong Kong *Branch* telah menandatangani Perjanjian Jaminan *(Bank Guarantee)* senilai Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Perjanjian fasilitas ini sudah berakhir dan tidak diperpanjang.

  Pada tanggal 8 September 2023, Perusahaan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan *(Bank Guarantee)* senilai Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Perjanjian tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 5 September 2025.

- **KB Kookmin Card Corp**

  Pada tanggal 28 Juli 2020, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp telah menandatangani Perjanjian Jaminan untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

  Pada tanggal 25 Februari 2021, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Pertama Perjanjian Jaminan, dimana KB Kookmin Card Corp akan menjamin pemberi pinjaman bahwa Perusahaan akan melakukan kewajiban saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman. Batas maksimun kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 405.000.000.000 dan jangka waktu jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2026.

*34. **SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (Continued)*

- ***PT Ayopop Teknologi Indonesia***

  On 12 December 2023, the Company and PT Ayopop Teknologi Indonesia ("ATI") have signed a cooperation agreement for the Implementation of Direct Debit Services for Receiving Product Payment Transactions at Collecting Agent No. ATI : PKS12023 I 121008, the latest amendment to the agreement No: KBFMF/PKS/ASN2023/11/052 on 1 April 2024. ATI will provide Direct Debit services through API to customers to be implemented by Customers and provided to end users and for the provision of Direct Debit services. One of the API partners as an aggregator for Direct Debit through the Company's Kreditplus Mobile (KPM). This agreement is automatically renewed for each subsequent consecutive I (one) year period.

- **Kookmin Bank, Hong Kong Branch**

  On 6 September 2022, the Company and Kookmin Bank, Hong Kong Branch have signed a Bank Guarantee Facility Agreement amounting to Rp 800,000,000,000 (eight hundred billion Rupiah) to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement. This facility agreement has ended and has not been extended.

  On 8 September 2023, the Company and Kookmin Bank, Hong Kong Branch have signed a Bank Guarantee Facility Agreement amounting to Rp 800,000,000,000 (eight hundred billion Rupiah) to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement. The agreement will be mature on 5 September 2025.

- ***KB Kookmin Card Corp***

  On 28 July 2020, the Company and KB Kookmin Card Co., Ltd. have signed a Guaranty Agreement to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement.

  On 25 February 2021, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a First Amendment to the Guaranty Agreement, in which KB Kookmin Card Corp will gurantee the lender that the Company will carry out its obligations at maturity in accordance with the loan agreement. The maximum amount of obligations that guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 405,000,000,000 and the maximum guarantee term is 5 (five) years or until the end of 2026.

34. **PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN** (Lanjutan)

- **KB Kookmin Card Corp** (Lanjutan)

  Pada tanggal 27 Juli 2021, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Kedua Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 370.461.000.000 untuk jangka waktu yang sama.

  Pada tanggal 10 Maret 2022, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Ketiga Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 367.400.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2027.

  Pada tanggal 7 Juni 2023, Perusahaan dan KB Kookmin Card Corp menandatangani Perubahan Keempat Perjanjian Jaminan terkait batas maksimum kewajiban yang dijamin oleh KB Kookmin Card Corp adalah sebesar KRW 366.400.000.000 untuk jangka jaminan maksimal selama 5 (lima) tahun atau sampai akhir tahun 2028.

*34. **SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS** (Continued)*

- ***KB Kookmin Card Corp** (Continued)*

  On 27 July 2021, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a Second Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 370,461,000,000 with the same guarantee period.

  On 10 March 2022, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a Third Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 367,400,000,000 and the maximum guarantee term is 5 (five) years or until the end of 2027.

  On 7 June 2023, the Company and KB Kookmin Card Corp have signed a Fourth Amendment to the Guaranty Agreement in which the maximum obligations guaranteed by KB Kookmin Card Corp is amounted to KRW 366,400,000,000 and the maximum guarantee term is 5 (five) years or until the end of 2028.

35. **(RUGI) LABA PER SAHAM**

(Rugi) laba per saham dasar dihitung dengan cara membagi (rugi) laba periode berjalan yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

*35. **(LOSS) EARNINGS PER SHARE***

(Loss) earnings per share is calculated by dividing (loss) profit for the period available to shareholders by the weighted average common shares outstanding during the period.

	30 Juni/ *June* 2024	**30 Juni/ *June* 2023 (Tidak diaudit/ *Unaudited*)**	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
(Rugi) laba periode berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar	(1.635.318.080)	69.657.451.265	91.546.129.267	158.128.207.170	*(Loss) profit for the period for the computation of basic earning per shares*
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar	226.250.040	126.250.040	134.583.373	126.250.040	*The weighted average of shares outstanding*
(Rugi) laba per saham dasar (nilai penuh)	(7)	552	680	1.253	*Basic (loss) earnings per share (full amount)*

Perusahaan tidak memiliki instrumen yang memberikan efek dilusi pada laba per saham dasar.

The Company does not have instrument that give impact of dilution effect on basic earning per share.

36. INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan menghadapi risiko-risiko keuangan melalui operasinya sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Secara umum seperti semua bisnis lainnya, Perusahaan menghadapi risiko yang timbul dari penggunaan instrumen keuangan. Catatan ini menggambarkan tujuan Perusahaan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko tersebut dan metode yang digunakan untuk mengukur mereka. Informasi kuantitatif lebih lanjut sehubungan dengan risiko disajikan pada seluruh laporan keuangan.

Tidak ada perubahan substantif dalam eksposur Perusahaan terhadap risiko instrumen keuangan, tujuan, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko-risiko tersebut atau metode yang digunakan untuk mengukur mereka dari periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain dalam catatan ini.

Instrumen-instrumen keuangan utama

Instrumen keuangan pokok yang digunakan oleh Perusahaan, dimana munculnya risiko atas instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Kas dan setara kas
- Piutang pembiayaan
- Tagihan anjak piutang
- Piutang lain-lain
- Aset lain-lain
- Pinjaman yang diterima
- Surat berharga yang diterbitkan
- Beban yang masih harus dibayar
- Utang lain-lain
- Liabilitas sewa

Ikhtisar dari instrumen-instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan menurut kategorinya sebagai berikut:

36. FINANCIAL INSTRUMENTS – RISK MANAGEMENT

The Company is exposed through its operations to the following financial risks:

- *Credit risk*
- *Market risk*
- *Liquidity risk*
- *Operational risk*

In common with all other businesses, the Company is exposed to risks that arise from their financial instruments. This note describes the Company's objectives, policies and processes for managing those risks and the methods used to measure them. Further quantitative information in respect of these risks is presented throughout these financial statements.

There have been no substantive changes in the Company's exposure to financial instrument risks, its objectives, policies and processes for managing those risks or the methods used to measure them from previous periods unless otherwise stated in this note.

Principal financial instruments

The principal financial instruments used by the Company, from which financial instrument risk arises are as follows:

- *Cash and cash equivalents*
- *Financing receivables*
- *Factoring receivables*
- *Other receivables*
- *Other assets*
- *Fund borrowings*
- *Securities issued*
- *Accrued expenses*
- *Other payables*
- *Lease liabilities*

A summary of the financial instruments held by category is provided below:

	Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial assets measured at amortized cost*			
	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Aset keuangan				***Financial assets***
Kas dan setara kas	210.910.304.167	150.519.339.731	174.432.851.427	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan	7.342.751.555.511	7.433.339.955.102	6.924.429.799.378	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	483.221.406.233	421.457.986.752	246.356.356.729	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	102.670.673.453	27.854.349.098	16.467.073.502	*Other receivables*
Aset lain-lain	24.593.329.817	26.079.280.177	28.013.525.413	*Other assets*
Jumlah	8.164.147.269.181	8.059.250.910.860	7.389.699.606.449	***Total***

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan) / *36. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)*

Ikhtisar dari instrumen-instrumen keuangan yang dimiliki Perusahaan menurut kategorinya sebagai berikut: / *A summary of the financial instruments held by category is provided below:*

	Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets measured at value through profit or loss*			
	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Aset keuangan				***Financial assets***
Piutang lain-lain	130.982.184.862	114.458.904.905	38.639.319.067	*Other receivables*

	Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui FVOCI/ *Financial assets measured at fair value through FVOCI*			
	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi jangka panjang	27.000.000.000	43.200.000.000	-	*Long term investment*

	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liability at amortized cost*			
	30 Juni/ *June* 2024	**31 Desember/ *December* 2023**	**31 Desember/ *December* 2022**	
Liabilitas keuangan				***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	5.846.678.265.536	5.588.833.273.490	5.272.818.454.858	*Fund borrowings*
Surat berharga yang diterbitkan	1.310.139.605.588	1.307.358.888.360	993.627.928.646	*Securities issued*
Beban yang masih harus dibayar	87.939.890.117	109.213.246.303	138.190.892.893	*Accrued expenses*
Utang lain-lain	70.996.296.096	90.744.751.885	77.945.598.010	*Other payables*
Liabilitas sewa	21.615.178.157	28.965.512.886	36.618.303.515	*Lease liabilities*
Jumlah	7.337.369.235.494	7.125.115.672.924	6.519.201.177.922	***Total***

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum

Perkembangan industri pembiayaan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas pembiayaan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya. Penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada dasarnya sudah dilakukan sejak Perusahaan berdiri, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

General objectives, policies and processes

The development in multi finance industry along with the improvement in complexity of financing activity emphasize more and more on the importance of good corporate governance and reliable risk management. Such both matters are important factors that become attention by the investor in valuation of option of its investment target. Basically the implementation of risk management in the Company has been done since the establishment of the Company, even though the Company still use conventional and developing ways in accordance with the development of internal and external circumstances.

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum (Lanjutan)

Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perusahaan dan dapat dikelola secara praktis dan efektif setiap hari, dengan 4 (empat) tipe risiko utama:

1. Risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila konsumen tidak dapat memenuhi liabilitasnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

2. Risiko pasar meliputi risiko-risiko yang terutama berkaitan dengan perubahan perubahan nilai suku bunga, nilai tukar mata uang yang akan menyebabkan berkurangnya pendapatan, atau bertambahnya biaya modal Perusahaan.

3. Risiko likuiditas merupakan risiko terkait dengan kemampuan sumber dana Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya yang jatuh tempo.

4. Risiko operasional yaitu risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian operasional karena kesalahan karyawan baik yang disengaja maupun tidak, kegagalan sistem dan proses operasional serta tidak berfungsinya sistem pengendalian internal dalam operasional Perusahaan sehari- hari.

Pengelolaan risiko di Perusahaan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perusahaan, berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya. Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan menjadi partner strategis bagi bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi Perusahaan.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai, Perusahaan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka manajemen risiko dituangkan dalam kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, batasan-batasan transaksi, kewenangan-kewenangan dan ketentuan-ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh aktivitas lingkup usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan berkala sesuai dengan perubahan parameter risikonya.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup:

   - Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
   - Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portfolio secara berkala;

   - Terdapatnya Komite Audit dan Manajemen Risiko dalam melakukan fungsi pengawasan.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS – RISK MANAGEMENT (Continued)

***General objectives, policies and processes** (Continued)*

The Company realizes that risk is a non-separable part of its operational activity and can be managed practically and effectively day by day, with 4 (four) particular risks:

1. Credit risk is the risk which will be arisen when the customer could not fulfill its liabilities in accordance with the agreement as agreed upon customer and the Company.

2. Market risk is the risk primarily due to changes in interest rates, exchange rates which could incur the decreased in revenue, or increased in cost of capital of the Company.

3. Liquidity risk is the risk due to the Company's ability of financial resources in order to discharge its matured liabilities.

4. Operational risk is the risk which has potential operational loss and errors due to human factors by intentionally or unintentionally, failure of information technology and operational process, as well as disfunctions of internal control system in daily operational of the Company.

Risk management in the Company include overall of scope of business activity in the Company, based on the requirement of equilibrium between business operational function and its risk management. With the risk management and policy that is in good functions, thus the risk management will be strategic partner for business in obtaining optimal outcome from the Company's course of operation.

In the event of development of proper risk management, the Company keeps increasing and improving the integrated and comprehensive framework of risk management system and internal control structure, therefore they can provide information regarding early potential risk and take appropriate actions to minimize the risk. The framework of risk management is presented under the form of policies, procedures, transactional limits, authorities, and other stipulation as well as various risk management instruments that is valid in all business activity. In order to ensure that the policy and procedure have been in line with the development of current business, the evaluation is frequently carried out in accordance with the change in its risk parameter.

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows:

1. Active supervision by Board of Commissioners and Directors, which includes:

   - *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
   - *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorization in limits provision and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;*
   - *There are existences of Audit Committee and Risk Management in their controlling functions.*

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum (Lanjutan)

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan. Perusahaan bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko sebagai berikut: (Lanjutan)

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

   Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan kondisi usaha terkini. Kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar, Ketentuan Umum dan Surat Keputusan Dewan Direksi, dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terkait. Perusahaan juga menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai batasan-batasan atas persetujuan atau otorisasi untuk transaksi-transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

   Perusahaan memiliki sejumlah perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko, terutama risiko kredit dan operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen untuk menjamin ketersediaan data risiko terkini dan komprehensif. Perusahaan telah melakukan implementasi sistem operasi Perusahaan yang ada menjadi *centralized system* yang dikenal dengan CONFINS.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

   Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Tanggung jawab dari Departemen Audit Internal mencakup:

   - Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektifitas dari proses bisnis yang ada di dalam Perusahaan;
   - Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan risiko Perusahaan;
   - Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan kegiatan-kegiatan proses pengendalian di dalam Perusahaan, termasuk rekomendasi perbaikan-perbaikan yang potensial terhadap proses tersebut; dan
   - Melakukan koordinasi dengan fungsi pengendalian dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum, sistem dan prosedur-prosedur, dan audit eksternal).

36. FINANCIAL INSTRUMENTS – RISK MANAGEMENT (Continued)

***General objectives, policies and processes** (Continued)*

In the implementation of risk management, the Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars, in which could be described as follows: (Continued)

2. Adequacy of risk management policies and procedures and risk limit setting

   The Company develops policies related to risk management, which are checks periodically and adopted constantly to fit the most recent business situation. Those policies were translated into Standard Operating Procedures, General Provisions and Decision of Board of Directors, which are being socialized to all employees. The Company also has applied policies regarding limitation on approval or authorization for both credit and non-credit transactions.

3. Adequacy of risk identification, measurement, control and monitoring processes, and risk management information systems

   The Company has a set of tools to identify, measure, and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism. In order to guarantee the availability of update and comprehensive risk data. The Company has done the implementation of the current Company's operating system becoming centralized system, which is known as CONFINS.

4. Comprehensive internal control system

   The Company has the Internal Audit Division, which reports on process and results of assessment independently to Boards of Commissioners and Directors. The accountability of the Internal Audit Division includes:

   - *Providing appraisal on the adequacy and effectiveness of all existing business process within the Company;*
   - *Conducting examination on compliances into the Company's risk policies;*
   - *Reporting on important issues related to the activities control process within the Company, including potential improvements to these processes; and*
   - *Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal, system and procedures, and external auditor).*

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Tujuan, kebijakan dan proses secara umum (Lanjutan)

Pada dasarnya proses manajemen risiko dilakukan oleh masing-masing unit mengingat risiko yang dihadapi merupakan risiko individual yang melekat pada produk, transaksi maupun proses pada unit yang bersangkutan. Tugas utama dari Departemen Manajemen Risiko adalah menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur manajemen risiko serta melakukan serangkaian proses-proses untuk mengumpulkan, melakukan pengukuran dan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Penetapan kebijakan manajemen risiko dilakukan melalui proses persetujuan Dewan Direksi.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika *counterparty* Perusahaan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Perusahaan. Risiko kredit Perusahaan terutama melekat kepada kas dan setara kas, piutang pembiayaan dan aset lain-lain.

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam aktivitas pembiayaan, dimana Perusahaan menawarkan jasa kredit bagi masyarakat yang hendak memiliki kendaraan bermotor. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi liabilitasnya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan.

Manajemen risiko yang telah diterapkan Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebagai berikut:

- Diversifikasi portofolio menurut wilayah, sektor ekonomi dan industry, merek dan jenis barang.
- *Risk Adjusted Pricing Method*, yaitu penetapan tingkat bunga pembiayaan berdasarkan risiko yang dihadapi, antara lain dinilai dari tingkat uang muka yang dibayar konsumen, usia kendaraan yang dibiayai, jenis penutupan asuransi yang dipilih dan lain sebagainya.
- Adanya *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai *"early warning system"* atas suatu produk pembiayaan maupun kantor cabang.
- Penanganan kontrak bermasalah yang dilakukan secara disiplin dan proaktif.
- Analisa atas kualitas portofolio secara periodik dan tindakan preventif dan sanksi bagi cabang-cabang yang kualitas portofolionya tidak sesuai target.

Perusahaan juga menerapkan pedoman Uji Tuntas Nasabah yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS – RISK MANAGEMENT (Continued)

***General objectives, policies and processes** (Continued)*

Basically risk management processes are carried out by each unit considering the risk faced are individual risks which are embedded into the products, transactions, as well as process in related unit. The primary task of Risk Management Division is determining policies and procedures as well as doing a series of processes of collecting, measuring, and reporting to Boards of Commissioners and Directors. The determination of risk management policies is carried out through approval process by the Board of Directors.

Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Company's counterparty fail to fulfill their contractual obligations to the Company. Credit risk is primarily attributable to its cash and cash equivalents, financing receivables and other assets.

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in financing activity, in which the Company offers credit services to public who would like to own motor vehicles. Directly, the Company faces risks when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and Company.

Risk management has been adopted by the Company against credit risk are as follows:

- *Portfolio diversification by region, economic sector and industry, brand and type of goods.*
- *Risk Adjusted Pricing Method, namely setting the interest rate of financing based on the risks faced by among others, judged by the level of advances paid by consumers, age of the financed vehicle, type of insurance coverage chosen and so forth.*
- *The Key Performance Indicators (KPI) as an "early warning system" of an individual loan products as well as branch offices.*
- *Handling of problematic contracts that are both disciplined and proactive.*
- *Analysis of portfolio quality through periodic and preventive actions and sanctions for the branches of the quality of its portfolio is not on target.*

The Company also implements the Customer Due Diligence as regulated in the Financial Service Authority Regulation No. 8 Year 2023 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing Programs and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector.

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan) / *36. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)*

Risiko kredit (Lanjutan) / ***Credit risk** (Continued)*

Risiko kredit juga timbul dari kas dan setara kas dan simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas dan setara kas pada institusi keuangan yang terpercaya.

Credit risk also arises from cash and cash equivalents and deposits with banks and financial institutions. To mitigate the credit risk, the Company places its cash and cash equivalents with reputable financial institutions.

Perusahaan tidak masuk ke dalam instrumen derivatif untuk mengelola risiko kredit, walaupun langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk beberapa kasus tertentu yang cukup terkonsentrasi, yang betujuan untuk mengurangi risiko serupa.

The Company does not enter into derivatives to manage credit risk, although in certain isolated cases may take steps to mitigate such risks if it is sufficiently concentrated.

Pengungkapan kuantitatif atas paparan risiko kredit sehubungan dengan aset keuangan adalah sebagai berikut:

Quantitative disclosures of the credit risk exposure in relation to financial assets are set out below:

	30 Juni/ *June* 2024		31 Desember/ *December* 2023		31 Desember/ *December* 2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying value* Rp 000	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* Rp 000	Nilai tercatat/ *Carrying Value* Rp 000	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* Rp 000	Nilai tercatat/ *Carrying Value* Rp 000	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* Rp 000	
Kas dan setara kas (kecuali kas)	199.682.096	199.682.096	139.399.389	139.399.389	159.817.680	159.817.680	*Cash and cash equivalents (except cash on hand)*
Piutang pembiayaan	7.342.751.555	7.342.751.555	7.433.339.955	7.433.339.955	6.924.429.799	6.924.429.799	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	483.221.406	483.221.406	421.457.987	421.457.987	246.356.357	246.356.357	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	233.652.858	233.652.858	142.313.254	142.313.254	55.106.393	55.106.393	*Other receivables*
Aset lain-lain	24.593.330	24.593.330	26.079.280	26.079.280	28.013.525	28.013.525	*Other assets*
Jumlah	8.283.901.245	8.283.901.245	8.162.589.865	8.162.589.865	7.413.723.754	7.413.723.754	***Total***

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi atas piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang yang dimiliki Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022:

The following table sets out the total credit risk and risk concentration of financing receivables and factoring receivables of the Company as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022:

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Berdasarkan objek yang dibiayai:				***Based on object financed:***
Mobil	4.871.941.579.802	5.039.410.175.367	4.422.605.312.012	*Cars*
Sepeda motor	1.722.359.224.255	1.611.764.638.010	1.464.790.270.218	*Motorcycles*
Barang *durable*	1.080.317.670.898	1.114.310.135.908	1.395.874.047.534	*Durable goods*
Tagihan anjak piutang	490.571.078.076	425.736.509.533	249.401.845.053	*Factoring*
Lain – lain	1.894.039.750	1.847.434.472	1.705.544.358	*Others*
Jumlah	8.167.083.592.781	8.193.068.893.290	7.534.377.019.175	***Total***

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Berdasarkan wilayah geografis:				***Based on geographic area:***
Jabodetabek	2.942.918.477.543	2.891.433.448.610	2.588.715.282.190	*Jabodetabek*
Sulawesi dan Indonesia Timur	1.403.053.309.854	1.375.876.160.684	1.323.894.175.857	*Sulawesi and East Indonesia*
Sumatera	1.061.606.520.143	1.078.548.508.917	947.660.337.445	*Sumatera*
Jawa Barat	984.099.671.981	986.974.855.891	902.420.456.357	*West Java*
Jawa Timur	768.430.697.684	797.152.709.318	813.601.074.922	*East Java*
Kalimantan	657.990.401.550	692.483.612.543	629.113.178.235	*Kalimantan*
Jawa Tengah	348.984.514.026	370.599.597.327	328.972.514.169	*Central Java*
Jumlah	8.167.083.592.781	8.193.068.893.290	7.534.377.019.175	***Total***

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan) / *36. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)*

Risiko kredit (Lanjutan) / ***Credit risk** (Continued)*

Bank / ***Cash in bank***

Pada tanggal 30 Juni 2024, jumlah uang yang signifikan dalam bentuk bank ditempatkan di institusi-institusi sebagai berikut:

As of 30 June 2024, a significant amount of cash in banks are held with the following institutes:

	30 Juni/ *June* 2024	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.880.250.545	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	32.548.051.068	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.658.096.590	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.929.698.641	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*

Risiko pasar / ***Market risk***

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel-variabel pasar seperti perubahan tingkat bunga dan nilai tukar mata uang. Pendapatan Perusahaan berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari aset dengan bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Perubahan tingkat bunga dapat menyebabkan menurunnya pendapatan bunga, sehingga mempengaruhi kinerja Perusahaan. Selain itu, pendapatan Perusahaan dapat berasal dari selisih kurs mata uang dalam jual beli valuta asing. Perubahan nilai tukar dapat menyebabkan penurunan pendapatan Perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Market risk is the risk of loss due to changes in market variables such as changes in interest rates and currency exchange rates. Company Revenue derived from the difference between interest earned from assets with interest paid to third parties. Changes in interest rates may cause the decrease in interest income, thus affecting the performance of the Company. In addition, the Company's revenue may come from foreign exchange trading currency in foreign exchange. Changes in exchange rates may cause a decrease in the Company's revenue, which in turn could affect the Company's performance.

Manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risk management has been adopted by the Company are as follows:

1. Melakukan penelaahan atas tingkat bunga pembiayaan yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pinjaman.
2. Membatasi eksposur dalam investasi yang memiliki harga pasar yang fluktuatif.

1. *To review the interest rate financing that is associated with interest rate loans.*
2. *Limiting exposure in the investment that has a fluctuating market prices.*

Risiko mata uang muncul karena Perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional. Ini adalah kebijakan Perusahaan, jika memungkinkan, untuk menyelesaikan liabilitas dalam mata uang fungsional dengan kas yang dihasilkan dari operasi sendiri dalam mata uang tersebut. Ketika Perusahaan mempunyai liabilitas dalam mata uang selain mata uang fungsional (dan tidak memiliki cadangan mata uang yang cukup untuk menyelesaikannya), kas dalam mata uang tersebut akan, jika memungkinkan, ditransfer dari pihak-pihak berelasi.

Currency risk arises because the Company enters into transactions denominated in a currency other than its functional currency. It is the Company policy, where possible, to settle liabilities denominated in its functional currency with the cash generated from its own operations in that currency. Where the Company have liabilities denominated in a currency other than its functional currency (and have insufficient reserves of that currency to settle them), cash already denominated in that currency will, where possible, be transferred from elsewhere within the related parties.

Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan dinyatakan menurut mata uang di bawah ini:

As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022, the Company's financial assets and financial liabilities were denominated in the following currencies:

		30 Juni/*June* 2024		**31 Desember/*December* 2023**		**31 Desember/*December* 2022**		
		Mata uang asing/ *Foreign currency*	**Setara IDR/ *Equivalent IDR***	**Mata uang asing/ *Foreign currency***	**Setara IDR/ *Equivalent IDR***	**Mata uang asing/ *Foreign currency***	**Setara IDR/ *Equivalent IDR***	
Aset keuangan								***Financial assets***
Bank	USD	101	1.663.119	161	2.486.292	281	4.424.816	*Cash in banks*
Jumlah aset keuangan			1.663.119		2.486.292		4.424.816	***Total financial assets***
Aset bersih dalam mata uang asing			1.663.119		2.486.292		4.424.816	***Net assets denominated in foreign currencies***

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian atau potensi kerugian yang merupakan akibat adanya kesenjangan antara penerimaan dan pembayaran. Terjadinya kesenjangan yang cukup besar akan menurunkan kemampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pinjaman dengan skedul pembayaran kembali pokok dan bunga yang sesuai dengan periode jatuh tempo piutang, sehingga tidak terjadi *miss-match*.
2. Menjaga agar posisi kas di bank milik Perusahaan agar selalu dalam posisi siap digunakan untuk mendukung aktivitas pembiayaan selama minimal 7 (tujuh) hari.
3. Memonitor posisi kas bank Perusahaan secara periodik, baik tahunan, bulanan, mingguan maupun harian, guna memastikan agar selalu terdapat *surplus* kas yang memadai.
4. Menjaga agar jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode tertentu lebih besar dibanding dengan utang yang jatuh tempo pada periode yang sama.

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo kontraktual (digambarkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan) atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022:

36. FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT (Continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of loss or potential loss that is due to the gap between receipts and payments. The occurrence of relatively wide gap will reduce the ability of the Company to meet its obligations when due.

Risk management applied by the Company are as follows:

1. *Getting a loan with a repayment schedule of principal and interest in accordance with original maturities of receivables, so there is no miss-match.*
2. *Keeping the cash position of the Company's bank is always in a liquid position in support of financing activities for at least 7 (seven) days.*
3. *Monitor the cash position of the Company bank periodically, whether yearly, monthly, weekly or daily, to ensure there is always sufficient cash surplus.*
4. *Keeping the number of receivables due in a particular period is greater than the debt that matured in the same period.*

The following table summarizes the contractual maturity gap profile (representing undiscounted contractual cash flows) of the Company's financial assets and liabilities as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 :

	30 Juni/*June* 2024				
	Antara 1 dan 12 bulan/ *Between 1 and 12 months* Rp 000	**Antara 1 dan 2 tahun/ *Between 1 and 2 years* Rp 000**	**Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years* Rp 000**	**Jumlah/*Total* Rp 000**	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	210.910.304	-	-	210.910.304	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan	4.362.296.948	1.825.356.618	1.155.097.990	7.342.751.556	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	483.221.406	-	-	483.221.406	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	233.652.858	-	-	233.652.858	*Other receivables*
Investasi jangka panjang	-	-	27.000.000	27.000.000	*Long term investment*
Aset lain-lain	2.955.448	1.812.454	19.825.428	24.593.330	*Other assets*
	5.293.036.964	1.827.169.072	1.201.923.418	8.322.129.454	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	3.629.762.957	1.570.409.407	646.505.901	5.846.678.265	*Fund borrowings*
Utang lain-lain	67.100.631	2.467.250	1.428.415	70.996.296	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	84.219.890	3.720.000	-	87.939.890	*Accrued expenses*
Surat berharga yang diterbitkan	497.737.047	812.402.558	-	1.310.139.605	*Securities issued*
Liabilitas sewa	17.431.722	3.709.129	474.327	21.615.178	*Lease liabilities*
	4.296.252.247	2.392.708.344	648.408.643	7.337.369.234	
Perbedaan jatuh tempo	996.784.717	(565.539.272)	553.514.775	984.760.220	*Maturity gap*

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo kontraktual (digambarkan dengan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan) atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022: (Lanjutan)

*36. **FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT** (Continued)*

The following table summarizes the contractual maturity gap profile (representing undiscounted contractual cash flows) of the Company's financial assets and liabilities as of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022: (Continued)

	31 Desember/*December* 2023				
	Antara 1 dan 12 bulan/ *Between 1 and 12 months* Rp 000	**Antara 1 dan 2 tahun/ *Between 1 and 2 years* Rp 000**	**Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years* Rp 000**	**Jumlah/*Total* Rp 000**	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	150.519.340	-	-	150.519.340	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan	4.369.460.268	1.833.928.815	1.229.950.872	7.433.339.955	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	421.457.987	-	-	421.457.987	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	142.313.254	-	-	142.313.254	*Other receivables*
Investasi jangka panjang	-	-	43.200.000	43.200.000	*Long term investment*
Aset lain-lain	4.124.473	1.730.634	20.224.173	26.079.280	*Other assets*
	5.087.875.322	1.835.659.449	1.293.375.045	8.216.909.816	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	3.386.687.436	1.662.218.410	539.927.427	5.588.833.273	*Fund borrowings*
Utang lain-lain	87.232.725	2.450.564	1.061.463	90.744.752	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	96.492.691	12.720.555	-	109.213.246	*Accrued expenses*
Surat berharga yang diterbitkan	496.050.109	311.880.254	499.428.525	1.307.358.888	*Securities issued*
Liabilitas sewa	16.935.491	11.057.807	972.215	28.965.513	*Lease liabilities*
	4.083.398.452	2.000.327.590	1.041.389.630	7.125.115.672	
Perbedaan jatuh tempo	1.004.476.870	(164.668.141)	251.985.415	1.091.794.144	*Maturity gap*

	31 Desember/*December* 2022				
	Antara 1 dan 12 bulan/ *Between 1 and 12 months* Rp 000	**Antara 1 dan 2 tahun/ *Between 1 and 2 years* Rp 000**	**Lebih dari 2 tahun/ *More than 2 years* Rp 000**	**Jumlah/*Total* Rp 000**	
Aset keuangan					***Financial assets***
Kas dan setara kas	174.432.851	-	-	174.432.851	*Cash and cash equivalents*
Piutang pembiayaan	3.089.387.010	1.545.490.817	2.289.551.972	6.924.429.799	*Financing receivables*
Tagihan anjak piutang	246.356.357	-	-	246.356.357	*Factoring receivables*
Piutang lain-lain	55.106.393	-	-	55.106.393	*Other receivables*
Aset lain-lain	6.683.036	4.783.731	16.546.758	28.013.525	*Other assets*
	3.571.965.647	1.550.274.548	2.306.098.730	7.428.338.925	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	3.407.511.180	1.705.372.886	159.934.389	5.272.818.455	*Fund borrowings*
Utang lain-lain	75.079.476	1.710.572	1.155.550	77.945.598	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	132.744.226	5.446.667	-	138.190.893	*Accrued expenses*
Surat berharga yang diterbitkan	308.840.589	(1.025.237)	685.812.577	993.627.929	*Securities issued*
Liabilitas sewa	14.234.701	14.206.301	8.177.302	36.618.304	*Lease liabilities*
	3.938.410.172	1.725.711.189	855.079.818	6.519.201.179	
Perbedaan jatuh tempo	(366.444.525)	(175.436.641)	1.451.018.912	909.137.746	*Maturity gap*

36. **INSTRUMEN KEUANGAN – MANAJEMEN RISIKO** (Lanjutan)

Risiko likuiditas (Lanjutan)

Mayoritas pinjaman yang diterima Perusahaan dengan jatuh tempo antara 1 sampai 12 bulan dan 1 sampai 2 tahun dapat diperpanjang atau di *rollover* secara otomatis tanpa perlu adanya pelunasan.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan sistem teknologi informasi, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian pada Perusahaan sehingga akan mempengaruhi kinerja dan tingkat kesehatan Perusahaan.

Manajemen risiko yang diterapkan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem yang tersentralisasi sehingga proses bisnis dapat dan terkontrol secara sistem dan dimonitor dari waktu ke waktu.
2. Menyiapkan *backup* dan *Disaster Recovery Plan* yang memadai bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas sistem aplikasi utama Perusahaan, baik dari sisi *hardware* dan *software*.
3. Menerapkan sistem audit kepatuhan yang berkelanjutan, baik di kantor cabang maupun kantor pusat.
4. Menerapkan aturan kerja yang jelas (SOP) dan sanksi yang tegas atas penyimpangan yang terjadi sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat.
5. Adanya penanaman nilai-nilai dasar Perusahaan sejak dini kepada karyawan, sehingga dapat menghindarkan/ mengurangi potensi penyimpangan.
6. Adanya penilaian kinerja yang adil dan transparan serta adanya kesempatan untuk pengembangan karir.

37. **MANAJEMEN MODAL**

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perusahaan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tanggal 17 November 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp 250.000.000.000;
- Perusahaan wajib memenuhi ketentuan rasio utang terhadap ekuitas *(gearing ratio)* paling rendah 0 (nol) kali dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.

*36. **FINANCIAL INSTRUMENTS - RISK MANAGEMENT** (Continued)*

***Liquidity risk** (Continued)*

Majority of the Company's fund borrowings with maturity between 1 and 12 months and 1 and 2 years can be automatic roll over without clean up period.

Operational risk

Operational risk is the risk of loss due to system failure of information technology, errors due to human factors, operational procedures and weaknesses in a process. These risks may cause harm to the Company that will affect performance and soundness of the Company.

Risk management applied by the Company are as follows:

1. *Implement a centralized system so that business processes can be controlled by the system and monitored from time to time.*
2. *Prepare backup and Disaster Recovery Plan is adequate when things happen that are not desirable for its major application systems, both in terms of hardware and software.*
3. *Implement a compliance audit system that is sustainable, both in branch offices or headquarters.*
4. *Implement a clear working rules (SOP) and strict sanctions for irregularities that occurred in accordance with an error rate that done.*
5. *The planting of the Company's values to employees early on, to avoid/reduce the potential for irregularities.*
6. *There is a fair assessment of performance and transparency as well as the opportunity for career development.*

*37. **CAPITAL MANAGEMENT***

The Company's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders.

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the Financial Service Authority Regulation No. 47/POJK.05/2020 dated 17 November 2020 and the Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Financing Companies which regulate provisions as follows:

- *The Company's paid-up capital of minimum Rp 250,000,000,000;*
- *The Company is required to comply with the debt-to-equity ratio (gearing ratio) of a minimum of 0 (zero) times and a maximum of 10 (ten) times.*

37. **MANAJEMEN MODAL** (Lanjutan) / *37. **CAPITAL MANAGEMENT** (Continued)*

Keterangan	POJK No. 47/POJK.05/2020 & POJK No. 35/POJK.05/2018	Struktur Modal Perusahaan/ *Company's Capital Structure* 30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	*Description*
Modal disetor (dalam milliar rupiah)	Minimal Rp 250 miliar/ *Minimum Rp 250 billion*	226	226	126	*Paid - up capital (in billion rupiah)*
Rasio utang terhadap ekuitas *(gearing ratio)*	Maksimum 10x/ *Maximum 10x*	5,59	5,19	5,73	*Debt to equity ratio (gearing ratio)*

Pemenuhan ketentuan modal disetor minimum di atas, mulai berlaku untuk pendirian Perusahaan saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 diundangkan.

The fulfillment of the minimum paid-up capital requirements above, comes into effect for the establishment of the Company when the Financial Services Authority Regulation Number 47/POJK.05/2020 is promulgated.

38. **RASIO KEUANGAN YANG RELEVAN** / *38. RELEVANT FINANCIAL RATIOS*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan telah melakukan pengukuran atas rasio keuangan sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 35/POJK.05/2018. Pada tanggal 30 Juni 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 Perusahaan telah menghitung beberapa rasio antara lain: (tidak diaudit)

Based on Financial Service Authority Regulation (POJK) No.28/POJK.05/2020 concerning to the Financial Soundness Level of Non-Bank Financial Service Institutions, the Company has measured the financial ratios as stipulated in POJK No.35/POJK.05/2018. As of 30 June 2024, 31 December 2023 and 2022 the Company has calculated ratios as follows: (unaudited)

	30 Juni/ *June* 2024	31 Desember/ *December* 2023	31 Desember/ *December* 2022	
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset	89,25%	91,11%	92,41%	*Financing to asset ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pinjaman	109,35%	113,90%	114,43%	*Financing receivables to funding ratio*
Rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	51,00%	51,79%	50,25%	*Financing receivables for investment and working capital to total financing receivables ratio*
Rasio permodalan	22,90%	23,84%	20,52%	*Capital ratio*
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	2,79%	2,01%	1,73%	*Non performing financing*
Rasio modal sendiri terhadap modal disetor	577%	606%	866%	*Equity ratio*
Tingkat kesehatan perusahaan	Peringkat/*Ranking* 2	Peringkat/*Ranking* 2	Peringkat/*Ranking* 2	*Company health level status*

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki.

Solvability ratio is used to identify the Company's capability to fulfill the Company's obligation through utilizing its own capital.

Beberapa rasio yang digunakan Perusahaan untuk mengawasi permodalan antara lain rasio imbal hasil ekuitas dan rasio solvabilitas.

Several ratios used by the Company to monitor capital are return on equity ratio and solvability ratio.

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri.

Return on equity ratio is used to identify the Company's capability to earn profit from the invested equity and is reflected through the comparison between net income to equity.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Notaris No. 131 tanggal 25 Juli 2024 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan ini telah diterima dan dicatat serta disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kemenkumham Nomor: AHU-AH.01.09-0231390 tanggal 25 Juli 2024.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris				***Board of Commisioners***
Komisaris Utama	:	Moon Cheol Kang*)	:	*President Commisioner*
Komisaris Independen	:	Nursalam Andi Tabusalla	:	*Independent Commisioner*
Direksi				***Board of Directors***
Direktur Utama	:	Yap Tjay Hing	:	*President Director*
Wakil Direktur Utama	:	Kisup Wi	:	*Vice President Director*
Direktur	:	Peter Halim	:	*Director*
Direktur	:	Hery Susanto Dermawan	:	*Director*
Direktur Pemasaran	:	Sea Hwan Lah	:	*Marketing Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan *General Affairs*	:	Martina Hariyanto	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur	:	Choi, Ho Jung	:	*Director*

*) Pada tanggal 18 Juli 2024 yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan *(Fit and Proper Test)* dari OJK.

Peringkat Nasional Jangka Panjang

Pada tanggal 25 Juli 2024, Perusahaan menerima surat dari Fitch No. 136/DIR/RATLTR/VII/2024 yang kembali menyatakan bahwa Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)' untuk Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pinjaman Promes Berulang

Pada tanggal 28 Agustus 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Promes Berulang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000.000 dan bersifat "*revolving*". Jangka waktu pembiayaan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan dijamin dengan piutang pembiayaan Perusahaan yang diikat secara fidusia.

Kookmin Bank, Hong Kong Branch

Pada tanggal 6 September 2024, Perusahaan dan Bank Kookmin, Cabang Hong Kong telah menandatangani Perjanjian Jaminan (*Bank Guarantee*) senilai Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) untuk menjamin pemberi pinjaman atas kewajiban Perusahaan yang wajib dibayar pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Changes of the Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

Based on Notarial Deed No. 131 dated 25 July 2024 of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, about the change in Directors and Commisioners. This change had been registered and stored in the administration system based on the Ministry of Law and Human Rights Number: AHU-AH.01.09-0231390 dated 25 July 2024.

So that the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

*) *On 18 July 2024, the person concerned passes the Fit and Proper Test from OJK.*

The National Long-Term Rating

On 25 July 2024, the Company has received letters No.136/DIR/RATLTR/VII/2024 from Fitch which reaffirmed the National Long-Term Rating "AAA(idn)" for Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Recurring Promissory Loan

On 28 August 2024, the Company obtained Recurring Promissory Loan facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk for supporting the Company's working capital with a maximum credit limit amounted Rp 200,000,000,000. The maximum term of loan is 3 (three) months and secured by fiduciary transfers of the Company's financing.

Kookmin Bank, Hong Kong Branch

On 6 September 2024, the Company and Kookmin Bank, Hong Kong Branch have signed a Bank Guarantee Facility Agreement amounting to Rp 800,000,000,000 (eight hundred billion Rupiah) to guarantee the lenders of the Company's obligations which must be paid at maturity in accordance with the loan agreement.

39. **PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN** (Lanjutan)

Pelunasan Obligasi

Pada tanggal 7 Juli 2024, Perusahaan telah melakukan pelunasan pokok Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 - Seri A sebesar Rp 500.000.000.000. Pembayaran pokok Obligasi ini dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

*39. **EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD** (Continued)*

Bond redemption

On July 7, 2024, the Company have paid the principal of Obligasi II KB Finansia Multi Finance - Series A amounting to IDR 500,000,000,000. This principal payment was made in full upon maturity.

40. **PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN INTERIM**

Dalam rangka penawaran umum Obligasi I KB Finansia Multi Finance Tahun 2024, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Ekshibit B, E/6, E/34, E/36, E/48, E/49, E/51, E/55, E/60, E/80, E/92 dan E/93.

*40. **REISSUANCE OF INTERIM FINANCIAL STATEMENTS***

In order to conduct public offering of the Bonds I of KB Finansia Multi Finance Year 2024, the Company has re-issued the interim financial statements for the six-month periods ended 30 June 2024 dan 2023 (Unaudited) and for the years ended 31 December 2023 and 2022 with several changes to the presentation and disclosures in Exhibit B, E/6, E/34, E/36, E/48, E/49, E/51, E/55, E/60, E/80, E/92 and E/93.

Tel : +62-21 5795 7300
Fax : +62-21 5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountant
Licence No. 622/KM.1/2016

Head Office
Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024

No. : 00792/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/X/2024

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT KB Finansia Multi Finance
J a k a r t a

The Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT KB Finansia Multi Finance
J a k a r t a

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan interim PT KB Finansia Multi Finance ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta catatan atas laporan keuangan interim, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim Perusahaan tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan interim dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the interim financial statements of PT KB Finansia Multi Finance (the "Company") which comprise the statement of financial position as of 30 June 2024 and 31 December 2023 and 2022, and the interim statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the six-months period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023 and 2022, and notes to the interim financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying interim financial statements present fairly, in all material respects, the interim financial position of the Company as of 30 June 2024 and 31 December 2023 and 2022, and its interim financial performance and its cash flows for the six-months period ended 30 June 2024 and for the years ended 31 December 2023 and 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Interim Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirement that are relevant to our Audit of the interim financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan interim periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam Audit kami diuraikan sebagai berikut:

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan dan Tagihan Anjak Piutang (Rp 341.110.631.037)

Nilai tercatat neto produk piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah memperhitungkan kerugian ekspektasian.

Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) dihitung berdasarkan tunggakan dan penghapusan historis untuk menentukan tahap kerugian ekspektasian tiap produk yang digunakan untuk penentuan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan umur pinjaman pada tiap produk. Tingkat cadangan ditelaah dan dimuktakhirkan atas estimasi kerugian kredit berdasarkan umur tiap piutang pembiayaan pada setiap tanggal pelaporan. KKE dihitung berdasarkan pendekatan kolektif dengan menggunakan beberapa parameter risiko antara lain *Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default* dengan mempertimbangkan informasi faktor makroekonomi.

Kami memfokuskan pada area ini sebagai hal audit utama karena jumlah piutang pembiayaan dan tagihan anjak piutang mewakili 89,25% dari total aset Perusahaan. Pengukuran KKE dilakukan melalui pertimbangan manajemen dengan penggunaan estimasi dan asumsi yang diharapkan keandalannya dalam penentuan jumlah cadangan penurunan nilai yang diakui pada akhir periode pelaporan.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

- Kami telah menguji keakuratan model perhitungan KKE berdasarkan persyaratan dalam PSAK 71;
- Kami telah menilai penerapan model penurunan nilai yang mempertimbangkan tunggakan dan penghapusan historis dan estimasi umur pinjaman yang diharapkan;
- Kami telah menilai, membandingkan data historis dan menilai pandangan manajemen atas risiko kredit yang berdampak pada pengakuan kerugian ekspektasian setelah pengakuan awal selama umur pinjaman;
- Kami telah menilai analisis sensitivitas dalam kaitannya dengan asumsi faktor masa depan;

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The Key Audit Matters identified in our audit are outlined as follows:

Allowance for Impairment Losses of Financing Receivables and Factoring Receivables (Rp 341,110,631,037)

The net carrying value of financing and factoring receivables products are subsequently measured at amortised cost after providing for expected losses.

Expected Credit Loss (ECL) is computed based on historical arrears and write-offs to determine an expected loss cycle by product which is used to determine the estimated life of receivables expected loss levels to provided against each product. Levels of allowances are reviewed and updated for the most recent expected life of receivables loss estimates at each reporting date. ECL is computed using collective approach with risk parameters including the Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default and consideration of macroeconomic factors information.

We focused on this area as a key audit matter due to amounts of financing receivables and factoring receivables represent 89.25% of total assets of the Company. The measurement of ECL is determined on the management's judgments using estimates and assumptions to derived reliability on provides allowance of impairment losses to be recognised in the end of reporting period.

In responding to the identified key audit matters, we performed the following audit procedures:

- *We have tested the computation accuracy of ECL model applied with requirements in SFAS 71;*
- *We have assessed the application of the model for impairment that considers the past arrears and write-offs and the expected life of loan loass estimates;*
- *We have assessed, compared the historical actual and challenge management's view of credit risk that impacts the recognition of expected losses upon initial recognition over the life of the loans;*
- *We have assessed sensitivity analysis in relation to the key forward looking assumptions;*

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Hal Lainnya

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00741/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/VIII/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 dan No. 00764/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/IX/2024 bertanggal 6 September 2024 atas laporan keuangan interim PT KB Finansia Multi Finance untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024. Sehubungan dengan penambahan pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan Perusahaan untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka penerbitan Surat Utang Obligasi Perusahaan seperti yang dijelaskan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 (Tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Other Matters

Prior to this report, we have issued independent auditors' report No. 00741/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/VIII/2024 dated 23 August 2024 and No. 00764/2.1068/AU.1/09/0119-2/1/IX/2024 dated 6 September 2024 on the interim financial statements of PT KB Finansia Multi Finance for the six-months period ended 30 June 2024. In line with the additional disclosure information on the Company's financial statements to issue the Company's bonds as described in Note 40 to the financial statements, the Company has reissued its financial statements for the six-months period ended 30 June 2024 and 2023 (Unaudited) and for the years ended 31 December 2023 and 2022.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahun 2024 di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in prospectus in connection with the proposed Series Issues of Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I KB Finansia Multi Finance Tahun 2024 in Indonesia Stock Exchange, and not intended to be and should not be used for any other purposes.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan interim

Responsibilities of management and those charged with governance for the interim financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the interim financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama Audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' responsibilities for the audit of the interim financial statements interim

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan interim (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Perusahaan atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Perusahaan. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

***Auditors' responsibilities for the audit of the interim financial statements** (Continued)*

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the interim financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim financial statements, including the disclosures, and whether the interim financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of the Company or business activities within the Company to express an opinion on the interim financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Company audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan interim (Lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

***Auditors' responsibilities for the audit of the interim financial statements** (Continued)*

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the interim financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Santanu Chandra, CPA
NIAP AP.0119/
License No. AP.0119

1 Oktober 2024/ *1 October 2024*

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountant), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.